



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/539/2024

TENTANG

INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya di bidang kearsipan, perlu disusun instrumen pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mencakup kebijakan mengenai kode klasifikasi arsip dan kode unit pengolah, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta jadwal retensi arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa dalam rangka penyeragaman, penyusunan instrumen pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui surat Nomor B-BA.02.07/208/2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan alat bantu bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas;
- a. Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah;
  - b. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip; dan
  - c. Jadwal Retensi Arsip.
- KEEMPAT : Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a merupakan sistem pengodean arsip dinamis yang berupa kombinasi huruf dan angka.

- KELIMA : Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a merupakan identitas unit kerja pusat yang meliputi pimpinan unit kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan *Project Manager Officer* (PMO) di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA untuk:
- a. Unit pelaksana teknis ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan; dan
  - b. Tim kerja ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- KETUJUH : Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b merupakan sistem untuk kemudahan akses arsip bagi masyarakat serta pelindungan terhadap keamanan arsip dinamis.
- KEDELAPAN : Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c merupakan masa retensi yang berguna dalam pelaksanaan penyusutan arsip dinamis.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/175/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
  - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/539/2024  
TENTANG  
INSTRUMEN PENGELOLAAN KEARSIPAN  
DINAMIS

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta berfungsi sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang utuh, autentik, dan terpercaya dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara, khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan kearsipan di lingkungan lembaga negara.

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendorong sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Begitu pentingnya arsip bagi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia, sehingga negara melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khususnya Pasal 40 ayat (4) telah mengamanatkan kepada seluruh Pencipta Arsip untuk membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip tersebut seringkali disebut sebagai instrumen pengelolaan arsip dinamis. Instrumen pengelolaan arsip dinamis adalah alat yang digunakan dalam proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip agar dapat dikendalikan secara efisien, efektif, dan sistematis. Instrumen pengelolaan arsip dinamis ini merupakan syarat awal terciptanya pengelolaan arsip dinamis dengan baik.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kode klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip sejalan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam pengelolaan arsip dinamis sehingga perlu disesuaikan instrumen tersebut.

Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:

- a. Fasilitatif, yaitu kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan; dan
- b. Substantif, yaitu kegiatan yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan pencipta arsip yang lain.

Instrumen pengelolaan arsip dinamis dibuat linier mulai dari kode klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip sampai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip hal ini untuk memudahkan Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis terutama kegiatan penyusutan arsip (memindahkan arsip inaktif, memusnahkan arsip yang

tidak bernilai guna, dan menyerahkan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya instrumen pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah sebagai alat bantu bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis.

Tujuan disusunnya instrumen pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. memperoleh keseragaman dalam penggunaan pola klasifikasi arsip;
2. mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis;
3. menunjang kodifikasi dalam pemberkasan arsip dinamis di dalam sistem pemberkasan (*filing system*) dan kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip;
4. menjadi acuan dalam memberi layanan informasi arsip dinamis kepada publik yang dikategorikan terbuka dan menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
5. menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusutan arsip.

C. Pengertian

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang akan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip Konvensional adalah arsip yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan.
4. Arsip Elektronik atau sering disebut juga arsip digital merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik.
5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. *Central File* adalah penyimpanan semua arsip aktif, kecuali yang masih dalam proses pekerjaan, disimpan pada lokasi terpusat (satu lokasi).
9. *Record Center* adalah suatu bangunan/ruangan yang biasanya dirancang sebagai pusat penyimpanan dan pelayanan arsip inaktif.
10. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan seperti kesehatan ibu, gizi, pencegahan penyakit menular, dan lain sebagainya.
11. Arsip Fasilitatif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif seperti keuangan, kepegawaian, perencanaan, kerjasama luar negeri, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan lain sebagainya.

12. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
13. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan kesamaan urusan kegiatan organisasi serta berfungsi sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali.
14. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
15. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
16. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
17. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
18. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
19. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
20. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
21. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
22. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Kesehatan.
23. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.
24. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
25. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kementerian Kesehatan adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.
26. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
27. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
28. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan.
29. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
30. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.

31. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

## BAB II

### KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH

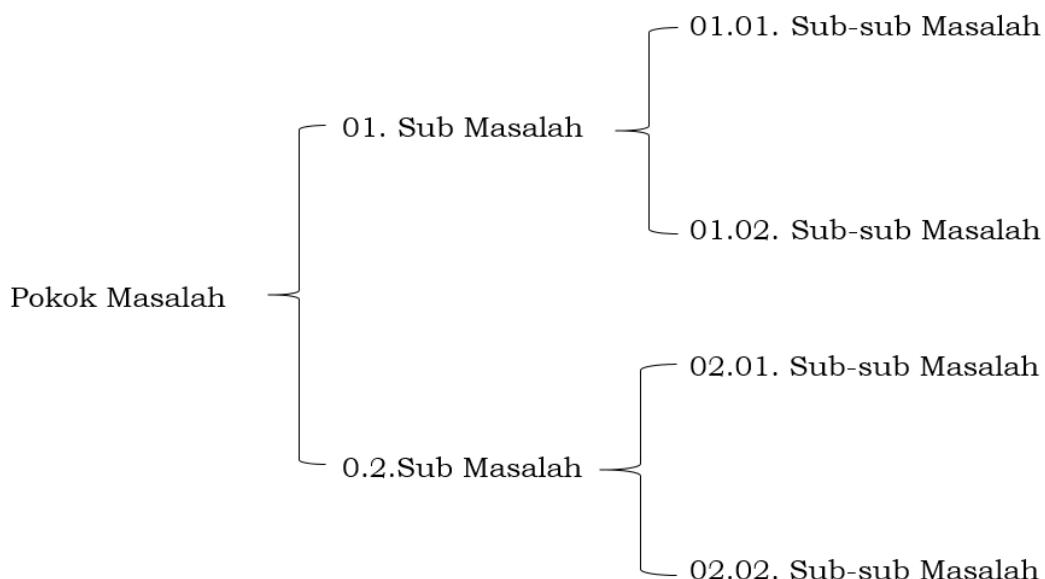
#### 1. Sistematika Pola Klasifikasi Arsip

Kode klasifikasi arsip diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode.

##### a. Sistem Klasifikasi

Klasifikasi arsip dengan sistem ini (struktur kegiatan dan permasalahan) dapat digunakan oleh setiap organisasi, sebagai contoh klasifikasi masalah “kepegawaian” tidak berarti bahwa yang boleh menggunakan hanya “Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia” atau “Bagian Kepegawaian” saja, tetapi unit kerja/satuan kerja lain dapat menggunakannya.

Klasifikasi disusun berdasarkan pada pengelompokan menurut masalah (*subject*). Kegiatan yang terdiri dari beberapa masalah pokok (*main subject*) dan setiap masalah pokok dapat terdiri dari beberapa sub masalah (*sub-subject*) dan tiap sub-sub masalah (*sub-sub-subject*).



Contoh Klasifikasi Arsip Masalah Kepegawaian:

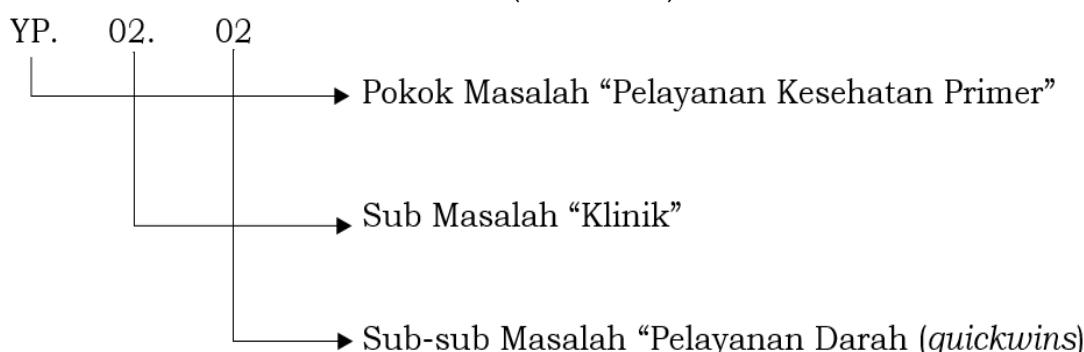
Pokok Masalah	Sub Masalah	Sub-sub Masalah
1	2	3
KP. Kepegawaian	01. Pengadaan Pegawai  02. Mutasi Pegawai	01.01. Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai 01.02. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 01.03. Identitas Pegawai Negeri Sipil 01.04. Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus 01.05. Mutasi Pegawai  02.01. Kenaikan Pangkat 02.02. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

		02.03. Pemindahan, Pemberhentian, dan Pensiun 02.04. dst.
	03.....dst	

b. Kode Klasifikasi

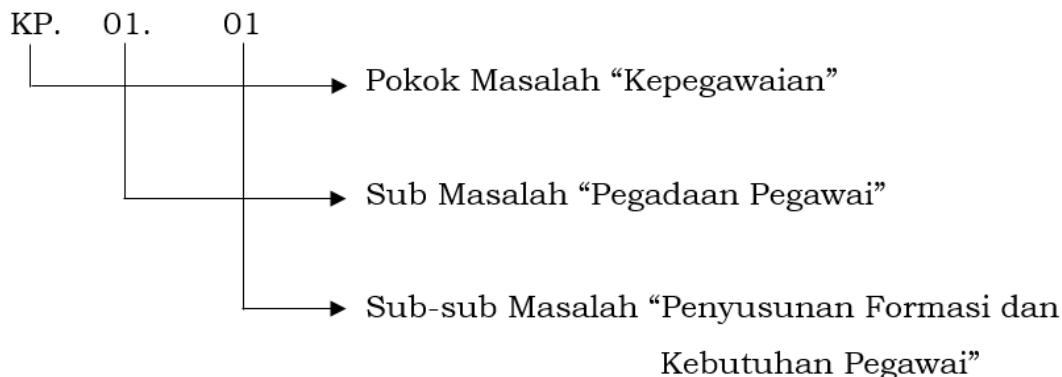
Pemberian kode merupakan kegiatan pemberian tanda pengenal pada arsip, dengan maksud untuk menyingkat tulisan dalam mengenali masalahnya. Sistem yang dipergunakan untuk pemberian kode di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah alfanumerik yaitu penggabungan kode huruf dan angka. Kode huruf digunakan untuk mengenali masalah pokok, sedangkan kode angka untuk sub-masalah dan sub-sub-masalah.

Contoh – I (Fasilitatif):



Penggunaan kode klasifikasi arsip KP.01.01 adalah untuk sub-sub-masalah yang ada kaitannya dengan naskah yang berkaitan dengan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai meliputi *bezetting* dan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rincian alokasi formasi CPNS, formasi tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan formasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS melalui formasi khusus (*incidentil*), baik untuk persiapan penyusunan kebijakan (norma, standar, prosedur, kriteria), persiapan bimbingan teknis (monitoring, evaluasi, penilaian, supervisi dan lain sebagainya), persiapan untuk sosialisasi (seminar, lokakarya, pemantapan, diseminasi, dan lain sebagainya) dan persiapan kegiatan lainnya meliputi undangan peserta, narasumber, moderator, surat tugas, nota dinas, telaah, kajian maupun laporan kegiatan.

### Contoh – II (Substantif)



Penggunaan kode klasifikasi arsip YP.02.02 adalah untuk sub-sub masalah berkaitan dengan naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan darah (*quickwins*) yang berkerja sama dengan dinas kesehatan melalui unit transfusi darah dan rumah sakit meliputi persiapan penyusunan pedoman (norma, standar, prosedur, kriteria), persiapan bimbingan teknis (monitoring, evaluasi, penilaian, supervisi dan lain sebagainya), persiapan untuk sosialisasi (seminar, lokakarya, pemantapan, diseminasi dan lain sebagainya), persiapan penyusunan *memorandum of understanding*, dan persiapan kegiatan lainnya meliputi undangan peserta, narasumber, moderator, surat tugas, nota dinas, telaah, kajian maupun laporan kegiatan.

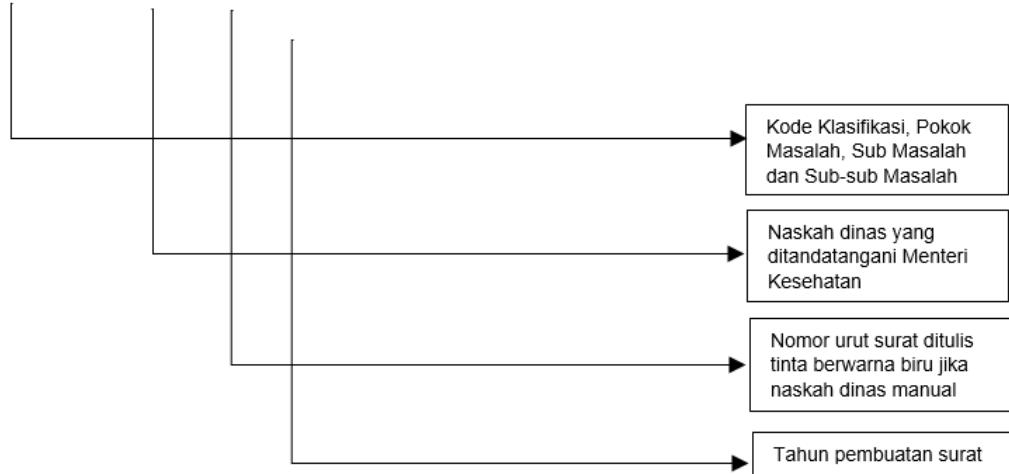
#### c. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran surat di lingkungan Kementerian Kesehatan mengacu pada kode klasifikasi arsip dan kode unit pengolah. Berdasarkan kode klasifikasi arsip dan kode unit pengolah dapat mempermudah klasifikasi jenis surat ketika melakukan pengarsipan serta mempermudah penyimpanan dan pencarian arsip.

Contoh:

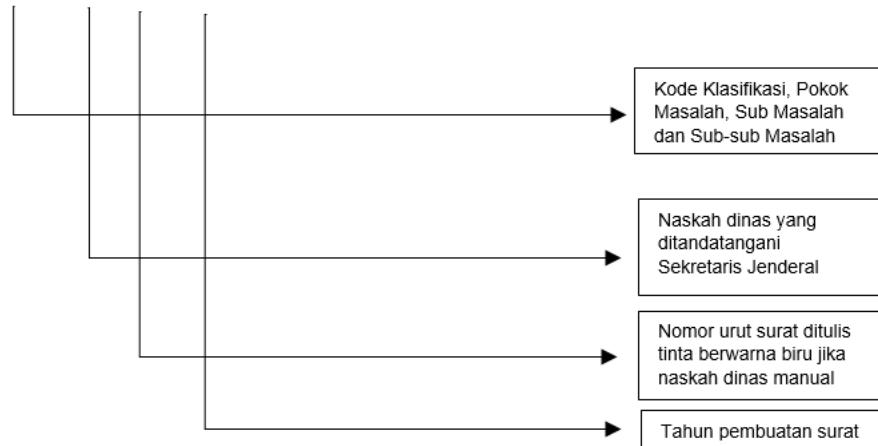
- 1) Surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan

SS.01.02/Menkes/78/2022



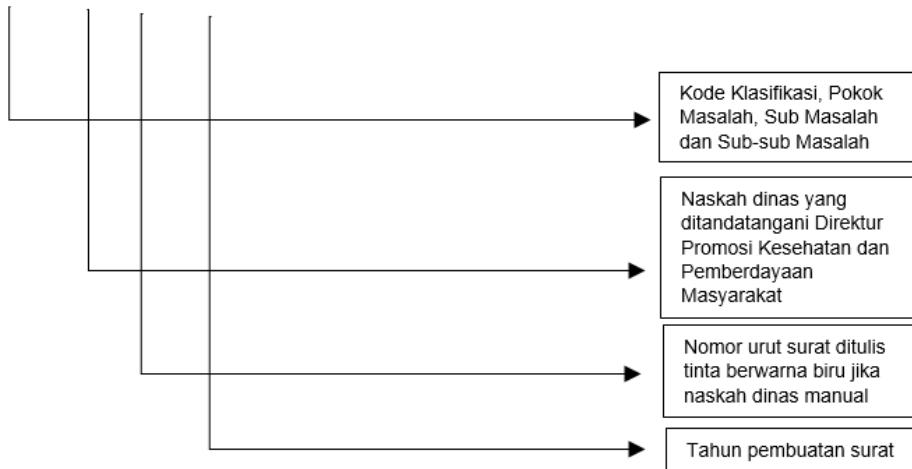
- 2) Surat dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya (Pejabat Eselon I)

PS.07.03/A/789/2022



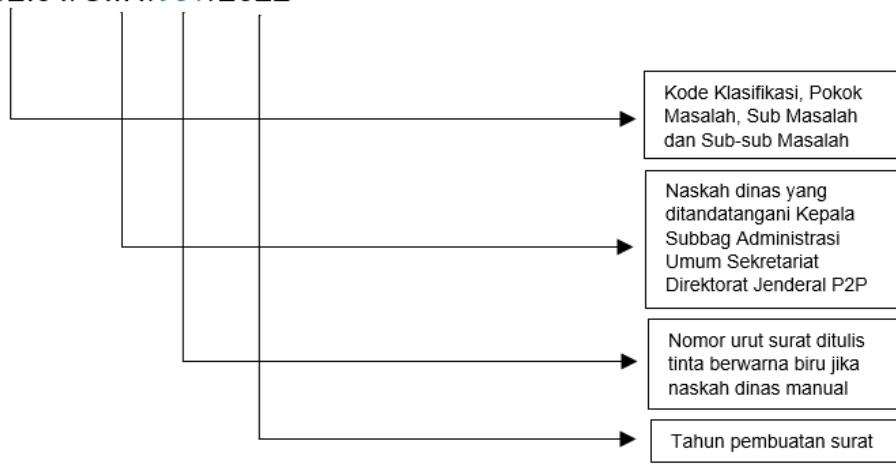
- 3) Surat dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II)

PK.02.01/B.II/462/2022



- 4) Nota dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) atau Ketua Tim Kerja

AR.02.01/C.I.1/789/2022



2. Kode Klasifikasi Arsip  
a. Fungsi Fasilitatif

AR. KEARSIPAN

01. Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis

- 01.01. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan pengelolaan arsip dinamis meliputi tata naskah dinas, kode klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, dan pengelolaan arsip dinamis.
- 01.02. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan arsip dinamis meliputi sosialisasi, fasilitasi, seminar, dan lain-lain.

02. Penciptaan Arsip

- 02.01. Pengelolaan Surat Masuk  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.
- 02.02. Pengelolaan Surat Keluar  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.

03. Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip

- 03.01. Pengelolaan Arsip Aktif  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberkasan meliputi pemeriksaan tanda perintah file/simpan, memberi indeks dan klasifikasi pada surat, mencatat pada daftar arsip aktif, memasukkan surat ke folder dan menempatkan di *filing cabinet*.
- 03.02. Pengelolaan Arsip Inaktif  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
- 03.03. Pengelolaan Arsip Vital  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip vital meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
- 03.04. Pengelolaan Arsip Terjaga  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip terjaga meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
- 03.05. Pengelolaan Arsip Audio Visual  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip audio visual meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.

- 03.06. Pengelolaan Arsip Elektronik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip elektronik meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
- 03.07. Alih Media Arsip  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih media arsip meliputi berita acara alih media arsip, daftar arsip dinamis yang dialihmediakan, dan lain-lain.
- 03.08. Layanan Arsip  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan arsip yang meliputi peminjaman arsip, pelayanan arsip ditempat/baca di tempat dan penggandaan/fotokopi.
- 03.09. Pemeliharaan Fisik Arsip  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan meliputi pemberian kamper, fumigasi dan lain sebagainya.

04. Penyusutan

- 04.01. Pemindahan Arsip  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip meliputi daftar arsip yang dipindahkan dan berita acara pemindahan.
- 04.02. Pemusnahan Arsip  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip meliputi surat keputusan tim pemusnahan arsip, daftar arsip yang dimusnahkan, surat pertimbangan penilaian dari unit pencipta arsip, surat permohonan persetujuan pemusnahan ke Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari ANRI, surat keputusan pemusnahan dan berita acara pemusnahan.
- 04.03. Penyerahan Arsip Statis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis meliputi akuisisi arsip, daftar arsip yang diserahkan, surat keputusan penyerahan dan berita acara penyerahan.

05. Sumber Daya Kearsipan

- 05.01. Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan (unit kearsipan dan unit pengolah) yang meliputi supervisi penyelenggaraan kearsipan, bimbingan teknis penyelenggaraan kearsipan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan.
- 05.02. Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan kearsipan yang meliputi laporan final pengawasan kearsipan internal, laporan final akreditasi kearsipan.
- 05.03. Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan kompetensi sumber daya manusia kearsipan meliputi sosialisasi, fasilitasi, dan seminar pembinaan kompetensi sumber daya manusia kearsipan, organisasi profesi arsiparis, administrasi sertifikasi arsiparis, administrasi pendidikan

dan pelatihan fungsional arsiparis, dan administrasi pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan.

- 05.04. Apresiasi Sumber Daya Kearsipan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Apresiasi Sumber Daya Kearsipan meliputi Penetapan Pemenang Lomba Arsiparis Teladan dan Penetapan Pemenang Lomba Unit Pengolah dan Unit Kearsipan.
- 05.05. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana meliputi gedung, ruangan dan peralatan kearsipan (*roll o pack, filing cabinet, boks arsip, folder, sekat, dan lain-lain*).

**BJ. PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**01. Pengadaan Barang dan Jasa**

- 01.01. Tender Seleksi (Sederhana)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tender/ seleksi meliputi persiapan, penyusunan data tender/ seleksi, undangan *review* paket tender/seleksi, proses pelaksanaan tender/seleksi, evaluasi, pengumuman, jawaban atas sanggahan, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil tender/seleksi.
- 01.02. Tender Cepat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tender cepat meliputi persiapan, penyusunan data tender cepat, undangan *review* paket tender cepat, proses pelaksanaan tender cepat, evaluasi, pengumuman, jawaban atas sanggahan, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil tender/seleksi.
- 01.03. Pengadaan Langsung  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan langsung meliputi persiapan, penyusunan data pengadaan langsung, undangan *review* paket pengadaan langsung, proses pelaksanaan pengadaan langsung, evaluasi, pengumuman, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil pengadaan langsung.
- 01.04. *e-Purchasing*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *e-purchasing* meliputi persiapan, penyusunan data *e-purchasing*, undangan reviu paket *e-purchasing*, proses pelaksanaan *e-purchasing*, evaluasi, pengumuman, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil *e-purchasing*.

**02. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**

- 02.01. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pengadaan secara elektronik.
- 02.02. Kontrak Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kontrak kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

- 02.03. Katalog Elektronik Sektoral  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan katalog elektronik sektoral.

**HK. HUKUM**

01. Peraturan Perundang-undangan
- 01.01. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang meliputi naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.
- 01.02. Peraturan Pemerintah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkannya Rancangan Peraturan Pemerintah.
- 01.03. Peraturan Presiden  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.
- 01.04. Keputusan Presiden  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan Presiden yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai ditetapkan.
- 01.05. Instruksi Presiden  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Instruksi Presiden yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum ditetapkan.
- 01.06. Peraturan Menteri Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan yang meliputi naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.
- 01.07. Keputusan Menteri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.
- 01.08. Keputusan Bersama  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan Bersama yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
02. Instruksi/Surat Edaran
- 02.01. Instruksi/Surat Edaran Menteri Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Instruksi/Surat Edaran Menteri Kesehatan yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.

- 02.02. Keputusan/Surat Edaran Pejabat setingkat eselon I  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan/Surat Edaran pejabat setingkat eselon I yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.
- 02.03. Keputusan/Surat Edaran pejabat setingkat eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan/Surat Edaran pejabat setingkat eselon II dan kepala unit pelaksana teknis yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum lainnya di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
03. Nota Kesepahaman/*Memorandum Of Understanding* (MoU)/ Kontrak/Perjanjian Kerjasama
- 03.01. Kerja Sama Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan NotaKesepahaman/ *Memorandum Of Understanding* (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama dalam kerja sama dalam negeri yang meliputi antar-instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah atau badan hukum lainnya.
- 03.02. Kerja Sama Luar Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Nota Kesepahaman/ *memorandum Of Understanding* (MoU)/Kontrak/ Perjanjian Kerjasama dalam kerja sama luar negeri yang meliputi antar-pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi internasional.
04. Pembinaan Hukum
- 04.01. Sosialisasi Hukum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain), penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrument/produk hukum kepada lembaga atau perorangan.
- 04.02. Dokumentasi Hukum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi hukum meliputi penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan dan penyebaran informasi hukum.
05. Bantuan Hukum
- 05.01. Bantuan Hukum Kasus Pidana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus pidana meliputi pendampingan hukum, konsultasi hukum, dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 05.02. Bantuan Hukum Kasus Perdata  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus perdata meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang kesehatan dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- 05.03. Bantuan Hukum Tata Usaha Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus tata usaha negara meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang kesehatan dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 05.04. Bantuan Hukum Hak Uji Materiil  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus hak uji materiil di Mahkamah Agung meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang kesehatan dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 05.05. Bantuan Hukum *Judicial Review*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus *judicial review* di Mahkamah Konstitusi meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum dan advokasi di bidang kesehatan, dan masalah hukum lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
06. Kasus/Sengketa Hukum
- 06.01. Kasus/Sengketa Hukum Pidana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum pidana meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan, telaah hukum, dan opini hukum.
- 06.02. Kasus/Sengketa Hukum Perdata  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum perdata meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan, telaah hukum dan opini hukum.
- 06.03. Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum tata usaha negara meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan, telaah hukum dan opini hukum.
07. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- 07.01. Hak Cipta  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cipta meliputi pengurusan masalah hak cipta sampai dengan penyelesaian masalah hak cipta, sertifikat, dan laporan.
- 07.02. Hak Paten (Hak Biasa Dan Hak Sederhana)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak paten (hak biasa dan hak sederhana), pengurusan masalah hak paten sampai dengan penyelesaian masalah hak paten, sertifikat, dan laporan.
- 07.03. Hak Merk  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak merk pengurusan masalah hak merk sampai dengan penyelesaian masalah hak merk, sertifikat, dan laporan.

IR. INFORMATIKA

01. Pengembangan Sistem Informasi

01.01. Pembuatan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Informasi atau Aplikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan/pengembangan/pemeliharaan sistem informasi atau aplikasi meliputi daftar *flow diagram*, proses bisnis, dan kode sumber aplikasi.

01.02. Standardisasi Sistem Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan standardisasi sistem informasi.

01.03. Rancangan Kebijakan Teknis dan Regulasi Layanan Data dan Produk Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rancangan kebijakan teknis dan regulasi layanan data dan produk informasi.

02. Pengelolaan Teknologi Informasi

02.01. Pengelolaan Aplikasi dan *Database*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan aplikasi, pengelolaan basis data, pengelolaan layanan penggunaan (surat elektronik, tanda tangan elektronik, *video conference*), dan pengelolaan situs web.

02.02. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang meliputi pengelolaan jaringan internet/LAN, *data center*, piranti teknologi informasi, *server* dan dokumen *hosting*.

02.03. Keamanan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keamanan informasi meliputi Penyelenggaraan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran, Berita Acara Penyidikan Keamanan Informasi, dan Pengelolaan Keamanan Informasi (ISO 27001).

03. Pengelolaan Data dan Informasi

03.01. Analisis Data dan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan semua kegiatan analisis data dan informasi meliputi kegiatan penyusunan profil kesehatan indonesia, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi, telaah, dan penilaian kualitas data, sosialisasi, *workshop*, kegiatan dokumentasi kunjungan kerja dan informasi data, penyajian data pimpinan, kegiatan katalog layanan data dan informasi, dan pemenuhan permintaan layanan data dan informasi.

03.02. Tata Kelola Kesehatan dan Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis data dan informasi meliputi kegiatan perlindungan data pribadi, kegiatan layanan pengaktifan domain.id, kegiatan monev dan pemetaan layanan domain.id, kegiatan pelaksanaan pendampingan dan edukasi pemanfaatan domain.id, kuesioner pengumpulan data, dan hasil pengolahan, analisis, telaah, dan penilaian kualitas data.

KM. KOMUNIKASI PUBLIK

01. Media Masa

01.01. Liputan dan Dokumentasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan liputan dan pendokumentasian yang meliputi proses pengumpulan/pengolahan data dan informasi sebagai bahan publikasi dengan melakukan perekaman baik berupa gambar/foto, suara, buku dan video sebagai gambaran jalannya peristiwa.

01.02. Wawancara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan wawancara yang meliputi kegiatan pengolahan, penyusunan, penyajian, penyebaran hasil wawancara yang mengaitkan antara draf pertanyaan, bahan wawancara, narasumber dengan media sebagai pemohon.

01.03. Penyajian Berita dan Konten Media Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyajian berita dan konten media sosial yang meliputi kegiatan pemaparan/penjelasan data dan informasi sebagai bahan publikasi biasanya disajikan dalam bentuk *press release* dan konten infografis.

01.04. Pertemuan Media Massa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertemuan media massa meliputi kegiatan pembahasan isu kesehatan dengan memfasilitasi pertemuan narasumber dengan berbagai media dalam bentuk diskusi atau konferensi pers berdasarkan undangan dari Kementerian Kesehatan.

01.05. Kompetisi Komunikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi komunikasi meliputi kegiatan pemberian apresiasi atas atensi khusus dalam bidang kesehatan berupa kompetisi jurnalistik, kompetisi majalah/sejenisnya, kompetisi foto, kompetisi media sosial dan kegiatan sejenisnya.

01.06. Press Tour

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi *press tour* meliputi kegiatan kunjungan media nasional yang diprakarsai Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah.

02. Opini Publik

02.01. Analisis Opini Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis opini publik meliputi kegiatan pemantauan, analisis dan rekomendasi atas perkembangan opini publik serta kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan berita kesehatan.

02.02. Strategi Komunikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan strategi komunikasi meliputi kegiatan media *visit* dan media *coaching* menteri dan para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan.

03. Produksi Komunikasi

03.01. Pembuatan Film atau Video

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan film atau video yang meliputi informasi berupa citra bergerak dan terekam dalam rangkaian fotografik dan suara pada pita magnetik yang penciptaannya menggunakan media teknologi/elektronik.

03.02. Advertorial Cetak dan *Online*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan advertorial cetak dan *online* meliputi pembuatan berita, artikel atau iklan di media cetak dan *online*.

04. Hubungan Antar Lembaga

04.01. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintah meliputi kegiatan yang berhubungan dengan antar kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah.

04.02. Hubungan Antar-Lembaga Non-Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar-lembaga non-pemerintah meliputi kegiatan yang berhubungan dengan antar lembaga dengan perusahaan/swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/sekolah dan lembaga non-pemerintah lainnya.

04.03. Forum Kehumasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan/badan koordinasi hubungan masyarakat (Bakohumas).

04.04. Layanan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan informasi meliputi permohonan informasi baik melalui surat maupun telepon, keterbukaan informasi publik, pengaduan masyarakat, pojok informasi, unit layanan terpadu, dan sistem informasi pelayanan publik.

04.05. Publikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi meliputi kegiatan diseminasi informasi, penyampaian dan penyebaran informasi melalui media cetak dan *online*, siaran radio kesehatan dan TV serta pameran foto dan pameran pembangunan kesehatan.

05. Penerbitan

05.01. Penerbitan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, produksi dan pendistribusian literatur/informasi sebagai bahan publikasi seperti buletin, majalah dan jurnal.

06. Perpustakaan

06.01. Perpustakaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan meliputi kegiatan pembinaan koleksi perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan seperti permintaan nomor *International Standard Book Number* (ISBN), inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi, input *database*, penajaran koleksi, pelayanan perpustakaan

- seperti literasi informasi, penelusuran referensi, layanan sirkulasi/peminjaman, pengembangan, perawatan/pelestarian bahan dan koleksi perpustakaan.
- 06.02. Bimbingan Teknis Perpustakaan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis perpustakaan.
- KN. KEKAYAAN NEGARA**
01. Barang Milik Negara
- 01.01. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan barang milik negara meliputi pengadaan barang habis pakai, pengadaan barang bergerak, pengadaan barang tidak bergerak/investasi/aset dan pengadaan jasa, perencanaan terkait pemeliharaan barang milik negara, dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
- 01.02. Penggunaan Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan barang milik negara meliputi penetapan status penggunaan, alih status penggunaan, penggunaan sementara, dioperasionalkan pihak lain, dan barang milik negara *idle*.
- 01.03. Pemanfaatan Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik negara meliputi dokumen sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerjasama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).
- 01.04. Asuransi Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengasuransian barang milik negara, meliputi pembuatan usulan asuransi, persiapan pengadaan jasa asuransi, persiapan pemilihan penyedia jasa asuransi, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan dan penandatanganan kontrak asuransi, berita acara serah terima polis asuransi, *endorsement*, dan klaim asuransi.
- 01.05. Penatausahaan Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan barang milik negara meliputi aset lancar/persediaan, aset tetap dan aset lainnya, Daftar Barang Ruangan (DBR), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Laporan (KIL).
- 01.06. Inventarisasi Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang milik negara meliputi inventarisasi umum/mutasi barang-serah terima aset/berita acara hibah, standardisasi/kodefikasi, pelaporan persediaan dan barang milik negara (tanah, gedung, wisma, rumah dinas, alat teknik, kendaraan dinas, buku pustaka, alat kantor mesin, dan alat kantor bukan mesin).
- 01.07. Pelaporan Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan barang milik negara meliputi laporan unit akuntansi pengguna/unit akuntansi pembantu pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), laporan barang milik negara, laporan persediaan, laporan pengawasan dan pengendalian,

- laporan rencana kebutuhan, laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan akuntansi barang milik negara.
- 01.08. Penghapusan Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan berupa standardisasi/petunjuk teknis penghapusan, usulan penghapusan, data dan dokumen pendukung, penilaian dalam rangka penghapusan, penetapan penghapusan, dokumen terkait penyebab penghapusan antara lain dokumen penyerahan kepada Pengelola Barang, pengalihan status penggunaan barang milik negara kepada Pengguna Barang lain, pemindahtanganan barang milik negara, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, ketentuan peraturan perundang undangan yang harus dilaksanakan, pemusnahan barang milik negara, atau sebab-sebab lain, berita acara pemeriksaan/penelitian, berita acara penghapusan, berita acara serah terima barang milik negara yang dihibahkan dan naskah hibah barang milik negara.
- 01.09. Pengelolaan Rumah Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rumah negara berupa pendaftaran, penetapan status golongan dan surat izin penghunian rumah negara, berita acara serah terima kunci rumah negara, teguran kepada penghuni rumah negara, alih fungsi, alih status golongan rumah negara, penghapusan rumah negara, dan perencanaan terkait pemeliharaan rumah negara tidak berpenghuni.

KP. KEPEGAWAIAN

01. Pengadaan Pegawai

- 01.01. Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai meliputi *bezetting* dan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rincian alokasi formasi CPNS, formasi tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan formasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS melalui formasi khusus (*incidentil*).
- 01.02. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil meliputi pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil, ujian seleksi calon pegawai negeri sipil, dan pelamar tidak lulus seleksi.
- 01.03. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan PNS meliputi penyelesaian surat keputusan CPNS pelamar yang lulus, penyelesaian surat keputusan CPNS tenaga honorer, peningkatan status CPNS menjadi PNS < 2 (dua) tahun, peningkatan status CPNS menjadi PNS > 2 (dua) tahun, pemanggilan peserta Pelatihan Dasar CPNS, penyelesaian ralat surat keputusan CPNS/PNS melalui Badan Kepegawaian Negara, penyelesaian ralat surat keputusan CPNS/PNS tanpa melalui Badan Kepegawaian Negara, penyelesaian surat keputusan pemberhentian CPNS atas

- Permintaan Sendiri (APS), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS dan sumpah PNS, dan administrasi pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas.
- 01.04. Administrasi Pegawai Negeri Sipil  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi Pegawai Negeri Sipil meliputi pengusulan pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu), dan pengusulan penetapan Nomor Identitas Pegawai (non-PNS).
- 01.05. Identitas Perseorangan/Personal File Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perseorangan/personal file pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- 01.06. Identitas Perseorangan/Personal File Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang secara Individual Ditentukan oleh Menteri yang Berjasa/Terlibat Peristiwa Berskala Nasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan indentitas perseorangan/personal file pejabat eselon I dan pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh menteri yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.
- 01.07. Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai dengan penugasan khusus meliputi surat keputusan pengangkatan penugasan khusus, surat keputusan pengangkatan kembali penugasan khusus, surat keputusan pindah/perubahan kriteria/ralat penugasan khusus, Surat Keputusan wafat/tewas penugasan khusus, Surat Keputusan berhenti penugasan khusus.
- 01.08. Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meliputi pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ujian seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan administrasi pelamar tidak lulus seleksi.
- 01.09. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meliputi administrasi pelamar lulus seleksi, bahan penyusunan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemanggilan peserta pelatihan dasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahan penyelesaian surat keputusan, dan pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atas permintaan sendiri.
- 01.10. Pegawai Perbantuan (Magang, Bawah Kendali Operasi, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pegawai Perbantuan meliputi surat keputusan pengangkatan, surat kriteria/ralat perjanjian kerja, surat keputusan berhenti perjanjian kerja.

## 02. Mutasi Pegawai

- 02.01. Kenaikan Pangkat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan usulan kenaikan pangkat meliputi kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta,

- kenaikan pangkat luar biasa, pencantuman gelar dan peninjauan masa kerja.
- 02.02. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan usulan kenaikan gaji berkala dan surat keputusan kenaikan gaji berkala pegawai.
- 02.03. Pemindahan, Pemberhentian dan PensiuN.  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan usulan pemindahan/mutasi, pelaksanaan pindah/mutasi seleksi terbuka (*job vacancy*) (pengumuman, pendaftaran, ujian seleksi), Administrasi Tidak Lulus Seleksi, usulan pemberhentian dan pensiuN pegawai Usulan Batas Usia PensiuN (BUP), Usulan PensiuN Atas Permintaan Sendiri, Usulan PensiuN Janda/ Duda).
- 02.04. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian sasaran kinerja pegawai meliputi usulan penilaian sasaran kinerja pegawai, usulan penilaian kinerja, usulan penilaian kerja, perilaku kerja, dan hasil evaluasi sasaran kinerja pegawai.
- 02.05. Dukungan Informasi Kepegawaian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dukungan informasi kepegawaian meliputi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), evaluasi hasil analisa jabatan (peta jabatan/informasi jabatan) dan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK).
03. Pengembangan Pegawai
- 03.01. Pengembangan Karier  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan usulan pengembangan karier meliputi peningkatan golongan dan pendidikan sesuai kebutuhan organisasi untuk mengikuti ujian dinas, ujian kenaikan pangkat, sumpah jabatan, penyesuaian ijazah, tugas dan izin belajar.
- 03.02. Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi jabatan fungsional melalui surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional (surat keputusan kenaikan jabatan, pengangkatan pertama, alih jabatan, *inpassing*/penyesuaian), surat keputusan pembebasan sementara, surat keputusan pengangkatan kembali, surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional, surat keputusan pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi (TBCR) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi jabatan fungsional tertentu.
- 03.03. Perancangan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perancangan pengembangan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi meliputi penyiapan bahan dalam pengisian jabatan mulai dari jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) dan jabatan administrasi (administrator dan pengawas) serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat.

- 03.04. Penugasan/Surat Perintah Pegawai  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan pegawai meliputi surat perintah melaksanakan tanggung jawab sebagai Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.).
- 03.05. Manajemen Talenta  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sistem merit dan manajemen talenta.
04. *Corporate University* Kementerian Kesehatan
- 04.01. Penilaian Kompetensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Kompetensi meliputi administrasi pengukuran/penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural serta teknis aparatur sipil negara, penyelenggaraan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, dan penyelenggaraan kompetensi, keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, pengetahuan dan pemahaman, serta sikap kerja aparatur sipil negara.
- 04.02. Rencana Pengembangan Kompetensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rencana pengembangan kompetensi meliputi penyusunan rancangan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai negeri sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
- 04.03. Program Pengembangan Kompetensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pengembangan kompetensi meliputi *platform* pembelajaran digital yang dapat diakses oleh seluruh SDM kesehatan yang meliputi tenaga kesehatan dan pegawai kementerian kesehatan, dan *platform* digital meliputi pelataran sehat, *learning management system* (LMS) dan *knowledge management system* (KMS).
- 04.04. Pelaksanaan pengembangan Kompetensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi meliputi pengembangan kompetensi seperti pelatihan, diklat, seminar, webinar aparatur sipil negara, dan lain sebagainya.
- 04.05. Pengelolaan *Corporate University*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *Pengelolaan Corporate University*.
- 04.06. Evaluasi Pengembangan Kompetensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi pengembangan kompetensi meliputi evaluasi paska pelatihan, pendidikan dan pelatihan, serta pelatihan dasar.
05. Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
- 05.01. Penegakan Disiplin Pegawai  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penegakan disiplin pegawai meliputi pemberhentian sementara sebagai PNS, pemberhentian PNS, hukuman disiplin (tingkat ringan, sedang, dan berat), penetapan status kepegawaian dan pengaduan masyarakat/ permasalahan umum.
- 05.02. Kesejahteraan Pegawai  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan pegawai meliputi izin perkawinan dan perceraian, penyelesaian cuti PNS seperti cuti tahunan, cuti

- alasan penting, cuti besar, Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), pengajuan, pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Tabungan Perumahan (Taperum) dan keanggotaan pegawai dalam organisasi sosial.
- 05.03. Penghargaan bagi PNS  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghargaan PNS meliputi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (10, 20, dan 30 tahun) dari Presiden Republik Indonesia dan tanda penghargaan Bakti Karya Husada (Dwi Windu dan Tri Windu) dari Menteri Kesehatan.
- 05.04. Penghargaan Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghargaan lainnya meliputi surat keputusan dan piagam untuk penghargaan lainnya yang dikelola/koordinir oleh masing-masing unit kerja pemegang program di lingkungan Kementerian Kesehatan, antara lain penghargaan Ksatria Bakti Husada, Manggala Karya Bakti Husada, Mitra Bakti Husada, institusi kesehatan berprestasi, tenaga kesehatan berprestasi, kader lestari, tenaga kesehatan teladan tingkat nasional, pemilihan lomba sekolah sehat tingkat nasional, dosen politeknik kesehatan dan widyaiswara berprestasi, lomba-lomba dan tanda penghargaan bidang kesehatan lainnya.
- 05.05. Pemeriksaan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan bagi Menteri dan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan, surat keputusan tim pengujian kesehatan dan surat pemeriksaan kesehatan pegawai/calon pegawai.
- 05.06. Tata Usaha Kepegawaian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian meliputi kegiatan presensi pegawai dan monitoring pegawai.
- 05.07. Organisasi Non-Kedinasan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non-kedinasan meliputi kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dharma Wanita, koperasi dan yayasan.

KR. KERUMAHTANGGAAN

01. Pelayanan Kerumahtanggaan
- 01.01. Pelayanan Umum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kerumahtanggaan yang meliputi perencanaan kebutuhan prasarana, sarana, dan pengelolaan ruang kerja, pengelolaan ruang pertemuan/rapat/lapangan upacara, peminjaman prasarana dan sarana kantor.
- 01.02. Pelayanan Khusus  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan layanan kepada pimpinan, penyediaan petugas kebersihan dan penyediaan petugas pendukung lainnya.
- 01.03. Administrasi Pakaian Dinas Pegawai  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pakaian dinas pegawai, satuan pengamanan, tenaga honorer,

- pramubakti, petugas kebersihan dan petugas pendukung lainnya.
- 01.04. Gerakan Kantor Berhias (GKB)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan gerakan kantor berhias.
02. Pemeliharaan dan Perbaikan
- 02.01. Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan gedung, izin renovasi/perbaikan ruang kerja/gedung dan pembangunan gedung.
- 02.02. Pemeliharaan dan Perbaikan rumah dinas/wisma/gudang  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan rumah dinas/wisma/gudang, izin renovasi/perbaikan ruang kerja/gedung dan izin penggunaan rumah dinas dan izin pembangunan rumah dinas/wisma/gudang.
- 02.03. Pertamanan/*landscaping*/penghijauan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pertamanan/*landscaping*.
- 02.04. Peralatan kantor, mesin dan pengolah data  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, mesin dan pengolah data.
- 02.05. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kantor pusat.
03. Pengelolaan Jaringan
- 03.01. Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan, pemasangan jaringan telekomunikasi meliputi telepon dan *Base Transceiver Station* (BTS).
- 03.02. Pengelolaan Jaringan Listrik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan jaringan listrik.
- 03.03. Pengelolaan Jaringan Air  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan jaringan air.
- 03.04. Pengelolaan TV Kabel  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan TV kabel dan/atau internet.
- 03.05. Pelaksanaan Penghematan Energi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penghematan energi di lingkungan kantor pusat.
04. Pengelolaan Kendaraan Dinas
- 04.01. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat-surat kendaraan dinas dan penatausahaan pengelolaan kendaraan dinas.
- 04.02. Pengelolaan Kendaraan Dinas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan kendaraan dinas, rekomendasi

- pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas.
- 04.03. Penggunaan Kendaraan Dinas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan, pengelolaan dan penggunaan kendaraan dinas.
05. Ketertiban dan Keamanan
- 05.01. Pengamanan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat dan tamu pejabat, rumah dinas, prasarana dan sarana kantor yang meliputi, penataausahaan surat izin masuk/keluar BMN dan orang, pendayagunaan petugas pengamanan, petugas jaga/piket, penataausahaan kejadian/gangguan/ pelanggaran, mobilisasi demonstran dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/TNI dan aparat keamanan lainnya.
- 05.02. Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan laporan ketertiban dan keamanan meliputi kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan dan penertiban penggunaan prasarana dan sarana, serta hal-hal koordinasi partisipatif lainnya terkait komunikasi dengan lingkungan sekitar.
- 05.03. Administrasi Pengelolaan Parkir  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan, pengelolaan dan penyediaan lahan parkir.
- KS. KERJA SAMA LUAR NEGERI
01. Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri
- 01.01. Telaah Permohonan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan telaah permohonan meliputi persiapan, penyusunan dan pelaksanaan telaah permohonan.
- 01.02. Dokumen Kerja Sama Internasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dokumen kerja sama internasional meliputi persiapan serta pelaksanaan dalam penyusunan dokumen seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), *Letter of International* (LoI) dan *agreement* lainnya.
- 01.03. Kertas Posisi/Surat Pendeklegasian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kertas posisi/surat pendeklegasian meliputi persiapan serta pelaksanaan penyusunan kertas posisi/surat pendeklegasian.
- 01.04. Registrasi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi pinjaman hibah luar negeri meliputi persiapan serta pelaksanaan penyusunan registrasi pinjaman hibah luar negeri.
02. Penyusunan Program, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Kesehatan Luar Negeri
- 02.01. Kerja sama Kesehatan Bilateral  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama kesehatan bilateral meliputi persiapan penyusunan program,

- perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan bilateral baik di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah maupun kawasan Amerika, Eropa dan Afrika.
- 02.02. Kerja Sama Kesehatan Regional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama kesehatan regional meliputi persiapan penyusunan program, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan regional baik dengan negara *Association South East Asia Nation* (ASEAN) maupun Non- *Association South East Asia Nation*.
- 02.03. Kerja Sama Kesehatan Multilateral  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama kesehatan multilateral meliputi persiapan penyusunan program, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan multilateral baik dengan persatuan bangsa-bangsa maupun non- persatuan bangsa-bangsa.
03. Administrasi Kerja Sama Luar Negeri
- 03.01. Administrasi Kerja Sama Antar-Lembaga Pemerintah, Lembaga Non-Pemerintah dan *International Non-Government Organization* (INGO)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi kerja sama antar-lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan *International Non-Government Organization* meliputi persiapan serta pelaksanaan administrasi kerja sama antar lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah dan *International Non-Government Organization*.
- 03.02. Administrasi Tenaga Kerja Asing Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi tenaga kerja asing kesehatan meliputi persiapan dan pelaksanaan administrasi tenaga kerja asing kesehatan.
- 03.03. Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi perjalanan dinas luar negeri meliputi izin, Surat Perintah (SP) Sekretariat Negara, paspor, visa dan *exit permit*.

## KU. KEUANGAN

### 01. Tata Laksana Keuangan

- 01.01. Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Naskah-naskah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendapatan negara bukan pajak meliputi usulan target dan pagu pendapatan negara bukan pajak, dokumen target dan pagu penyusunan pendapatan negara bukan pajak, usulan pendapatan negara bukan pajak/Badan Layanan Umum (BLU), usulan remunerasi badan layanan umum, pola tarif, laporan dan berita acara baik badan layanan umum maupun non badan layanan umum.
- 01.02. Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Naskah-naskah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan pendapatan negara bukan pajak melalui aplikasi.
- 01.03. Hibah Langsung Luar Negeri Barang/Jasa  
Naskah-naskah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hibah langsung luar negeri barang/jasa meliputi laporan dan hasil pemantauan.

- 01.04. Penghapusan Piutang  
Naskah-naskah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan proses penghapusan piutang meliputi persiapan, proses dan pelaksanaan sampai usulan penghapusan piutang.
02. Pelaksanaan Anggaran
- 02.01. Belanja Pegawai  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan termasuk tunjangan kinerja dan remunerasi, honorarium, uang lembur, uang makan, pensiun, biaya kecelakaan, biaya pemakaman, penggajian pegawai honorer dan vakasi.
- 02.02. Administrasi dan Data Dukung Belanja Pegawai  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan data dukung belanja pegawai.
- 02.03. Belanja Barang  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan belanja barang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang badan layanan umum dan belanja bantuan sosial.
- 02.04. Belanja Modal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan belanja modal meliputi pembayaran perolehan aset dan atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya.
- 02.05. Pengeluaran Anggaran  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran meliputi Rencana Penarikan Dana (RPD), Rencana Pelaksana Kegiatan (RPK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), SSP-TUP (Tambah Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan APBN dan bahan nota keuangan, dan lain-lain.
03. Pengelolaan Perbendaharaan
- 03.01. Perbendaharaan  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perbendaharaan meliputi persiapan usulan persetujuan dan pelaporan pembukaan dan penutupan rekening, surat keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
- 03.02. Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan meliputi KP4 yaitu surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga dan surat keterangan lain.
- 03.03. Pajak  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan meliputi penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).
- 03.04. Penerimaan Non Pajak  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan meliputi penerimaan dan

- penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke kas negara.
- 03.05. Pengembalian Belanja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembalian belanja meliputi pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
- 03.06. Berita Acara Pemeriksaan Kas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan berita acara pemeriksaan kas.
- 03.07. Verifikasi Anggaran  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi anggaran meliputi pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/ pengeluaran anggaran.
- 03.08. Pembukuan Anggaran  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan anggaran yang meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi.
04. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 04.01. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- 04.02. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Koordinator Wilayah (pada Unit Pelaksana Teknis yang menjadi Koordinator Wilayah)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada koordinator wilayah (UPT yang menjadi koordinator wilayah) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- 04.03. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Eselon I (Biro Keuangan dan BMN/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit eselon I (Biro Keuangan dan BMN/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- 04.04. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan (Biro Keuangan dan BMN)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan (Biro Keuangan dan BMN) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

- 04.05. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada satuan kerja BLU meliputi penyiapan bahan koordinasi, analisis dan pengelolaan akuntansi atas uang dan barang.
- 04.06. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Non-Badan Layanan Umum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada satuan kerja non-BLU meliputi penyiapan bahan koordinasi, analisis dan pengelolaan akuntansi atas uang dan barang.
- 04.07. Penyiapan Bahan Analisis Akuntansi Kementerian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan analisis akuntansi kementerian.
- 04.08. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Satuan Kerja.
- 04.09. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Unit Eselon I  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Unit Eselon I.
- 04.10. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Kementerian Kesehatan.

**MR. Manajemen Risiko**

01. Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 01.01. *Risk Register*  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi, penetapan, pelaksanaan dan penyusunan *risk register* manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 01.02. Laporan Manajemen Risiko  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi, pelaksanaan dan penyusunan laporan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan.

**OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

01. Organisasi
- 01.01. Penataan Organisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penataan organisasi (kantor pusat, dan unit pelaksana teknis) meliputi usulan organisasi dan tata kerja, uraian tugas dan fungsi, naskah akademis, pedoman, dan perumusan organisasi dan tata kerja meliputi penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pelaporan.
- 01.02. Evaluasi Organisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi (usulan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaporan) organisasi meliputi usulan evaluasi, penyusunan instrumen dan monitoring evaluasi organisasi.

- 01.03. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi pelaksanaan (usulan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaporan) koordinasi tugas fungsi lintas program dan lintas sektor.
- 01.04. Budaya Kerja Organisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaporan, dan penerapan budaya kerja organisasi.
02. Ketatalaksanaan
- 02.01. Proses Bisnis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses bisnis meliputi identifikasi, analisis, pemetaan dan penetapan bisnis proses dan peta lintas fungsi.
- 02.02. Standar Operasional Prosedur  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar operasional prosedur meliputi penyusunan finalisasi, penetapan, monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur.
- 02.03. Pedoman Ketatalaksanaan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pedoman ketatalaksanaan untuk menindaklanjuti organisasi dan tata kerja meliputi penyusunan akronim, singkatan nama, nomenklatur bahasa inggris, dan dokumen pedoman lainnya terkait ketatalaksanaan.
03. Analisis Jabatan
- 03.01. Informasi Jabatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan dengan hasil akhir informasi jabatan yang berisikan informasi tentang nama jabatan, uraian jabatan, syarat jabatan, uraian tugas dan fungsi, kewenangan, dan efektifitas dan efisiensi jabatan.
- 03.02. Analisis Beban Kerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis beban kerja meliputi perhitungan beban kerja dan penyusunan peta jabatan.
- 03.03. Evaluasi Jabatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi jabatan meliputi penentuan harga jabatan dan kelas jabatan.
04. Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi
- 04.01. Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Internal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi reformasi birokrasi meliputi penyusunan *roadmap* dan gambaran pencapaian reformasi birokrasi, dan implementasi transformasi internal meliputi transformasi tata kelola sumber daya manusia, perencanaan dan penganggaran, organisasi, kebijakan, dan teknologi dan digital.

- 04.02. *Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *roadmap* reformasi birokrasi kementerian kesehatan yang meliputi usulan dan penyusunan.
- 04.03. Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi implementasi reformasi birokrasi yang meliputi fasilitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan penilaian eksternal oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN).

**PR. PERENCANAAN**

01. Perencanaan Strategis dan Program
- 01.01. Perencanaan Strategis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
- 01.02. Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana aksi program dan rencana aksi kegiatan Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi.
- 01.03. Nota Keuangan dan Lampiran Pidato Presiden  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan nota keuangan dan lampiran pidato presiden.
- 01.04. Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan termasuk laporan kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 01.05. Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan termasuk laporan kinerja di lingkungan Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi.
- 01.06. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- 01.07. Usulan Perencanaan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.
- 01.08. Usulan Program Transfer Daerah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan terkait program transfer daerah termasuk dana alokasi khusus.
02. Pokok-pokok Kebijakan dan strategi Pembangunan
- 02.01. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan dan rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

- 02.02. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah bidang kesehatan.
03. Rencana Kerja Tahunan
- 03.01. Rencana Kerja Tahunan Kementerian Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Kesehatan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas).
- 03.02. Penetapan Kinerja Menteri dan Pimpinan Madya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja eselon I dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 03.03. Penetapan Kinerja Eselon II ke bawah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti eselon II dengan eselon I.
04. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
- 04.01. Penyusunan Anggaran Kementerian Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Kesehatan meliputi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Standar Biaya Umum (SBU), standar Biaya Khusus (SBK).
- 04.02. Revisi Dokumen Anggaran Kementerian Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan revisi/*refocusing*/efisiensi perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA dan POK.
- 04.03. Penyusunan Anggaran Transfer Daerah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran transfer daerah termasuk dana alokasi khusus.
- 04.04. Revisi Dokumen Anggaran Transfer Daerah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan revisi/perubahan dokumen anggaran transfer daerah termasuk dana alokasi khusus.
05. Pelaporan dan Evaluasi
- 05.01. Laporan Berkala  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun meliputi laporan triwulan atau laporan semesteran.
- 05.02. Laporan Tahunan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun meliputi laporan tahun.
- 05.03. Laporan Khusus  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan khusus meliputi laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti pidato presiden dan rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

- 05.04. *Progress Report*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu).
- 05.05. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan Kementerian Kesehatan.
- 05.06. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi.
- 05.07. Laporan Program Transfer Daerah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program transfer daerah termasuk dana alokasi khusus.
- 05.08. Evaluasi Program Transfer Daerah Termasuk Dana Alokasi Khusus Final  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program transfer daerah termasuk dana alokasi khusus final.

PS. PENGAWASAN

01. Audit
- 01.01. Audit Kinerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut.
- 01.02. Audit dengan Tujuan Tertentu  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut.
- 01.03. *Probit Audit*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan *probit audit* yang meliputi surat penugasan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut.
- 01.04. Audit Penugasan Khusus  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit penugasan khusus yang meliputi surat penugasan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut.
02. Reviu
- 02.01. Reviu Laporan Keuangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu laporan keuangan (semesteran dan tahunan), meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
- 02.02. Reviu RKA-KL  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RKA-KL, revisi RKA-KL/anggaran, buka blokir, *refocusing* anggaran, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

- 02.03. **Reviu Lainnya**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu lainnya (selain reviu LK dan RKA-KL), antara lain pelaksanaan reviu RKBMN, reviu Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA), Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIP), aspek kinerja tertentu, aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan hasil kajian pengawasan tertentu baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
- 02.04. **Reviu Surat Pernyataan Piutang Negara telah Optimal/Verifikasi Utang**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu surat pernyataan piutang negara telah optimal/verifikasi utang.
- 03. Evaluasi**
- 03.01. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kesehatan**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi SAKIP meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
- 03.02. **Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi jaminan kesehatan nasional meliputi surat penugasan, sampai dengan pelaporan.
- 03.03. **Evaluasi Reformasi dan Birokrasi**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 03.04. **Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) meliputi surat penugasan, sampai dengan pelaporan.
- 03.05. **Evaluasi Efektivitas Kepatuhan SKI/SPI**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi efektivitas kepatuhan SKI/SPI meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
- 03.06. **Evaluasi Program Lainnya**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program meliputi surat penugasan, sampai dengan pelaporan.
- 04. Pengaduan Masyarakat**
- 04.01. **Penanganan Pengaduan Masyarakat**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan melalui berbagai media.
- 04.02. **Daftar Hitam**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar hitam yang datang dari internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan.

- 04.03. Klarifikasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan untuk tujuan tertentu meliputi surat penugasan, sampai dengan pelaporan.
05. Laporan Hasil Pengawasan  
05.01. Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Semesteran dan Tahunan yang disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Menteri Kesehatan.
06. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)  
06.01. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap Kerugian Negara yang meliputi TP-TGR seperti, laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/uang, SK Tanggung Jawab Mutlak (Surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, surat keputusan penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR).
07. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan  
07.01. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan/ Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti meliputi surat tugas sampai dengan pelaporan.
08. Program Pencegahan Korupsi  
08.01. Pengendalian Gratifikasi/ *Sponsorship*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian gratifikasi/ *sponsorship* sampai dengan pelaporan.
- 08.02. Pembangunan Zona Integritas (ZI)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ZI (Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani) meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
- 08.03. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan LHKPN meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
- 08.04. Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan LHKASN meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
- 08.05. Program Pencegahan Korupsi Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program pencegahan korupsi lainnya meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan

09. Kegiatan Pengawasan Lainnya
  - 09.01. Konsultasi Pengawasan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.
  - 09.02. Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat kerja/koordinasi pengawasan yang meliputi surat penugasan, surat undangan, narasumber, sampai dengan pelaporan.
  - 09.03. Kebijakan Pengawasan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan, pedoman pengawasan, petunjuk pelaksanaan pengawasan, petunjuk teknis pengawasan dan lain-lain yang meliputi surat penugasan, nota dinas sampai dengan pelaporan.
  - 09.04. Perencanaan Pengawasan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), *roadmap* pengawasan yang meliputi penyusunan kegiatan, nota dinas sampai dengan pelaporan.
  - 09.05. Verifikasi Pengawasan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang bersifat verifikasi.

## UM. KETATAUSAHAAN

01. Kesekretariatan Pimpinan
  - 01.01. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Menteri dan Wakil Menteri) Terkait Bidang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat (Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim), Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas (Rakorpintas), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan sambutan Menteri dan wakil Menteri.
  - 01.02. Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat forum komunikasi staf ahli menteri.
  - 01.03. Rapat Koordinasi Direktorat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi direktorat.
  - 01.04. Rapat Koordinasi Staf  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi staf.
  - 01.05. Rapat Koordinasi Pusat/Biro  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi pusat/biro.
  - 01.06. Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pencetakan dan penggandaan meliputi permintaan fotokopi, penjilidan dan pencetakan.
02. Keprotokolan
  - 02.01. Lambang, Bendera dan Lagu Kebangsaan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan lambang negara Garuda Pancasila, bendera kebangsaan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia raya.

- 02.02. Pelaksanaan Upacara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara resmi meliputi upacara bendera, upacara hari raya/hari besar nasional, upacara pemakaman dan apel pagi, pelantikan, pengukuhan, pemberian penghargaan, penandatangan MoU dan peresmian.
- 02.03. Administrasi Audiensi dan Jamuan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audiensi baik dari internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan dan penyelenggaraan kegiatan jamuan pimpinan meliputi permohonan, undangan, notulen.
- 02.04. Agenda Pimpinan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda pimpinan.
- 02.05. Ucapan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ucapan meliputi ucapan terima kasih, ucapan selamat dan ucapan belasungkawa.

UI. KETATAUSAHAAN GAJI

01. Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
- 01.01. Pembayaran Gaji ASN dan CASN  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi administrasi pembayaran gaji ASN dan CASN, meliputi naskah/daftar gaji dan penyampaian dokumen mutasi kepegawaian yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan melekat seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pindah, Pengangkatan dalam Jabatan, Pensiun, dan lain-lain.
- 01.02. Tunjangan ASN dan CASN  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi usulan pembayaran, meliputi dokumen usulan Uang Makan, Uang Lembur, Tunjangan Kinerja ASN dan CASN.
- 01.03. Pemotongan Pajak ASN dan CASN  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi mekanisme pemotongan pajak ASN dan CASN.
- 01.04. Rekening Gaji ASN dan CASN  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi pembuatan rekening ASN dan CASN.
- 01.05. Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan ASN dan CASN meliputi pemotongan iuran.
- 01.06. Penggunaan Aplikasi e-Monev  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-Monev.
02. Pengelolaan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian (TKDP)
- 02.01. Administrasi Pengelolaan Pembayaran Insentif TKDP  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi administrasi pembayaran insentif TKDP meliputi Staf Khusus Menteri, tenaga Pegawai Tidak Tetap, tenaga honorer, Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat Tim,

- Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Residen dan Dokter Pasca Internsip.
- 02.02. Tunjangan Uang Lembur TKDP  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi usulan uang lembur tenaga Honorer
- 02.03. Pemotongan Pajak TKDP  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi mekanisme pemotongan pajak TKDP.
- 02.04. Rekening Gaji TKDP  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi pembuatan buku rekening TKDP.
- 02.05. Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan TKDP  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi dan pemrosesan kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan meliputi pemotongan iuran bulanan kepesertaan.

b. Fungsi Substantif

AD. ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

01. Analisis Lingkungan Strategis

- 01.01. Analisis Politik Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog kebijakan dalam rangka penyusunan naskah kebijakan, asesmen lapangan, pembahasan analisis kebijakan dan kebijakan politik kesehatan.
- 01.02. Analisis Sosial Ekonomi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog kebijakan dalam rangka penyusunan naskah kebijakan, asesmen lapangan, pembahasan analisis kebijakan dan analisis kebijakan sosial ekonomi.
- 01.03. Analisis Perilaku  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog kebijakan dalam rangka penyusunan naskah kebijakan, asesmen lapangan, pembahasan analisis kebijakan, revolusi mental bidang kesehatan dan *Executive Brain Assessment* (EBA) untuk penyusunan analisis perilaku.
- 01.04. Analisis Kesehatan Intelegensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum dialog kebijakan, penyusunan naskah kebijakan, asesmen lapangan dan pembahasan analisis kesehatan intelegensi.

02. Pelaksanaan Program Analisis Lingkungan Strategis

- 02.01. Analisis Politik Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan analisis politik kesehatan di daerah, lokakarya analisis politik kesehatan dan kegiatan analisis politik kesehatan.
- 02.02. Analisis Sosial Ekonomi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi di daerah, lokakarya analisis sosial ekonomi dan kegiatan analisis sosial ekonomi.
- 02.03. Analisis Perilaku  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan analisis perilaku kesehatan di daerah, lokakarya analisis perilaku kesehatan dan kegiatan analisis perilaku kesehatan.

- 02.04. Analisis Kesehatan Intelegensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan analisis kesehatan intelegensi di daerah, lokakarya analisis kesehatan intelegensi dan kegiatan analisis kesehatan intelegensi.
03. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Lingkungan Strategis
- 03.01. Analisis Politik Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis politik kesehatan.
- 03.02. Analisis Sosial Ekonomi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan.
- 03.03. Analisis Perilaku  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis perilaku kesehatan.
- 03.04. Analisis Kesehatan Intelegensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan analisis kesehatan intelgensia.

**BP. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

01. Penyusunan Kebijakan Teknis Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- 01.01. Kebijakan Upaya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi penyusunan kebijakan upaya kesehatan meliputi pengusulan kebijakan (surat usulan, surat permintaan, telaahan staf, bahan pidato, ceramah, materi presentasi, memo kebijakan), penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), dan survei/studi/penelitian (rencana kerja survei/studi/penelitian/master plan, administrasi survei/studi/penelitian seperti surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen kerja sama dengan dinas, laboratorium, perguruan tinggi, layanan kesehatan dan lain-lain, pelaksanaan survei/studi/penelitian seperti proposal protokol, rekomendasi etik, perizinan, kuesioner, kontak responden, data hasil pemeriksaan spesimen, laporan hasil survei/studi/penelitian berupa laporan akhir).
- 01.02. Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi penyusunan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan meliputi pengusulan kebijakan (surat usulan, surat permintaan, telaahan staf, bahan pidato, ceramah, materi presentasi, memo kebijakan), penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), dan survei/studi/penelitian (rencana kerja survei/studi/penelitian/master plan, administrasi survei/studi/penelitian seperti surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen kerja sama dengan dinas, laboratorium, perguruan tinggi, layanan kesehatan dan lain-lain, pelaksanaan survei/studi/penelitian seperti proposal protokol, rekomendasi etik, perizinan, kuesioner, kontak responden, data hasil pemeriksaan spesimen, laporan hasil survei/studi/penelitian berupa laporan akhir).

- 01.03. Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi penyusunan kebijakan pembiayaan dan desentralisasi kesehatan meliputi pengusulan kebijakan (surat usulan, surat permintaan, telaahan staf, bahan pidato, ceramah, materi presentasi, memo kebijakan), penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), dan survei/studi/penelitian (rencana kerja survei/studi/penelitian/master plan, administrasi survei/studi/penelitian seperti surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen kerja sama dengan dinas, laboratorium, perguruan tinggi, layanan kesehatan dan lain-lain, pelaksanaan survei/studi/penelitian seperti proposal protokol, rekomendasi etik, perizinan, kuesioner, kontak responden, data hasil pemeriksaan spesimen, laporan hasil survei/studi/penelitian berupa laporan akhir).
- 01.04. Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi penyusunan kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan meliputi pengusulan kebijakan (surat usulan, surat permintaan, telaahan staf, bahan pidato, ceramah, materi presentasi, memo kebijakan), penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), dan survei/studi/penelitian (rencana kerja survei/studi/penelitian/master plan, administrasi survei/studi/penelitian seperti surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen kerja sama dengan dinas, laboratorium, perguruan tinggi, layanan kesehatan dan lain-lain, pelaksanaan survei/studi/penelitian seperti proposal protokol, rekomendasi etik, perizinan, kuesioner, kontak responden, data hasil pemeriksaan spesimen, laporan hasil survei/studi/penelitian berupa laporan akhir).
02. Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Kesehatan
- 02.01. Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Upaya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan kesehatan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan meliputi perumusan dan penyusunan bahan hasil konsultasi publik maupun FGD, hasil uji petik, *hearing* dan bahan dukungan lainnya dalam penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan seperti naskah urgensi, naskah akademik, naskah kajian rancangan peraturan perundang-undangan, saran kebijakan (*policy brief*, *policy paper*, *policy memo*, artikel kebijakan/makalah kebijakan, monograf kebijakan), perbaikan/penyempurnaan kebijakan (*policy refinement*), laporan advokasi kebijakan, laporan hasil evaluasi kebijakan, permohonan rekomendasi dan rekomendasi *material transfer agreement*.
- 02.02. Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan meliputi perumusan dan penyusunan bahan hasil konsultasi publik maupun FGD, hasil uji petik, *hearing* dan bahan dukungan lainnya dalam penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan seperti naskah urgensi, naskah akademik, naskah kajian rancangan

peraturan perundang-undangan, saran kebijakan (*policy brief, policy paper, policy memo*, artikel kebijakan/makalah kebijakan, monograf kebijakan), perbaikan/penyempurnaan kebijakan (*policy refinement*), laporan advokasi kebijakan, laporan hasil evaluasi kebijakan, permohonan rekomendasi dan rekomendasi *material transfer agreement*.

- 02.03. Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembiayaan dan desentralisasi kesehatan meliputi perumusan dan penyusunan bahan hasil konsultasi publik maupun FGD, hasil uji petik, *hearing* dan bahan dukungan lainnya dalam penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan seperti naskah urgensi, naskah akademik, naskah kajian rancangan peraturan perundang-undangan, saran kebijakan (*policy brief, policy paper, policy memo*, artikel kebijakan/makalah kebijakan, monograf kebijakan), perbaikan/penyempurnaan kebijakan (*policy refinement*), laporan advokasi kebijakan, laporan hasil evaluasi kebijakan, permohonan rekomendasi dan rekomendasi *material transfer agreement*.

- 02.04. Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan meliputi perumusan dan penyusunan bahan hasil konsultasi publik maupun FGD, hasil uji petik, *hearing* dan bahan dukungan lainnya dalam penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan seperti naskah urgensi, naskah akademik, naskah kajian rancangan peraturan perundang-undangan, saran kebijakan (*policy brief, policy paper, policy memo*, artikel kebijakan/makalah kebijakan, monograf kebijakan), perbaikan/penyempurnaan kebijakan (*policy refinement*), laporan advokasi kebijakan, laporan hasil evaluasi kebijakan, permohonan rekomendasi dan rekomendasi *material transfer agreement*.

### 03. Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Kesehatan

- 03.01. Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Upaya Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan upaya kesehatan meliputi sosialisasi/penyebarluasan kebijakan (daftar konsultasi dan hasil konsultasi publik), laporan diseminasi kebijakan, dan uji coba kebijakan.

- 03.02. Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan meliputi sosialisasi/penyebarluasan kebijakan (daftar konsultasi dan hasil konsultasi publik), laporan diseminasi kebijakan, dan uji coba kebijakan.

- 03.03. Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan pembiayaan dan desentralisasi

- kesehatan meliputi sosialisasi/ penyebarluasan kebijakan (daftar konsultasi dan hasil konsultasi publik), laporan diseminasi kebijakan, dan uji coba kebijakan.
- 03.04. Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang Diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan meliputi sosialisasi/penyebarluasan kebijakan (daftar konsultasi dan hasil konsultasi publik), laporan diseminasi kebijakan, dan uji coba kebijakan.
04. Integrasi dan Sinergi Kebijakan Kesehatan
- 04.01. Integrasi dan Sinergi Kebijakan Upaya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan kesehatan (adopsi kebijakan) di bidang upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan.
- 04.02. Integrasi dan Sinergi Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan kesehatan (adopsi kebijakan) di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
- 04.03. Integrasi dan Sinergi Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan kesehatan (adopsi kebijakan) di bidang pembiayaan dan desentralisasi kesehatan.
- 04.04. Integrasi dan Sinergi Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan kesehatan (adopsi kebijakan) di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan.
05. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan
- 05.01. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Upaya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan kesehatan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan meliputi laporan hasil pemantauan kebijakan, perencanaan evaluasi kebijakan, surat keputusan pembentukan tim evaluasi kebijakan, dokumen rencana kerja evaluasi kebijakan, dan survei evaluasi kebijakan.
- 05.02. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan kesehatan di bidang ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan meliputi laporan hasil pemantauan kebijakan, perencanaan evaluasi kebijakan, surat keputusan pembentukan tim evaluasi kebijakan, dokumen rencana kerja evaluasi kebijakan, dan survei evaluasi kebijakan.
- 05.03. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan kesehatan di bidang pembiayaan dan desentralisasi kesehatan meliputi laporan hasil

pemantauan kebijakan, perencanaan evaluasi kebijakan, surat keputusan pembentukan tim evaluasi kebijakan, dokumen rencana kerja evaluasi kebijakan, dan survei evaluasi kebijakan.

- 05.04. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan kesehatan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan meliputi laporan hasil pemantauan kebijakan, perencanaan evaluasi kebijakan, surat keputusan pembentukan tim evaluasi kebijakan, dokumen rencana kerja evaluasi kebijakan, dan survei evaluasi kebijakan.

**DP. PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN**

01. Fasilitasi produksi dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan
- 01.01. Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Spesialis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program bantuan biaya pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis yang meliputi rekrutmen peserta, penjajakan kerja sama, pemberian bantuan biaya pendidikan, pengembalian peserta didik, penyiapan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 01.02. Program Bantuan Biaya Pendidikan SDM Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program bantuan biaya pendidikan untuk pendidikan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi rekrutmen peserta, penjajakan kerjasama, pemberian bantuan biaya pendidikan, pengembalian peserta didik, penyiapan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 01.03. Program Afirmasi Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program afirmasi pendidikan untuk dokter dan dokter gigi yang meliputi rekrutmen peserta, penjajakan kerjasama, pemberian bantuan biaya pendidikan, pengembalian/penempatan peserta didik, penyiapan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 01.04. Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program afirmasi pendidikan untuk tenaga kesehatan yang meliputi rekrutmen peserta, penjajakan kerjasama, pemberian bantuan biaya pendidikan, pengembalian/penempatan peserta didik, penyiapan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 01.05. Penyiapan Program Studi Pendidikan Tinggi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kajian pembukaan atau penutupan prodi pendidikan bidang kesehatan, dan penetapan kuota mahasiswa pendidikan tinggi bidang kesehatan.
- 01.06. Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Tinggi Kesehatan  
Naskah-Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan program studi pendidikan tinggi kesehatan meliputi bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- 01.07. Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Naskah-Naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di tingkat pusat.
- 01.08. Program pemenuhan dan pemerataan tenaga dokter melalui pendidikan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program *Academic Health System* (AHS) dan Dokter Layanan Primer dalam rangka pemenuhan tenaga dokter di pelayanan kesehatan meliputi penyusunan NSPK, sosialisasi, pembuatan *roadmap* implementasi, pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kerjasama dengan *stakeholders*.
02. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan Industri dan Dunia Kerja
- 02.01. Penyelenggaraan Penyelarasan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan Industri dan Dunia Kerja  
Naskah-Naskah yang berkaitan dengan integrasi fungsional penyelenggaran pendidikan tinggi bidang kesehatan dengan pengguna (*stakeholder*), kerjasama pendidikan tinggi dengan penyelenggara pelayanan kesehatan, dan industri dan dunia kerja, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 02.02. Penyiapan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan atau Industri dan Dunia Kerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemagangan dosen atau tenaga kependidikan di fasilitas pelayanan kesehatan atau lokasi lain yang dibutuhkan dalam penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan atau industri dan dunia kerja, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
03. Penyiapan Cadangan Tenaga Kesehatan dalam Situasi Khusus
- 03.01. Penyiapan Tenaga Kesehatan Cadangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan identifikasi, pendaftaran atau registrasi tenaga kesehatan cadangan.
- 03.02. Mobilisasi Tenaga Kesehatan Cadangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan mobilisasi tenaga kesehatan cadangan.
- 03.03. Pembinaan Tenaga Kesehatan Cadangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan tenaga kesehatan cadangan meliputi bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan hal lainnya yang diperlukan.
04. Fasilitasi Pembinaan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Milik Kementerian Kesehatan Terkait Bidang Penyediaan Tenaga Kesehatan
- 04.01. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan  
Naskah-naskah yang berkaitan fasilitasi penyusunan kurikulum, bahan ajar, pengembangan metode

- pembelajaran, pelaksanaan program kerja sama detasering, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta hal lainnya terkait penyelenggaraan pendidikan.
- 04.02. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan antara lain pengembangan program studi, rintisan kelas internasional, Pusat Unggulan IPTEK Poltekkes Kemenkes (PUI-PK), *Center of Excellence* (CoE), *Inter-Professional Education* (IPE), *Inter-Professional Collaboration* (IPC), *Recognize Prior Learning* (RPL) dan lainnya.
- 04.03. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tingkat Pusat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat tingkat pusat.
- 04.04. Peningkatan Kapasitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemilihan dosen/mahasiswa berprestasi dan peningkatan kapasitas mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
05. Fasilitasi Penjaminan Mutu Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan
- 05.01. Fasilitasi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi penyusunan atau pengembangan standar-standar penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan termasuk prasarana dan sarana.
- 05.02. Fasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi sinkronisasi pangkalan data pendidikan tinggi, *tracer study*, pembinaan sistem penjaminan mutu, dan akreditasi.
- 05.03. Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi uji kompetensi pendidikan tinggi bidang kesehatan tingkat pusat, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
06. Fasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
- 06.01. Fasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian dan penetapan pengelolaan angka kredit, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional bidang pendidikan tinggi tenaga kesehatan.

#### FH. KETAHANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

01. Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produk Biologi Dalam Negeri
- 01.01. Bahan Baku Fitofarmaka Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan baku fitofarmaka dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi dengan petani fitofarmaka, fasilitasi pengembangan

- produksi, peningkatan penggunaan bahan baku fitofarmaka dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.02. **Sediaan Fitofarmaka Dalam Negeri**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sediaan fitofarmaka dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi dengan petani fitofarmaka, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan bahan baku fitofarmaka dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.03. **Bahan Baku Produk Biologi Dalam Negeri**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan baku produk biologi dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi dengan petani fitofarmaka, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan bahan baku fitofarmaka dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.04. **Sediaan Produk Biologi Dalam Negeri**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sediaan produk biologi dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi dengan petani fitofarmaka, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan bahan baku fitofarmaka dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.05. **Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produk Biologi Dalam Negeri**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi bahan baku dan sediaan fitofarmaka dan produk biologi dalam negeri.
02. **Bahan Baku dan Sediaan Vaksin Dalam Negeri**
- 02.01. **Bahan Baku Dalam Negeri**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan baku dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan bahan baku vaksin dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 02.02. **Sediaan Vaksin Dalam Negeri**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sediaan vaksin dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan bahan baku vaksin dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 02.03. **Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku dan Sediaan Vaksin Dalam Negeri**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi bahan baku dan sediaan vaksin dalam negeri.

03. Alat Kesehatan Diagnostik *In-Vitro* Dalam Negeri
- 03.01. Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alat kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 03.02. Alat Kesehatan Diagnostik *In-Vitro* Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 03.03. Uji Klinik Alat Kesehatan Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan uji klinik alat kesehatan dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 03.04. Pemantauan dan Evaluasi Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi alat kesehatan.
04. Bahan Baku Obat Kimia dan Obat Kimia Dalam Negeri
- 04.01. Sediaan Farmasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sediaan farmasi meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan penggunaan sediaan obat kimia dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 04.02. Bahan Baku Obat Kimia Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan baku obat kimia dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan penggunaan bahan baku obat kimia dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 04.03. Obat Kimia Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan obat kimia dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pemetaan kebutuhan, fasilitasi kerja sama antara industri farmasi, fasilitasi pengembangan produksi, peningkatan penggunaan penggunaan obat kimia dalam negeri, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 04.04. Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku Obat Kimia dan Obat Kimia Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi bahan baku obat kimia dan obat kimia dalam negeri.

05. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Alat Kesehatan dan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri
- 05.01. Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tingkat komponen dalam negeri alat kesehatan dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 05.02. Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi.
- 05.03. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi tingkat komponen dalam negeri alat kesehatan dan penggunaan alat kesehatan dalam negeri.

#### FK. PENGAWASAN ALAT KESEHATAN

01. Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Produksi
- 01.01. Audit Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit audit cara pembuatan alat kesehatan yang baik sarana produksi alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
- 01.02. Audit Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit cara pembuatan perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik, sarana produksi perbekalan kesehatan rumah tangga.
- 01.03. Verifikasi Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses verifikasi sertifikasi cara pembuatan alat kesehatan yang baik.
- 01.04. Verifikasi Sertifikasi Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses verifikasi sertifikasi cara pembuatan perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik.
- 01.05. Pengawasan *Post-Market* Sarana Produksi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan sarana produksi alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
02. Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Distribusi
- 02.01. Audit Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik  
Naskah-naskah yang berkaitan audit Audit cara distribusi alat kesehatan yang baik sarana distribusi alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
- 02.02. Verifikasi Sertifikasi Audit Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik  
Naskah-naskah yang berkaitan proses verifikasi sertifikasi cara distribusi alat kesehatan yang baik.

- 02.03. Pengawasan Post-Market Sarana Distribusi  
Naskah-naskah yang berkaitan pengawasan sarana distribusi alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
03. Pengawasan Produk
- 03.01. Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan alat kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 03.02. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 03.03. Pengawasan Iklan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan iklan.
- 03.04. Kejadian Tidak Diinginkan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan laporan kejadian tidak diinginkan.
- 03.05. Pengawasan Vigilans  
Naskah-naskah yang berkaitan pengawasan *vigilans* alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro*.
04. Pembakuan dan Pengujian
- 04.01. Standar Pengawasan Produk  
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan standar pengawasan produk alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 04.02. Standar Nasional Indonesia  
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan rancangan standar nasional indonesia alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro* meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 04.03. Standar Pengawasan Sarana Produksi  
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan standar pengawasan sarana produksi alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 04.04. Standar Pengawasan Sarana Distribusi  
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan standar pengawasan sarana distribusi alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in-vitro* meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 04.05. Standar Sistem Manajemen Mutu  
Naskah-naskah yang berkaitan perumusan standar sistem manajemen mutu alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi.

05. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan (Wasmatlitrik) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 05.01. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penyidikan  
Naskah-naskah yang berkaitan tindak lanjut hasil pengawasan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in-vitro* dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan/atau penyidikan dugaan pelanggaran bidang alat kesehatan.
- 05.02. Penanganan Pengaduan Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan penanganan keluhan masyarakat terkait produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar, sertifikasi, sarana produksi, dan sarana distribusi.
- 05.03. Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
Naskah-naskah yang berkaitan komunikasi informasi dan edukasi untuk penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang benar sebagai pemberdayaan masyarakat.
- 05.04. Sistem Informasi Penyidikan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan pengelolaan sistem informasi penyidikan dan penanganan pengaduan masyarakat.

06. Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan

- 06.01. Pengawasan Bidang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan pengawasan bidang kesehatan meliputi pelaksanaan dan laporan.
- 06.02. Penyidikan Bidang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan Penyidikan Bidang Kesehatan meliputi pelaksanaan penyidikan dan laporan hasil penyidikan.

**FP. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN**

01. Sertifikasi dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi
- 01.01. Produksi dan Distribusi Kefarmasian di bidang Obat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi kefarmasian di bidang obat meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.02. Izin Pedagang Besar Farmasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan izin pedagang besar farmasi meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, dan rekomendasi.
- 01.03. Izin Industri Farmasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan izin industri farmasi meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, dan rekomendasi.
02. Pengendalian Harga dan Pemantauan Pasar obat
- 02.01. Harga Obat Katalog  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harga obat katalog meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.

- 02.02. Harga Obat Generik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harga obat generik meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 02.03. Harga Obat Program Khusus  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harga obat program khusus meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 02.04. Pasar Obat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pasar obat meliputi perencanaan, prosedur, pemantauan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 02.05. Pasar Perbekalan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pasar perbekalan kesehatan meliputi perencanaan, prosedur, pemantauan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 02.06. E-Logistik Obat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan e-logistik obat meliputi perencanaan, prosedur, pemantauan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 02.07. E-Monev Obat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan e-monev obat meliputi perencanaan, prosedur, pemantauan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
03. Penilaian Farmakoekonomi
- 03.01. Kebijakan di bidang Farmakoekonomi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan farmakoekonomi meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 03.02. Peningkatan Kapasitas SDM bidang Farmakoekonomi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang farmakoekonomi meliputi seminar, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.
- 03.03. Implementasi Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan implementasi analisis farmakoekonomi di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pelaksanaan dan laporan.
04. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan *Special Access Scheme*
- 04.01. Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Narkotika  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi di bidang obat narkotika meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 04.02. Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Psikotropika  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi di bidang obat psikotropika meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.

- 04.03. Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Prekursor Farmasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi di bidang obat prekursor farmasi meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 04.04. Perizinan di bidang Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perizinan di bidang obat narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
05. Seleksi Fitofarmaka dan Pembinaan Industri dan Usaha Obat Tradisional
- 05.01. Produksi dan Distribusi Industri di bidang Obat Tradisional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi industri di bidang obat tradisional meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 05.02. Produksi dan Distribusi Industri di bidang Kosmetika  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi industri di bidang kosmetika meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.

#### FR. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

01. Penyusunan Standardisasi
- 01.01. Standardisasi Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi alat kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.02. Standardisasi Produk Diagnostik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi produk diagnostik meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.03. Standardisasi Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi produk perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.04. Standardisasi Pengembangan Produk Mandiri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi pengembangan produk mandiri meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.05. Harmonisasi Regulasi Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan harmonisasi regulasi alat kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.
- 01.06. Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasukan alat kesehatan melalui jalur khusus (*Special Access Scheme*) meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.

02. Klarifikasi

- 02.01. Klarifikasi Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Klarifikasi Izin Edar Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi rapat klarifikasi dan rekomendasi.
- 02.02. Double Keagenan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Double Keagenan meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi.

03. Perizinan

- 03.01. Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan izin edar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, dan rekomendasi.
- 03.02. Surat keterangan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan surat keterangan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, dan rekomendasi.
- 03.03. Rekomendasi Persetujuan Impor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rekomendasi persetujuan impor meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, dan rekomendasi.
- 03.04. Persetujuan Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persetujuan iklan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, dan rekomendasi.
- 03.05. Persetujuan Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persetujuan pemasukan alat kesehatan melalui jalur khusus (*Special Access Scheme*) meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, dan rekomendasi.
- 03.06. Izin Distribusi Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Izin Distribusi Alat kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, dan rekomendasi.

FY. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN

01. Seleksi Obat

- 01.01. Formularium Nasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan formularium nasional meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 01.02. Formularium Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan formularium haji meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.03. Daftar Obat Esensial Nasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan daftar obat esensial nasional meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
02. Perencanaan Kebutuhan Obat dan *Digital Inventory*
- 02.01. Perencanaan Kebutuhan Obat Perbekalan Kesehatan dan Vaksin untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan obat perbekalan kesehatan dan vaksin untuk program jaminan kesehatan nasional dan haji meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dan *Digital Inventory*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan kebutuhan obat dan *digital inventory* meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Sistem Informasi Perencanaan Kebutuhan Obat dan *Digital Inventory*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi perencanaan kebutuhan obat dan *digital inventory* meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, prosedur, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, evaluasi, dan pemantauan.
03. Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah
- 03.01. Tata Kelola Obat *Buffer Stock* Provinsi dan Nasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola obat *buffer stock* provinsi dan nasional meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Tata Kelola Obat Program dan Pelayanan Kesehatan Dasar  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola obat program dan pelayanan kesehatan dasar meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Kebijakan Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan instalasi farmasi pemerintah meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.04. Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat *Buffer Stock* dan Obat Program  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan evaluasi ketersediaan obat *buffer stock* dan obat program di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Puskesma.

04. Pengendalian Ketersediaan Vaksin

04.01. Vaksin

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan vaksin meliputi vaksin baru, vaksin reguler, vaksin hepatitis, vaksin infulenza dan vaksin haji/umroh.

04.02. *Auto Disable Syringe (ADS) dan Safety Box*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan ADS dan *Safety Box*.

04.03. Reagen

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan reagen meliputi reagen *screening* darah dan reagen campak.

04.04. Kebijakan Pengendalian Ketersediaan Vaksin

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian ketersediaan vaksin meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

04.05. Data dan Evaluasi Ketersediaan Vaksin

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan evaluasi ketersediaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas.

05. Pengendalian Ketersediaan Obat

05.01. Obat Program Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan obat program kesehatan meliputi obat *buffer stock* pusat, bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB), obat penyakit menular, obat filariasis, obat *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) dan Penyakit Menular Seksual (PMS), obat malaria, obat *Tuberculosis* (TBC) paru, obat dan perbekalan kesehatan haji, obat kesehatan ibu, obat kesehatan anak, obat gizi, obat kesehatan jiwa, obat Poliklinik Kementerian Kesehatan, obat Operasi Surya Baskara Jaya dan obat hepatitis.

05.02. Kebijakan Pengendalian Ketersediaan Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian ketersediaan obat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

05.03. Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan evaluasi ketersediaan obat program di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas.

06. Farmasi Manajemen dan Farmasi Klinis

06.01. Kebijakan Farmasi Manajemen dan Farmasi Klinis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan farmasi manajemen dan farmasi klinis meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

06.02. Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggara sistem elektronik farmasi dan pengelolaan aplikasi perizinan penyelenggara sistem elektronik farmasi.

06.03. Sistem Informasi Pelayanan Kefarmasian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi pelayanan kefarmasian meliputi manajemen data, pemantauan, pembinaan dan pengawasan fasilitas

- 06.04. kefarmasian melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (SIMONA).  
Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan *center of excellence* pelayanan kefarmasian meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
07. Evaluasi Penggunaan Obat Rasional  
07.01. Kebijakan Pengendalian dan penggunaan Obat Rasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengendalian penggunaan obat rasional meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 07.02. Promosi dan Edukasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Informasi, Edukasi dan Pelaporan Pelaksanaan Promosi dan Edukasi Masyarakat Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) melalui Sistem Informasi GeMa CerMat (SIGECE).
- 07.03. Pemantauan dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan, pemantauan dan evaluasi obat esensial untuk penanganan penyakit prioritas.

#### GM. GIZI MASYARAKAT

01. Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi  
01.01. Pedoman Gizi Seimbang  
Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman gizi seimbang meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Pemberian Makanan Bayi dan Anak  
Naskah-naskah yang berisi tentang pemberian makanan bayi dan anak, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.03. Hari Gizi Nasional  
Naskah-naskah yang berisi tentang hari gizi nasional meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 01.04. Pelayanan Gizi Masyarakat  
Naskah-naskah yang berisi tentang pelayanan gizi masyarakat meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
02. Kewaspadaan Gizi  
02.01. Standar Antropometri  
Naskah-naskah yang berisi tentang standar antropometri meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Pemantauan Konsumsi Gizi  
Naskah-naskah yang berisi tentang pemantauan konsumsi gizi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 02.03. Pemberian Gizi dalam Kegiatan Bencana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan gizi dalam kegiatan bencana meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.04. Pemantauan Status Gizi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan status gizi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.05. Jaringan Informasi Pangan dan Gizi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jaringan informasi pangan dan gizi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
03. Penanggulangan Masalah Gizi
- 03.01. *Stunting/ pendek*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan gizi *stunting/ pendek* meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Manajemen Taburia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan manajemen taburia dalam penanggulangan masalah gizi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Suplementasi Gizi Tablet Tambah Darah dan Vitamin A.  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan suplementasi gizi tablet tambah darah dan Vitamin A dalam bidang penanggulangan masalah gizi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.04. *Buffer Stock Makanan Pendamping*  
Naskah-naskah yang berkaitan *buffer stock* MPASI, Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil dan Anak Sekolah dalam penanggulangan masalah gizi.
04. Pengelolaan Konsumsi Gizi
- 04.01. Pelayanan Gizi di Puskesmas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan gizi di puskesmas dalam pengelolaan konsumsi gizi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.02. Pelayanan Gizi di Rumah Sakit  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan gizi di rumah sakit dalam pengelolaan konsumsi gizi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.03. Pekan Air Susu Ibu (ASI) Sedunia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pekan air susu ibu sedunia dalam bidang pengelolaan konsumsi gizi meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 04.04. Gizi Buruk  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan gizi buruk dalam bidang pengelolaan konsumsi gizi meliputi

penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

#### HJ. KESEHATAN HAJI

##### 01. Pelayanan Kesehatan Haji

- 01.01. Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan haji, meliputi penyiapan obat, vaksin dan alat kesehatan serta penyusunan rencana operasional, kontensi dan mitigasi kesehatan.
- 01.03. Pelatihan Petugas Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan kompetensi dan integrasi petugas meliputi Tenaga Kesehatan Haji (TKH), Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH), Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK).

##### 02. Surveilans Kesehatan Haji

- 02.01. Surveilans Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans kesehatan haji meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Analisis Data Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan analisis data kesehatan jemaah haji dan penyusunan profil kesehatan haji.

##### 03. Strategi Pengembangan Kesehatan Haji

- 03.01. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis dan rekomendasi kebijakan kesehatan haji meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, evaluasi, dan rekomendasi.
- 03.02. Petunjuk Teknis/Standar Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan petunjuk teknis/standar kesehatan haji serta pengembangan kurikulum dan modul pelatihan petugas kesehatan haji meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Petugas Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan petugas kesehatan haji meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

##### 04. Pengendalian Risiko dan Promosi Kesehatan Haji

- 04.01. Program Manasik Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berisiko dengan program manasik kesehatan haji meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 04.02. Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan seperti pembuatan media promosi kesehatan dan pembimbingan kesehatan haji dalam peningkatan kebugaran kesehatan haji.
- 04.03. Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian faktor risiko kesehatan haji meliputi pemeriksaan jasa boga katering jemaah haji, vaksinasi jamaah haji dan sanitasi asrama haji.

05. Sistem Informasi dan Publikasi

- 05.01. Informasi dan Publikasi Kesehatan haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (SISKOHATKES), telejemaah, telepetugas, DAFTARIN, website dan media massa serta persiapan bahan presentasi pimpinan meliputi penyusunan aplikasi, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.02. Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rekrutmen petugas kesehatan haji meliputi tenaga kesehatan haji, panitia penyelenggaraan ibadah haji, tenaga pendukung kesehatan.

IM. IMUNISASI

01. Imunisasi Dasar dan Bayi di Bawah Dua Tahun (Baduta)
- 01.01. Imunisasi Hepatitis B0 (HB0), Bacillus Calmette-Guérin (BCG), Polio (Oral Polio Vaccine (OPV), Inactivated Polio Vaccine (IPV)), Difteri Pertusis Tetanus (DPT)-Hepatitis B (HB), Haemophilus Influenzae type B (HiB), MR, JE Bayi di Bawah Dua Tahun, Human Papiloma Virus (HPV), dan Rotavirus  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Imunisasi Hepatitis B0 (HB0), Bacillus Calmette-Guérin (BCG), Polio (Oral Polio Vaccine (OPV), Inactivated Polio Vaccine (IPV)), Difteri Pertusis Tetanus (DPT)-Hepatitis B (HB), Haemophilus Influenzae type B (HiB), MR, JE Bayi di Bawah Dua Tahun, Human Papiloma Virus (HPV), dan Rotavirus meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Pekan Imunisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pekan imunisasi baik nasional maupun internasional.
- 01.03. Data Imunisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data imunisasi.
02. Imunisasi Tambahan dan Khusus
- 02.01. Imunisasi Tambahan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi tambahan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 02.02. Imunisasi Antigen Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi antigen baru meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Imunisasi Respons Kejadian Luar Biasa  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Imunisasi respons kejadian luar biasa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.04. Imunisasi Khusus Imunisasi Khusus untuk Jemaah Haji/Umroh  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi khusus untuk Jemaah Haji/Umroh meliputi Imunisasi Khusus untuk Jemaah Haji/Umroh meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.05. Imunisasi Coronavirus Disease-19 (COVID-19)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Coronavirus Disease-19 (COVID-19) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
03. Imunisasi Wanita Usia Subur (WUS), Surveilans PD3I dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
- 03.01. Imunisasi WUS  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan imunisasi wanita usia subur meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Surveilans Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, hepatitis b, pertusis, difteri, haemophilus influenza, campak dan tetanus meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
04. Imunisasi Usia Sekolah dan Sumber Daya Imunisasi
- 04.01. Imunisasi Anak Sekolah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Imunisasi bagi anak usia sekolah meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.02. Sumber Daya Manusia Imunisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, workshop, webinar dan lain-lain bagi sumber daya imunisasi.
- 04.03. Logistik Imunisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data penyimpanan, distribusi logistik imunisasi, laporan, dan evaluasi.

- 04.04. Sistem Informasi Imunisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi imunisasi meliputi penyusunan aplikasi, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.05. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan lintas sektor dan lintas program meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi

#### JP. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

01. Pembiayaan
- 01.01. *National Health Account (NHA)/Provincial Health Account (PHA)/District Health Account (DHA)*  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan NHA/PHA/DHA berupa persiapan, pelaksanaan, pendampingan bagi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, laporan, diseminasi pada unit terkait, dan rekomendasi.
- 01.02. Analisis Biaya Kesehatan  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perhitungan biaya pelayanan kesehatan (*costing*), perhitungan kebutuhan satuan biaya kesehatan perorangan dan masyarakat, berupa persiapan, pelaksanaan, laporan, advokasi, dan rekomendasi.
02. Jaminan Kesehatan
- 02.01. Kepesertaan  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi perhitungan data kepesertaan, penataan kepesertaan, rekonsiliasi dengan kementerian terkait, laporan dan rekomendasi.
- 02.02. Iuran  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perhitungan, kesinambungan, dan kecukupan iuran, laporan serta rekomendasi.
- 02.03. Tarif  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perhitungan tarif yaitu kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), *Indonesian Case Based Groups* (INA CBGs) bagi RS, pengembangan dan monitoring tarif, evaluasi klaim RS, penyusunan kebijakan tentang iuran biaya, laporan hasil dan rekomendasi (kebijakan), penetapan tarif (kapitasi dan INA-CBG)
- 02.04. *Clinical Advisory*  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan persiapan pertimbangan medis pelayanan JKN, pelaksanaan, pedoman, komite pelayanan medik, laporan, diseminasi, dan rekomendasi.
- 02.05. Manfaat Pelayanan  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi paket manfaat, koordinasi kendali mutu dan biaya dengan *stakeholder*, koordinasi dan fasilitasi kegiatan *Coordination of Benefit* (COB) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, laporan, dan rekomendasi.

- 02.06. Laporan Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Jaminan Kesehatan.  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan laporan pelaksanaan pembayaran tagihan Jaminan Kesehatan.
03. Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan
- 03.01. Penilaian Teknologi Kesehatan/*Health Technology Assesment* (PTK/HTA)  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan PTK/HTA berupa persiapan pemilihan topik, pelaksanaan HTA, *workshop* hasil dengan tim *ad-hoc* dan para ahli, laporan, diseminasi, dan rekomendasi.
- 03.02. Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan tata laksana skrining (deteksi awal) penyakit tidak menular pada peserta JKN, laporan, dan rekomendasi.

#### KG. KESEHATAN KELUARGA

01. Kesehatan Maternal dan Neonatal
- 01.01. Pelayanan Antenatal Terpadu  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi, deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan, penyiap persalinan yang bersih dan aman, antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan, penatalaksanaan kasus serta rujukan, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi.
- 01.02. Pelayanan Kelas Ibu Hamil  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kelas ibu hamil dalam bentuk tatap muka dan aktivitas fisik/senam ibu hamil.
- 01.03. Pencegahan Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan primer pada perempuan usia reproduksi agar tidak tertular HIV, Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan pengidap HIV, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya, pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya, sasaran semua ibu hamil risiko tertular HIV, ibu hamil dengan HIV dan bayi lahir dari ibu HIV.
- 01.04. Kemitraan Bidan dan Dukun  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan bidan dan dukun meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.05. Rumah Tunggu Kelahiran  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan,

- sasaran ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.06. Supervisi Fasilitatif  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan klinis dan manajemen secara terarah dan sistematis untuk pengelola program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), bidan koordinator dan bidan desa.
- 01.07. Audit Maternal Perinatal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran dan pengkajian penyebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal.
- 01.08. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, perencanaan penggunaan KB pasca persalinan, cakupan serta mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
- 01.09. Tanda Bahaya pada Kehamilan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.10. Surveilans Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi masalah gizi, kesehatan Ibu dan Anak, mengkaji faktor-faktor penyebab masalah, menganalisis dan menginterpretasi informasi yang terkumpul, dan bertindak sesuai hasil yang ada untuk mengurangi masalah gizi, kesehatan ibu dan anak di masa mendatang, menetapkan tingkatan dan kecenderungan, mengidentifikasi faktor risiko dan faktor penentu (*determinant factors*), mendeteksi kelompok berisiko (*red flags*), memonitor perilaku dan pelayanan kesehatan, memudahkan dalam perencanaan, mengidentifikasi pelatihan dan kebutuhan riset, serta memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program.
- 01.11. Pelayanan Kesehatan Neonatal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.12. Manajemen Asfiksia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan manajemen asfiksia pada Bayi Baru Lahir (BBL), tata laksana yang diberikan pada kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir/beberapa saat setelah lahir meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.13. Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata laksana medik yang diberikan kepada bayi yang lahir kurang dari

- 2.500 gram tanpa memandang masa kehamilan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.14. Pencegahan Infeksi Pada Proses Melahirkan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan terjadinya risiko penularan infeksi mikroorganisme dari lingkungan klien dan tenaga kesehatan, sasaran tenaga kesehatan, pasien, semua pihak yang berkontak dengan sumber infeksi.
- 01.15. Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kegawatdaruratan maternal dan neonatal meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.16. *Screening Hypothyroid Congenital*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tes yang dilakukan pada saat bayi berumur beberapa hari untuk memilah bayi yang menderita hipotiroid kongenital dari bayi yang tidak menderita hipotiroid kongenital meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.17. Kelainan Bawaan pada Janin dan Bayi Baru lahir  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan deteksi dini kelainan bawaan pada janin dan bayi baru lahir meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
02. Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah
- 02.01. Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh kembang yang dilakukan menggunakan kuesioner pra-skrining perkembangan meliputi motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, tes daya dengar, tes daya lihat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Rujukan Tumbuh Kembang  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan sistem rujukan tumbuh kembang dengan melatih tim rujukan tumbuh kembang di rumah sakit rujukan regional provinsi yang mampu melakukan intervensi gangguan tumbuh kembang sesuai level pelayanan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (*The Implementation of the Integrated Management of Childhood Illnesses (IMCI) Computerized Adaptation and Training Tools (ICATT)*).  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan berbasis komputer meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.04. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendekatan terintegrasi/terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan

- fokus kepada kesehatan anak berusia 0 – 59 bulan secara menyeluruh di unit rawat jalan fasilitas pelayanan kesehatan dasar meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.05. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.06. Buku Kesehatan Ibu dan Anak  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.07. Kohort Bayi, Kohort Anak Balita dan Anak Pra-Sekolah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kohort bayi, kohort anak balita dan anak pra-sekolah (instrumen yang digunakan untuk register perekaman data hasil pemeriksaan kesehatan bayi (0-11 bulan) dan anak balita dan pra-sekolah (12-72 bulan) yang tercatat pada kartu balita) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.08. Anak dengan Disabilitas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.09. *Knowledge Sharing Program*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *knowledge sharing program* meliputi studi komparasi pemanfaatan buku kesehatan ibu anak di beberapa negara Organisasi Konferensi Islam dengan Indonesia meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.10. Kelas Ibu Balita  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelas ibu balita dalam bentuk tatap muka yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemberian air susu ibu eksklusif, pengetahuan ibu akan pentingnya imunisasi, keterampilan ibu dalam pemberian makanan pendamping-air susu ibu dan gizi seimbang, kemampuan ibu memantau pertumbuhan dan melaksanakan stimulasi perkembangan, pengetahuan ibu cara merawat gigi dan cuci tangan yang benar serta meningkatkan pengetahuan ibu tentang penyakit terbanyak serta cara pencegahan dan perawatannya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

03. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

- 03.01. Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar nasional pelayanan kesehatan peduli remaja meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Akselarasi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Sekolah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan akselarasi pelaksanaan upaya kesehatan sekolah meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Kader Kesehatan Remaja/Konselor Sebaya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kader kesehatan remaja/konselor sebaya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.04. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan peduli remaja meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.05. Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, termasuk penjaringan (pemeriksaan kesehatan dan *screening anemia*) serta pemberian tablet tambah darah meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.06. Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.07. Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Remaja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan partisipasi anak usia sekolah dan remaja meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.08. Jejaring Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan jejaring kesehatan usia sekolah dan remaja meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

04. Kesehatan Reproduksi

- 04.01. Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.02. Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi PUS/Skrining Layak Hamil  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi bagi PUS/skrining layak hamil meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 04.03. Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Mahasiswa  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi bagi mahasiswa meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.04. Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi di tempat kerja meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.05. Pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.06. Pelayanan Infertilitas dan Kesehatan Reproduksi Lainnya  
Naskah-naskah berkaitan dengan pelayanan infertilitas dan kesehatan reproduksi lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.07. Kemitraan dan Jejaring Kesehatan Reproduksi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan dan jejaring kesehatan reproduksi meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.08. Pendampingan/Penyeliaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Reproduksi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan/penyeliaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

## 05. Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)

- 05.01. Penyelenggaraan Puskesmas santun lansia dan Pelayanan Geriatri Terpadu di Rumah Sakit.  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Puskesmas santun lanjut usia dan pelayanan geriatri terpadu di rumah sakit meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.02. Posyandu Lanjut Usia/Pelayanan Home Care/*Long Term Care* (PJP)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Lanjut Usia/pelayanan *homecare/long term care* (PJP) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.03. Kemitraan Lintas Program/Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Kesehatan Lanjut Usia.  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kemitraan lintas program/lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan lanjut usia meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi
- 05.04. *Training of Trainer* /Pelatihan/Orientasi Kesehatan Lanjut Usia  
Naskah-naskah yang terkait berkaitan dengan *Training of Trainer* /pelatihan/orientasi kesehatan lanjut usia.

- 05.05. Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan Lanjut Usia.  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan komunikasi informasi edukasi kesehatan lanjut usia *Training of Trainer* meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.06. Pendampingan/Penyeliaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Lanjut Usia.  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendampingan/penyeliaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi program kesehatan lanjut usia.
- 05.07. Data Dan Informasi Kesehatan Lanjut Usia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan informasi kesehatan lanjut usia meliputi penyusunan data dan informasi, publikasi, laporan dan evaluasi.
- 05.08. Isu Global Kesehatan Lanjut Usia  
Naskah-naskah yang terkait berkaitan dengan isu global kesehatan lanjut usia meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**06. Kesehatan Kelompok Rentan**

- 06.01. Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan bagi KtP/A dan TPPO meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 06.02. Paket Pelayanan Awal Minimal (PPAM)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan paket pelayanan awal minimal kelompok rentan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 06.03. Pelayanan Kesehatan bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi disabilitas dan kelompok rentan lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 06.04. Pengarusutamaan Gender  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 06.05. Isu-Isu Global Kelompok Rentan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan isu-isu global kelompok rentan meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**KH. KEMAHASISWAAN**

01. Penerimaan Mahasiswa Baru  
01. 01. Penerimaan Mahasiswa Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru meliputi promosi seleksi penerimaan mahasiswa baru (sipenmaru), pendaftaran mahasiswa, naskah soal tes, tes masuk, pengumuman hasil tes masuk, uji kesehatan, wawancara dan psikotes, daftar mahasiswa

- yang tidak lulus dan tidak diterima, dan registrasi mahasiswa baru.
01. 02. Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan penerimaan mahasiswa baru meliputi daftar mahasiswa yang lulus dan diterima dan penetapan peserta didik baru.
01. 03. Orientasi Mahasiswa Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan orientasi mahasiswa baru meliputi administrasi penyelenggaraan orientasi dan laporan mahasiswa dan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
01. 04. Berkas Mahasiswa  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas mahasiswa meliputi kartu mahasiswa, sertifikat/piagam/surat keterangan orientasi mahasiswa baru, surat keterangan izin/tugas, berkas pendaftaran mahasiswa, nilai tugas akhir, piagam/sertifikasi kuliah kerja nyata/kriteria ketuntasan minimal, dan biodata mahasiswa.
01. 05. Mahasiswa Asing  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan mahasiswa asing meliputi registrasi mahasiswa asing, rekomendasi kegiatan pertukaran mahasiswa, dan izin belajar, keimigrasian, izin tinggal dan laporan keberadaan mahasiswa asing.
02. Registrasi Mahasiswa
02. 01. Registrasi Administrasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan registrasi mahasiswa meliputi bukti pembayaran pendidikan.
02. 02. Registrasi Akademik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan registrasi akademik meliputi kartu rencana studi, kartu hasil studi baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama (reguler dan non reguler), dan registrasi mahasiswa di pangkalan data pendidikan tinggi.
03. Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa
- 03.01. Fasilitasi Mahasiswa  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi mahasiswa meliputi fasilitas kesehatan mahasiswa, peminjaman transportasi, kegiatan olah raga dan kesenian, sekretariat organisasi mahasiswa, bimbingan konseling, pengembangan minat bakat dan fasilitas lainnya, dan asrama.
- 03.02. Beasiswa dengan Dana Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan beasiswa dengan dana dalam negeri meliputi kegiatan penetapan penerimaan beasiswa, seleksi calon penerima beasiswa, tawaran beasiswa, dan keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- 03.03. Beasiswa dengan Dana Luar Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan beasiswa dengan dana luar negeri meliputi kegiatan penetapan penerimaan beasiswa, seleksi calon penerima beasiswa, tawaran beasiswa, dan keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT).

04. Organisasi Mahasiswa

04.01. Kegiatan Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA)/Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) yang meliputi proses pembentukan, daftar anggota dan pengangkatan pengurus.

04.02. Pelaksanaan Kegiatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa.

05. Kegiatan Mahasiswa

05.01. Kegiatan Akademik dan Non Akademik Tingkat Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan akademik dan non akademik tingkat nasional meliputi kegiatan ilmiah dan prestasi lomba mahasiswa tingkat lokal/nasional dan kegiatan lomba kegiatan mahasiswa tingkat lokal/nasional.

05.02. Kegiatan Akademik dan Non Akademik Tingkat Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik tingkat internasional meliputi kegiatan ilmiah dan prestasi lomba mahasiswa tingkat internasional, kegiatan lomba kegiatan mahasiswa tingkat internasional, sertifikat pemberian prestasi mahasiswa.

06. Status Mahasiswa

06.01. Status Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan status mahasiswa yang meliputi berkas status mahasiswa pindah program studi, berkas pengunduran diri, berkas cuti akademik mahasiswa, berkas surat pernyataan kembali kuliah, berkas dispensasi tidak mengikuti kuliah, sanksi, dan surat keterangan mahasiswa.

06.02. Penetapan Pengunduran Diri Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan pengunduran diri mahasiswa meliputi *drop out* mahasiswa dan skorsing

KI. KESEKRETARIATAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

01. Registrasi Dokter

01.01. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi dokter/dokter spesialis meliputi pengajuan permohonan registrasi sampai dengan penerbitan surat tanda registrasi dan data dukung penerbitan surat tanda registrasi dokter.

01.02. Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencabutan surat tanda registrasi dokter/dokter spesialis mulai dari pencabutan pencatatan yang melanggar kode etik profesi sampai dengan keputusan pencabutan dan data dukung pencabutan surat tanda registrasi dokter.

01.03. Penerbitan Registrasi Dokter Sementara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi sementara kepada dokter/dokter spesialis warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang

- kedokteran yang bersifat sementara di Indonesia dari pengajuan permohonan registrasi dokter sementara sampai dengan diterbitkan surat tanda registrasi.
- 01.04. Penerbitan Registrasi Dokter Bersyarat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi dokter/dokter spesialis bersyarat kepada peserta program pendidikan dokter/dokter spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia dari pengajuan permohonan registrasi dokter/dokter spesialis bersyarat sampai dengan diterbitkan surat tanda registrasi data dukung penerbitan registrasi dokter bersyarat.
- 01.05. Her Registrasi Dokter  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi ulang surat tanda registrasi dokter/dokter spesialis meliputi surat permohonan kepada ketua Konsil Kedokteran Indonesia beserta lampiran persyaratan, pertimbangan ketua divisi registrasi kedokteran dan ketua divisi pembinaan kedokteran data dukung her registrasi dokter.
02. Standar Pendidikan Profesi Dokter
- 02.01. Standar Pendidikan Profesi Dokter  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan profesi dokter meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan profesi dokter.
- 02.02. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan profesi dokter spesialis meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan profesi dokter spesialis.
- 02.03. Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan cabang ilmu kedokteran meliputi pengesahan dan penerapan kerja sama dengan kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan cabang ilmu kedokteran.
- 02.04. Standar Pendidikan Berkelanjutan Dokter  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan berkelanjutan dokter meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan berkelanjutan dokter.
- 02.05. Standar Pengesahan Standar Kompetensi Dokter  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan standar kompetensi dokter.
03. Registrasi Kedokteran Gigi
- 03.01. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis meliputi pengajuan permohonan registrasi sampai dengan penerbitan surat

- tanda registrasi dan data dukung penerbitan surat tanda registrasi dokter gigi.
- 03.02. **Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencabutan surat tanda registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis mulai dari pencabutan pencatatan yang melanggar kode etik profesi sampai dengan keputusan pencabutan dan data dukung pencabutan surat tanda registrasi dokter gigi.
- 03.03. **Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Sementara**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi sementara kepada dokter gigi/dokter gigi spesialis warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan dibidang kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia meliputi dari pengajuan permohonan registrasi dokter sementara sampai dengan diterbitkan surat tanda registrasi dan data dukung penerbitan surat tanda registrasi dokter gigi sementara.
- 03.04. **Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Bersyarat**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis bersyarat kepada peserta program pendidikan dokter gigi/dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia dari pengajuan permohonan registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis bersyarat sampai dengan diterbitkan surat tanda registrasi dan data dukung penerbitan surat tanda registrasi dokter gigi bersyarat.
- 03.05. **Her Registrasi Dokter Gigi**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian registrasi ulang surat tanda registrasi dokter gigi/dokter gigi spesialis meliputi surat permohonan kepada ketua konsil kedokteran indonesia beserta lampiran persyaratananya, pertimbangan ketua divisi registrasi kedokteran gigi dan ketua divisi pembinaan kedokteran gigi dan data dukung her registrasi dokter gigi.
- 04. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi**
- 04.01. **Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan profesi dokter gigi meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan profesi dokter gigi.
- 04.02. **Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran gigi spesialis, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis.
- 04.03. **Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan cabang ilmu kedokteran gigi pengesahan dan penerapan kerja sama dengan kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi

- pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan cabang ilmu kedokteran gigi.
- 04.04. Standar Pendidikan Berkelanjutan Dokter Gigi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penerbitan standar pendidikan berkelanjutan dokter gigi meliputi pengesahan kerja sama dengan kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi RS pendidikan dalam rangka pengesahan standar pendidikan berkelanjutan dokter gigi.
- 04.05. Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan standar kompetensi dokter gigi.
05. Pembinaan Praktik
- 05.01. Pembinaan Praktik Dokter  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan praktik dokter yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi melalui monitoring, evaluasi dan pelaksanaan registrasi dokter.
- 05.02. Pembinaan Praktik Dokter Gigi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan praktik dokter gigi yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi melalui monitoring, evaluasi dan pelaksanaan registrasi dokter gigi.
06. Pelayanan Hukum
- 06.01. Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan awal untuk menentukan jenis kasus atau pelanggaran disiplin kedokteran.
- 06.02. Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran Gigi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan awal untuk menentukan jenis kasus atau pelanggaran disiplin kedokteran gigi.
- 06.03. Persidangan Pemeriksaan Kedokteran  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan investigasi terhadap dokter atau dugaan adanya pelanggaran kode etik kedokteran atau pelanggaran disiplin kedokteran sampai dengan surat keputusan persidangan.
- 06.04. Persidangan Pemeriksaan Kedokteran Gigi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan investigasi terhadap dokter gigi atau dugaan adanya pelanggaran kode etik kedokteran gigi atau pelanggaran disiplin kedokteran meliputi surat pemberitahuan sampai dengan surat keputusan persidangan.
- 06.05. Tindak Lanjut/Eksekusi Keputusan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindakan penentuan eksekusi yang berupa teguran, pencabutan surat tanda registrasi atas kasus yang telah ditetapkan.

## KJ. KESEHATAN JIWA

### 01. Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan

- 01.01. Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan di Institusi  
Naskah-naskah terkait promosi kesehatan jiwa dan kemitraan di institusi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan di Organisasi Lainnya  
Naskah-naskah terkait promosi kesehatan jiwa dan kemitraan di organisasi lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

### 02. Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa

- 02.01. Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus dan atau Disabilitas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa pada anak dan remaja berkebutuhan khusus dan atau penyandang disabilitas meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Usia Sekolah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa pada usia sekolah dan remaja meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja dalam Penanganan Masalah Kasus Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa pada anak dan remaja dalam penanganan dampak kekerasan perundungan, adiksi, dan masalah kesehatan jiwa anak dan remaja lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.04. Penjangkauan Pelayanan dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa melalui Kesehatan Jiwa Bergerak  
Naskah-naskah yang berkaitan dalam bidang penjangkauan pelayanan dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa pada masyarakat melalui kesehatan jiwa bergerak (MMHS) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.05. Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa  
Naskah-naskah yang berkaitan dalam pencegahan kasus bunuh diri, demensia, alzheimer dan masalah kesehatan jiwa pada perempuan, Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil (Bumil), Ibu Bersalin (Bulin) dan Ibu Nifas (Bufas) serta masalah kesehatan jiwa lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

### 03. Tata Kelola Gangguan Jiwa

- 03.01. Kasus Gangguan Jiwa Berat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus gangguan jiwa berat antara lain schizophrenia, gangguan bipolar, depresi berat, kasus pasung dan lain-lain meliputi penyusunan

- kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Kasus Gangguan Jiwa Ringan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus gangguan jiwa antara lain kecemasan, depresi ringan, dan lain-lain meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Kegawatdaruratan Kesehatan Jiwa pada Situasi Krisis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan situasi kegawatdaruratan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
04. Masalah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)
- 04.01. Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan NAPZA di institusi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.02. Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan NAPZA di masyarakat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.03. Upaya Promotif NAPZA  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan promotif NAPZA meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.04. Upaya Preventif NAPZA  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan preventif NAPZA meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.05. Upaya Kuratif NAPZA  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan kuratif NAPZA meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.06. Upaya Rehabilitatif NAPZA  
Naskah naskah yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan rancangan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitatif NAPZA meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
05. Surveilans Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 05.01. Surveilans Kesehatan Jiwa dan NAPZA  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans kesehatan jiwa meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.

- 05.02. Sistem Informasi Kesehatan Jiwa  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan jiwa meliputi penyusunan aplikasi, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.03. Pembinaan dan Advokasi Kesehatan Jiwa dan NAPZA  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan advokasi kesehatan jiwa dan NAPZA meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
06. Hari Besar Kesehatan Jiwa
- 06.01. Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan hari kesehatan jiwa sedunia meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 06.02. Peringatan Hari Besar Kesehatan Jiwa Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan hari peduli autisme sedunia, hari pencegahan bunuh diri sedunia, hari alzheimer sedunia meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
07. Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Kader terkait Kesehatan Jiwa
- 07.01. Anak dan Remaja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan tenaga kesehatan dan kader terkait kesehatan jiwa pada anak dan remaja termasuk penyusunan akreditasi.
- 07.02. Dewasa dan Lansia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan tenaga kesehatan dan kader terkait kesehatan jiwa pada usia dewasa dan lansia termasuk penyusunan akreditasi.
- 07.03. Penanganan Gangguan NAPZA  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan tenaga kesehatan dan kader terkait penanganan gangguan NAPZA termasuk penyusunan akreditasi.

#### KK. PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

01. Norma Standar Prosedur Kriteria Penanggulangan Krisis Kesehatan
- 01.01. Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan pencegahan dan mitigasi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Ketahanan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan ketahanan kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.03. Tanggap Darurat dan Tim Kegawatdaruratan Medis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan dan pedoman tanggap darurat serta kegawatdaruratan medis meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 01.04. Evaluasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan terkait evaluasi, rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.05. Kerja Sama *United Nations* dan Kemitraan Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan terkait kerja sama *United Nations* dan kemitraan lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.06. Pengelolaan Data dan Informasi Pemantauan Krisis Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan dan penyusunan buku-buku tinjauan serta buku profil meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.07. Revitalisasi Gudang Regional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan gudang meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.08. Logistik Kesehatan dan Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi perencanaan Logistik dan Barang Milik Negara meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
02. Bimbingan, Informasi, Evaluasi dan Koordinasi
- 02.01. Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan prakrisis kesehatan dan koordinasi pentahelix, asistensi pengelolaan krisis kesehatan, *workshop*, rencana kontingensi dan peta risiko untuk pengurangan risiko krisis kesehatan, penyusunan kajian pengelolaan krisis kesehatan akibat bencana, penyusunan laporan pengelolaan krisis kesehatan untuk pimpinan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas, dan laporan rutin kesiapsiagaan.
- 02.02. Ketahanan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *workshop* untuk ketahanan kesehatan, dan simulasi pengelolaan krisis kesehatan, dan laporan rutin Ketahanan Kesehatan.
- 02.03. Tanggap Darurat dan Tim Kegawatdaruratan Medis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan tanggap darurat, kaji cepat kesehatan, kegawatdaruratan medis, pelatihan-pelatihan Tim, dan fasilitasi kegiatan pendampingan kaji cepat bidang kesehatan, dan laporan rutin tanggap darurat dan kegawatdaruratan medis. Koordinasi yang berkaitan mobilisasi tim kegawatdaruratan medis, relawan, dan logistik kesehatan.
- 02.04. Evaluasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi tanggap darurat krisis kesehatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan laporan rutin Evaluasi, Rehabilitasi,

- dan Rekonstruksi, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, fasilitasi kegiatan pendampingan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan, serta penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 02.05. Kerja Sama *United Nations* dan Kemitraan Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan, pemantauan dan evaluasi, dan laporan rutin Kerja Sama *United Nations* dan Kemitraan Lainnya, lembaga di bawah United Nations (WHO dan UNICEF dan Kemitraan Lainnya), memfasilitasi pelaksanaan program-program kerja yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.
- 02.06. Pengelolaan Data dan Informasi, Pemantauan Krisis Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring data dan informasi, Membuat dan mengelola *website* dan media sosial, pemantauan informasi, Sistem Informasi Pengelolaan Krisis Kesehatan, pemantauan dan evaluasi, *Workshop* Sistem Informasi Penanggulangan Krisis.
- 02.07. Revitalisasi Gudang Regional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan, pemantauan serta pembukuan logistik kesehatan di 10 PPK Regional di luar DKI Jakarta, serta pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas dan laporan rutin Revitalisasi Gudang Regional.
- 02.08. Logistik Kesehatan dan Barang Milik Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan serta pembukuan, pemantauan logistik kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, penerimaan donasi logistik kesehatan, pendistribusian donasi logistik kesehatan, pencatatan penerimaan dan distribusi logistik kesehatan, penyusunan berita acara/berita acara sementara penerimaan dan distribusi logistik kesehatan/non-medik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan laporan rutin Logistik dan Barang Milik Negara.

#### KL. KESEHATAN LINGKUNGAN

01. Penyehatan Air, Udara, Tanah, Sanitasi Dasar dan Kawasan Lingkungan
- 01.01. Penyehatan Air  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan air meliputi pengamanan air minum dan pengawasan kualitas air minum meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Penyehatan Udara  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan sanitasi udara meliputi pengamanan udara dan pengawasan kualitas udara meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.03. Penyehatan Tanah  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan sanitasi tanah, pengamanan tanah dan pengawasan kualitas tanah meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 01.04. Penyehatan Sanitasi Dasar  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan sanitasi dasar meliputi penyediaan air minum, sanitasi berbasis masyarakat, percepatan pengembangan sanitasi pemukiman dan sanitasi sekolah meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.05. Penyehatan Kawasan  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan kawasan meliputi higiene sanitasi dan bangunan umum, pengendalian faktor risiko di rumah dan tempat umum, penanggulangan kedaruratan bidang kesehatan lingkungan, fasilitasi kesehatan masyarakat di daerah terpencil, pelabuhan sehat, bandara sehat, terminal sehat, pasar sehat dan kabupaten kota sehat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
02. Penyehatan Pangan
- 02.01. Peningkatan Higiene Sanitasi Pangan  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan higiene sanitasi pangan seperti makanan jajanan, restoran/rumah makan, jasa boga, depot air minum, kantin dan rumah tangga meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Pengawasan dan Perlindungan Higiene Sanitasi Pangan  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan perlindungan higiene sanitasi pangan meliputi makanan jajanan, restoran/rumah makan, jasa boga, depot air minum, kantin dan rumah tangga meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
03. Pengamanan Limbah dan Radiasi
- 03.01. Pengamanan Limbah  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan limbah meliputi limbah fasilitas pelayanan kesehatan, merkuri logam berat dan pengaman pestisida meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Pengamanan Radiasi  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan radiasi meliputi analisis dampak kesehatan lingkungan, radiasi pengion, radiasi non-pengion dan perubahan iklim meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
04. Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan
- 04.01. Adaptasi Perubahan Iklim  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan adaptasi perubahan iklim meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 04.02. Kebencanaan Bidang Kesehatan Lingkungan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan kebencanaan dalam bidang kesehatan lingkungan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

#### KO. KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

01. Okupasi dan surveilans kesehatan kerja
- 01.01. Kesehatan Okupasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja, pemeriksaan kesehatan pekerja, program kembali kerja, pelayanan kesehatan kerja, standar penyelenggaraan pelayanan kedokteran okupasi, petunjuk teknis pelayanan kesehatan kerja di unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dan modul *trainer of training* diagnostik Penyakit Akibat Kerja di bidang kesehatan okupasi.
- 01.02. Surveilans Kesehatan Kerja  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeriksaan calon tenaga kerja indonesia, pemeriksaan kelayakan kerja, pemeriksaan kesehatan pelaut, pelayanan kesehatan tenaga kerja indonesia di bidang surveilans kesehatan kerja.
02. Kesehatan Kerja
- 02.01. Kesehatan Kerja Formal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan kerja formal meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Kesehatan Kerja Informal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesehatan kerja informal meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
03. Kesehatan Olahraga
- 03.01. Kesehatan Olahraga Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebugaran jasmani bumi, anak sekolah, pekerja, karyawan, usia produktif, usia lanjut, dan jemaah haji di bidang kesehatan olahraga meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Kesehatan Olahraga Prestasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dukungan *event* olahraga nasional dan internasional di bidang kesehatan olahraga prestasi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

#### KT. TENAGA KESEHATAN INDONESIA

01. Fasilitas Registrasi
- 01.01. Registrasi Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mekanisme penerbitan dan pencabutan surat tanda registrasi tenaga kesehatan, kajian masalah registrasi, data surat tanda registrasi, rekonsiliasi dan validasi data surat tanda registrasi, sosialisasi surat tanda registrasi dan laporan

- kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan tenaga kesehatan dan data dukung registrasi tenaga kesehatan.
- 01.02. Registrasi Psikologi Klinis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi psikologi klinis dan data dukung registrasi psikologis klinis.
- 01.03. Registrasi Perawat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi Perawat dan data dukung registrasi perawat.
- 01.04. Registrasi Bidan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi bidan dan data dukung registrasi bidan.
- 01.05. Registrasi Kefarmasian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi kefarmasian dan data dukung registrasi kefarmasian.
- 01.06. Registrasi Tenaga Kesehatan Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga kesehatan masyarakat dan data dukung registrasi tenaga kesehatan masyarakat.
- 01.07. Registrasi Tenaga Kesehatan Lingkungan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga kesehatan lingkungan dan data dukung registrasi tenaga kesehatan lingkungan.
- 01.08. Registrasi Tenaga Gizi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga gizi dan data dukung registrasi tenaga gizi.
- 01.09. Registrasi Tenaga Keterapian Fisik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga keterapian fisik dan data dukung registrasi keterapian fisik.
- 01.10. Registrasi Tenaga Keteknisian Medis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga keteknisian medis dan data dukung registrasi keteknisian medis.
- 01.11. Registrasi Tenaga Biomedika  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga biomedika dan data dukung registrasi tenaga biomedika.
- 01.12. Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi tenaga kesehatan tradisional dan data dukung registrasi tenaga kesehatan tradisional.
02. Fasilitas Standardisasi
- 02.01. Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar kompetensi tenaga kesehatan.
- 02.02. Standar Kompetensi Kerja Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar kompetensi kerja tenaga kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 02.04. Standar Praktik Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar praktik tenaga kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
03. Fasilitas Pembinaan Keprofesian  
03.01. Pembinaan Keprofesian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan keprofesional seperti *e-learning* tenaga kesehatan dan evaluasi kemampuan *online* tenaga kesehatan.
- 03.02. Pengembangan Keprofesian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pengembangan keprofesional seperti seminar, webinar, penyusunan keprofesional, dan bimbingan dan pengawasan tenaga kesehatan.
04. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan  
04.01. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penegakan disiplin tenaga kesehatan seperti permasalahan dan pelanggaran praktik tenaga kesehatan.
- 04.02. Disiplin Praktik Psikologi Klinis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik psikologi klinis.
- 04.03. Disiplin Praktik Perawat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik perawat.
- 04.04. Disiplin Praktik Bidan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik bidan.
- 04.05. Disiplin Praktik Kefarmasian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik kefarmasian.
- 04.06. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga kesehatan masyarakat.
- 04.07. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga kesehatan lingkungan.
- 04.08. Disiplin Praktik Tenaga Gizi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga gizi.
- 04.09. Disiplin Praktik Tenaga Keterapi Fisik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga keterapi fisik.
- 04.10. Disiplin Praktik Keteknisian Medis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik keteknisian medis.
- 04.11. Disiplin Praktik Teknik Biomedika  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik teknik biomedika.
- 04.12. Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan disiplin praktik tenaga kesehatan tradisional.

05. Fasilitasi Penyiapan Bahan Pertimbangan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
- 05.01. Bahan Pertimbangan Pendirian Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan.
- 05.02. Bahan Pertimbangan Penutupan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan.

PG. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

01. Pidayagunaan Tenaga Kesehatan termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan
- 01.01. Pidayagunaan Dokter Spesialis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi kebijakan, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, penyiapan wahana, survei lapangan, rekrutmen, seleksi, pembekalan, penempatan, pemberangkatan, pendampingan dan pemulangan.
- 01.02. Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi, kebijakan, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, penyiapan wahana, survei lapangan, rekrutmen, seleksi, pembekalan, penempatan, pemberangkatan, pendampingan, dan pemulangan.
- 01.03. Komite Internsip Dokter Indonesia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi, rekrutmen, seleksi, penempatan, pembekalan, pemberangkatan, pendampingan, pemulangan dan survei lapangan.
- 01.04. Penugasan Khusus *Team Based*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi kebijakan, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, penyiapan wahana, survei lapangan, rekrutmen, seleksi, pembekalan, penempatan, pemberangkatan, pendampingan dan pemulangan.
- 01.05. Penugasan Khusus Individual  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi, kebijakan,

- sosialisasi, koordinasi dan konsultasi, penyiapan wahana, survei lapangan, rekrutmen, seleksi, pembekalan, penempatan, pemberangkatan, pendampingan dan pemulangan.
- 01.06. Penugasan Khusus Residen  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan meliputi, rekrutmen, seleksi, penempatan, pembekalan, pemberangkatan, pendampingan, pemulangan dan survei lapangan.
- 01.07. Pembinaan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis kepada Kementerian Kesehatan yang meliputi, monitoring UPT dan evaluasi terkait pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan.
02. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (WNI LLN) dan Purna Penempatan Luar Negeri
- 02.01. Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara indonesia lulusan luar negeri yang meliputi kebijakan, koordinasi dan konsultasi, sosialisasi, pendaftaran, verifikasi dokumen, penilaian kompetensi, pembekalan, dan penempatan.
- 02.02. Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Purna Penempatan Luar Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan purna penempatan luar negeri yang meliputi kebijakan, koordinasi dan konsultasi, sosialisasi, pelaksanaan *job-fair*, pendaftaran, verifikasi dokumen, penilaian kompetensi, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan.
- 02.03. Pembinaan teknis kepada UPT Kementerian Kesehatan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Purna Penempatan Luar Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis kepada UPT yang meliputi monitoring dan evaluasi.
03. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Indonesia
- 03.01. Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan Indonesia ke luar negeri yang meliputi kebijakan, koordinasi dan konsultasi,

- sosialisasi, rekrutmen, uji seleksi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan Indonesia ke luar negeri termasuk pendampingan serta fasilitasi kunjungan delegasi ke negara tujuan.
- 03.02. Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan warga negara asing di Indonesia yang meliputi pelayanan, pendidikan, pelatihan, bakti sosial, penelitian, kondisi darurat bencana, dan kegiatan lainnya.
- 03.03. Pembinaan Teknis terkait Bidang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Indonesia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengawasan teknis pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing.
04. Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Warga Negara Asing yang melaksanakan Adaptasi
- 04.01. Fasilitasi Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub-Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis warga negara indonesia lulusan luar negeri yang meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, penilaian kompetensi, survei lapangan, pembekalan, pemberangkatan, penempatan, pendampingan, dan pemulangan.
- 04.02. Fasilitasi Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub-Spesialis Warga Negara Asing yang melaksanakan Adaptasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub-spesialis warga negara asing yang melaksanakan adaptasi, meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, penilaian kompetensi dan penempatan.
- 04.03. Pembinaan Teknis terkait Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Warga Negara Asing yang melaksanakan Adaptasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis yang meliputi monitoring dan evaluasi.
- PL. PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN DAN PENUNJANG KESEHATAN
01. Kebutuhan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 01.01. Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan NSPK analisis kompetensi kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan yang meliputi penyusunan draf, penyusunan instrumen, uji coba instrumen, dan pengolahan data instrumen.

- 01.02. Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan NSPK analisis kompetensi kebutuhan pelatihan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang meliputi penyusunan draf, penyusunan instrumen, uji coba instrumen, dan pengolahan data instrumen.
- 01.03. Penilaian Potensi, Kompetensi, serta Sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian potensi, kompetensi, serta sertifikasi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang meliputi penyusunan instrumen, uji coba instrumen dan skema sertifikasi, penyelenggaraan penilaian, pengelolaan hasil, dan pemanfaatan hasil penilaian potensi, kompetensi dan sertifikasi.
- 01.04. Lembaga Sertifikasi Profesi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi kepada lembaga sertifikasi profesi bidang kesehatan, pemberian sertifikasi kompetensi kerja, dan kegiatan lembaga sertifikasi profesi lainnya.
- 01.05. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang meliputi pemetaan kebutuhan pelatihan, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan hasil.
02. Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 02.01. Program Pelatihan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan program pelatihan tenaga kesehatan meliputi penyusunan surat keputusan, penyusunan modul dan kurikulum, serta surat keterangan pengesahan kurikulum.
- 02.02. Program Pelatihan Tenaga Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan program pelatihan tenaga penunjang kesehatan meliputi penyusunan surat keputusan, penyusunan modul dan kurikulum, serta surat keterangan pengesahan kurikulum.
- 02.03. Penyelenggaraan Pelatihan  
Naskah-naskah penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan meliputi pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi.
03. Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan
- 03.01. Penjaminan Mutu Institusi Pelatihan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan institusi pelatihan yang meliputi penyusunan norma standar prosedur kriteria, penyusunan instrumen akreditasi institusi, proses akreditasi institusi, penyusunan surat keputusan penetapan, rekomendasi sertifikat, dan kegiatan penjaminan mutu institusi pelatihan.

- 03.02. Penjaminan Mutu Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang meliputi penyusunan norma standar prosedur kriteria, penyusunan instrumen akreditasi pelatihan, proses akreditasi pelatihan, penyusunan surat keputusan penetapan, rekomendasi, sertifikat, serta kegiatan penjaminan mutu pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan.
04. Peningkatan Kompetensi
- 04.01. Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan jabatan fungsional di bidang peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- 04.02. Pembinaan Teknis Peningkatan Kompetensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan teknis peningkatan mutu tenaga kesehatan yang meliputi pembinaan teknis penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan kepada UPT Kementerian Kesehatan di bidang tenaga kesehatan.
- PK. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
01. Strategi Komunikasi Risiko, Informasi dan Edukasi Kesehatan
- 01.01. Strategi Komunikasi Risiko, Informasi dan Edukasi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait strategi komunikasi risiko, informasi dan edukasi kesehatan serta pendekatan komunikasi kepada sasaran (tenaga kesehatan, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat).
- 01.02. Pengembangan Pesan  
Naskah-naskah pengembangan pesan kesehatan di Puskesmas, rumah sakit, pengembangan pesan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, malaria, HIV, TBC, penyakit tidak menular dan penyakit lainnya.
- 01.03. Desain Kreatif Pesan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi model edukasi kesehatan masyarakat (bumil, usia produktif dan lansia) meliputi masyarakat sosial, media cetak, audiovisual, dan jenis desain.
02. Penyebarluasan Informasi Kesehatan
- 02.01. Penyebarluasan Informasi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media di pusat, provinsi, kabupaten/kota.
- 02.02. Kampanye Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi kampanye kesehatan berupa media cetak, media elektronik, dan media sosial dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19, malaria, HIV, TBC, penyakit tidak menular serta pengendalian tembakau/rokok pada bumil, usia produktif dan lansia.

03. Advokasi Kesehatan

03.01. Advokasi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait advokasi kesehatan.

03.02. Kebijakan yang disusun oleh Sektoral, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Naskah-naskah yang berisi tentang kebijakan yang sudah disusun oleh kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait program kesehatan masyarakat, dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, surat edaran gubernur dan instruksi gubernur.

03.03. Komitmen dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang komitmen sektoral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam mendukung kesehatan masyarakat.

04. Kemitraan Kesehatan

04.01. Kemitraan Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait kemitraan kesehatan.

04.02. MoU dalam mendukung Program Kesehatan Masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang MoU dengan dunia usaha, lembaga kemasyarakatan yang mempunyai program

*Corporate Social Responsibility (CSR)* bidang kesehatan.

04.03. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dalam mendukung

Program Kesehatan Masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang penyusunan perjanjian kerja sama dengan dunia usaha yang sebelumnya telah

melewati proses MoU.

04.04. Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang pembinaan teknis jabatan fungsional promosi kesehatan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

04.05. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Naskah-naskah yang berisi tentang pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bersama mitra.

05. Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan

05.01. Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan

Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

05.02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Masyarakat

Naskah-naskah yang berisi tentang peningkatan kapasitas SDMK masyarakat meliputi peningkatan SDM di provinsi, kabupaten/kota, dan Puskesmas meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 05.03. Penggerakan Promosi Kesehatan di Berbagai Tatanan Naskah-naskah yang berisi tentang penggerakan promosi kesehatan di institusi Pendidikan (Sekolah/Madrasah dan Pesantren), tempat ibadah, tempat kerja dan tempat umum meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.04. Penggerakan 7 Materi Prioritas Promosi Kesehatan Naskah-naskah yang berisi tentang penggerakan 7 materi prioritas promosi kesehatan (imunisasi, olahraga, gizi seimbang, personal higienis dan sanitasi lingkungan, skrining, anti merokok, dan kepatuhan minum obat) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.05. Saka Bakti Husada Naskah-naskah yang berkaitan dengan saka bakti husada dan perkemahan bakti saka bakti husada nasional.
- 05.06. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Naskah-naskah yang berkaitan dengan rumah sakit yang melakukan promosi kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.07. Promosi Kesehatan Bencana/Tim Gerak Cepat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi kesehatan bencana/tim gerak cepat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

## 06. Pengorganisasian Masyarakat

- 06.01. Pengorganisasian Masyarakat Naskah-naskah yang berisi tentang pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait pengorganisasian masyarakat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 06.02. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Posyandu, Poskesdes, dana desa yang terkait dengan pemberdayaan dan penggerakan masyarakat/upaya kesehatan bersumber daya masyarakat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 06.03. Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pokjanal desa dan kelurahan siaga aktif dan Pokjanal Posyandu/forum peduli kesehatan.
- 06.04. *International Non-Government Organization (INGO)* Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang bergerak di bidang pemberdayaan dan penggerakan masyarakat khususnya bidang kesehatan.

## 07. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

- 07.01. Peran Serta Masyarakat Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait peran serta

- masyarakat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 07.02. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dalam negeri yang bergerak di bidang kesehatan meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 07.03. Institusi Keagamaan yang Menyelenggarakan Peran Serta Masyarakat Bidang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan lain sebagainya.
- 07.04. Kelompok Potensial yang Melaksanakan Gerakan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dasa Wisma, kelompok nelayan, petani, dan lainnya meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
08. Data dan Analisis Perilaku
- 08.01. Data dan Analisis Perilaku  
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait data dan analisis perilaku meliputi penyusunan data, analisis data, laporan, dan evaluasi.
- 08.02. Data Perilaku dan Analisis semua siklus kehidupan  
Naskah-naskah yang berisi tentang Data Perilaku dan Analisis semua siklus kehidupan meliputi penyusunan data, analisis data, laporan, dan evaluasi.
- 08.03. Komunikasi risiko dan strategi 7 materi prioritas Promosi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang Komunikasi risiko dan strategi 7 materi prioritas promosi kesehatan (imunisasi, olahraga, gizi seimbang, personal higienis dan sanitasi lingkungan, skrining, anti merokok, dan kepatuhan minum obat) meliputi penyusunan data, analisis data, laporan, dan evaluasi.
- 08.04. Standar Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang Standar Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 08.05. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  
Naskah-naskah yang berisi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) penyakit menular dan penyakit tidak manular meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
09. Perilaku Bumil, Anak dan Remaja
- 09.01. Perilaku Bumil, Anak dan Remaja  
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait perilaku bumil, anak dan remaja meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 09.02. *Demand Creation* dan Edukasi sesuai dengan Siklus Ibu Hamil, Anak dan Remaja  
Naskah-naskah yang berisi tentang *Demand Creation* dan Edukasi sesuai dengan siklus bumil, anak dan remaja meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 09.03. Upaya Kesehatan Sekolah  
Naskah-naskah yang berisi tentang promosi kesehatan pada Upaya Kesehatan Sekolah meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
10. Perilaku Usia Produktif dan Lansia
- 10.01. Perilaku Usia Produktif dan Lanjut Usia  
Naskah-naskah yang berisi pedoman umum, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan terkait perilaku usia produktif dan lanjut usia meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 10.02. *Demand Creation* dan Edukasi sesuai dengan Siklus Usia Produktif dan Lanjut Usia  
Naskah-naskah yang berisi tentang *demand creation* dan edukasi sesuai dengan siklus usia produktif dan lanjut usia meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

#### PM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

01. Tuberculosis
- 01.01. Pengendalian Penyakit Tuberculosis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian penyakit tuberculosis meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Pengobatan Tuberculosis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tuberculosis, *Directly Observed Treatment Short-course (DOTS)*, Wakil Supervisor (WASOR) tuberculosis, tuberculosis anak, tuberculosis HIV, keperawatan tuberculosis, tuberculosis di lembaga pemasyarakatan dan tuberculosis diabetes melitus meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.03. Laboratorium Tuberculosis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laboratorium tuberculosis meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.04. Obat Anti Tuberculosis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan obat anti tuberculosis meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.05. Tuberculosis Operational Research (TORG)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan TORG meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 01.06. Logistik Tuberculosis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan logistik tuberculosis meliputi data penimpanan, distribusi, laporan, dan evaluasi.
02. Pengendalian Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Penyakit Infeksi Menular Seksual
- 02.01. Survei Terpadu Biologis dan Perilaku  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan survei terpadu biologis dan perilaku/*Integrated Bio-Behavioural Surveillance* (IBBS) meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. *Human Immunodeficiency Virus*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *human immunodeficiency virus* meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Infeksi Menular Seksual  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan infeksi menular seksual meliputi perawatan, perawatan dukungan dan pengobatan, konseling dan test meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.04. Obat Anti Retro Viral (ARV) dan Reagen Tes *Human Immunodeficiency Virus*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan obat-obat anti retro viral dan reagen tes *human immunodeficiency virus* meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.05. Kelompok Kerja Pengendalian *Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Penyakit Infeksi Menular Seksual  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelompok kerja dan komite ahli dalam pengendalian *acquired immunodeficiency syndrome* dan penyakit infeksi menular seksual meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
03. Pengendalian Penyakit Menular
- 03.01. Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian infeksi saluran pernafasan akut, *Middle East Respiratory Syndrome* *Corona Virus* (MERS CoV), pneumonia, dan penyakit infeksi saluran pernafasan akut lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian infeksi penyakit infeksi saluran pencernaan (diare, disentri, kolera, hepatitis, tifoid, dan penyakit infeksi saluran pencernaan lainnya) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Penyakit Tropis Menular  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit tropis menular langsung (kusta, frambusia, ulkus, penyakit *neglected tropical diseases*, dan penyakit tropis menular langsung lainnya) meliputi penyusunan kebijakan,

sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 03.04. Kelompok Kerja Pengendalian Penyakit Menular  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelompok kerja dan komite ahli dalam pengendalian Penyakit Menular meliputi hepatitis, kusta, frambusia dan penyakit menular lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

## PN. PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

### 01. Proyeksi dan Pemetaan Produksi Tenaga Kesehatan

- 01.01. Proyeksi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proyeksi tenaga kesehatan berdasarkan *supply* dan *demands/needs* tenaga kesehatan, dokumen penyusunan identifikasi data, penyusunan petunjuk teknis, diseminasi petunjuk teknis, finalisasi petunjuk teknis, dan dokumen sosialisasi *supply demands/needs* tenaga kesehatan serta pelaporan proyeksi tenaga kesehatan dan penyusunan analisis kesenjangan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan nasional.
- 01.02. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemetaan produksi tenaga kesehatan, penyusunan pemetaan produksi dokter, bidan, dan perawat serta pelaporan pemetaan produksi tenaga kesehatan, dan penyusunan rencana adaptasi dokter/dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis/sub spesialis, warga negara indonesia lulusan luar negeri dan warga negara asing.
- 01.03. Penetapan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan jenis tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan baru.

### 02. Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung

- 02.01. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung meliputi dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, penyusunan dan sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan serta pelaporan.
- 02.02. Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan program prioritas, identifikasi, penyusunan, diseminasi, finalisasi penyusunan Juknis, sosialisasi dan monitoring serta pelaporan.

- 02.03. Pemanfaatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan seperti kegiatan penyusunan formasi aparatur sipil negara dan pemanfaatan lainnya.
03. Strategi Nasional Pemenuhan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan
- 03.01. Strategi Nasional Pemenuhan Tenaga Kesehatan  
    Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan strategi nasional pemenuhan tenaga kesehatan meliputi rekomendasi dan pelaporan kebijakan strategi nasional tenaga kesehatan dan penyusunan rencana pemenuhan, produksi, distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan jangka menengah dan jangka panjang.
- 03.02. Strategi Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan  
    Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan strategi nasional pengembangan tenaga kesehatan meliputi penyusunan dokumen strategi nasional pengembangan tenaga kesehatan, diseminasi dokumen strategi nasional pengembangan tenaga kesehatan dan pelaporan.
04. Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan
- 04.01. Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan  
    Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengembangan tenaga kesehatan meliputi analisa, uji coba, dan hasil uji coba penyusunan pedoman perencanaan pengembangan tenaga kesehatan dan kegiatan pada pengembangan aplikasi bursa kerja tenaga kesehatan serta pelaporan.
- 04.02. Perencanaan Evaluasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan  
    Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana evaluasi kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan warga negara indonesia lulusan luar negeri dan warga negara asing.
- 04.03. Pembinaan Teknis Perencanaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan  
    Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah meliputi koordinasi pembinaan wilayah terkait Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), koordinasi pembinaan wilayah terkait pemantauan 9 (sembilan) penyakit prioritas, dan program lain termasuk lokus penugasan khusus serta pelaporan kegiatan fasilitas dan pembinaan pemerintah daerah.

PP. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

01. Perkuliahan

- 01.01. Administrasi Perkuliahan  
    Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan meliputi administrasi jadwal perkuliahan (surat undangan rapat), administrasi kalender akademik,

administrasi jadwal akademik, administrasi rancangan pengumuman dan administrasi rancangan surat edaran (semester genap, semester ganjil, beban mengajar, ruang kuliah, dosen pembina mata kuliah, pembimbing akademik, dan peserta didik).

- 01.02. Silabus Mata Kuliah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan silabus mata kuliah meliputi silabus mata kuliah, bobot satuan kredit semester, kode mata kuliah (perubahan dan penetapan), persyaratan mata kuliah, bahan bacaan (wajib, pendukung, atau referensi).
- 01.03. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi pembelajaran teori dan pembelajaran praktik (jadwal, materi mata kuliah), kontrak perkuliahan, garis-garis besar materi perkuliahan, dan modul bahan ajar.
- 01.04. Proses Belajar Mengajar  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar meliputi permohonan dosen mengajar, tutorial, matrikulasi, penguji *objective structured clinical assessment*, pembimbing dan penguji karya tulis ilmiah.
- 01.05. Daftar Kehadiran Dosen  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar kehadiran dosen meliputi daftar kehadiran dosen, daftar kehadiran mahasiswa, dan evaluasi kehadiran.

## 02. Kurikulum

- 02.01. Administrasi Kurikulum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kurikulum yang meliputi pelaksanaan kurikulum dan penyusunan kurikulum program studi (penambahan, perubahan dan penyempurnaan kurikulum).
- 02.02. Pedoman Kurikulum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pedoman kurikulum yang meliputi kurikulum perguruan tinggi dan evaluasi pengembangan kurikulum perguruan tinggi.
- 02.03. Mata Kuliah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan mata kuliah yang meliputi mata kuliah dasar umum, praktik laboratorium, praktik klinik, dan mata kuliah keahlian.

## 03. Program Studi

- 03.01. Administrasi Program Studi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi program studi yang meliputi penyelenggaraan program studi seperti surat usulan program studi, proses penyelenggaraan program studi.
- 03.02. Penolakan Program Studi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penolakan program studi.
- 03.03. Evaluasi Program Studi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program studi meliputi proses akreditasi program studi.

04. Dosen

04.01. Pengajaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengajaran yang meliputi proses belajar mengajar, permohonan dosen mengajar, tutorial, matrikulasi, penguji *objective structured clinical assessment*, pembimbing dan penguji karya tulis ilmiah dan skripsi, laporan realisasi pengajar.

05. Penunjang Akademik

05.01. Administrasi Kegiatan Penunjang Akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan penunjang akademik yang meliputi perpustakaan, kegiatan bengkel, kegiatan olahraga, kegiatan praktik lapangan, kegiatan *workshop*, dan kegiatan pendidikan lainnya.

05.02. Peraturan Pengunaan Sarana dan Prasarana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan pengunaan sarana dan prasarana yang meliputi pemakaian laboratorium, pemakaian perpustakaan, pemakaian bengkel, pemakaian prasarana dan sarana olahraga, pemakaian prasarana dan sarana lainnya.

06. Evaluasi Mahasiswa

06.01. Pelaksanaan Ujian Semester

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian semester yang meliputi pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester, usulan ujian tengah semester dan akhir semester, soal ujian tengah semester dan akhir semester, nilai hasil ujian tengah semester dan akhir semester.

06.02. Tugas Akhir

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tugas akhir yang meliputi usulan, pelaksanaan karya tulis ilmiah, usulan, pelaksanaan skripsi dan karya tulis akhir profesi, usulan, pelaksanaan nilai tugas akhir (praktik kerja lapangan dan pembelajaran berbagai masalah).

06.03. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi yang meliputi usulan, daftar panitia, penguji dan peserta, soal, pelaksanaan, dan nilai hasil *try-out*, usulan, daftar panitia, penguji dan peserta, soal, pelaksanaan, dan nilai hasil uji kompetensi.

07. Yudisium

07.01. Kelulusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelulusan mahasiswa yang meliputi penetapan yudisium, penetapan kelulusan, surat keterangan lulus, ijazah dan transkrip nilai termasuk surat keterangan pendamping ijazah, surat pengganti ijazah, legalisir ijazah, sertifikat uji kompetensi, sertifikat/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi, sertifikat/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi, salinan ijazah, dan salinan transkrip nilai.

07.02. Administrasi Kelulusan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kelulusan yang meliputi surat tugas, undangan, dan prosesi wisuda, berkas pengusulan pengadaan blanko ijazah dan berkas pengadaan transkrip.

- 07.03. Buku Induk  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku induk nomor registrasi kelulusan mahasiswa.
08. Alumni
- 08.01. Himpunan Organisasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan himpunan organisasi yang meliputi registrasi alumni dan program kegiatan alumni.
- 08.02. Perkembangan Alumni  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkembangan alumni dan buku wisuda dan verifikasi ijazah.

PT. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

01. Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara
- 01.01. Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan meliputi petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, peraturan presiden tentang tunjangan, dan standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
- 01.02. Permohonan Rekomendasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat dari instansi pemerintah pusat dan daerah tentang permohonan rekomendasi formasi dan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
- 01.03. Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan.
- 01.04. Sistem Informasi Jabatan Fungsional Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekapitulasi data pejabat fungsional kesehatan serta pemanfaatan sistem informasi jabatan fungsional kesehatan.
02. Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara
- 02.01. Pengelolaan Karier Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan karier tenaga kesehatan non aparatur sipil negara meliputi pedoman skema karier tenaga kesehatan non aparatur sipil negara, standar kompetensi kerja tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara, dan skema sertifikasi.
- 02.02. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Karier Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi kepada lembaga sertifikasi profesi bidang kesehatan dan pengelolaan karier tenaga kesehatan non aparatur sipil negara.
- 02.03. Sistem Informasi Karier Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi karier tenaga kesehatan non aparatur sipil negara.

03. Pengawasan Tenaga Kesehatan

- 03.01. Pengelolaan Pengaduan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan adanya laporan atau pengaduan dari instansi pusat dan daerah terhadap pelaksanaan pengawasan tenaga kesehatan.
- 03.02. Pelaksanaan Penyidikan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tim penyidik tenaga kesehatan, laporan hasil penyidikan serta tindak lanjut pelaksanaan penyidikan.
- 03.03. Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan tenaga kesehatan.

04. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan

- 04.01. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan norma standar prosedur kriteria dan regulasi perlindungan tenaga kesehatan, standar pengupahan tenaga kesehatan, dan penghargaan tenaga kesehatan.
- 04.02. Pemantauan dan Evaluasi Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan evaluasi kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan.

PV. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK

01. Pengendalian Malaria

- 01.01. Kelambu Berinsektisida (*Long-Lasting Insecticidal Nets (LLINs)*)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelambu berinsektisida meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Eliminasi Malaria  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan eliminasi malaria meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.03. *Crosschecker* Mikroskopis Malaria  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *crosschecker* mikroskopis malaria meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02. Pengendalian Arbovirosis

- 02.01. Demam Berdarah Dengue (DBD)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan demam berdarah dengue mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Chikungunya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan chikungunya mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 02.03. *Japanese Encephalitis*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Japanese encephalitis* mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.04. Virus Zika  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan virus zika mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
03. Pengendalian Zoonosis
- 03.01. Penyakit Flu Burung  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit flu burung mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Penyakit Rabies  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit rabies mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Penyakit Pes  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit pes mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.04. Penyakit Flu Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit flu baru mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.05. Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tumbuhan Beracun  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tumbuhan beracun mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.06. Penyakit Bersumber Binatang Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit bersumber binatang lainnya diantaranya leptospirosis, antraks, dan lain-lain, mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
04. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
- 04.01. Filariasis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit filariasis mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.02. Kecacingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kecacingan mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi

- penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 04.03. Schistosomiasis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan schistosomiasis mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
05. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
- 05.01. Pengendalian Vektor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian vektor meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.02. Pengendalian Binatang Pembawa Penyakit  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian binatang pembawa penyakit meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.03. Uji Resistensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan uji resistensi pencegahan dan pengendalian tular vektor zoonotik meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

#### RS. PELAYANAN KESEHATAN DI RS DAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA

01. Pelayanan Kesehatan di RS
- 01.01. Pelayanan Medis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pelayanan medis seperti rawat inap, rawat jalan, rawat inap intensif, pelayanan tindakan operatif, layanan tindakan non operatif, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- 01.02. Pelayanan Penunjang  
Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi dan diagnostik, farmasi (resep obat), gizi, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), binatu, rehabilitasi medik, optik, hiperbarik, dan lain-lain.
- 01.03. Pelayanan Non-Medis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan non-medis seperti promosi kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), binatu, kesehatan lingkungan dan lain-lain.
- 01.04. Rekam Medis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas rekam medis konvensional pasien yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya.
- 01.05. Resume Pasien Pulang dan Tindakan Medis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan resume konvensional pasien pulang dan tindakan medis.
- 01.06. Rekam Medis Pejabat Negara, Tokoh Nasional, Tokoh Daerah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekam medis pejabat negara, tokoh nasional, tokoh daerah.

- 01.07. Resume Kasus Besar, Kasus Pertama Pandemi, dan Kejadian Luar Biasa  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan resume kasus besar, kasus pertama pandemi, dan kejadian luar biasa.
- 01.08. Forensik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi forensik.
- 01.09. *Visum et repertum*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *visum et repertum*.
- 01.10. Transplantasi Organ  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan transplantasi organ yang pertama kali dan kasus baru seperti mata, ginjal, jantung, dan lain-lain.
02. Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 02.01. Pelayanan Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di fasilitas kesehatan lainnya seperti rawat inap, rawat jalan, rawat inap intensif, pelayanan tindakan operatif, layanan tindakan non-operatif, dan IGD.
- 02.02. Pelayanan Penunjang di Fasilitas Kesehatan Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan penunjang di fasilitas kesehatan lainnya seperti laboratorium, radiologi dan diagnostik, farmasi, gizi, CSSD, binatu, rehabilitasi medik, optik, hiperbarik, dan lain-lain.
- 02.03. Pelayanan Non-Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan non-medis di fasilitas kesehatan lainnya seperti promosi kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), binatu, kesehatan lingkungan dan lain-lain.
- 02.04. Rekam Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya  
Naskah-naskah yang terkait dengan berkas pasien di fasilitas kesehatan lainnya yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lainnya

## SR. SURVEILANS DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

01. Surveilans
- 01.01. Surveilans Penyakit  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans penyakit seperti difteri, polio, dan lain sebagainya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Surveilans Kejadian Luar Biasa  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans kejadian luar biasa, respons cepat, dan fasilitasi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.03. Surveilans Kesehatan Lingkungan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans kesehatan lingkungan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 01.04. Surveilans Epidemiologi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surveilans epidemiologi meliputi epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.05. Kewaspadaan Dini  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kewaspadaan dini meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.06. Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan respons kejadian luar biasa dan wabah meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
02. Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
- 02.01. Hapus Serangga dan Hapus Tikus  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian hapus serangga dan hapus tikus meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan  
Naskah-naskah yang berkaitan teknis pengendalian risiko kesehatan lingkungan di pelabuhan, bandara, Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), pemukiman, *event* khusus, tempat kerja, industri farmasi dan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Vaksinasi Internasional  
Naskah-naskah yang berkaitan vaksinasi internasional (*yellow fever*, meningitis, dan vaksin baru lainnya) pada kantor kesehatan pelabuhan dan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 02.04. Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan dan upaya kesehatan pelabuhan meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.05. Pengangkutan Orang Sakit  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan orang sakit meliputi penjemputan, pelayanan kesehatan, dan perizinan.
- 02.06. Pengiriman Jenazah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengiriman jenazah baik dalam bentuk utuh maupun abu jenazah meliputi penjemputan dan perizinan meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 02.07. Dokumen Perjalanan Kejadian Luar Biasa dan Wabah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen perjalanan pada masa kejadian luar biasa dan wabah, misalnya *health alert card*.
03. Penyakit Infeksi Emerging
- 03.01. Penyakit Infeksi Emerging  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang penyakit poliomyelitis, virus ebola, virus MERS, influenza A (H5N1) flu burung, virus hanta, virus nipah, *yellow fever*, demam lassa,

- demam congo meningitis, COVID-19 dan penyakit infeksi emerging lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Deteksi Penyakit Infeksi Emerging  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan intervensi penyakit infeksi emerging meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Intervensi Penyakit Infeksi Emerging  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan intervensi penyakit infeksi emerging meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
04. Sertifikat dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT
- 04.01. Sertifikat Kesehatan Manusia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian sertifikat *international certificate of vaccination (ICV)*.
- 04.02. Sertifikat Kesehatan Moda Transportasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan penerbitan sertifikat meliputi *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*, *Certificate of Pratique (CoP)*, *Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)* dan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)*, Sertifikat obat dan alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), dan Sertifikat Air Bersih.
- 04.03. Sertifikat Kesehatan Barang  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan penerbitan sertifikat atau surat keterangan Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Barang Adiktif (OMKABA).
- 04.04. Sertifikat Kesehatan Lingkungan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian sertifikat meliputi sertifikat air bersih, sertifikat penyelenggaraan perusahaan fumigasi di kapal, sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga, sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan, sertifikat obat dan alat P3K.
- 04.05. Surat Keterangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian surat keterangan meliputi hasil uji laboratorium rujukan, penerbitan surat izin pengangkutan jenazah, orang sakit yang laik terbang, surat keterangan pengujian kesehatan nakhoda/pilot dan Anak Buah Kapal (ABK).
- 04.06. Buku Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian buku kesehatan.
05. Laboratorium Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 05.01. Standardisasi Laboratorium Surveilans  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan standardisasi laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.02. Pengembangan Laboratorium Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan koordinasi pengembangan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyusunan

- kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 05.03. Penyelenggaraan Laboratorium Surveilans dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
06. Surveilans Terintegrasi
- 06.01. Diseminasi Informasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan diseminasi informasi di bidang surveilans terintegrasi laboratorium, surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit, kewaspadaan dini dan respons KLB, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah.
- 06.02. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Fasilitasi Pengelolaan SDM di bidang surveilans terintegrasi; laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit, kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah.
- 06.03. Fasilitasi Kemitraan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi kemitraan di bidang surveilans terintegrasi laboratorium, surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit, kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

## SS. SISTEM DAN STRATEGI KESEHATAN

01. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan
- 01.01. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Naskah-naskah yang berisi tentang penyusunan kebijakan teknis, analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan upaya kesehatan masyarakat.
- 01.02. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang penyusunan kebijakan teknis, analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan pelayanan dan penunjang kesehatan.
- 01.03. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Ketahanan dan Teknologi Kesehatan

- Naskah-naskah yang berisi tentang penyusunan kebijakan teknis, analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan pelayanan dan penunjang kesehatan.
- 01.04. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Sumber Daya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berisi tentang penyusunan kebijakan teknis, analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan sumber daya kesehatan.
02. Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan
- 02.01. Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Naskah-naskah yang berisi tentang pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan upaya kesehatan masyarakat meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan pelayanan dan penunjang kesehatan meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Ketahanan dan Teknologi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan pelayanan dan penunjang kesehatan meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.04. Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Sumber Daya Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan sumber daya kesehatan meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
03. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
- 03.01. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem upaya kesehatan masyarakat.
- 03.02. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem pelayanan dan penunjang kesehatan.
- 03.03. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Ketahanan dan Teknologi Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem pelayanan dan penunjang kesehatan.

03.04. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sumber Daya Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem sumber daya kesehatan.

**TK. TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN**

01. Tata Kelola Sistem Rujukan

01.01. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi tata kelola sistem rujukan pelayanan kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

01.02. Pengembangan Pelayanan *Telemedicine*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan *telemedicine* antar-fasilitas pelayanan kesehatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02. Pengelolaan Wahana Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan

02.01. Jejaring Rumah Sakit Pendidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jejaring rumah sakit dan *academic health system* meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02.02. Program di Rumah Sakit Pendidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pelayanan jantung, pelayanan ginjal, pelayanan hati, pelayanan kanker, sel punca, teknologi dan reproduksi berbantu serta transplantasi organ di rumah sakit pendidikan meliputi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02.03. Teknologi Kesehatan

Naskah-Naskah yang berkaitan dengan *Biomedical Genome-Based Science Initiative* (BGSi) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02.04. Program di Rumah Sakit Pendidikan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program dokter spesialis dan program rumah sakit pendidikan lainnya, seperti *fellowship*, *stase*, dan lain-lain meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

03. Pengelolaan Kerja Sama Pelayanan Kesehatan

03.01. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan pada kegiatan nasional dan internasional lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

03.02. Kerja Sama Bidang Pelayanan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi pengelolaan kerja sama luar negeri bidang pelayanan kesehatan (*sister hospital*) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi,

pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

04. Pengelolaan Badan Layanan Umum

04.01. Penilaian Kinerja Pelayanan

Naskah-naskah yang berhubungan dengan fasilitasi pengelolaan manajemen badan layanan umum berupa penilaian kinerja pelayanan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

04.02. Rencana Strategis Bisnis

Naskah-naskah yang berhubungan dengan fasilitasi pengelolaan manajemen BLU berupa rencana strategis bisnis meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**TL. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LABORATORIUM**

01. Teknologi Pengendalian Penyakit

01.01. Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan model dan teknologi tepat guna meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

01.02. Pengembangan dan Penapisan Teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan penapisan teknologi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

01.03. Kemitraan dan Jejaring Kerja di Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kemitraan dan jejaring kerja di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02. Teknologi Laboratorium

02.01. Pengembangan Teknologi Laboratorium

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan teknologi laboratorium meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02.02. Laboratorium Rujukan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laboratorium rujukan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02.03. Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan uji kendali mutu dan kalibrasi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02.04. Rekomendasi Hasil Uji Laboratorium

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekomendasi hasil uji laboratorium meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan rekomendasi.

**TM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR**

**01. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah**

**01.01. Penyakit Jantung**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit jantung mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**01.02. Penyakit Pembuluh Darah**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit pembuluh darah mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**01.03. Penyakit Hipertensi**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit hipertensi mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**01.04. Penyakit Stroke**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit stroke mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**02. Pengendalian Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik**

**02.01. Penyakit Diabetes Melitus**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit diabetes melitus mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**02.02. Penyakit Gangguan Metabolik**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit gangguan metabolism mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**02.03. Penyakit Gangguan Tiroid**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit gangguan tiroid mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**02.04. Gangguan Obesitas**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan gangguan obesitas mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**03. Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah**

**03.01. Penyakit Kanker**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit kanker mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

**03.02. Penyakit Kelainan Darah**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit kelainan darah seperti *Idiopathic Thrombocytopenic Purpura* (ITP), hemofilia, thalassemia, dan penyakit kelainan darah lainnya mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan meliputi

penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

04. Pengendalian Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi

04.01. Penyakit Akibat Produk Tembakau.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyakit akibat produk tembakau meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

04.02. Gangguan Imunologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan gangguan imunologi (asma, lupus, dan penyakit gangguan imunologi lainnya) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

05. Gangguan Indera dan Fungsional

05.01. Pengendalian Gangguan Panca Indera

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian panca indera (mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah) seperti gangguan refraksi, katarak, glukoma, serumen prop/kotoran telinga, *Noise Induced Hearing Loss* (NIHL), prebikusis, dan penyakit gangguan panca indera lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

05.02. Pengendalian Gangguan Fungsional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian gangguan fungsional, seperti pengendalian disabilitas dan tuli kongenital meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

YK. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

01. Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

01.01. Pemetaan Prasarana dan Sarana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan, analisis, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

01.02. Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian teknologi dan fasilitasi perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

01.03. Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan penilaian fungsi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

01.04. Analisis Data dan Informasi Prasarana dan Sarana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

01.05. Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang pelayanan kesehatan primer.

02. Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

- 02.01. Pemetaan Prasarana dan Sarana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan, analisis, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- 02.02. Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian teknologi dan fasilitasi perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- 02.03. Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan penilaian fungsi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- 02.04. Analisis Data dan Informasi Prasarana dan Sarana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- 02.05. Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

03. Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

- 03.01. Pemetaan Prasarana dan Sarana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan, analisis, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 03.02. Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian teknologi dan fasilitasi perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 03.03. Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi prasarana dan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 03.04. Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang pelayanan kesehatan lainnya.

04. Standar Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- 04.01. Pemetaan Standar Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan, analisis, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 04.02. Penilaian Teknologi Standar Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian teknologi dan fasilitasi perencanaan kebutuhan standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

- 04.03. Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Standar Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan serta penilaian fungsi standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 04.04. Fasilitasi Pemenuhan Standar Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pemenuhan standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 04.05. Analisis Data dan Informasi Standar Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi standar alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 04.06. Pembinaan Teknis Standar Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang standar alat kesehatan pelayanan kesehatan.
05. Pengujian dan Kalibrasi
- 05.01. Penilaian dan Monitoring Pengamanan Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian dan monitoring pengamanan prasarana, sarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 05.02. Pengujian dan Kalibrasi Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengujian dan kalibrasi prasarana, sarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 05.03. Analisis Data dan Informasi Pengujian dan Kalibrasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis data dan informasi pengujian dan kalibrasi prasarana, sarana, dan alat kesehatan.
- 05.04. Pembinaan Teknis Pengujian dan Kalibrasi Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis fasilitas pelayanan kesehatan kepada UPT di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana, sarana, dan alat kesehatan.

#### YM. MUTU PELAYANAN KESEHATAN

01. Mutu Pelayanan Kesehatan
- 01.01. Mutu Pelayanan Kesehatan Primer  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, klinik pratama, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutu pelayanan kesehatan di RS dan klinik utama meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

- 01.03. Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutu pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
02. Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- 02.01. Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi pelayanan kesehatan di puskesmas, klinik pratama, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.02. Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan klinik utama meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Akreditasi Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional lainnya meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

#### YP. PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

01. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- 01.01. Puskesmas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Puskesmas meliputi manajemen puskesmas, puskesmas sebagai wahana pendidikan, puskesmas rawat inap, non-rawat inap dan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial (PONED) dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.02. Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dan pelayanan kesehatan bergerak meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.03. Keluarga Sehat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program keluarga sehat meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.04. Integrasi Layanan Kesehatan Primer  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program integrasi layanan kesehatan primer meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02. Pelayanan Klinik

02.01. Pelayanan Klinik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan klinik dan penunjang kesehatan klinik meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02.02. Pelayanan Darah (*Quickwins*)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan darah (*quickwins*) yang berkerja sama dengan dinas kesehatan melalui unit transfusi darah dan rumah sakit.

02.03. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Berprestasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi yang meliputi penyusunan instrumen penilaian, proposal CSR, dan penganugerahan.

03. Perizinan dan Registrasi Klinik

03.01. Pelayanan Klinik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi perizinan pelayanan modal asing dan non-pelayanan modal asing, pelayanan kesehatan klinik, dan penunjang kesehatan klinik.

03.02. Praktik Perorangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi perizinan praktik perorangan (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya).

03.03. Panduan Praktik Klinis dan Panduan Keterampilan Klinis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan panduan praktik klinis dan panduan keterampilan klinis.

YR. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

01. Standardisasi Klinis Pelayanan Kesehatan Rujukan

01.01. Standar Pelayanan Kedokteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengembangan implementasi standar pelayanan kedokteran di fasilitas kedokteran meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

01.02. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi penyediaan pelayanan kesehatan rujukan dan tata kelola klinis pelayanan kesehatan rujukan.

01.03. Panduan Praktik Klinis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi penerapan panduan praktik klinis dan *clinical pathway* di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

01.04. Audit Klinis Rumah Sakit dan lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit.

02. Perizinan dan Pengembangan serta Pengawasan Pelayanan Kesehatan Rujukan

02.01. Perizinan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi perizinan, pengembangan dan inovasi pelayanan kesehatan rujukan pada praktik perorangan, klinis, rumah sakit dan

- pelayanan kesehatan tingkat pertama lain serta pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan khusus lainnya.
- 02.02. Pengawasan Rumah Sakit  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawas internal ruma sakit, dan badan pengawas rumah sakit.
03. Transformasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 03.01. Rujuk Balik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengelolaan rujuk balik di fasilitas kesehatan tingkat pertama, penguatan integrasi pelayanan klinik dan praktik perorangan dan rumah sakit.
- 03.02. Pelayanan Unggulan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengembangan layanan unggulan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- 03.03. Jejaring Pelayanan Kesehatan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi stratifikasi dan pengampuan jejaring pelayanan kesehatan rujukan untuk 9 (sembilan) penyakit prioritas.

YT. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

01. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
- 01.01. Pelayanan Kesehatan Penyehat Tradisional (Hattrra)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan penyehat tradisional meliputi penyusunan kebijakan dan sosialisasi.
- 01.02. Pembinaan Penyehat Tradisional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program kegiatan pembinaan penyehat tradisional meliputi pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.03. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan sehat pakai air meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.04. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan asuhan mandiri kesehatan tradisional dan penunjang meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.05. Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian pemanfaatan taman obat keluarga meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 01.06. Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan asuhan mandiri dan penunjang pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

02. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
- 02.01. Penilaian/Penapisan Kesehatan Tradisional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian/penapisan kesehatan tradisional.
- 02.02. Pelayanan Kesehatan Komplementer Non Tradisional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan komplementer non tradisional meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.03. Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
- 02.04. Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia (FROTI)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan formularium ramuan obat tradisional indonesia meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.05. Tenaga Pengawas Kesehatan Tradisional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tenaga pengawas kesehatan tradisional meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.06. Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional Indonesia meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.07. Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sentra penerapan dan pengembangan pengobatan tradisional meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 02.08. Kelompok Kerja Nasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kelompok kerja nasional meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
03. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
- 03.01. Formularium Obat Herbal Asli Indonesia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan formularium obat herbal asli Indonesia meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.02. Pelayanan Medik Obat Herbal Asli Indonesia  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan medik obat herbal asli Indonesia meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.03. Pelayanan Medik Akupunktur  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan medik akupunktur

- meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.04. Pelayanan Akupresur di Puskesmas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan akupresur oleh tenaga kesehatan di puskesmas meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.05. *Brainstorming* Pelaksanaan Kegiatan terkait Pelayanan Kesehatan Integrasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *brainstorming* pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan kesehatan integrasi meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan, dan evaluasi.
- 03.06. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional integrasi meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.
- 03.07. Pelayanan Akupresur di Puskesmas  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan akupresur di puskesmas meliputi penyusunan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis, supervisi, laporan, dan evaluasi.

3. KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. SEKRETARIAT JENDERAL

- I. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- II. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- III. Kepala Biro Hukum
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- IV. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- V. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VI. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VII. Kepala Biro Umum
  - 1. Kepala Bagian Rumah Tangga
- VIII. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- IX. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
  - 1. Kepala Bidang Perancangan Sistem dan Strategi
  - 2. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- X. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- XI. Kepala Pusat Kesehatan Haji
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- XII. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- XIII. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal
- XIV. Project Management Office (PMO) Sekretariat Jenderal

B. DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

- I. Sekretaris Direktorat Jenderal
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- II. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- III. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- IV. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- V. Direktur Kesehatan Jiwa
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VI. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
  - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
- VII. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- VIII. Project Management Office (PMO) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- C. DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
  - I. Sekretaris Direktorat Jenderal
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - II. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - III. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - IV. Direktur Pengelolaan Imunisasi
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - V. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VI. Direktur Penyehatan Lingkungan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VII. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - VIII. *Project Management Office (PMO)* Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- D. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
  - I. Sekretaris Direktorat Jenderal
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - II. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - III. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - IV. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - V. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VI. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VII. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
  - VIII. *Project Management Office (PMO)* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- E. DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
  - I. Sekretaris Direktorat Jenderal
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - II. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - III. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - IV. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - V. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VI. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VII. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  - VIII. *Project Management Office (PMO)* Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- F. DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
  - I. Sekretaris Direktorat Jenderal
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - II. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - III. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - IV. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - V. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VI. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VII. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VIII. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - IX. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
  - X. *Project Management Office (PMO)* Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- G. INSPEKTORAT JENDERAL
  - I. Sekretaris Inspektorat Jenderal
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - II. Inspektur I
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - III. Inspektur II
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - IV. Inspektur III
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - V. Inspektur IV
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VI. Inspektur Investigasi
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VII. Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal
  - VIII. *Project Management Office (PMO)* Inspektorat Jenderal
- H. BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
  - I. Sekretaris Badan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - II. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - III. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - IV. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - V. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
    - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum
  - VI. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
  - VII. *Project Management Office (PMO)* Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- I. STAF AHLI BIDANG EKONOMI KESEHATAN
- J. STAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI KESEHATAN
- K. STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN
- L. STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN GLOBALISASI KESEHATAN

### BAB III

#### SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

##### A. Klasifikasi Keamanan Arsip

Arsip dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan. Kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip berkaitan dengan hak dan kewenangan seseorang. Bersamaan dengan itu, kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip menyangkut kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan informasi tertentu kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap akses arsip dinamis. Berdasarkan ketentuan umum yang telah dibahas, arsip dinamis Kementerian Kesehatan terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

###### 1. Biasa/Umum/Terbuka

Arsip dinamis Kementerian Kesehatan yang termasuk ke dalam kategori arsip umum merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan

###### 2. Terbatas

Arsip dinamis Kementerian Kesehatan yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

###### 3. Rahasia

Arsip dinamis yang tergolong ke dalam kategori rahasia mengandung dampak yang luas hingga menganggu kinerja Kementerian Kesehatan.

##### B. Pengamanan Fisik Dan Informasi Arsip

###### 1. Pengamanan Ruang Simpan Arsip

Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (cctv), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip. Arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada almari besi.

###### 2. Penentuan Pengelola arsip meliputi Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip di Bagian Arsip dan *central file* Kementerian Kesehatan. Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif sangat berperan dalam pengamanan arsip di *record centre* sehingga penetapan hak akses arsip dapat berjalan optimal. Arsiparis dan atau Pengolah Arsip mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.

###### 3. Daftar Arsip Terbatas dan Daftar Arsip Rahasia

Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia termasuk ke dalam pengamanan informasi arsip. Tujuannya sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *records centre* dan *central file*.

##### C. Tabel Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Skema Klasifikasi Keamanan yang berlaku di Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 1.

D. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis

Berdasarkan klasifikasi keamanan dapat ditentukan hak akses bagi pengguna yang berhak untuk mengakses arsip dinamis. Pengguna yang diberikan hak akses, terdiri dari dua golongan yaitu pengguna yang ada di lingkungan internal Kementerian Kesehatan dan pengguna dari lingkungan eksternal Kementerian Kesehatan. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengguna yang berhak di lingkungan Kementerian Kesehatan
  - a. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri Kesehatan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya;
    - 2) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level tertinggi), yaitu Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Inspektur Jenderal yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
    - 3) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level tinggi), yaitu Pejabat Eselon dua dan tiga yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
  - b. Pelaksana Kebijakan, yaitu Arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
  - c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
2. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal Kementerian Kesehatan
  - a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
  - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), contohnya ketika BPK sedang dalam tugas mengaudit
  - c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan

fungsi penegakan hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana masalah korupsi. Untuk lebih jelas mengenai daftar arsip dinamis yang dapat diakses sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di kantor Kementerian Kesehatan, bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 1  
 Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fungsi Fasilitatif  
 di Lingkungan Kementerian Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
I	AR. KEARSIPAN					
1	AR.01	Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bagian Kearsipan
	AR.01.01	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis				
	AR.01.02	Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis				
2	AR.02	Penciptaan Arsip	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bagian Kearsipa
	AR.02.01	Pengelolaan Surat Masuk				
	AR.02.02	Pengelolaan Surat Keluar				
3	AR.03	Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bagian Kearsipa
	AR.03.01	Pengelolaan Arsip Aktif				
	AR.03.02	Pengelolaan Arsip Inaktif				
	AR.03.03	Pengelolaan Arsip Vital				
	AR.03.04	Pengelolaan Arsip Terjaga				
	AR.03.05	Pengelolaan Arsip Audio Visual				
	AR.03.06	Pengelolaan Arsip Elektronik				
	AR.03.07	Alih Media Arsip				
	AR.03.08	Layanan Arsip				
	AR.03.09	Pemeliharaan Fisik Arsip				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
4	AR.04	Penyusutan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bagian Karsipa
	AR.04.01	Pemindahan Arsip				
	AR.04.02	Pemusnahan Arsip				
	AR.04.03	Penyerahan Arsip Statis				
5	AR.05	Sumber Daya Kearsipan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bagian Karsipa
	AR.05.01	Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan				
	AR.05.02	Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan				
	AR.05.03	Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Karsipa	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bagian Karsipa
	AR.05.04	Apresiasi Sumber Daya Kearsipan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bagian Karsipa

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	AR.05.05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bagian Kearsipa
II	BJ. PENGADAAN BARANG DAN JASA					
1	BJ.01	Pengadaan Barang dan Jasa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	BJ.01.01	Tender Seleksi (sederhana)				
	BJ.01.02	Tender Cepat				
	BJ.01.03	Pengadaan Langsung				
	BJ.01.04	e-Purchasing				
2	BJ.02	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	BJ.02.01	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				
	BJ.02.02	Kontrak Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha				
	BJ.02.03	Katalog Elektronik Sektoral				
III	HK. HUKUM					
1	HK.01	Peraturan Perundang-undangan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Hukum
	HK.01.01	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang				
	HK.01.02	Peraturan Pemerintah				
	HK.01.03	Peraturan Presiden				
	HK.01.04	Keputusan Presiden				
	HK.01.05	Instruksi Presiden				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	HK.01.06	Peraturan Menteri Kesehatan				
	HK.01.07	Keputusan Menteri				
	HK.01.08	Keputusan Bersama				
2	HK.02	Instruksi/Surat Edaran	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Hukum
	HK.02.01	Instruksi/Surat Edaran Menteri Kesehatan				
	HK.02.02	Keputusan/Surat Edaran Pejabat setingkat eselon I				
	HK.02.03	Keputusan/Surat Edaran pejabat setingkat eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)				
3	HK.03	Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Hukum
	HK.03.01	Kerja Sama Dalam Negeri				
	HK.03.02	Kerja Sama Luar Negeri				
4	HK.04	Pembinaan Hukum	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Hukum
	HK.04.01	Sosialisasi Hukum				
	HK.04.02	Dokumentasi Hukum (JDIH)				
5	HK.05	Bantuan Hukum	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Hukum
	HK.05.01	Bantuan Hukum Kasus Pidana				
	HK.05.02	Bantuan Hukum Kasus Perdata				
	HK.05.03	Bantuan Hukum Tata Usaha Negara				
	HK.05.04	Bantuan Hukum Hak Uji Materiil				
	HK.05.05	Bantuan Hukum <i>Judicial Review</i>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					Kementerian Kesehatan	
6	HK.06	Kasus/Sengketa Hukum	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bidang Hukum
	HK.06.01	Kasus/Sengketa Hukum Pidana				
	HK.06.02	Kasus/Sengketa Hukum Perdata				
	HK.06.02	Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara				
7	HK.07	Hak Atas Kekayaan Intelektual	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Hukum
	HK.07.01	Hak Cipta				
	HK.07.02	Hak Paten (Hak Biasa dan Hak Sederhana)				
	HK.07.03	Hak Merk				
IV	<b>IR. INFORMATIKA</b>					
1	IR.01	Pengembangan Sistem Informasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Teknologi dan Data Informasi
	IR.01.01	Pembuatan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Informasi atau Aplikasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					Kementerian Kesehatan	
		Administrasi Kegiatan pembuatan/pengembangan/pemeliharaan sistem informasi atau aplikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Teknologi dan Data Informasi
	IR.01.02	Standardisasi Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Teknologi dan Data Informasi
2	IR.02	Pengelolaan Teknologi Informasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Teknologi dan Data Informasi
	IR.02.01	Pengelolaan Aplikasi dan Database				
	IR.02.02	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi				
	IR.02.03	Keamanan Informasi - Penyelenggaraan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran - Berita Acara Penyidikan Keamanan Informasi - Pengelolaan Keamanan Informasi (ISO 27001)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Teknologi dan Data Informasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
		Berkas kegiatan pengelolaan keamanan informasi (sosialisasi, webinar, dan lain-lain)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Teknologi dan Data Informasi
3	IR.03	Pengelolaan Data dan Informasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Teknologi dan Data Informasi
	IR.03.01	Analisis Data dan Informasi				
	IR.03.02	Tata Kelola Kesehatan dan Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Teknologi dan Data Informasi
V	<b>KM. KOMUNIKASI PUBLIK</b>					
1	KM.01	Media Masa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik
	KM.01.01	Liputan dan Dokumentasi				
	KM.01.02	Wawancara				
	KM.01.03	Penyajian Berita dan Konten Media Sosial				
	KM.01.04	Pertemuan Media Massa				
	KM.01.05	Kompetisi Komunikasi				
	KM.01.06	<i>Press Tour</i>				
2	KM.02	Opini Publik	Biasa/Terbuka	Publik		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KM.02.01	Analisis Opini Publik			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik
	KM.02.02	Strategi Komunikasi				
3	KM.03	Produksi Komunikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik
	KM.03.01	Pembuatan Film atau Video				
	KM.03.02	Advertorial Cetak dan <i>Online</i>				
4	KM.04	Hubungan Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik
	KM.04.01	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah				
	KM.04.02	Hubungan Antar Lembaga Nonpemerintah				
	KM.04.03	Forum Kehumasan				
	KM.04.04	Layanan Informasi				
	KM.04.05	Publikasi				
5	KM.05	Penerbitan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik
	KM.05.01	Penerbitan				
6	KM.06	Perpustakaan				
	KM.06.01	Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik
	KM.06.02	Bimbingan Teknis Perpustakaan				
VI	KN. KEKAYAAN NEGARA					
1	KN.01	Barang Milik Negara (BMN)				
	KN.01.01	Perencanaan Kebutuhan BMN	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Keuangan dan BMN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					kinerja Kementerian Kesehatan	
	KN.01.02	Penggunaan BMN	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Keuangan dan BMN
	KN.01.03	Pemanfaatan BMN				
	KN.01.04	Asuransi BMN				
	KN.01.05	Penatausahaan BMN				
	KN.01.06	Inventarisasi BMN				
	KN.01.07	Pelaporan BMN				
	KN.01.08	Penghapusan BMN				
	KN.01.09	Pengelolaan Rumah Negara				
	VII	KP. KEPEGAWAIAN				
1	KP.01	Pengadaan Pegawai	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang	Bidang SDM
	KP.01.01	Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
1	KP.01.02	Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
	KP.01.03	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
	KP.01.04	Administrasi Pegawai Negeri Sipil				
	KP.01.05	Identitas Perseorangan / <i>Personal File</i> Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
	KP.01.06	Identitas Perseorangan / <i>Personal File</i> Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang secara Individual Ditentukan oleh Menteri yang Berjasa/ Terlibat Peristiwa Berskala Nasional				
	KP.01.07	Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus				
	KP.01.08	Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
	KP.01.09	Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
	KP.01.10	Pegawai Perbantuan (Magang, Bawah Kendali Operasi, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)				
	KP.02	Mutasi Pegawai	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang SDM
2	KP.02.01	Kenaikan Pangkat				
	KP.02.02	Kenaikan Gaji Berkala (KGB)				
	KP.02.03	Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiu				
	KP.02.04	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)				
	KP.02.05	Dukungan Informasi Kepegawaian				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
3	KP.03	Pengembangan Pegawai	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang SDM
	KP.03.01	Pengembangan Karier				
	KP.03.02	Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu				
	KP.03.03	Perancangan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi				
	KP.03.04	Penugasan/Surat Perintah Pegawai				
	KP.03.05	Manajemen Talenta				
4	KP.04	<i>Corporate University</i> Kementerian Kesehatan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bidang SDM
	KP.04.01	Penilaian Kompetensi				
	KP.04.02	Rencana Pengembangan Kompetensi				
	KP.04.03	Program Pengembangan Kompetensi				
	KP.04.04	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi				
	KP.04.05	Pengelolaan <i>Corporate University</i>				
	KP.04.06	Evaluasi Pengembangan Kompetensi				
5	KP.05	Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KP.05.01	Penegakan Disiplin Pegawai → masukan dari hukum rahasia	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bidang SDM
	KP.05.02	Kesejahteraan Pegawai	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bagian SDM
	KP.05.03	Penghargaan bagi PNS				
	KP.05.04	Penghargaan Lainnya				
	KP.05.05	Pemeriksaan Kesehatan				
	KP.05.06	Tata Usaha Kepegawaian				
	KP.05.07	Organisasi Non -Kedinasan				
VIII	<b>KR. KERUMAH TANGGAAN</b>					
1	KR.01	Pelayanan Kerumah tanggaan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bagian Rumah Tangga
	KR.01.01	Pelayanan Umum				
	KR.01.02	Pelayanan Khusus				
	KR.01.03	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai				
	KR.01.04	Gerakan Kantor Berhias (GKB)				
2	KR.02	Pemeliharaan dan Perbaikan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang	
	KR.02.01	Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
3	KR.02.02	Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas/Wisma/Gudang			mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bagian Rumah Tangga
	KR.02.03	Pertamanan/ <i>Landscaping</i> /Penghijauan				
	KR.02.04	Peralatan Kantor, Mesin dan Pengolah Data				
	KR.02.05	Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja				
4	KR.03	Pengelolaan Jaringan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bagian Rumah Tangga
	KR.03.01	Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi				
	KR.03.02	Pengelolaan Jaringan Listrik				
	KR.03.03	Pengelolaan Jaringan Air				
	KR.03.04	Pengelolaan TV Kabel				
5	KR.03.05	Pelaksanaan Penghematan Energi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bagian Rumah Tangga
	KR.04	Pengelolaan Kendaraan Dinas				
	KR.04.01	Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas				
	KR.04.02	Pengelolaan Kendaraan Dinas				
	KR.04.03	Penggunaan Kendaraan Dinas				
5	KR.05	Ketertiban dan Keamanan	Biasa/Terbuka	Publik		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KR.05.01	Pengamanan			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bagian Rumah Tangga
	KR.05.02	Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan				
	KR.05.03	Administrasi Pengelolaan Parkir				
IX	KS. KERJA SAMA LUAR NEGERI					
1	KS.01	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kerja Sama Luar Negeri
	KS.01.01	Telaah Permohonan				
	KS.01.02	Dokumen Kerja Sama Intenasional				
	KS.01.03	Kertas Posisi/Surat Pendeklegasian				
	KS.01.04	Registrasi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)				
2	KS.02	Penyusunan Program, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Kesehatan Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kerja Sama Luar Negeri
	KS.02.01	Kerja Sama Kesehatan Bilateral				
	KS.02.02	Kerja Sama Kesehatan Regional				
	KS.02.03	Kerja Sama Kesehatan Multilateral				
3	KS.03	Administrasi Kerja Sama Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Kerja Sama Luar Negeri
	KS.03.01	Administrasi Kerja Sama Antar-Lembaga Pemerintah, Lembaga Non-Pemerintah dan International Non-Government Organization (INGO)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KS.03.02	Administrasi Tenaga Kerja Asing Kesehatan			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
	KS.03.03	Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri				
X	<b>KU. KEUANGAN</b>					
1	KU.01	Tata Laksana Keuangan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Keuangan dan BMN
	KU.01.01	Pendapatan Negara Bukan Pajak				
	KU.01.02	Hibah Langsung Luar Negeri Barang/Jasa				
	KU.01.03	Penghapusan Piutang				
2	KU.02	Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Keuangan dan BMN
	KU.02.01	Belanja Pegawai				
	KU.02.02	Administrasi dan Data Dukung Belanja Pegawai				
	KU.02.03	Belanja Barang				
	KU.02.04	Belanja Modal				
	KU.02.05	Pengeluaran Anggaran				
3	KU.03	Pengelolaan Perbendaharaan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Keuangan dan BMN
	KU.03.01	Perbendaharaan				
	KU.03.02	Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KU.03.03	Pajak	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Keuangan dan BMN
	KU.03.04	Penerimaan Non Pajak	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Keuangan dan BMN
	KU.03.05	Pengembalian Belanja				
	KU.03.06	Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Keuangan dan BMN
	KU.03.07	Verifikasi Anggaran				
	KU.03.08	Pembukuan Anggaran				
4	KU.04	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Keuangan dan BMN
	KU.04.01	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang)				
	KU.04.02	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Koordinator Wilayah (pada UPT yang menjadi Koordinator Wilayah)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KU.04.03	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Eselon I (Biro Keuangan dan BMN/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan)				
	KU.04.04	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan (Biro Keuangan dan BMN)				
	KU.04.05	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum				
	KU.04.06	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Non-BLU				
	KU.04.07	Penyiapan Bahan Analisis Akuntansi Kementerian				
	KU.04.08	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja				
	KU.04.09	Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Unit Eselon I				
	KU.04.10	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan				
XI	MR. MANAJEMEN RISIKO					
1	MR.01	Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Keuangan dan BMN
	MR.01.01	<i>Risk Register</i>				
	MR.01.02	Laporan Manajemen Risiko				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					Kementerian Kesehatan	
XII	OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA					
1	OT.01	Organisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Organisasi
	OT.01.01	Penataan Organisasi				
	OT.01.02	Evaluasi Organisasi				
	OT.01.03	Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor				
	OT.01.04	Budaya Kerja Organisasi				
2	OT.02	Ketatalaksanaan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Organisasi
	OT.02.01	Proses Bisnis				
	OT.02.02	Standar Operasional Prosedur				
	OT.02.03	Pedoman Ketatalaksanaan				
3	OT.03	Analisis Jabatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Organisasi
	OT.03.01	Informasi Jabatan				
	OT.03.02	Analisis Beban Kerja				
	OT.03.03	Evaluasi Jabatan				
4	OT.04	Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Organisasi
	OT.04.01	Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Internal				
	OT.04.02	<i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi				
	OT.04.03	Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi				
XIII	PR. PERENCANAAN					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
1	PR.01	Perencanaan Strategis dan Program	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Perencanaan dan Anggaran
	PR.01.01	Perencanaan Strategis				
	PR.01.02	Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan Unit Kerja/ UPT/ Unit Organisasi				
	PR.01.03	Nota Keuangan dan Lampiran Pidato Presiden				
	PR.01.04	Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)Kementerian Kesehatan				
	PR.01.05	Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP Unit Kerja/ UPT/ Unit Organisasi				
	PR.01.06	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan				
	PR.01.07	Usulan Perencanaan				
	PR.01.08	Usulan Program Transfer Daerah				
	PR.02	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan				
2	PR.02.01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Perencanaan dan Anggaran
	PR.02.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)				
3	PR.03	Rencana Kerja Tahunan				
	PR.03.01	Rencana Kerja Tahunan Kementerian Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Perencanaan dan Anggaran
	PR.03.02	Penetapan Kinerja Menteri dan Pimpinan Madya				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PR.03.02	Penetapan Kinerja Eselon II ke Bawah			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
4	PR.04	Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Perencanaan dan Anggaran
	PR.04.01	Penyusunan Anggaran Kementerian Kesehatan				
	PR.04.02	Revisi Dokumen Anggaran Kementerian Kesehatan				
	PR.04.03	Penyusunan Anggaran Transfer Daerah				
	PR.04.04	Revisi Dokumen Anggaran Transfer Daerah				
5	PR.05	Pelaporan dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Perencanaan dan Anggaran
	PR.05.01	Laporan Berkala				
	PR.05.02	Laporan Tahunan				
	PR.05.03	Laporan Khusus				
	PR.05.04	<i>Progress Report</i>				
	PR.05.05	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan				
	PR.05.06	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan Unit Kerja/ UPT/ Unit Organisasi				
	PR.05.07	Laporan Program Transfer Daerah				
	PR.05.08	Evaluasi Program Transfer Daerah Termasuk Dana Alokasi Khusus Final				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
XVI	PS. PENGAWASAN					
1	PS.01	Audit	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bidang Pengawasan
	PS.01.01	Audit Kinerja				
	PS.01.02	Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)				
	PS.01.03	<i>Probitry Audit</i>				
	PS.01.04	Audit Penugasan Khusus				
2	PS.02	Reviu	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pengawasan
	PS.02.01	Reviu Laporan Keuangan				
	PS.02.02	Reviu RKA-KL				
	PS.02.03	Reviu Lainnya				
	PS.02.04	Reviu Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal/ Verifikasi Utang				
3	PS.03	Evaluasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pengawasan
	PS.03.01	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kesehatan				
	PS.03.02	Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)				
	PS.03.03	Evaluasi Reformasi dan Birokrasi (RB)				
	PS.03.04	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PS.03.05	Evaluasi Efektivitas Kepatuhan SKI/SPI				
	PS.03.06	Evaluasi Program Lainnya				
4	PS.04	Pengaduan Masyarakat	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bidang Pengawasan
	PS.04.01	Penanganan Pengaduan Masyarakat				
	PS.04.02	Daftar Hitam				
	PS.04.03	Klarifikasi				
5	PS.05	Laporan Hasil Pengawasan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pengawasan
	PS.05.01	Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS)				
6	PS.06	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya	Bidang Pengawasan
	PS.06.01	Laporan TP-TGR				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
7	PS.07	Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bidang Pengawasan
	PS.07.01	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan				
8	PS.08	Program Pencegahan Korupsi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pengawasan
	PS.08.01	Pengendalian Gratifikasi/ <i>Sponsorship</i>				
	PS.08.02	Pembangunan Zona Integritas (ZI)				
	PS.08.03	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)				
	PS.08.04	Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN)				
	PS.08.05	Program Pencegahan Korupsi Lainnya				
9	PS.09	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Pengawasan
	PS.09.01	Konsultasi Pengawasan				
	PS.09.02	Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan				
	PS.09.03	Kebijakan Pengawasan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PS.09.04	Perencanaan Pengawasan			kinerja Kementerian Kesehatan	
XV	UM. UMUM					
1	UM.01	Kesekretariatan Pimpinan				
	UM.01.01	Penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Menteri dan Wakil Menteri) Terkait Bidang Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	TU Pimpinan
	UM.01.02	Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	TU Pimpinan
	UM.01.03	Rapat Koordinasi Direktorat				
	UM.01.04	Rapat Koordinasi Staf				
	UM.01.05	Rapat Koordinasi Pusat/ Biro				
	UM.01.06	Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan				
2	UM.02	Keprotokolan				
	UM.02.01	Lambang, Bendera dan Lagu Kebangsaan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	TU Pimpinan
	UM.02.02	Pelaksanaan Upacara				
	UM.02.03	Administrasi Audiensi dan Jamuan				
	UM.02.04	Agenda Pimpinan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang	TU Pimpinan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
	UM.02.05	Ucapan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	TU Pimpinan
XVI	UI. KETATAUSAHAAN GAJI					
1	UM.01	Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bagian Gaji
	UM.01.01	Pembayaran Gaji ASN dan CASN				
	UM.01.02	Tunjangan ASN dan CASN				
	UM.01.03	Pemotongan Pajak ASN dan CASN				
	UM.01.04	Rekening Gaji ASN dan CASN				
	UM.01.05	Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan				
	UM.01.06	Penggunaan Aplikasi e-Monev				
2	UM.02	Pengelolaan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian (TKDP)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Gaji
	UM.02.01	Administrasi Pengelolaan Pembayaran Insentif TKDP				
	UM.02.02	Tunjangan Uang Lembur TKDP				
	UM.02.03	Pemotongan Pajak TKDP				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	UM.02.04	Rekening Gaji TKDP			Kementerian Kesehatan	
	UM.02.05	Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan TKDP				

**Tabel 2**  
**Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fungsi Substantif**  
**di Lingkungan Kementerian Kesehatan**

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
I	<b>AD. ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN</b>					
1	AD.01	Analisis Lingkungan Strategis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kebijakan Kesehatan
	AD.01.01	Analisis Politik Kesehatan				
	AD.01.02	Analisis Sosial Ekonomi				
	AD.01.03	Analisis Perilaku				
	AD.01.04	Analisis Kesehatan Intelelegensi				
2	AD.02	Pelaksanaan Program Analisis Lingkungan Strategis	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	AD.02.01	Analisis Politik Kesehatan				
	AD.02.02	Analisis Sosial Ekonomi				
	AD.02.03	Analisis Perilaku				
	AD.02.04	Analisis Kesehatan Intelelegensi				
3	AD.03	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Lingkungan Strategis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kebijakan Kesehatan
	AD.03.01	Analisis Politik Kesehatan				
	AD.03.02	Analisis Sosial Ekonomi				
	AD.03.03	Analisis Perilaku				
	AD.03.04	Analisis Kesehatan Intelelegensi				
II	<b>BP. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN</b>					
1	BP.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	BP.01.01	Kebijakan Upaya Kesehatan			mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	BP.01.02	Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan				
	BP.01.03	Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan				
	BP.01.04	Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan				
2	BP.02	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kebijakan Kesehatan
	BP.02.01	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Upaya Kesehatan				
	BP.02.02	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan				
	BP.02.03	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan				
	BP.02.04	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan				
3	BP.03	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kebijakan Kesehatan
	BP.03.01	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Upaya Kesehatan				
	BP.03.02	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan				
	BP.03.03	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan				
	BP.03.04	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
4	BP.04	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kebijakan Kesehatan
	BP.04.01	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Upaya Kesehatan				
	BP.04.02	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan				
	BP.04.03	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan				
	BP.04.04	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan				
5	BP.05	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kebijakan Kesehatan
	BP.05.01	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan Kebijakan Upaya Kesehatan				
	BP.05.02	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan				
	BP.05.03	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan				
	BP.05.04	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan				
III	<b>DP. PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN</b>					
1	DP.01	Fasilitasi Produksi dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan				
	DP.01.01	Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Spesialis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bidang Tenaga Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					Kesehatan	
		Database Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
DP.01.02		Program Bantuan Biaya Pendidikan SDM Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
		Database Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
DP.01.03		Program Afirmasi Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Tenaga Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Database Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	DP.01.04	Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
		Database Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	DP.01.05	Penyiapan Program Studi Pendidikan Tinggi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Tenaga Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					kinerja Kementerian Kesehatan	
	DP.01.06	Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Tinggi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	DP.01.07	Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan				
	DP.01.08	Program Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Dokter Melalui Pendidikan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
2	DP.02	Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA)				
	DP.02.01	Penyelenggaraan Penyelarasan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan IDUKA	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	DP.02.02	Penyiapan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan atau IDUKA	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Tenaga Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					kinerja Kementerian Kesehatan	
3	DP.03	Penyiapan Cadangan Tenaga Kesehatan dalam Situasi Khusus				
	DP.03.01	Penyiapan Tenaga Kesehatan Cadangan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	DP.03.02	Mobilisasi Tenaga Kesehatan Cadangan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	DP.03.03	Pembinaan Tenaga Kesehatan Cadangan				
4	DP.04	Fasilitasi Pembinaan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Milik Kementerian Kesehatan Terkait Bidang Penyediaan Tenaga Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	DP.04.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan				
	DP.04.02	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan				
	DP.04.03	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tingkat Pusat				
	DP.04.04	Peningkatan Kapasitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
5	DP.05	Fasilitasi Penjaminan Mutu Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	DP.05.01	Fasilitasi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan				
	DP.05.02	Fasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan				
	DP.05.03	Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan				
6	DP.06	Fasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	DP.06.01	Fasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan				
IV	<b>FH. KETAHANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN</b>					
1	FH.01	Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produk Biologi Dalam Negeri	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FH.01.01	Bahan Baku Fitofarmaka Dalam Negeri				
	FH.01.02	Sediaan Fitofarmaka Dalam Negeri				
	FH.01.03	Bahan Baku Produk Biologi Dalam Negeri				
	FH.01.04	Sediaan Produk Biologi Dalam Negeri				
	FH.01.05	Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produksi Biologi Dalam Negeri				
2	FH.02	Bahan Baku dan Sediaan Vaksin Dalam Negeri	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FH.02.01	Bahan Baku Vaksin Dalam Negeri				
	FH.02.02	Sediaan Vaksin Dalam Negeri				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	FH.02.03	Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku dan Sediaan Vaksin Dalam Negeri			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
3	FH.03	Alat Kesehatan Diagnostik In-Vitro Dalam Negeri	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FH.03.01	Alat Kesehatan				
	FH.03.02	Alat Kesehatan Diagnostik In-Vitro Dalam Negeri				
	FH.03.03	Uji Klinik Alat Kesehatan Dalam Negeri				
	FH.03.04	Pemantauan dan Evaluasi Alat Kesehatan				
4	FH.04	Bahan Baku Obat Kimia dan Obat Kimia Dalam Negeri	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FH.04.01	Sediaan Farmasi				
	FH.04.02	Bahan Baku Obat Kimia Dalam Negeri				
	FH.04.03	Obat Kimia Dalam Negeri				
	FH.04.04	Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku Obat Kimia dan Obat Kimia Dalam Negeri				
5	FH.05	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Alat Kesehatan dan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FH.05.01	TKDN Alat Kesehatan Dalam Negeri				
	FH.05.02	Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri				
	FH.05.03	Pemantauan dan Evaluasi TKDN Alat Kesehatan dan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
V	FK. PENGAWASAN ALAT KESEHATAN					
1	FK.01	Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Produksi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FK.01.01	Audit Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik				
	FK.01.02	Audit Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik				
	FK.01.03	Verifikasi Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik				
	FK.01.04	Verifikasi Sertifikasi Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik				
	FK.01.05	Pengawasan Post-Market Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2	FK.02	Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Distribusi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FK.02.01	Audit Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik				
	FK.02.02	Verifikasi Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik				
	FK.02.03	Pengawasan Post-Market Sarana Distribusi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
3	FK.03	Pengawasan Produk	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FK.03.01	Alat Kesehatan				
	FK.03.02	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga				
	FK.03.03	Pengawasan Iklan				
	FK.03.04	Kejadian Tidak Diinginkan				
	FK.03.05	Pengawasan Vigilans				
4	FK.04	Pembakuan dan Pengujian	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FK.04.01	Standar Pengawasan Produk				
	FK.04.02	Standar Nasional Indonesia (SNI)				
	FK.04.03	Standar Pengawasan Sarana Produksi				
	FK.04.04	Standar Pengawasan Sarana Distribusi				
	FK.04.05	Standar Sistem Manajemen Mutu	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5	FK.05	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan (Wasmatlitrik) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat				
	FK.05.01	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penyidikan	Terbatas	Pejabat		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	FK.05.02	Penanganan Pengaduan Masyarakat		Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FK.05.03	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FK.05.04	Sistem Informasi Penyidikan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6	FK.06	Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan				
	FK.06.01	Pengawasan Bidang Kesehatan				
	FK.06.02	Penyidikan Bidang Kesehatan				
VI	FP. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN					
1	FP.01	Sertifikasi dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang	Bidang Kefarmasian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
2	FP.01.01	Produksi dan Distribusi Kefarmasian di bidang Obat			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	dan Alat Kesehatan
	FP.01.02	Izin Pedagang Besar Farmasi				
	FP.01.03	Izin Industri Farmasi				
2	FP.02	Pengendalian Harga dan Pemantauan Pasar obat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FP.02.01	Harga Obat Katalog				
	FP.02.02	Harga Obat Generik				
	FP.02.03	Harga Obat Program Khusus				
	FP.02.04	Pasar Obat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FP.02.05	Pasar Perbekalan Kesehatan				
	FP.02.06	E-Logistik Obat				
	FP.02.07	E-Monev Obat				
3	FP.03	Penilaian Farmakoekonomi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FP.03.01	Kebijakan di Bidang Farmakoekonomi				
	FP.03.02	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Farmakoekonomi				
	FP.03.03	Implementasi Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
4	FP.04	Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Special Access Scheme	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang	Bidang Kefarmasian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
5	FP.04.01	Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Narkotika			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	dan Alat Kesehatan
	FP.04.02	Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Psikotropika				
	FP.04.03	Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Prekursor Farmasi				
	FP.04.04	Perizinan di Bidang Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi				
VII	FP.05	Seleksi Fitofarmaka dan Pembinaan Industri dan Usaha Obat Tradisional	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FP.05.01	Produksi dan Distribusi Industri di Bidang Obat Tradisional				
	FP.05.02	Produksi dan Distribusi Industri di Bidang Kosmetika				
<b>FR. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN</b>						
1	FR.01	Penyusunan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FR.01.01	Standardisasi Alat Kesehatan				
	FR.01.02	Standardisasi Produk Diagnostik				
	FR.01.03	Standardisasi Produk PKRT				
	FR.01.04	Standardisasi Pengembangan Produk Mandiri				
	FR.01.05	Harmonisasi Regulasi Alat Kesehatan				
	FR.01.06	Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Jalur Khusus ( <i>Special Access Scheme</i> )				
2	FR.02	Klarifikasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FR.02.01	Klarifikasi Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT				
	FR.02.02	<i>Double Keagenan</i>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
3	FR.03	Perizinan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FR.03.01	Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT				
	FR.03.02	Surat keterangan Alat Kesehatan dan PKRT				
	FR.03.03	Rekomendasi Persetujuan Impor				
	FR.03.04	Persetujuan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT				
	FR.03.05	Persetujuan Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus ( <i>Special Access Scheme</i> )				
	FR.03.06	Izin Distribusi Alat Kesehatan				
VIII	FY. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN					
1	FY.01	Seleksi Obat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.01.01	Formularium Nasional				
	FY.01.02	Formularium Haji				
	FY.01.03	Daftar Obat Esensial Nasional				
2	FY.02	Perencanaan Kebutuhan Obat dan Digital <i>Inventory</i>	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.02.01	Perencanaan Kebutuhan Obat Perbekalan Kesehatan dan Vaksin untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Haji				
	FY.02.02	Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dan Digital <i>Inventory</i>				
	FY.02.03	Sistem Informasi Perencanaan Kebutuhan Obat dan Digital <i>Inventory</i>				
3	FY.03	Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
4	FY.03.01	Tata Kelola Obat <i>Buffer Stock</i> Provinsi dan Nasional	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.03.02	Tata Kelola Obat Program dan Pelayanan Kesehatan Dasar				
	FY.03.03	Kebijakan Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.03.04	Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat <i>Buffer Stock</i> dan Obat Program	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4	FY.04	Pengendalian Ketersediaan Vaksin	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.04.01	Vaksin				
	FY.04.02	<i>Auto Disable Syringe (ADS)</i> dan Safety Box				
	FY.04.03	Reagen				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					Kementerian Kesehatan	
	FY.04.04	Kebijakan Pengendalian Ketersediaan Vaksin	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.04.05	Data dan Evaluasi Ketersediaan Vaksin	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5	FY.05	Pengendalian Ketersediaan Obat				
	FY.05.01	Obat Program Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.05.02	Kebijakan Pengendalian Ketersediaan Obat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					Kesehatan	
	FY.05.03	Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6	FY.06	Farmasi Manajemen dan Farmasi Klinis				
	FY.06.01	Kebijakan Farmasi Manajemen dan Farmasi Klinis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.06.02	Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.06.03	Sistem Informasi Pelayanan Kefarmasian				
	FY.06.04	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian				
7	FY.07	Evaluasi Penggunaan Obat Rasional				
	FY.07.01	Kebijakan Pengendalian dan Penggunaan Obat Rasional	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					kinerja Kementerian Kesehatan	
	FY.07.02	Promosi dan Edukasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	FY.07.03	Pemantauan dan Evaluasi				
IX	<b>GM. GIZI MASYARAKAT</b>					
1	GM.01	Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	GM.01.01	Pedoman Gizi Seimbang				
	GM.01.02	Pemberian Makanan Bayi dan Anak				
	GM.01.03	Hari Gizi Nasional				
	GM.01.04	Pelayanan Gizi Masyarakat				
2	GM.02	Kewaspadaan Gizi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	GM.02.01	Standar Antropometri				
	GM.02.02	Pemantauan Konsumsi Gizi				
	GM.02.03	Pemberian Gizi dalam Kegiatan Bencana				
	GM.02.04	Pemantauan Status Gizi				
	GM.02.05	Jaringan Informasi Pangan dan Gizi				
3	GM.03	Penanggulangan Masalah Gizi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	GM.03.01	Stunting/pendek				
	GM.03.02	Manajemen Taburia				
	GM.03.03	Suplementasi Gizi Tablet Tambah Darah dan Vitamin A				
	GM.03.04	Buffer Stock Makanan Pendamping				
4	GM.04	Pengelolaan Konsumsi Gizi	Biasa/Terbuka	Publik		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	GM.04.01	Pelayanan Gizi di Puskesmas			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	GM.04.02	Pelayanan Gizi di Rumah Sakit				
	GM.04.03	Pekan ASI Sedunia				
	GM.04.04	Gizi Buruk				
X	HK. KESEHATAN HAJI					
1	HJ.01	Pelayanan Kesehatan Haji	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Haji
	HJ.01.01	Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji				
	HJ.01.02	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji				
	HJ.01.03	Pelatihan Petugas Kesehatan Haji				
2	HJ.02	Surveilans Kesehatan Haji	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Haji
	HJ.02.01	Surveilans Kesehatan Haji				
	HJ.02.02	Analisis Data Kesehatan Haji				
3	HJ.03	Strategi Pengembangan Kesehatan Haji	Biasa/Terbuka	Publik		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	HJ.03.01	Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Haji			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Haji
	HJ.03.02	Kebijakan Kesehatan Haji				
4	HJ.04	Pengendalian Risiko dan Promosi Kesehatan Haji	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Haji
	HJ.04.01	Program Manasik Kesehatan Haji				
	HJ.04.02	Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan Haji				
	HJ.04.03	Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji				
5	HJ.05	Sistem Informasi dan Publikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Haji
	HJ.05.01	Informasi dan Publikasi Kesehatan Haji				
	HJ.05.02	Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Haji

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
XI	IM. IMUNISASI					
1	IM.01	Imunisasi Dasar dan Bayi di Bawah Dua Tahun (Baduta)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	IM.01.01	Imunisasi Hepatitis B0 (HB0), Bacillus Calmette-Guérin (BCG), Polio (Oral Polio Vaccine (OPV), Inactivated Polio Vaccine (IPV)), Dipteri Pertusis Tetanus (DPT)-Hepatitis B (HB), Haemophilus Influenzae type B (HiB), MR, JE Bayi di Bawah Dua Tahun, Human Papiloma Virus (HPV), dan Rotavirus				
	IM.01.02	Pekan Imunisasi				
	IM.01.03	Data Imunisasi				
2	IM.02	Imunisasi Tambahan dan Khusus	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	IM.02.01	Imunisasi Tambahan				
	IM.02.02	Imunisasi Antigen Baru				
	IM.02.03	Imunisasi Respons Kejadian Luar Biasa				
	IM.02.04	Imunisasi Khusus untuk Jamaah Haji/Umroh				
	IM.02.05	Imunisasi Coronavirus Disease-19 (COVID-19)				
3	IM.03	Imunisasi Wanita Usia Subur (WUS), Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	IM.03.01	Imunisasi WUS				
	IM.03.02	Surveilans PD3I				
	IM.03.03	Surveilans KIPI				
4	IM.04	Imunisasi Usia Sekolah dan Sumber Daya Imunisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	IM.04.01	Imunisasi Anak Sekolah				
	IM.04.02	Sumber Daya Manusia Imunisasi				
	IM.04.03	Logistik Imunisasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	IM.04.04	Sistem Informasi Imunisasi			Kesehatan	
	IM.04.05	Koordinasi Lintas Sektor (LS) dan Lintas Program (LP)				
XII	JP. PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN					
1	JP.01	Pembiayaan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan
	JP.01.01	<i>National Health Account (NHA) / Provincial Health Account(PHA) / District Health Account(DHA)</i>				
	JP.01.02	Analisis Biaya Kesehatan				
2	JP.02	Jaminan Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan
	JP.02.01	Kepesertaan				
	JP.02.02	Iuran				
	JP.02.03	Tarif				
	JP.02.04	<i>Clinical Advisory</i>				
	JP.02.05	Manfaat Pelayanan				
	JP.02.06	Laporan Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Jaminan Kesehatan				
3	JP.03	Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan
	JP.03.01	Penilaian Teknologi Kesehatan / <i>Health Technology Assessment (PTK/HTA)</i>				
	JP.03.02	Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
XIII	KG. KESEHATAN KELUARGA					
1	KG.01	Kesehatan Maternal dan Neonatal	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KG.01.01	Pelayanan Antenatal Terpadu				
	KG.01.02	Pelayanan Kelas Ibu Hamil				
	KG.01.03	Pencegahan Penularan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)				
	KG.01.04	Kemitraan Bidan dan Dukun				
	KG.01.05	Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)				
	KG.01.06	Supervisi Fasilitatif				
	KG.01.07	Audit Maternal Perinatal				
	KG.01.08	Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/ Pemberdayaan Masyarakat				
	KG.01.09	Tanda Bahaya pada Kehamilan				
	KG.01.10	Surveilans Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak				
	KG.01.11	Pelayanan Kesehatan Neonatal				
	KG.01.12	Manajemen Asfiksia				
	KG.01.13	Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)				
	KG.01.14	Pencegahan Infeksi pada Proses Melahirkan				
	KG.01.15	Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal				
	KG.01.16	<i>Screening Hypothyroid Congenital</i>				
	KG.01.17	Kelainan Bawaan pada Janin dan Bayi Baru Lahir				
2	KG.02	Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KG.02.01	Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang (SDIDTK)				
	KG.02.02	Rujukan Tumbuh Kembang				
	KG.02.03	Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer ( <i>The Implementation of the Integrated Management of Childhood Illnesses</i> (IMCI)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
		<i>Computerized Adaptation and Training Tools (ICATT))</i>				
	KG.02.04	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)				
	KG.02.05	Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat				
	KG.02.06	Buku Kesehatan Ibu dan Anak				
	KG.02.07	Kohort Bayi, Kohort Anak Balita dan Anak Pra-Sekolah				
	KG.02.08	Anak dengan Disabilitas				
	KG.02.09	<i>Knowledge Sharing Program (KSP)</i>				
	KG.02.10	Kelas Ibu Balita				
3	KG.03	Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KG.03.01	Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)				
	KG.03.02	Akselarasi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)				
	KG.03.03	Kader Kesehatan Remaja/Konselor Sebaya				
	KG.03.04	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja				
	KG.03.05	Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah				
	KG.03.06	Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah				
	KG.03.07	Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Remaja				
	KG.03.08	Jejaring Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja				
4	KG.04	Kesehatan Reproduksi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KG.04.01	Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin				
	KG.04.02	Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi PUS/Skrining Layak Hamil				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KG.04.03	Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Mahasiswa			Kesehatan	
	KG.04.04	Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja				
	KG.04.05	Pelayanan Kontrasepsi/Keluarga Berencana				
	KG.04.06	Pelayanan Infertilitas dan Kesehatan Reproduksi Lainnya				
	KG.04.07	Kemitraan dan Jejaring Kesehatan Reproduksi				
	KG.04.08	Pendampingan/Penyeliaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Reproduksi				
5	KG.05	Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KG.05.01	Penyelenggaraan Puskesmas Santun Lansia dan Pelayanan Geriatri Terpadu di Rumah Sakit				
	KG.05.02	Posyandu Lanjut Usia/Pelayanan Home Care/Long Term Care (PJP)				
	KG.05.03	Kemitraan LP/LS dalam penyelenggaraan kesehatan lansia				
	KG.05.04	<i>Training of Trainer/Pelatihan/Orientasi Kesehatan Lanjut Usia</i>				
	KG.05.05	Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan Lanjut Usia				
	KG.05.06	Pendampingan/Penyeliaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Lansia				
	KG.05.07	Data Dan Informasi Kesehatan Lansia				
	KG.05.08	Isu Global Kesehatan Lansia				
	KG.06	Kesehatan Kelompok Rentan				
6	KG.06.01	Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KG.06.02	Paket Pelayanan Awal Minimal (PPAM)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KG.06.03	Pelayanan Kesehatan Bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya			Kesehatan	
	KG.06.04	Pengarusutamaan Gender				
	KG.06.05	Isu-Isu Global Kelompok Rentan				
XIV	KH. KEMAHASISWAAN					
1	KH.01	Penerimaan Mahasiswa Baru	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Poltekkes Kemkes
	KH.01.01	Penerimaan Mahasiswa Baru				
	KH.01.02	Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru				
	KH.01.03	Orientasi Mahasiswa Baru				
	KH.01.04	Berkas Mahasiswa				
	KH.01.05	Mahasiswa Asing				
2	KH.02	Registrasi Mahasiswa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Poltekkes Kemkes
	KH.02.01	Registrasi Administrasi				
	KH.02.02	Registrasi Akademik				
3	KH.03	Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Poltekkes Kemkes
	KH.03.01	Fasilitasi Mahasiswa				
	KH.03.02	Beasiswa dengan Dana Dalam Negeri				
	KH.03.03	Beasiswa dengan Dana Luar Negeri				
4	KH.04	Organisasi Mahasiswa	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Poltekkes Kemkes
	KH.04.01	Kegiatan Organisasi				
	KH.04.02	Pelaksanaan Kegiatan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
5	KH.05	Kegiatan Mahasiswa	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Poltekkkes Kemkes
	KH.05.01	Kegiatan Akademik dan Non Akademik Tingkat Nasional				
	KH.05.02	Kegiatan Akademik dan Non Akademik Tingkat Internasional				
6	KH.06	Status Mahasiswa	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Poltekkkes Kemkes
	KH.06.01	Status Mahasiswa				
	KH.06.02	Penetapan Pengunduran Diri Mahasiswa				
XV	KI. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA					
1	KI.01	Registrasi Dokter	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Konsil Kedokteran Indonesia
	KI.01.01	Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter				
	KI.01.02	Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter				
	KI.01.03	Penerbitan Registrasi Dokter Sementara				
	KI.01.04	Penerbitan Registrasi Dokter Bersyarat				
	KI.01.05	Her Registrasi Dokter				
2	KI.02	Standar Pendidikan Profesi Dokter	Terbatas	Pejabat		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KI.02.01	Standar Pendidikan Profesi Dokter				
	KI.02.02	Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis				
	KI.02.03	Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran				
	KI.02.04	Standar Pendidikan Berkelanjutan Dokter				
	KI.02.05	Pengesahan Standar Kompetensi Dokter				
3	KI.03	Registrasi Kedokteran Gigi				
	KI.03.01	Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi				
	KI.03.02	Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi				
	KI.03.03	Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Sementara				
	KI.03.04	Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Bersyarat				
	KI.03.05	Her Registrasi Dokter Gigi				
4	KI.04	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi				
	KI.04.01	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi				
	KI.04.02	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis				
	KI.04.03	Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi				
	KI.04.04	Standar Pendidikan Berkelanjutan Dokter Gigi				
	KI.04.05	Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi				
5	KI.05	Pembinaan Praktik				
	KI.05.01	Pembinaan Praktik Dokter				
	KI.05.02	Pembinaan Praktik Dokter Gigi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
6	KI.06	Pelayanan Hukum	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Konsil Kedokteran Indonesia
	KI.06.01	Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran				
	KI.06.02	Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran Gigi				
	KI.06.03	Persidangan Pemeriksaan Kedokteran				
	KI.06.04	Persidangan Pemeriksaan Kedokteran Gigi				
	KI.06.05	Tindak Lanjut/Eksekusi Keputusan				
XVI	<b>KJ. KESEHATAN JIWA</b>					
1	KJ.01	Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KJ.01.01	Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan di Institusi				
	KJ.01.02	Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan di Organisasi Lainnya				
2	KJ.02	Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KJ.02.01	Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus dan atau Disabilitas				
	KJ.02.02	Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Usia Sekolah-				
	KJ.02.03	Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja dalam Penanganan Masalah Kasus Lainnya				
	KJ.02.04	Penjangkauan Pelayanan dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa melalui Kesehatan Jiwa Bergerak				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KJ.02.05	Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
3	KJ.03	Tata Kelola Gangguan Jiwa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KJ.03.01	Kasus Gangguan Jiwa Berat				
	KJ.03.02	Kasus Gangguan Jiwa Ringan				
	KJ.03.03	Kegawatdaruratan Kesehatan Jiwa pada Situasi Krisis				
4	KJ.04	Masalah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KJ.04.01	Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi				
	KJ.04.02	Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat				
	KJ.04.03	Upaya Promotif NAPZA				
	KJ.04.04	Upaya Preventif NAPZA				
	KJ.04.05	Upaya Kuratif NAPZA	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KJ.04.06	Upaya Rehabilitatif NAPZA-				
5	KJ.05	Surveilans Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Biasa/Terbuka	Publik		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KJ.05.01	Surveilans Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	
	KJ.05.02	Sistem Informasi Kesehatan Jiwa			Kementerian Kesehatan	
	KJ.05.03	Pembinaan dan Advokasi Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Bidang Kesehatan Masyarakat	
6	KJ.06	Hari Besar Kesehatan Jiwa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KJ.06.01	Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia				
	KJ.06.02	Peringatan Hari Besar Kesehatan Jiwa Lainnya				
7	KJ.07	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Kader terkait Kesehatan Jiwa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KJ.07.01	Anak dan Remaja				
	KJ.07.02	Dewasa dan Lansia				
	KJ.07.02	Penanganan Gangguan NAPZA				
XVII	KK. PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN					
1	KK.01	NSPK Penanggulangan Krisis Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Penanggulangan Krisis Kesehatan
	KK.01.01	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan				
	KK.01.02	Ketahanan Kesehatan				
	KK.01.03	Tanggap Darurat dan Tim Kegawatdaruratan Medis				
	KK.01.04	Evaluasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi				
	KK.01.05	Kerja Sama <i>United Nations</i> dan Kemitraan Lainnya				
	KK.01.06	Pengelolaan Data dan Informasi Pemantauan Krisis Kesehatan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KK.01.07	Revitalisasi Gudang Regional				
	KK.01.08	Logistik Kesehatan dan Barang Milik Negara				
2	KK.02	Bimbingan, Informasi, Evaluasi dan Koordinasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Penanggulangan Krisis Kesehatan
	KK.02.01	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan				
	KK.02.02	Ketahanan Kesehatan				
	KK.02.03	Tanggap Darurat dan Tim kegawatdaruratan Medis				
	KK.02.04	Evaluasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi				
	KK.02.05	Kerja Sama <i>United Nations</i> dan Kemitraan Lainnya				
	KK.02.06	Pengelolaan Data dan Informasi Pemantauan Krisis Kesehatan				
	KK.02.07	Revitalisasi Gudang Regional				
	KK.02.08	Logistik Kesehatan dan Barang Milik Negara				
XVIII	KL. KESEHATAN LINGKUNGAN					
1	KL.01	Penyehatan Air, Udara, Tanah, Sanitasi Dasar dan Kawasan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	KL.01.01	Penyehatan Air				
	KL.01.02	Penyehatan Udara				
	KL.01.03	Penyehatan Tanah				
	KL.01.04	Penyehatan Sanitasi Dasar				
	KL.01.05	Penyehatan Kawasan				
2	KL.02	Penyehatan Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	KL.02.01	Peningkatan Higiene Sanitasi Pangan				
	KL.02.02	Pengawasan dan Perlindungan Higiene Sanitasi Pangan				
3	KL.03	Pengamanan Limbah dan Radiasi	Biasa/Terbuka	Publik		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	KL.03.01	Pengamanan Limbah			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	
	KL.03.01	Pengamanan Radiasi			Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4	KL.04	Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	KL.04.01	Adaptasi Perubahan Iklim				
	KL.04.02	Kebencanaan Bidang Kesehatan Lingkungan				
XIX	<b>KO. KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA</b>					
1	KO.01	Okupasi dan Surveilans Kesehatan Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KO.01.01	Kesehatan Okupasi				
	KO.01.02	Surveilans Kesehatan Kerja				
2	KO.02	Kesehatan Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KO.02.01	Kesehatan Kerja Formal				
	KO.02.02	Kesehatan Kerja Informal				
3	KO.03	Kesehatan Olahraga	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Kesehatan Masyarakat
	KO.03.01	Kesehatan Olahraga Masyarakat				
	KO.03.02	Kesehatan Olahraga Prestasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					Kesehatan	
XIX	KT. TENAGA KESEHATAN INDONESIA					
1	KT.01	Fasilitas Registrasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
	KT.01.01	Registrasi Tenaga Kesehatan				
	KT.01.02	Registrasi Psikologi Klinis				
	KT.01.03	Registrasi Perawat				
	KT.01.04	Registrasi Bidan				
	KT.01.05	Registrasi Kefarmasian				
	KT.01.06	Registrasi Tenaga Kesehatan Masyarakat				
	KT.01.07	Registrasi Tenaga Kesehatan Lingkungan				
	KT.01.08	Registrasi Tenaga Gizi				
	KT.01.09	Registrasi Tenaga Keterapian Fisik				
	KT.01.10	Registrasi Tenaga Keteknisian Medis				
	KT.01.11	Registrasi Tenaga Biomedis				
	KT.01.12	Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional				
2	KT.02	Fasilitas Standardisasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
	KT.02.01	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan				
	KT.02.02	Standar Kompetensi Kerja Tenaga Kesehatan				
	KT.02.03	Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan				
	KT.02.04	Standar Praktik Tenaga Kesehatan				
3	KT.03	Fasilitas Pembinaan Keprofesian	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
	KT.03.01	Pembinaan Keprofesian				
	KT.03.02	Pengembangan Keprofesian				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
4	KT.04	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
	KT.04.01	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan				
	KT.04.02	Disiplin Praktik Psikologi Klinis				
	KT.04.03	Disiplin Praktik Perawat				
	KT.04.04	Disiplin Praktik Bidan				
	KT.04.05	Disiplin Praktik Kefarmasian				
	KT.04.06	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat				
	KT.04.07	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan				
	KT.04.08	Disiplin Praktik Tenaga Gizi				
	KT.04.09	Disiplin Praktik Tenaga Keterapian Fisik				
	KT.04.10	Disiplin Praktik Keteknisian Medis				
	KT.04.11	Disiplin Praktik Keteknisian Medis				
	KT.04.12	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional				
5	KT.05	Fasilitasi Penyiapan Bahan Pertimbangan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
	KT.05.01	Bahan Pertimbangan Pendirian Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan				
	KT.05.02	Bahan Pertimbangan Penutupan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan				
XX	PG. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN					
1	PG.01	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PG.01.01	Pendayagunaan Dokter Spesialis				
	PG.01.02	Program Internsip Dokter Indonesia				
	PG.01.03	Komite Internsip Dokter Indonesia				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PG.01.04	Penugasan Khusus <i>Team Based</i>				
	PG.01.05	Penugasan Khusus Individual				
	PG.01.06	Penugasan Khusus Residen				
	PG.01.07	Pembinaan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan				
2	PG.02	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (WNI LLN) dan Purna Penempatan Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PG.02.01	Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan WNI LLN				
	PG.02.02	Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Purna Penempatan Luar Negeri				
	PG.02.03	Pembinaan teknis kepada UPT Kementerian Kesehatan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan WNI LLN dan Purna Penempatan Luar Negeri				
3	PG.03	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PG.03.01	Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PG.03.02	Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan WNA di Indonesia				
	PG.03.03	Pembinaan Teknis terkait Bidang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan WNA di Indonesia				
4	PG.04	Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis WNI LLN dan WNA yang melaksanakan Adaptasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PG.04.01	Fasilitasi Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub-Spesialis WNI LLN				
	PG.04.02	Fasilitasi Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub-Spesialis WNA yang melaksanakan Adaptasi				
	PG.04.03	Pembinaan Teknis terkait Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis WNI LLN dan WNA yang melaksanakan Adaptasi				
XXI	PL. PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN DAN PENUNJANG KESEHATAN					
1	PL.01	Kebutuhan Pelatihan Bidang Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PL.01.01	Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan				
	PL.01.02	Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Penunjang Kesehatan				
	PL.01.03	Penilaian Potensi, Kompetensi, serta Sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan				
	PL.01.04	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PL.01.05	Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan				
2	PL.02	Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PL.02.01	Program Pelatihan Tenaga Kesehatan				
	PL.02.02	Program Pelatihan Tenaga Penunjang Kesehatan				
	PL.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan				
3	PL.03	Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PL.03.01	Penjaminan Mutu Institusi Pelatihan				
	PL.03.02	Penjaminan Mutu Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan				
4	PL.04	Peningkatan Kompetensi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PL.04.01	Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan				
	PL.04.02	Pembinaan Teknis Peningkatan Kompetensi				
XXII	<b>PK. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
1	PK.01	Strategi Komunikasi Risiko, Informasi dan Edukasi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	PK.01.01	Strategi Komunikasi Risiko, Informasi dan Edukasi Kesehatan				
	PK.01.02	Pengembangan Pesan				
	PK.01.03	Desain Kreatif Pesan Kesehatan				
2	PK.02	Penyebarluasan Informasi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang	
	PK.02.01	Penyebarluasan Informasi Kesehatan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PK.02.02	Kampanye Kesehatan			mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
3	PK.03	Advokasi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	PK.03.01	Advokasi Kesehatan				
	PK.03.02	Kebijakan yang disusun oleh Sektoral, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota				
	PK.03.03	Komitmen dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat				
4	PK.04	Kemitraan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	PK.04.01	Kemitraan Kesehatan				
	PK.04.02	MoU dalam mendukung Program Kesehatan Masyarakat				
	PK.04.03	Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dalam mendukung Program Kesehatan Masyarakat				
	PK.04.04	Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan				
	PK.04.05	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				
5	PK.05	Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	PK.05.01	Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan				
	PK.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Masyarakat				
	PK.05.03	Penggerakan Promosi Kesehatan di Berbagai Tatanan				
	PK.05.04	Penggerakan 7 Materi Prioritas Promosi Kesehatan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PK.05.05	Saka Bakti Husada (SBH)				
	PK.05.06	Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS)				
	PK.05.07	Promosi Kesehatan Bencana/Tim Gerak Cepat				
6	PK.06	Pengorganisasian Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	PK.06.01	Pengorganisasian Masyarakat				
	PK.06.02	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
	PK.06.03	Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal)				
	PK.06.04	<i>International Non-Government Organization (INGO)</i>				
7	PK.07	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	PK.07.01	Peran Serta Masyarakat				
	PK.07.02	Organisasi Kemasyarakatan/LSM				
	PK.07.03	Institusi Keagamaan yang Menyelenggarakan Peran Serta Masyarakat Bidang Kesehatan				
	PK.07.04	Kelompok Potensial yang Melaksanakan Gerakan Masyarakat Bidang Kesehatan				
8	PK.08	Data dan Analisis Perilaku	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	PK.08.01	Data dan Analisis Perilaku				
	PK.08.02	Data Perilaku dan Analisis Semua Siklus Kehidupan				
	PK.08.03	Komunikasi Risiko dan Strategi 7 materi Prioritas Promosi Kesehatan				
	PK.08.04	Standar Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan				
	PK.08.05	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				
9	PK.09	Perilaku Bumil, Anak dan Remaja	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Kesehatan Masyarakat
	PK.09.01	Perilaku Bumil, Anak dan Remaja				
	PK.09.02	<i>Demand Creation</i> dan Edukasi Sesuai dengan Siklus Bumil, Anak dan Remaja				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PK.09.03	Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)			kinerja Kementerian Kesehatan	
10	PK.10	Perilaku Usia Produktif dan Lansia	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
	PK.10.01	Perilaku Usia Produktif dan Lansia				
	PK.10.02	<i>Demand Creation</i> dan Edukasi Sesuai dengan Siklus Usia Produktif dan Lansia				
XXIII	PM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR					
1	PM.01	TBC	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	PM.01.01	Pengendalian Penyakit TBC				
	PM.01.02	Pengobatan TBC				
	PM.01.03	Laboratorium TBC				
	PM.01.04	Obat Anti TBC				
	PM.01.05	<i>TBC Operational Research (TORG)</i>				
	PM.01.06	Logistik TBC				
2	PM.02	Pengendalian AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	PM.02.01	Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBCP)				
	PM.02.02	HIV				
	PM.02.03	Infeksi Menular Seksual (IMS)				
	PM.02.04	Obat Anti Retro Viral (ARV) dan Reagen Tes HIV				
	PM.02.05	Kelompok Kerja Pengendalian AIDS dan Penyakit IMS				
3	PM.03	Pengendalian Penyakit Menular	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	PM.03.01	Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)				
	PM.03.02	Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PM.03.03	Penyakit Tropis Menular			kinerja Kementerian Kesehatan	
	PM.03.04	Kelompok Kerja Pengendalian Penyakit Menular				
XXIV	PN. PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN					
1	PN.01	Proyeksi dan Pemetaan Produksi Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PN.01.01	Proyeksi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan				
	PN.01.02	Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan				
	PN.01.03	Penetapan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Baru				
2	PN.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PN.02.01	Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan				
	PN.02.02	Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan				
	PN.02.03	Pemanfaatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan				
3	PN.03	Strategi Nasional Pemenuhan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PN.03.01	Strategi Nasional Pemenuhan Tenaga Kesehatan				
	PN.03.02	Strategi Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan				
4	PN.04	Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PN.04.01	Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan		Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PN.04.02	Perencanaan Evaluasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan				
	PN.04.03	Pembinaan Teknis Perencanaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan				
XXV	PP. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN					
1	PP.01	Perkuliahannya		Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan
	PP.01.01	Administrasi Perkuliahannya				
	PP.01.02	Silabus Mata Kuliah				
	PP.01.03	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran				
	PP.01.04	Proses Belajar Mengajar				
	PP.01.05	Daftar Kehadiran Dosen				
2	PP.02	Kurikulum		Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan
	PP.02.01	Administrasi Kurikulum				
	PP.02.02	Pedoman Kurikulum				
	PP.02.03	Mata Kuliah				
3	PP.03	Program Studi		Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan
	00.03.01	Administrasi Program Studi				
	00.03.02	Penolakan Program Studi				
	00.03.03	Evaluasi Program Studi				
4	PP.04	Dosen		Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang
	PP.04.01	Pengajaran				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
5	PP.05	Penunjang Akademik			mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	PP.05.01	Administrasi Penunjang Akademik	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Poltekkkes Kemkes
	PP.05.02	Peraturan Penggunaan Sarana dan Prasarana				
6	PP.06	Evaluasi Mahasiswa	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Poltekkkes Kemkes
	PP.06.01	Pelaksanaan Ujian Semester				
	PP.06.02	Tugas Akhir				
	PP.06.03	Pelaksanaan Uji Kompetensi				
7	PP.07	Yudisium	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Poltekkkes Kemkes
	PP.07.01	Administrasi Kelulusan				
	PP.07.03	Buku Induk				
8	PP.08	Alumni	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Poltekkkes Kemkes

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					kinerja Kementerian Kesehatan	
XXVI	PT. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN					
1	PT.01	Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan ASN	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PT.01.01	Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan				
	PT.01.02	Permohonan Rekomendasi				
	PT.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kesehatan				
	PT.01.04	Sistem Informasi Jabatan Fungsional Kesehatan				
2	PT.02	Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan Non ASN	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PT.02.01	Pengelolaan Karier Tenaga Kesehatan Non ASN				
	PT.02.02	Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Karier Tenaga Kesehatan Non-ASN				
	PT.02.03	Sistem Informasi Karier Tenaga Kesehatan Non-ASN				
3	PT.03	Pengawasan Tenaga Kesehatan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Tenaga Kesehatan
	PT.03.01	Pengelolaan Pengaduan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan				
	PT.03.02	Pelaksanaan Penyidikan Tenaga Kesehatan				
	PT.03.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Tenaga Kesehatan				
4	PT.04	Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Tenaga Kesehatan
	PT.04.01	Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PT.04.02	Pemantauan dan Evaluasi Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan			kinerja Kementerian Kesehatan	
XXVII	PV. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK					
1	PV.01	Pengendalian Malaria	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	PV.01.01	Kelambu Berinsektisida ( <i>Long-Lasting Insecticidal Nets (LLINs)</i> )				
	PV.01.02	Eliminasi Malaria				
	PV.01.03	<i>Crosschecker</i> Mikroskopis Malaria				
2	PV.02	Pengendalian Arbovirosis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	PV.02.01	Demam Berdarah Dengue (DBD)				
	PV.02.02	Chikungunya				
	PV.02.03	<i>Japanese Encephalitis</i>				
	PV.02.04	Virus Zika				
3	PV.03	Pengendalian Zoonosis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	PV.03.01	Penyakit Flu Burung				
	PV.03.02	Penyakit Rabies				
	PV.03.03	Penyakit Pes				
	PV.03.04	Penyakit Flu Baru				
	PV.03.05	Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tumbuhan Beracun				
	PV.03.06	Penyakit Bersumber Binatang Lainnya				
4	PV.04	Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	PV.04.01	Filariasis				
	PV.04.02	Kecacingan				
	PV.04.03	Schistosomiasis				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					Kesehatan	
5	PV.05	Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	PV.05.01	Pengendalian Vektor				
	PV.05.02	Pengendalian Binatang Pembawa Penyakit				
	PV.05/03	Uji Resistensi				
XXVIII	RS. PELAYANAN KESEHATAN DI RS DAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA					
1	RS.01	Pelayanan Kesehatan di RS	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit
	RS.01.01	Pelayanan Medis-- Terbatas				
	RS.01.02	Pelayanan Penunjang--Terbatas				
	RS.01.03	Pelayanan Non-Medis-- Terbatas				
	RS.01.04	Rekam Medis	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Rumah Sakit
	RS.01.05	Forensik---dibutuhkansurat persetujuan pembukaan informasi				
	RS.01.06	<i>Visum et repertum</i>				
	RS.01.07	Transplantasi Organ				
	RS.02	Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Lainnya				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	RS.02.01	Pelayanan Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit
	RS.02.02	Pelayanan Penunjang di Fasilitas Kesehatan Lainnya				
	RS.02.03	Pelayanan Non-Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya				
	RS.02.04	Rekam Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya		Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Rumah Sakit
XXIX	<b>SR. SURVEILANS DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN</b>					
1	SR.01	Surveilans	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	SR.01.01	Surveilans Penyakit				
	SR.01.02	Surveilans KLB				
	SR.01.03	Surveilans Kesehatan Lingkungan				
	SR.01.04	Surveilans Epidemiologi				
	SR.01.05	Kewaspadaan Dini				
	SR.01.06	Respon KLB dan Wabah				
2	SR.02	Penyakit Infeksi Emerging	Biasa/Terbuka	Publik		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
3	SR.02.01	Hapus Serangga dan Hapus Tikus			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	SR.02.02	Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan				
	SR.02.03	Vaksinasi Internasional				
	SR.02.04	Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan				
	SR.02.05	Pengangkutan Orang Sakit				
	SR.02.06	Pengiriman Jenazah				
	SR.02.07	Dokumen Perjalanan KLB dan Wabah				
4	SR.03	Penyakit Infeksi Emerging	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	SR.03.01	Penyakit Infeksi Emerging				
	SR.03.02	Deteksi Penyakit Infeksi Emerging				
	SR.03.03	Intervensi Penyakit Infeksi Emerging				
	SR.04	Sertifikat dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	SR.04.01	Sertifikat Kesehatan Manusia				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					merusak kemitraan dan reputasi	
	SR.04.02	Sertifikat Kesehatan Moda Transportasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	SR.04.03	Sertifikat Kesehatan Barang				
	SR.04.04	Sertifikat Kesehatan Lingkungan				
	SR.04.05	Surat Keterangan				
	SR.04.06	Buku Kesehatan				
5	SR.05	Laboratorium Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	SR.05.01	Standardisasi Laboratorium Surveilans				
	SR.05.02	Pengembangan Laboratorium Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
	SR.05.03	Penyelenggaraan Laboratorium Surveilans dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
6	SR.06	Surveilans Terintegrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	SR.06.01	Diseminasi Informasi				
	SR.06.02	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia				
	SR.06.03	Fasilitasi Kemitraan				
XXX	SS. SISTEM DAN STRATEGI KESEHATAN					
1	SS.01	Penyusunan Kebijakan Teknis bidang analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Sistem dan Strategi Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	SS.01.01	Upaya Kesehatan Masyarakat			kinerja Kementerian Kesehatan	
	SS.01.02	Pelayanan dan Penunjang Kesehatan				
	SS.01.03	Ketahanan dan Teknologi Kesehatan				
	SS.01.04	Sumber Daya Kesehatan				
2	SS.02	Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Sistem dan Strategi Kesehatan
	SS.02.01	Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat				
	SS.02.02	Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan				
	SS.02.03	Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Ketahanan dan Teknologi Kesehatan				
	SS.02.04	Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Sumber Daya Kesehatan				
3	SS.03	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Sistem dan Strategi Kesehatan
	SS.03.01	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Upaya Kesehatan Masyarakat				
	SS.03.02	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan				
	SS.03.03	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan				
	SS.03.04	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sumber Daya Kesehatan				
XXXI	TK. TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN					
1	TK.01	Tata Kelola Sistem Rujukan	Biasa/Terbuka	Publik		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	TK.01.01	Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	TK.01.02	Pengembangan Pelayanan <i>Telemedicine</i>				Bidang pelayanan Kesehatan
2	TK.02	Pengelolaan Wahana Pendidikan dan RS Pendidikan				
	TK.02.01	Jejaring RS Pendidikan				
	TK.02.02	Program di RS Pendidikan				
	TK.02.03	Teknologi Kesehatan				
	TK.02.04	Program di RS Pendidikan Lainnya				
3	TK.03	Pengelolaan Kerja Sama Pelayanan Kesehatan				
	TK.03.01	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan				
	TK.03.02	Kerja Sama Bidang Pelayanan Kesehatan				
4	TK.04	Pengelolaan BLU				
	TK.04.01	Penilaian Kinerja Pelayanan				
	TK.04.02	Rencana Strategis Bison				
XXXII	TL. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LABORATORIUM					
1	TL.01	Teknologi Pengendalian Penyakit				
	TL.01.01	Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	TL.01.02	Pengembangan dan Penapisan Teknologi			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	pengendalian Penyakit
	TL.01.03	Kemitraan dan Jejaring Kerja di Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium				
2	TL.02	Teknologi Laboratorium	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	TL.02.01	Pengembangan Teknologi Laboratorium				
	TL.02.02	Laboratorium Rujukan				
	TL.02.03	Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi				
	TL.02.04	Rekomendasi Hasil Uji Laboratorium				
XXXIII	TM. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR					
1	TM.01	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	TM.01.01	Penyakit Jantung				
	TM.01.02	Penyakit Pembuluh Darah				
	TM.01.03	Penyakit Hipertensi				
	TM.01.04	Penyakit Stroke				
2	TM.02	Pengendalian Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	TM.02.01	Penyakit Diabetes Melitus				
	TM.02.02	Penyakit Gangguan Metabolik				
	TM.02.03	Penyakit Gangguan Tiroid				
	TM.02.04	Gangguan Obesitas				
3	TM.03	Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Pencegahan dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	TM.03.01	Penyakit Kanker			mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	pengendalian Penyakit
	TM.03.02	Penyakit Kelainan Darah				
4	TM.04	Pengendalian Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	TM.04.01	Penyakit Akibat Produk Tembakau.				
	TM.04.02	Gangguan Imunologi				
5	TM.05	Gangguan Indera dan Fungsional	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	TM.05.01	Pengendalian Gangguan Panca Indera				
	TM.05.02	Pengendalian Gangguan Fungsional				
XXXIV	YK. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN					
1	YK.01	Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer				
	YK.01.01	Pemetaan Prasarana dan Sarana	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YK.01.02	Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana				
	YK.01.03	Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana				
	YK.01.04	Analisis Data dan Informasi Prasarana dan Sarana				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	YK.01.05	Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
2	YK.02	Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan				
	YK.02.01	Pemetaan Prasarana dan Sarana	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YK.02.02	Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana				
	YK.02.03	Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana				
	YK.02.04	Analisis Data dan Informasi Prasarana dan Sarana				
	YK.02.05	Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
3	YK.03.03	Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				
	YK.03.01	Pemetaan Prasarana dan Sarana	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YK.03.02	Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana				
	YK.03	Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					Kementerian Kesehatan	
	YK.03.04	Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
4	YK.04	Standar Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YK.04.01	Pemetaan Standar Alat Kesehatan				
	YK.04.02	Penilaian Teknologi Standar Alat Kesehatan				
	YK.04.03	Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Standar Alat Kesehatan				
	YK.04.04	Fasilitasi Pemenuhan Standar Alat Kesehatan				
	YK.04.05	Analisis Data dan Informasi Standar Alat Kesehatan				
	YK.04.06	Pembinaan Teknis Standar Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
5	YK.05	Pengujian dan Kalibrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YK.05.01	Penilaian dan Monitoring Pengamanan Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan				
	YK.05.02	Pengujian dan Kalibrasi Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	YK.05.03	Analisis Data dan Informasi Pengujian dan Kalibrasi			kinerja Kementerian Kesehatan	
	YK.05.04	Pembinaan Teknis Pengujian dan Kalibrasi Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
XXXV	YM. MUTU PELAYANAN KESEHATAN					
1	YM.01	Mutu Pelayanan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YM.01.01	Mutu Pelayanan Kesehatan Primer				
	YM.01.02	Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan				
	YM.01.03	Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya				
2	YM.02	Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YM.02.01	Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer				
	YM.02.02	Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan				
	YM.02.03	Akreditasi Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya				
XXXVI	YP. PELAYANAN KESEHATAN PRIMER					
1	YP.01	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YP.01.01	Puskesmas				
	YP.01.02	Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)				
	YP.01.03	Keluarga Sehat				
	YP.01.04	Integrasi Layanan Kesehatan Primer				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
2	YP.02	Pelayanan Klinik	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YP.02.01	Pelayanan Klinik				
	YP.02.02	Pelayanan Darah ( <i>Quickwins</i> )				
	YP.02.03	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Berprestasi				
3	YP.03	Perizinan dan Registrasi Klinik	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YP.03.01	Pelayanan Klinik				
	YP.03.02	Praktik Perorangan				
	YP.03.03	Panduan Praktik Klinis dan Panduan Keterampilan Klinis				
XXXVII	<b>YR. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN</b>					
1	YR.01	Standardisasi Klinis Pelayanan Kesehatan Rujukan				
	YR.01.01	Standar Pelayanan Kedokteran	Biasa/Terbuka	Publik	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YR.01.02	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
1	YR.01.03	Panduan Praktik Klinis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YR.01.04	Audit Klinis RS dan lainnya	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
2	YR.02	Perizinan dan Pengembangan serta Pengawasan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YR.02.01	Perizinan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan				
	YR.02.02	Pengawasan RS				
3	YR.03	Transformasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YR.03.01	Rujuk Balik				
	YR.03.02	Pelayanan Unggulan				
	YR.03.03	Jejaring Pelayanan Kesehatan				
XXXVIII	<b>YT. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL</b>					
1	YT.01	Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	Biasa/Terbuka	Publik		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	YT.01.01	Pelayanan Kesehatan Penyehat Tradisional (Hattrra)			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	
	YT.01.02	Pembinaan Hattrra			Kementerian Kesehatan	
	YT.01.03	Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)				
	YT.01.04	Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional				
	YT.01.05	Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)				
	YT.01.06	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur				
2	YT.02	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YT.02.01	Penilaian/Penapisan Kesehatan Tradisional				
	YT.02.02	Pelayanan Kesehatan Komplementer NonTradisional				
	YT.02.03	Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer				
	YT.02.04	Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia (FROTI)				
	YT.02.05	Tenaga Pengawas Kesehatan Tradisional				
	YT.02.06	Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia				
	YT.02.07	Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)				
	YT.02.08	Kelompok Kerja Nasional				
3	YT.03	Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Pelayanan Kesehatan
	YT.03.01	Formularium Obat Herbal Asli Indonesia				
	YT.03.02	Pelayanan Medik Obat Herbal Asli Indonesia				
	YT.03.03	Pelayanan Medik Akupunktur				
	YT.03.04	Pelayanan Akupresur di Puskesmas				
	YT.03.05	Brainstorming Pelaksanaan Kegiatan terkait Pelayanan Kesehatan Integrasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	YT.03.06	Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi				
	YT.03.07	Pelayanan Akupresur di Puskesmas				

Tabel 3  
Penanganan Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis  
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENTSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA
1	Terbuka/Biasa	Tidak ada persyaratan khusus	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan sarana dan prasarana khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip</li> <li>2. File digital harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal</li> </ol>	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses dari pemilik otoritas sistem	Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi
2	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik Arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip</li> <li>2. File digital harus dilindungi</li> </ol>	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen ( <i>by request</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi</li> <li>2. <i>Firewall</i> dan <i>Instruction Prevention System</i> (IPS)</li> </ol>

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENTSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA
		penegak hukum			terhadap penggunaan internal dan eksternal		3. Arsip harus terenkripsi dan dekripsi 4. <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)
3	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip 2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/dokumen rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses terbatas	1. <i>Mirror</i> secara <i>real time</i> untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian arsip 2. File digital harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal		1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi 2. <i>Firewall</i> dan <i>Instruction Prevention System</i> (IPS) 3. Arsip harus terenkripsi dan dekripsi hanya dapat diakses melalui server 4. <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)
4	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap	Dibatasi hanya untuk	1. Disimpan di zone yang	1. <i>Mirror</i> secara <i>real time</i> untuk tujuan	1. Hanya staf yang ditunjuk	1. Server dan sistem aplikasi

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENTSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA
	"SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip	penentu kebijakan, pengawasan dan penegak hukum	sngat aman dengan penelusuran jejak akses  2. Penerapan kebijakan "meja harus bersih"	pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian arsip  2. File digital harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal	pimpinan lembaga yang dapat mengakses arsip tersebut  2. Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen ( <i>by request</i> )	yang memiliki autentifikasi  2. Firewall and Instruction Prevention System (IPS) 3. Arsip harus terenkripsi dan dekripsi hanya dapat diakses melalui server 4. Token ( <i>two factor authentication</i> ) 5. Disaster Recovery Center (DRC)	

Tabel 4  
Penyampaian Informasi Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis  
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP KONVENTSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1	Terbuka/Biasa	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus
2	Terbatas	Amplop segel	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal maka harus menggunakan enkripsi ( <i>encryption</i> ), email yang dikirim dengan alamat khusus, <i>password</i> , dan sebagainya.
3	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan warna dan kertas yang berbeda</li> <li>2. Diberi kode "RAHASIA"</li> <li>3. Menggunakan amplop double</li> <li>4. Amplop segel, stempel Rahasia</li> <li>5. Konfirmasi tanda terima</li> <li>6. Harus dikirim oleh orang yang diberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen Rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Harus ada konfirmasi penerima pesan elektronik atau email</li> <li>2. Menggunakan perangkat yang dikhkususkan bagi pesan elektronik atau email</li> <li>3. Menggunakan persandian atau kriptografi</li> </ul>
4	Sangat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan warna dan kertas yang berbeda</li> <li>2. Menggunakan amplop double bersegel</li> <li>3. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tanda tangan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan perangkat yang dikhkususkan bagi pesan elektronik atau email</li> <li>2. Menggunakan persandian atau kriptografi</li> <li>3. Harus ada pelacakan akses untuk informasi pesan</li> </ul>

		4. Harus dikirim oleh orang yang diberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen Sangat Rahasia	4. elektronik atau <i>email</i>
--	--	---	---------------------------------

**BAB IV**  
**JADWAL RETENSI ARSIP**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Penghitungan retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi atau *closed file*. *Closed file* ditentukan dengan pernyataan antara lain:

1. sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran;
2. setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan;
3. sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku;
4. sejak peraturan perundang-undangan diundangkan;
5. setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan;
6. sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir;
7. sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan;
8. setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).
9. setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit;
10. setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaanya berakhir;
11. setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir;
12. setelah hasil sensus dipublikasikan;
13. setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan;
14. setelah data di perbarui (update); dan
15. setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan.

Penetapan rekomendasi suatu jenis arsip yang dinyatakan musnah atau dinyatakan permanen ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

1. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi, suatu jenis arsip tidak memiliki nilai guna lagi; atau
2. Keterangan permanen ditentukan apabila suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder dan wajibdiserahkan ke lembaga kearsipan.

Tabel 1  
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Kesehatan

NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU PENYIMPAN		KETERANGAN		
			AKTIF	INAKTIF			
I	<b>FASILITATIF</b>						
	AR	<b>KEARSIPAN</b>					
	01	Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis					
		01	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis		Musnah		
			1)	Tata Naskah Dinas			
			2)	Kode Klasifikasi Arsip			
			3)	Jadwal Retensi Arsip			
			4)	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip			
			5)	Pengelolaan Arsip Dinamis			
	02	Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis		1 Tahun	Musnah		
		1)	Sosialisasi				
		2)	Fasilitasi				
		3)	Seminar, dan lain-lain				
	02	Penciptaan Arsip					
		01	Pengelolaan Surat Masuk		Musnah		
			1)	Buku Agenda Surat Masuk			
			2)	Kartu Kendali			
			3)	Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi			
			4)	Penomoran Surat			
			5)	Pengarahan, Pencatatan, dan Pendistribusian Surat			
			6)	Penggunaan Cap/Stempel			
			7)	Pengiriman Surat/Barang Cetakan			
	02	Pengelolaan Surat Keluar		2 Tahun	Musnah		
		1)	Buku Agenda Surat Masuk				

			2)	Kartu Kendali								
			3)	Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi								
			4)	Penomoran Surat								
			5)	Pengarahan, Pencatatan, dan Pendistribusian Surat								
			6)	Penggunaan Cap/Stempel								
			7)	Pengiriman Surat/Barang Cetakan								
03	Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip											
	01	Pengelolaan Arsip Aktif				2 Tahun	3 Tahun	Musnah				
		1)	Pemberkasan									
		2)	Daftar Arsip Aktif									
		3)	Daftar Pencarian Arsip									
		4)	Daftar Arsip Informasi Publik									
	02	Pengelolaan Arsip Inaktif										
		1)	Penataan									
		2)	Penyimpanan									
		3)	Pemeliharaan									
		4)	Pengolahan									
		5)	Daftar Arsip Inaktif									
		6)	Daftar Pencarian Arsip									
		7)	Daftar Arsip Informasi Publik									
	03	Pengelolaan Arsip Vital				2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah				
		1)	Penataan									
		2)	Penyimpanan									
		3)	Pemeliharaan									
		4)	Pengolahan									
		5)	Daftar Arsip Vital									
		6)	Daftar Pencarian Arsip									
		7)	Daftar Arsip Informasi Publik									
	04	Pengelolaan Arsip Terjaga				2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah				
		1)	Penataan									

			2)	Penyimpanan			
			3)	Pemeliharaan			
			4)	Pengolahan			
			5)	Daftar Arsip Terjaga			
			6)	Daftar Pencarian Arsip			
			7)	Daftar Arsip Informasi Publik			
	05	Pengelolaan Arsip Audio Visual					
		1)	Penataan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2)	Penyimpanan				
		3)	Pemeliharaan				
		4)	Pengolahan				
	06	Pengelolaan Arsip Elektronik			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penataan				
		2)	Penyimpanan				
		3)	Pemeliharaan				
		4)	Pengolahan				
	07	Alih Media Arsip			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Administrasi Pelaksanaan Alih Media				
		2)	Berita Acara Alih Media Arsip				
		3)	Daftar Arsip Dinamis yang Dialihmediakan				
	08	Layanan Arsip			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Peminjaman dan Penggunaan Arsip				
	09	Pemeliharaan Fisik Arsip			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Pemeliharaan Arsip dan Ruang Penyimpanan (Seperti Kegiatan Pembelian Kamper, Fumigasi, dan lain-lain)				
	04	Penyusutan					
	01	Pemindahan Arsip			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Berita Acara Pemindahan				
		2)	Daftar Arsip yang Dipindahkan				
	02	Pemusnahan Arsip			1 Tahun Setelah	0 Tahun	Musnah

			1)	Berita Acara Pemusnahan	Kementerian Kesehatan Dibubarkan		
			2)	Daftar Arsip yang Dimusnahkan			
			3)	Pertimbangan Tim Penilai			
			4)	Surat keputusan Pemusnahan			
			5)	Berita Acara Pemusnahan			
	03	Penyerahan Arsip			1 Tahun Setelah Kementerian Kesehatan Dibubarkan	2 Tahun	Permanen
			1)	Berita Acara Penyerahan			
			2)	Daftar Arsip yang Diserahkan			
			3)	Pertimbangan Tim Penilai			
			4)	Surat keputusan Penyerahan			
			5)	Berita Acara Penyerahan			
	05	Pembinaan					
	01	Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Supervisi Penyelenggaraan Kearsipan			
			2)	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan			
			3)	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan			
	02	Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Laporan Final Pengawasan Kearsipan Internal			
			2)	Laporan Final Akreditasi Kearsipan			
	03	Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi			
			2)	Fasilitasi			
			3)	Seminar			
			4)	Organisasi Profesi Arsiparis			
			5)	Administrasi Sertifikasi Arsiparis			
			6)	Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis			
			7)	Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan			

			04	Apresiasi Sumber Daya Kearsipan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penetapan Pemenang Lomba Arsiparis Teladan			
			2)	Penetapan Pemenang Lomba Unit Pengolah dan Unit Kearsipan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan			
			1)	Administrasi Persuratan Penyediaan Prasarana Meliputi Gedung, Ruangan, dan Peralatan Kearsipan ( <i>Roll-O-Pack, Filing Cabinet</i> )			
			2)	Administrasi Persuratan Terkait Penyediaan Sarana Meliputi Boks Arsip, Folder, Sekat, dan lain-lain			
BJ	PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	01	Pengadaan Barang dan Jasa					
		01	Tender Seleksi (Sederhana)		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	8 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Data Tender Seleksi			
			2)	Undangan Reviu Paket Tender Seleksi			
			3)	Proses Pelaksanaan Tender Seleksi, Evaluasi, Pengumuman, Jawaban Atas Sanggahan, Penugasan, dan Berita Acara Selama Proses Pemilihan			
			4)	Hasil Pemilihan, Kontrak, Berita Acara Serah Terima, dan Laporan Hasil Tender/Seleksi			
	02	Tender Cepat		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	8 Tahun	Musnah	
		1)	Penyusunan Data Tender Cepat				
		2)	Undangan Reviu Paket Tender Cepat				
		3)	Proses Pelaksanaan Tender Cepat, Evaluasi, Pengumuman, Jawaban Atas Sanggahan, Penugasan, dan Berita Acara Selama Proses Pemilihan				

			4)	Hasil Pemilihan, Kontrak, Berita Acara Serah Terima, dan Laporan Hasil Tender Cepat			
		03	Pengadaan Langsung		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	8 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Data Pengadaan Langsung			
			2)	Undangan Reviu Paket Pengadaan Langsung			
			3)	Proses Pelaksanaan Tender Cepat, Evaluasi, Pengumuman, Jawaban Atas Sanggahan, Penugasan, dan Berita Acara Selama Proses Pemilihan			
			4)	Hasil Pemilihan, Kontrak, Berita Acara Serah Terima, dan Laporan Hasil Pengadaan Langsung			
		04	E-Purchasing		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	8 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Data E-Purchasing dan Undangan Reviu Paket E-Purchasing			
			2)	Proses Pelaksanaan E-Purchasing, Evaluasi, Pengumuman, Penugasan, dan Berita Acara Selama Proses Pemilihan			
			3)	Hasil Pemilihan, Kontrak, Berita Acara Serah Terima, dan Laporan Hasil E-Purchasing			
	02	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					
	01	Layanan Pengadaan Secara Elektronik			2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	8 Tahun	Musnah
		1)	Kegiatan terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
	02	Kontrak Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha			2 Tahun Setelah Masa Kontrak Berakhir	8 Tahun	Musnah
		1)	Administrasi Kontrak Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha				
	03	Katalog Elektronik Sektoral				8 Tahun	Musnah

			1)	Kegiatan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral	2 Tahun Setelah Katalog Diperbarui		
	HK	HUKUM					
	01	Peraturan Perundang-undangan					
		01	Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang		2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
			1)	Naskah Akademik			
			2)	Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang			
			3)	Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah Ditetapkan			
	02	Peraturan Pemerintah			2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		1)	Naskah Akademik				
		2)	Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum				
		3)	Peraturan Pemerintah yang telah Ditetapkan				
	03	Peraturan Presiden			2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		1)	Naskah Kajian				
		2)	Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum				
		3)	Peraturan Presiden yang telah Ditetapkan				
	04	Keputusan Presiden			2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		1)	Naskah Akademik				
		2)	Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum				
		3)	Keputusan Presiden yang telah Ditetapkan				
	05	Instruksi Presiden				3 Tahun	Permanen

			1)	Naskah Akademik	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku		
			2)	Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum			
			3)	Instruksi Presiden yang telah Ditetapkan			
	06	Peraturan Menteri Kesehatan	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen		
		1)					
		2)					
		3)					
	07	Keputusan Menteri	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen		
		1)					
		2)					
		3)					
	08	Keputusan Bersama	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen		
		1)					
		2)					
	02	Instruksi/Surat Edaran					
	01	Instruksi/Surat Edaran Menteri Kesehatan	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah		
		1)					
		2)					
	02	Keputusan/Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah		
		1)					

			2)	Instruksi/Surat Edaran Pejabat Tingkat Eselon I yang telah Ditetapkan			
		03	Keputusan/Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis		2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			1)	Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum			
			2)	Keputusan/Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang telah Ditetapkan			
	03		Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama				
		01	Kerja Sama Dalam Negeri yang bersifat nasional		2 Tahun Setelah Perjanjian Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
			1)	Surat Prakarsa Kerja Sama			
			2)	Surat Penjajakan Kerja Sama			
			3)	Telaah Kerja Sama			
			4)	MoU/Nota Kesepahaman			
			5)	Perjanjian Kerja Sama			
			6)	Rencana Kerja			
			7)	Rencana Aksi			
			8)	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi			
	02		Kerja Sama Luar Negeri		2 Tahun Setelah Perjanjian Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
			1)	Surat Prakarsa Kerja Sama			
			2)	Surat Penjajakan Kerja Sama			
			3)	Telaah Kerja Sama			
			4)	MoU/Nota Kesepahaman			
			5)	Perjanjian Kerja Sama			
			6)	Rencana Kerja			
			7)	Rencana Aksi			
	04		Pembinaan Hukum				
		01	Sosialisasi Hukum		1 Tahun	2 Tahun	Musnah

			1)	Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen/Produk Hukum kepada Lembaga atau Perseorangan			
		02	Dokumentasi Hukum		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Hukum			
			2)	Perluasan dan Penyebaran Informasi Hukum			
	05	Bantuan Hukum					
		01	Bantuan Hukum Kasus Pidana		2 Tahun Setelah Kasus Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pendampingan Hukum			
			2)	Konsultasi Hukum			
			3)	Masalah Hukum Lainnya			
		02	Bantuan Hukum Kasus Perdata		2 Tahun Setelah Kasus Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum			
			2)	Konsultasi Hukum			
			3)	Advokasi di Bidang Kesehatan dan Masalah Hukum Lainnya			
		03	Bantuan Hukum Tata Usaha Negara		2 Tahun Setelah Kasus Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum			
			2)	Konsultasi Hukum			
			3)	Advokasi di Bidang Kesehatan dan Masalah Hukum Lainnya			
		04	Bantuan Hukum Hak Uji Materiil		2 Tahun Setelah Kasus Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Bantuan Hukum Kasus Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung			
			2)	Pemberian Bantuan Hukum			
			3)	Konsultasi Hukum			
			4)	Advokasi di Bidang Kesehatan dan Masalah Hukum Lainnya			
		05	Bantuan Hukum <i>Judicial Review</i>		2 Tahun Setelah Kasus	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Bantuan Hukum Kasus <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi			

			2)	Pemberian Bantuan Hukum	Berkekuatan Hukum Tetap		
			3)	Konsultasi Hukum			
			4)	Advokasi di Bidang Kesehatan dan Masalah Hukum Lainnya			
06	06	Kasus/Sengketa Hukum					
	01	Kasus/Sengketa Hukum Pidana		1) Penyelesaian Kasus/Sengketa Hukum Pidana	2 Tahun Setelah Kasus Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
			2)	Proses Verbal mulai dari Penyelidikan dan Penyidikan sampai dengan Vonis			
			3)	Pembelaan			
			4)	Telaah Hukum			
			5)	Opini Hukum			
	02	Kasus/Sengketa Hukum Perdata		1) Penyelesaian Kasus/Sengketa Hukum Perdata	2 Tahun Setelah Kasus Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
			2)	Proses Verbal mulai dari Penyelidikan dan Penyidikan sampai dengan Vonis			
			3)	Pembelaan			
			4)	Telaah Hukum			
			5)	Opini Hukum			
	03	Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara		1) Penyelesaian Kasus/Sengketa Hukum Perdata	2 Tahun Setelah Kasus Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
			2)	Proses Verbal mulai dari Penyelidikan dan Penyidikan sampai dengan Vonis			
			3)	Pembelaan			
			4)	Telaah Hukum			
			5)	Opini Hukum			
	07	Hak Atas Kekayaan Intelektual					
	01	Hak Cipta		1) Pengurusan Masalah Hak Cipta sampai dengan Penyelesaian Masalah Hak Cipta	1 Tahun Setelah Hasil Cipta Tidak Digunakan	2 Tahun	Permanen
			2)	Sertifikat dan Laporan			

			02	Hak Paten (Hak Biasa dan Hak Sederhana)	1 Tahun Setelah Hasil Paten Tidak Digunakan	2 Tahun	Permanen
			1)	Pengurusan Hak Paten (Hak Biasa dan Hak Sederhana)			
			2)	Pengurusan Masalah Hak Paten sampai dengan Penyelesaian Masalah Hak Paten			
			3)	Sertifikat dan Laporan			
			03	Hak Merek	1 Tahun Setelah Hasil Paten Tidak Digunakan	2 Tahun	Permanen
			1)	Pengurusan Masalah Hak Merek sampai dengan Penyelesaian Masalah Hak Merek			
			2)	Sertifikat dan Laporan			
IR	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
	01	Pengembangan Sistem Informasi					
		01	Pembuatan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Informasi atau Aplikasi		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			1)	<i>Daftar Flow Diagram</i>			
			2)	Proses Bisnis			
			3)	Kode Sumber Aplikasi			
		02	Standardisasi Sistem Informasi		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			1)	Penyusunan Standardisasi Sistem Informasi			
		03	Usulan Kebijakan Teknis dan Regulasi Layanan Data serta Produk Informasi				
			1)	Kegiatan Rancangan Kebijakan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2)	Regulasi Layanan Data			
			3)	Produk Informasi			
	02	Pengelolaan Teknologi Informasi					
		01	Pengelolaan Aplikasi dan Basis Data		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pengelolaan Aplikasi			
			2)	Kegiatan Pengelolaan Basis Data			
			3)	Kegiatan Pengelolaan Layanan Penggunaan (Surat Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, dan Video Conference)			

			4)	Kegiatan Pengelolaan Situs Web			
		02	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi yang meliputi Pengelolaan Jaringan Internet/LAN, Data Center, Peranti Teknologi Informasi, Server, dan Dokumen Hosting			
		03	Keamanan Informasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran			
			2)	Berita Acara Penyidikan Keamanan Informasi			
			3)	Pengelolaan Keamanan Informasi (ISO 27001)			
	03	Pengelolaan Data dan Informasi					
	01	Analisis Data dan Informasi			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Penyusunan Profil Kesehatan Indonesia			
			2)	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Penyajian, Diseminasi, Telaah, dan Penilaian Kualitas Data			
			3)	Sosialisasi, Workshop)			
			4)	Kegiatan Dokumentasi Kunjungan Kerja dan Informasi Data			
			5)	Penyajian Data Pimpinan			
			6)	Kegiatan Katalog Layanan Data dan Informasi			
			7)	Pemenuhan Permintaan Layanan Data dan Informasi			
	02	Tata Kelola Kesehatan dan Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Perlindungan Data Pribadi			
			2)	Kegiatan Layanan Pengaktifan Domain.id			
			3)	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pemetaan Layanan Domain.id			

			4)	Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan dan Edukasi Pemanfaatan Domain.id						
			5)	Kuesioner Pengumpulan Data						
			6)	Hasil Pengolahan, Analisis, Telaah, dan Penilaian Kualitas Data						
KM	KOMUNIKASI PUBLIK									
01	Media Masa									
	01	Liputan dan Dokumentasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Proses Pengumpulan/Pengolahan Data dan Informasi							
		2)	Bahan Publikasi Berupa Gambar/Foto, Suara, Buku, dan Video sebagai Gambaran Jalannya Peristiwa							
	02	Wawancara			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Kegiatan Pengolahan, Penyusunan, dan Penyajian							
		2)	Penyebaran Hasil Wawancara yang mengaitkan antara Draf Pertanyaan							
		3)	Bahan Wawancara, Narasumber dengan Media sebagai Pemohon		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
	03	Penyajian Berita dan Konten Media Sosial								
		1)	Kegiatan Penyajian Berita dan Konten Media Sosial							
		2)	Pemaparan/Penjelasan Data dan Informasi sebagai Bahan Publikasi							
		3)	<i>Press Release</i> dan Konten Infografik		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
	04	Pertemuan Media Massa								
		1)	Pembahasan Isu Kesehatan							
		2)	Fasilitasi Pertemuan Narasumber dengan Berbagai Media dalam Bentuk Diskusi atau							

			Konferensi Pers Berdasarkan Undangan dari Kementerian Kesehatan			
	05	Kompetisi Komunikasi	1) Kegiatan Pemberian Apresiasi atas Atensi Khusus dalam Bidang Kesehatan 2) Kompetisi Media Sosial dan Kegiatan Sejenisnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)				
		2)				
	06	Press Tour	1) Administrasi Kunjungan Media Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	02	Opini Publik				
	01	Analisis Opini Publik Berita Kesehatan	1) Pemantauan 2) Analisis 3) Rekomendasi Penyusunan Berita Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	02	Strategi Komunikasi	1) Media Visit 2) Media Coaching	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	03	Produksi Komunikasi				
	01	Pembuatan Film dan Video	1) Informasi Berupa Citra Bergerak dan Terekam dalam Rangkaian Fotografi 2) Suara Pada Pita Magnetik yang Penciptaannya Menggunakan Media Teknologi/Elektronik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	02	Advertorial Cetak dan <i>Online</i> Film atau Video	1) Pembuatan Berita, Artikel 2) Iklan di Media Cetak dan <i>Online</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	04	Hubungan Antar Lembaga				
	01	Hubungan Antar-Lembaga Pemerintah	1) Pertemuan, Sosialisasi, dan Kegiatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	02	Hubungan Antar-Lembaga Non-Pemerintah	1) Pertemuan, Sosialisasi, dan Kegiatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	03	Forum Kehumasan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Pertemuan, Sosialisasi, dan Kegiatan Lainnya			
		04	Layanan Informasi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Permohonan Informasi Baik melalui Surat maupun Telepon, Keterbukaan Informasi Publik, Pengaduan Masyarakat, Pojok Informasi, Unit Layanan Terpadu, dan Sistem Informasi Pelayanan Publik			
		05	Publikasi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Diseminasi Informasi dan TV			
			2)	Penyampaian dan Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak dan <i>Online</i>			
			3)	Siaran Radio Kesehatan			
			4)	Pameran Foto dan Pameran Pembangunan Kesehatan			
	05	Penerbitan					
	01	Penerbitan			1 Tahun Setelah Dipublikasi	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pengumpulan			
			2)	Pengolahan			
			3)	Penyusunan			
			4)	Produksi dan Pendistribusian Literatur/Informasi			
	06	Perpustakaan					
	01	Perpustakaan			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pembinaan Koleksi Perpustakaan			
			2)	Pengolahan Bahan Perpustakaan Nomor			
			3)	<i>International Standard Book Number (ISBN)</i>			
			4)	Inventarisasi			
			5)	Katalogisasi			
			6)	Klasifikasi			
			7)	<i>Input Database</i>			
			8)	Penajaran Koleksi			

			9)	Kegiatan Pelayanan Perpustakaan			
			10)	Pengembangan, Perawatan/Pelestarian Bahan dan Koleksi Perpustakaan			
		02	Bimbingan Teknis Perpustakaan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Bimbingan Teknis Perpustakaan			
KN	KEKAYAAN NEGARA						
	01	Barang Milik Negara					
	01	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Perencanaan Pengadaan Barang Habis Pakai				
		2)	Perencanaan Pengadaan Barang Bergerak				
		3)	Perencanaan Pengadaan Barang Tidak Bergerak/Investasi/Aset				
		4)	Perencanaan Pengadaan Jasa				
		5)	Perencanaan terkait Pemeliharaan Barang Milik Negara				
		6)	Usulan Standar Barang dan Standar Kebutuhan				
	02	Penggunaan Barang Milik Negara		2 Tahun Setelah Barang Milik Negara Dihapuskan/Alih Kepemilikan	3 Tahun	Musnah	
		1)	Penetapan Status Penggunaan				
		2)	Alih Status Penggunaan				
		3)	Penggunaan Sementara, Dioperasionalkan Pihak Lain				
		4)	Barang Milik Negara <i>Idle</i>				
	03	Pemanfaatan Barang Milik Negara		2 Tahun Setelah Sewa/Kontrak Selesai	3 Tahun	Musnah	
		1)	Dokumen Sewa dan Pinjam Pakai				
		2)	Kerja Sama Pemanfaatan				
		3)	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur				
		4)	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna				
		5)	Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur				
	04	Asuransi Barang Milik Negara			3 Tahun	Musnah	

				1)	Pembuatan Usulan Asuransi	2 Tahun Setelah Diperbarui		
				2)	Persiapan Pengadaan Jasa Asuransi			
				3)	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia			
				4)	Pelaksanaan dan Penandatanganan Kontrak Asuransi			
				5)	Berita Acara Serah Terima Polis Asuransi			
				6)	<i>Endorsement</i>			
				7)	Klaim Asuransi			
	05				Penatausahaan Barang Milik Negara	2 Tahun Setelah Barang Milik Negara Dihapuskan/ Alih Kepemilikan	3 Tahun	Musnah
				1)	Aset Lancar/Persediaan			
				2)	Aset Tetap dan Aset Lainnya			
				3)	Daftar Barang Ruangan			
				4)	Kartu Inventaris Barang			
				5)	Kartu Inventaris Laporan	2 Tahun Setelah Barang Milik Negara Dihapuskan/Alih Kepemilikan	3 Tahun	Musnah
	06				Inventarisasi Barang Milik Negara			
				1)	Inventarisasi Umum/Mutasi Barang/Serah Terima Aset/Berita Acara Hibah dan Standardisasi/Kodifikasi			
				2)	Pelaporan Persediaan dan Barang Milik Negara (Tanah, Gedung, Wisma, Rumah Dinas, Alat Teknik, Kendaraan Dinas, Buku Pustaka, Alat Kantor Mesin, dan Alat Kantor Bukan Mesin)			
	07				Pelaporan Barang Milik Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				1)	Laporan Unit Akuntansi Pengguna/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran			
				2)	Laporan Barang Milik Negara			
				3)	Laporan Persediaan			
				4)	Laporan Pengawasan dan Pengendalian			
				5)	Laporan Rencana Kebutuhan			
				6)	Laporan Semesteran			

			7)	Laporan Tahunan			
			8)	Laporan Akuntansi Barang Milik Negara			
		08	Penghapusan Barang Milik Negara		2 Tahun Setelah Barang Milik Negara Dihapuskan/Alih Kepemilikan	3 Tahun	Musnah
			1)	Standardisasi/Petunjuk Teknis Penghapusan			
			2)	Usulan Penghapusan			
			3)	Data dan Dokumen Pendukung			
			4)	Penilaian dalam rangka Penghapusan, Penetapan Penghapusan			
			5)	Dokumen Terkait Penyebab Penghapusan Antara Lain Dokumen Penyerahan kepada Pengelola Barang, Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang Lain			
			6)	Pemindahtanganan Barang Milik Negara			
			7)	Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya			
			8)	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Harus Dilaksanakan			
			9)	Pemusnahan Barang Milik Negara atau Sebab- sebab Lain			
			10)	Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian			
			11)	Berita Acara Penghapusan			
			12)	Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang Dihibahkan			
			13)	Naskah Hibah Barang Milik Negara			
		09	Pengelolaan Rumah Negara		2 Tahun Setelah Alih Status Kepemilikan	3 Tahun	Musnah
			1)	Pendaftaran			
			2)	Penetapan Status Golongan dan Surat Izin Penghunian Rumah Negara			

			3)	Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Negara						
			4)	Teguran kepada Penghuni Rumah Negara						
			5)	Alih Fungsi dan Alih Status Golongan Rumah Negara						
			6)	Penghapusan Rumah Negara						
			7)	Perencanaan Terkait Pemeliharaan Rumah Negara Tidak Berpenghuni						
KP	KEPEGAWAIAN									
	01	Pengadaan Pegawai								
		01	Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1)	Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan						
			2)	Analisis Kebutuhan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja						
			3)	Pengolahan Data Kebutuhan						
	02	Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil			1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
			1)	Pengumuman Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil						
			2)	Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil						
			3)	Pelamar Tidak Lulus Seleksi						
	03	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil			1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
			1)	Administrasi Pelamar Lulus Seleksi						
			2)	Bahan Penyusunan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil						
			3)	Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil						
			4)	Bahan Penyelesaian Surat Keputusan						
			5)	Administrasi Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri						
			6)	Administrasi Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas						
	04	Administrasi Pegawai Negeri Sipil			1 Tahun	2 Tahun	Musnah			

			1)	Pengusulan Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/ Kartu Suami			
			2)	Pengusulan Pembuatan Nomor Induk Pegawai/ Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			
		05	Identitas Perseorangan/ <i>Personal File</i> Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	8 Tahun	Musnah	
		06	Identitas Perseorangan/ <i>Personal File</i> Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang Secara Individual Ditentukan oleh Menteri yang Berjasa/Terlibat Peristiwa Berskala Nasional	2 Tahun setelah Berhenti/Pensiun	2 Tahun	Permanen	
		07	Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
			1) Usulan Pengangkatan Pegawai Penugasan Khusus				
			2) Usulan Pengangkatan Kembali Penugasan Khusus				
			3) Usulan Pindah/Perubahan Kriteria/Ralat Penugasan Khusus				
			4) Usulan Keputusan Wafat/Tewas Penugasan Khusus				
			5) Usul Berhenti Penugasan Khusus				
		08	Pelaksana Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
			1) Pengumuman Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
			2) Ujian Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
			3) Administrasi Pelamar Tidak Lulus Seleksi				
		09	Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
			1) Administrasi Pelamar Lulus Seleksi				

			2)	Bahan Penyusunan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			
			3)	Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			
			4)	Bahan Penyelesaian Surat Keputusan			
			5)	Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas Permintaan Sendiri			
	10		Pegawai Perbantuan (Magang, Bawah Kendali Operasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu )		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Pengadaan Pegawai Perbantuan			
			2)	Usulan Kriteria/Ralat Perjanjian Kerja			
			3)	Usulan Berhenti Perjanjian Kerja			
	02	Mutasi Pegawai					
	01 Kenaikan Pangkat				1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan dan Usulan Kenaikan Pangkat(Kenaikan Pangkat Reguler, Kenaikan Pangkat Pilihan, Kenaikan Pangkat Anumerta, Kenaikan Pangkat Luar Biasa)			
			2)	Usulan Pencantuman Gelar			
			3)	Usulan Peninjauan Masa Kerja			
	02	Kenaikan Gaji Berkala			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Kenaikan Gaji Berkala			
			2)	Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala			
	03	Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiu			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan dan Usulan Pemindahan/Mutasi			
			2)	Pelaksanaan Pindah/Mutasi Seleksi Terbuka ( <i>Job Vacancy</i> ) (Pengumuman, Pendaftaran, Ujian Seleksi)			
			3)	Administrasi Tidak Lulus Seleksi			
			4)	Kegiatan dan Usulan Pemberhentian			

			5)	Kegiatan dan Usulan Pensiun (Usulan Batas Usia Pensiun (BUP), Usulan Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Usulan Pensiun Janda/Duda)			
	04	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		1) Usulan Penilaian SKP	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		2) Usulan Penilaian Kinerja		3) Usulan Penilaian Kerja			
		4) Hasil dan Evaluasi SKP					
	05	Dukungan Informasi Kepegawaian		1) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA)			
		2) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)		3) Evaluasi Hasil Analisis Jabatan (Peta Jabatan/ Informasi Jabatan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4) Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK)					
	03	Pengembangan Pegawai					
	01	Pengembangan Karier		1) Usulan Peningkatan Golongan dan Pendidikan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		2) Usulan Ujian Dinas		3) Pelaksanaan Ujian Dinas			
		4) Usulan Ujian Kenaikan Pangkat		5) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat			
		6) Kegiatan Pelaksanaan Sumpah Jabatan		7) Usulan Penyesuaian Ijazah			
		8) Usulan Tugas dan Izin Belajar					
	02	Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu		1) Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		2) Usulan Kenaikan Jabatan					

			3)	Usulan Pengangkatan Pertama			
			4)	Usulan Alih Jabatan			
			5)	Usulan <i>Inpassing</i> /Penyesuaian			
			6)	Usulan Pembebasan Sementara			
			7)	Usulan Pengangkatan Kembali			
			8)	Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional			
			9)	Usulan Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR)			
			10)	Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Tertentu			
	03		Perancangan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Usulan Penyiapan Bahan dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, dan Pratama)				
		2)	Usulan Penyiapan Bahan dalam Pengisian Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas)				
		3)	Usulan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pejabat				
		4)	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pejabat				
	04		Penugasan/Surat Perintah Pegawai		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Usulan Surat Perintah Melaksanakan Tanggung Jawab sebagai Pelaksana Harian (Plh)				
		2)	Usulan Surat Perintah Melaksanakan Tanggung Jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt)				
	05		Manajemen Talenta		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Usulan Kegiatan Sistem Merit				
		2)	Usulan Kegiatan Manajemen Talenta				
	04		<i>Corporate University</i> Kementerian Kesehatan				

			01	Penilaian Kompetensi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1)	Administrasi Pengukuran/Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Teknis Aparatur Sipil Negara.					
			2)	Penyelenggaraan mulai dari Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan dan <i>Monitoring Evaluasi</i>					
			3)	Penyelenggaraan Kompetensi, Keterampilan Teknis, Keterampilan Interpersonal, Pengetahuan dan Pemahaman, serta Sikap Kerja Aparatur Sipil Negara		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		02	Rencana Pengembangan Kompetensi						
			1)	Penyusunan Rancangan Upaya untuk Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan Standar Kompetensi Jabatan dan Rencana Pengembangan Karier		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		03	Program Pengembangan Kompetensi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1)	<i>Platform</i> Pembelajaran Digital yang dapat Diakses oleh Seluruh SDM Kesehatan yang meliputi Tenaga Kesehatan dan Pegawai Kementerian Kesehatan					
			2)	Platform Digital meliputi Pelataran Sehat, <i>Learning Management System</i> (LMS) dan <i>Knowledge Management System</i> (KMS).					
		04	Pelaksanaan pengembangan Kompetensi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1)	Pengembangan Kompetensi seperti Pelatihan, Diklat. Seminar, Webinar Aparatur Sipil Negara, dan lain sebagainya					
		05	Pengelolaan <i>Corporate University</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
		06	Evaluasi Pengembangan Kompetensi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah		

			1)	Evaluasi Paska Pelatihan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Pelatihan Dasar			
	05	Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai					
	01	Penegakan Disiplin Pegawai			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Usulan Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil				
		2)	Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil				
		3)	Usulan Hukuman Disiplin (Tingkat Ringan, Sedang, dan Berat)				
		4)	Usulan Penetapan Status Kepegawaian				
		5)	Usulan Pengaduan Masyarakat/ Permasalahan Umum				
	02	Kesejahteraan Pegawai			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Usulan Izin Perkawinan dan Perceraian				
		2)	Usulan Penyelesaian Cuti PNS/PPPK (Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan, Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN))				
		3)	Usulan Pengajuan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)				
		4)	Usulan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)				
		5)	Usulan Tabungan Perumahan (Taperum)				
		6)	Usulan Keanggotaan Pegawai dalam Organisasi Sosial				
	03	Penghargaan bagi PNS			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Usulan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (10, 20, dan 30 Tahun) dari Presiden Republik Indonesia				

			2)	Usulan Pemberian Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada (Dwi Windu dan Tri Windu) dari Menteri Kesehatan			
		04	Penghargaan Lainnya		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Penghargaan Ksatria Bakti Husada			
			2)	Usulan Manggala Karya Bakti Husada			
			3)	Usulan Mitra Bakti Husada			
			4)	Usulan Institusi Kesehatan Berprestasi			
			5)	Usulan Tenaga Kesehatan Berprestasi			
			6)	Usulan Kader Lestari			
			7)	Usulan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional			
			8)	Usulan Pemilihan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional			
			9)	Usulan Dosen Politeknik Kesehatan dan Widyaiswara Berprestasi			
			10)	Usulan Lomba-lomba dan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan Lainnya			
		05	Pemeriksaan Kesehatan		1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Eselon I dan II			
			2)	Usulan Keputusan Tim Penguji Kesehatan			
			3)	Surat Keputusan Tim Penguji Kesehatan			
			4)	Surat Pemeriksaan Kesehatan Pegawai/Calon Pegawai			
			5)	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan			
			6)	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
		06	Tata Usaha Kepegawaian		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Presensi Pegawai			
			2)	Monitoring Pegawai			
		07	Organisasi Non-Kedinasan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah

			1)	Kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)				
			2)	Kegiatan Dharma Wanita				
			3)	Kegiatan Koperasi dan Yayasan				
KR	KERUMAHTANGGAAN							
	01	Pelayanan Kerumahtanggaan						
	01	Pelayanan Umum					Musnah	
		1)	Perencanaan Kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Pengelolaan Ruang Kerja					
		2)	Pengelolaan Ruang Pertemuan/Rapat/Lapangan Upacara					
		3)	Peminjaman Prasarana dan Sarana Kantor					
	02	Pelayanan Khusus					Musnah	
		1)	Penyediaan Layanan Kepada Pimpinan					
		2)	Penyediaan Petugas Kebersihan					
		3)	Penyediaan Petugas Pendukung Lainnya					
	03	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai					Musnah	
		1)	Pakaian Dinas Pegawai					
		2)	Satuan Pengamanan					
		3)	Tenaga Honorer					
		4)	Pramubakti					
		5)	Petugas Kebersihan dan Petugas Pendukung Lainnya					
	04	Gerakan Kantor Berhias					Musnah	
		1)	Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Kantor Berhias					
	02	Pemeliharaan dan Perbaikan						
	01	Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung					Musnah	
		1)	Kegiatan Pemeliharaan Gedung, Izin Renovasi/Perbaikan Ruang Kerja/Gedung dan Pembangunan Gedung					

			02	Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas/Wisma/ Gudang	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Tahun	Musnah
			1)	Pemeliharaan Rumah Dinas/Wisma/Gudang			
			2)	Izin Renovasi/Perbaikan Ruang Kerja/Gedung			
			3)	Izin Penggunaan Rumah Dinas			
			4)	Izin Pembangunan Rumah Dinas/Wisma/Gudang			
			03	Pertamanan/ <i>Landscape</i> /Penghijauan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan terkait Pertamanan/ <i>Landscape</i> /Penghijauan			
			04	Peralatan Kantor, Mesin dan Pengolah Data	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Administrasi Penyediaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor, Mesin dan Pengolah Data			
			05	Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Kantor Pusat			
		03		Pengelolaan Jaringan			
			01	Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Perbaikan, Pemeliharaan, Pemasangan Jaringan Telekomunikasi meliputi Telepon dan <i>Base Transceiver Station</i>			
			02	Pengelolaan Jaringan Listrik	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pemasangan Jaringan Listrik			
			03	Pengelolaan Jaringan Air	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pemasangan Jaringan Air			
			04	Pengelolaan TV Kabel	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pengelolaan TV Kabel dan/atau Internet			

			05	Pelaksanaan Penghematan Energi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan Penghematan Energi di Lingkungan Kantor Pusat			
	04	<u>Pengelolaan Kendaraan Dinas</u>					
	01	Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		1)	Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas				
		2)	Penatausahaan Pengelolaan Kendaraan Dinas				
	02	<u>Pengelolaan Kendaraan Dinas</u>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Kendaraan Dinas				
		2)	Rekomendasi Pengadaan Kendaraan Dinas				
		3)	Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas				
	03	<u>Penggunaan Kendaraan Dinas</u>		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		1)	Kegiatan Penatausahaan, Pengelolaan dan Penggunaan Kendaraan Dinas				
	05	<u>Ketertiban dan Keamanan</u>					
	01	<u>Pengamanan</u>		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		1)	Kegiatan Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan Terhadap Pejabat dan Tamu Pejabat, Rumah Dinas, Prasarana dan Sarana Kantor				
		2)	Penataausahaan Surat Izin Masuk/Keluar Barang Milik Negara dan Orang				
		3)	Pendayagunaan Petugas Pengamanan, Petugas Jaga/Piket				
		4)	Penataausahaan Kejadian/Gangguan/Pelanggaran				
		5)	Mobilisasi Demonstran dan Kerja Sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)/ Tentara Nasional Indonesia, dan Aparat Keamanan Lainnya				

			02	Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
			1)	Penatausahaan Laporan Ketertiban dan Keamanan						
			2)	Kehilangan, Kerusakan, Kecelakaan, Gangguan dan Penertiban Penggunaan Prasarana dan Sarana, serta Koordinasi Partisipatif Lainnya Terkait Komunikasi dengan Lingkungan Sekitar	1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
			03	Administrasi Pengelolaan Parkir						
			1)	Penatausahaan, Pengelolaan, dan Penyediaan Lahan Parkir						
KS	KERJA SAMA LUAR NEGERI									
	01	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri								
	01	Telaah Permohonan			2 Tahun Setelah Ditandatangani	3 Tahun	Musnah			
		1)	Telaah Permohonan Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri							
	02	Dokumen Kerja Sama Internasional			2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen			
		1)	Persiapan							
		2)	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen <i>Memorandum of Understanding, Letter of International dan Agreement</i> Lainnya							
		3)	<i>Memorandum of Understanding, Letter of International dan Agreement</i> Lainnya							
	03	Kertas Posisi/Surat Pendeklegasian			2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kertas Posisi/Surat Pendeklegasian meliputi Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Kertas Posisi/Surat Pendeklegasian							
		2)	Kertas Posisi/Surat Pendeklegasian							
	04	Registrasi Pinjaman Hibah Luar Negeri			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Persiapan serta Pelaksanaan Penyusunan Registrasi Pinjaman Hibah Luar Negeri							

		02	Penyusunan Program, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kerja Sama Kesehatan Luar Negeri				
		01	Kerja sama Kesehatan Bilateral		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Persiapan Penyusunan Program, Perencanaan Kerja Sama Kesehatan Bilateral baik di Kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah maupun Kawasan Amerika, Eropa dan Afrika			
			2)	Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Kesehatan Bilateral baik di Kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah maupun Kawasan Amerika, Eropa dan Afrika			
		02	Kerja Sama Kesehatan Regional		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1)	Persiapan Penyusunan Program, Perencanaan Kerja Sama Kesehatan Regional baik dengan Negara <i>Association South East Asia Nation</i> Maupun <i>Non-Association South East Asia Nation</i>			
			2)	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Kesehatan Regional baik dengan Negara <i>Association South East Asia Nation</i> Maupun <i>Non-Association South East Asia Nation</i>			
		03	Kerja Sama Kesehatan Multilateral		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1)	Persiapan Penyusunan Program, Perencanaan Kerja Sama Kesehatan Multilateral baik dengan Persatuan Bangsa-Bangsa maupun Non-Persatuan Bangsa-Bangsa			
			2)	Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Kesehatan Multilateral baik dengan Persatuan Bangsa-Bangsa maupun Non-Persatuan Bangsa-Bangsa			
		03	Administrasi Kerja Sama Luar Negeri				

		01	Administrasi Kerja Sama Antar-Lembaga Pemerintah, Lembaga Non-Pemerintah dan <i>International Non-Government Organization</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		02	Administrasi Tenaga Kerja Asing Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Persiapan dan Pelaksanaan Administrasi Tenaga Kerja Asing Kesehatan			
		03	Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Surat Perintah (SP) Sekretariat Negara			
			2) Paspor			
			3) Visa			
			4) <i>Exit permit</i>			
KU	KEUANGAN					
	01	Tata Laksana Keuangan				
		01	Pendapatan Negara Bukan Pajak	2 Tahun Setelah Ditetapkan	8 Tahun	Musnah
			1) Usulan Target dan Pagu Pendapatan Negara Bukan Pajak			
			2) Dokumen Target dan Pagu Penyusunan Pendapatan Negara Bukan Pajak			
			3) Usulan Pendapatan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum			
			4) Usulan Remunerasi Badan Layanan Umum			
			5) Pola Tarif			
			6) Laporan dan Berita Acara Badan Layanan Umum dan Non Badan Layanan Umum			
			7) Kartu Pengawasan dan Rincian Surat Perintah Membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak			
		02	Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Melalui Aplikasi	1 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil	2 Tahun	Musnah
			1) Bukti Kuitansi Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Melalui Aplikasi			

					Pemeriksaan Selesai		
		03	Hibah Langsung Luar Negeri Barang/Jasa				
			1) Kegiatan Hibah Langsung Luar Negeri Barang/Jasa meliputi Laporan dan Hasil Pemantauan		2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai dan Barang Telah Dihapuskan	8 Tahun	Musnah
		04	Penghapusan Piutang				
			1) Pelimpahan Piutang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang		2 Tahun Setelah Terbit SK Hapus Bersyarat	8 Tahun	Musnah
		02	Pelaksanaan Anggaran				
		01	Belanja Pegawai				
			1) Gaji				
			2) Tunjangan Kinerja				
			3) Remunerasi				
			4) Honorarium				
			5) Uang Lembur				
			6) Uang Makan				
			7) Pensiun				
			8) Biaya Kecelakaan				
			9) Biaya Pemakaman				
			10) Penggajian Pegawai Honorer dan Vakasi				
		02	Administrasi dan Data Dukung Pembayaran Gaji		1 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	2 Tahun	Musnah

			03	Belanja Barang	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah
			1)	Belanja Barang Operasional			
			2)	Belanja Barang Non-Operasional			
			3)	Belanja Barang BLU			
			4)	Belanja Bantuan Sosial			
			04	Belanja Modal	2 Tahun Setelah Barang Tidak Dikuasai	5 Tahun	Musnah
			1)	Pembayaran Perolehan Aset Menambah Nilai Aset Tetap atau Aset Lainnya			
			05	Pengeluaran Anggaran	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah
			1)	Rencana Penarikan Dana			
			2)	Rencana Pelaksana Kegiatan			
			3)	Surat Permintaan Pembayaran - Ganti Uang (SPP-GU)			
			4)	Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP- LS)			
			5)	Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)			
			6)	Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SSP-TUP)			
			7)	Surat Kuasa Sampai Surat Perintah Membayar (SPM)			
			8)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)			
			9)	Petunjuk Pelaksanaan/Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara			
			10)	Bahan Nota Keuangan, dan lain-lain			
			03	Pengelolaan Perbendaharaan			
			01	Perbendaharaan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Persetujuan dan Pelaporan Pembukaan dan Penutupan Rekening			

			2)	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan			
		02	Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1) KP4, Surat Keterangan untuk Mendapat Tunjangan Keluarga	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Surat Keterangan Lain terkait Penghasilan Pegawai			
		03		Pajak			
			1)	Pengelolaan Perbendaharaan Meliputi Penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP)	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah
		04	Penerimaan Non-Pajak	1) Penerimaan dan Penyetoran Non-Pajak Melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah
				1) Pengembalian Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)			
		05	Pengembalian Belanja	1) Pengembalian Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah
		06		Berita Acara Pemeriksaan Kas			
					2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil	8 Tahun	Musnah

				Pemeriksaan Selesai		
	07	Verifikasi Anggaran		2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah
		1) Pengujian/Penelitian Kebenaran Pertanggungjawaban Pengeluaran disertai dengan Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan/ Pengeluaran Anggaran				
	08	Pembukuan Anggaran		2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah
		1) Buku Kas Umum				
		2) Buku Kas Pembantu				
		3) Kartu-kartu Realisasi Anggaran				
		4) Kartu Pengawasan Realisasi				
	04	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
	01	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang)				
		1) Laporan Realisasi Anggaran				
		2) Neraca				
		3) Laporan Operasional				
		4) Laporan Perubahan Ekuitas				
		5) Catatan atas Laporan Keuangan				
	02	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Koordinator Wilayah (pada UPT yang Menjadi Koordinator Wilayah)		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
		1) Laporan Realisasi Anggaran				
		2) Neraca				
		3) Laporan Operasional				
		4) Laporan Perubahan Ekuitas				
		5) Catatan Atas Laporan Keuangan				
	03	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Eselon I (Biro Keuangan dan Barang Milik		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan	3 Tahun	Musnah

			Negara/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/ Sekretariat Badan)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai		
			1) Laporan Realisasi Anggaran			
			2) Neraca			
			3) Laporan Operasional			
			4) Laporan Perubahan Ekuitas			
			5) Catatan Atas Laporan Keuangan			
	04		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan (Biro Keuangan dan Barang Milik Negara)	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
			1) Laporan Realisasi Anggaran			
			2) Neraca			
			3) Laporan Operasional			
			4) Laporan Perubahan Ekuitas			
			5) Catatan Atas Laporan Keuangan			
	05		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah
			1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			
			2) Penyiapan Bahan Koordinasi			
			3) Analisis			
			4) Pengelolaan Akuntansi Atas Uang dan Barang			
	06		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Non-Badan Layanan Umum	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	5 Tahun	Musnah
			1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			
			2) Penyiapan Bahan Koordinasi			
			3) Analisis			
			4) Pengelolaan Akuntansi Atas Uang dan Barang			
	07		Penyiapan Bahan Analisis Akuntansi Kementerian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	08		Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	3 Tahun	Musnah

					Hasil Pemeriksaan Selesai					
			09	Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Unit Eselon I	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah			
			10	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah			
MR	<b>MANAJEMEN RISIKO</b>									
	01	Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan								
	01	<i>Risk Register</i>			2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penetapan, Pelaksanaan dan Penyusunan <i>Risk Register</i> Manajemen Risiko							
	02	Laporan Manajemen Risiko			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Koordinasi, Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko							
OT	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>									
	01	Organisasi								
	01	Penataan Organisasi			2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Permanen			
		1)	Usulan Organisasi dan Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi, dan Unit Pelaksana Teknis							
		2)	Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi, dan Unit Pelaksana Teknis							

			3)	Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi, dan Unit Pelaksana Teknis			
			4)	Penetapan Organisasi dan Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi, dan Unit Pelaksana Teknis			
			5)	Pelaporan Organisasi dan Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Unit Pelaksana Teknis			
	02	Evaluasi Organisasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Usulan Evaluasi Organisasi dan Kriteria Klasifikasi					
		2) Penyusunan Evaluasi Organisasi dan Kriteria Klasifikasi					
		3) Pembahasan Evaluasi Organisasi dan Kriteria Klasifikasi					
		4) Penetapan Evaluasi Organisasi dan Kriteria Klasifikasi					
		5) Pelaporan Evaluasi Organisasi dan Kriteria Klasifikasi					
	03	Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Usulan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor					
		2) Penyusunan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor					
		3) Pembahasan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor					
		4) Penetapan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor					
		5) Pelaporan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor					
	04	Budaya Kerja Organisasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Usulan Budaya Kerja Organisasi					
		2) Penyusunan Budaya Kerja Organisasi					

			3)	Pembahasan Budaya Kerja Organisasi						
			4)	Penetapan Budaya Kerja Organisasi						
			5)	Pelaporan Budaya Kerja Organisasi						
02	Ketatalaksanaan									
	01	Proses Bisnis			2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Permanen			
		1)	Usulan Peta Proses Bisnis dan Peta Lintas Fungsi							
		2)	Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Peta Lintas Fungsi							
		3)	Pembahasan Peta Proses Bisnis dan Peta Lintas Fungsi							
		4)	Penetapan Peta Proses Bisnis dan Peta Lintas Fungsi							
		5)	Pelaporan Peta Proses Bisnis dan Peta Lintas Fungsi							
	02	Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah			2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah			
		1)	Usulan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah							
		2)	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah							
		3)	Pembahasan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah							
		4)	Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah							
		5)	Pelaporan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah							
	03	Pedoman Ketatalaksanaan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			

			1)	Usulan Akronim, Singkatan Nama, Nomenklatur Bahasa Inggris, Pedoman Organisasi Tata Laksana Lainnya						
			2)	Penyusunan Akronim, Singkatan Nama, Nomenklatur Bahasa Inggris, Pedoman Organisasi Tata Laksana Lainnya						
			3)	Pembahasan Akronim, Singkatan Nama, Nomenklatur Bahasa Inggris, Pedoman Organisasi Tata Laksana Lainnya						
			4)	Penetapan Akronim, Singkatan Nama, Nomenklatur Bahasa Inggris, Pedoman Organisasi Tata Laksana Lainnya						
			5)	Pelaporan Akronim, Singkatan Nama, Nomenklatur Bahasa Inggris, Pedoman Organisasi Tata Laksana Lainnya						
	03	Analisis Jabatan								
	01	Informasi Jabatan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Usulan Informasi Jabatan							
		2)	Penyusunan Informasi Jabatan							
		3)	Pembahasan Informasi Jabatan							
		4)	Penetapan Informasi Jabatan							
	02	Analisis Beban Kerja			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Usulan Perhitungan Beban Kerja dan Peta Jabatan							
		2)	Penyusunan Perhitungan Beban Kerja dan Peta Jabatan							
		3)	Pembahasan Hasil Perhitungan Beban Kerja dan Peta Jabatan							
		4)	Penetapan Hasil Perhitungan Beban Kerja dan Peta Jabatan							

			5)	Pelaporan Hasil Perhitungan Beban Kerja dan Peta Jabatan			
		03	Evaluasi Jabatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Usulan kelas jabatan				
			2) Laporan Evaluasi Jabatan				
			3) Penyusunan Kelas Jabatan				
			4) Pembahasan Kelas Jabatan				
			5) Penetapan Kelas Jabatan				
			6) Pelaporan Kelas Jabatan				
	04	Implementasi Reformasi Birokrasi					
		01	Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Internal		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Usulan Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Implementasi Transformasi Internal Kemenkes				
			2) Penyusunan Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Implementasi Transformasi Internal Kemenkes				
			3) Pembahasan Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Implementasi Transformasi Internal Kemenkes				
			4) Penetapan Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Implementasi Transformasi Internal Kemenkes				
			5) Pelaporan Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Implementasi Transformasi Internal Kemenkes				
		02	<i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1) Usulan Penyusunan <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan				

			2)	Penyusunan <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan			
		03	Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Fasilitasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Penilaian Reformasi Birokrasi Eksternal			
			2)	Penyusunan Fasilitasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Penilaian Reformasi Birokrasi Eksternal			
			3)	Pembahasan Fasilitasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Penilaian Reformasi Birokrasi Eksternal			
			4)	Penetapan Fasilitasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Penilaian Reformasi Birokrasi Eksternal			
			5)	Pelaporan Fasilitasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Penilaian Reformasi Birokrasi Eksternal			
PR	<b>PERENCANAAN</b>						
	01	Perencanaan Strategis dan Program Kementerian Kesehatan					
		01	Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			1)	Penyiapan Bahan Koordinasi			
			2)	Penyusunan Rencana Strategis			
		02	Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			1)	Penyiapan Bahan Koordinasi			
			2)	Penyusunan Rencana Strategis			
		03	Nota Keuangan dan Lampiran Pidato Presiden		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyiapan Bahan Koordinasi			
			2)	Penyusunan Nota Keuangan			

			3)	Lampiran Pidato Presiden			
		04	Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan	1) Penyiapan Bahan Koordinasi dan Penyusunan Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
			2)				
		05	Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi				
			1)	Penyiapan Bahan Koordinasi dan Penyusunan Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			2)	Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan			
		06	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan				
		07	Usulan Perencanaan Program Kerja Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah	
		08	Usulan Program Transfer Daerah				
			1)	Program Transfer Daerah Termasuk Dana Alokasi Khusus	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
		02	Pokok-pokok Kebijakan dan strategi Pembangunan				
		01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bidang Kesehatan				
			1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang Telah Ditetapkan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen

		02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bidang Kesehatan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bidang Kesehatan			
	03	Rencana Kerja Tahunan				
		01	Rencana Kerja Tahunan Kementerian Kesehatan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		1)	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah			
		2)	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Tahunan			
		3)	Rencana Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas)			
		02	Penetapan Kinerja Menteri dan Pimpinan Madya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1)	Penetapan Kinerja Eselon I dengan Menteri Kesehatan			
		2)	Penetapan Kinerja Menteri Kesehatan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
		03	Penetapan Kinerja Eselon II ke bawah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penetapan Kinerja Eselon II dengan Eselon I			
	04	Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara				
		01	Penyusunan Anggaran Kementerian Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga			
		2)	Daftar Isian Program dan Anggaran			
		3)	Petunjuk Operasional Kegiatan			
		4)	Surat Rincian Alokasi Anggaran			
		5)	Standar Biaya Umum			
		6)	Standar Biaya Khusus			
		02	Revisi Dokumen Anggaran Kementerian Kesehatan	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	3 Tahun	Musnah
		1)	Revisi/Refocusing/Efisiensi Perubahan Dokumen Anggaran			

			2)	Revisi Daftar Isian Program dan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	Hasil Pemeriksaan Selesai		
		03	Penyusunan Anggaran Transfer Daerah		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Anggaran Transfer Daerah Termasuk Dana Alokasi Khusus			
		04	Revisi Dokumen Anggaran Transfer Daerah		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
			1)	Revisi/Perubahan Dokumen Anggaran Transfer Daerah Termasuk Dana Alokasi Khusus			
	05	Pelaporan dan Evaluasi					
	01	Laporan Berkala			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Laporan Triwulan				
	02	Laporan Tahunan			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	03	Laporan Khusus			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Laporan Pemantauan Prioritas				
		2)	Laporan Pelaksanaan Kegiatan atas Permintaan Eksternal				
		3)	Laporan Atas Pelaksanaan Kegiatan/Program Tertentu Seperti Pidato Presiden dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI				
	04	Progress Report			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Laporan yang Mencerminkan Kemajuan Tahapan Pelaksanaan Kinerja yang Telah Dicapai dalam Kurun Waktu Tertentu (untuk				

			Kegiatan yang Berkelanjutan yang Memerlukan Waktu Lebih dari Satu)			
		05	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		06	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja/UPT/Unit Organisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		07	Laporan Program Transfer Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1) Penyusunan Laporan <i>Monitoring Final</i>			
		08	Evaluasi Program Transfer Daerah Termasuk Dana Alokasi Khusus Final	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
PS	<b>PENGAWASAN</b>					
	01	<b>Audit</b>				
		01	Audit Kinerja	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tuntas	3 Tahun	Musnah
			1) Surat Penugasan			
			2) Surat Pemberitahuan			
			3) Pelaporan sampai Tindak lanjut			
		02	Audit dengan Tujuan Tertentu	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tuntas	3 Tahun	Musnah
			1) Surat Penugasan			
			2) Surat Pemberitahuan			
			3) Klarifikasi Audit			
			4) Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen, yang Memerlukan Tindak Lanjut dan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut			
		03	<i>Probity Audit</i>	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan	3 Tahun	Musnah
			1) Surat Penugasan			

			2)	Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen, yang Memerlukan Tindak Lanjut dan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tuntas		
		04	Audit Penugasan Khusus		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tuntas	3 Tahun	Musnah
			1)	Surat Penugasan			
			2)	Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen, yang Memerlukan Tindak Lanjut, dan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut			
	02	Reviu					
		01	Reviu Laporan Keuangan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Laporan Keuangan (Semesteran dan Tahunan)			
			2)	Surat Penugasan			
			3)	Surat Pemberitahuan sampai dengan Pelaporan			
		02	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga			
			2)	Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga/Anggaran			
			3)	Buka Blokir			
			4)	<i>Refocusing</i> Anggaran			
			5)	Surat Penugasan, Surat Pemberitahuan sampai dengan Pelaporan			
		03	Reviu Lainnya		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara			
			2)	Reviu Evaluasi Penyerapan Anggaran			

			3)	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan			
			4)	Aspek Kinerja Tertentu			
			5)	Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan			
			6)	Hasil Kajian Pengawasan Tertentu Baik Semesteran dan Tahunan			
			7)	Surat Penugasan, Surat Pemberitahuan sampai dengan Pelaporan			
		04	Reviu Surat Pernyataan Piutang Negara telah Optimal/Verifikasi Utang		2 Tahun Setelah Tuntas Ditindaklanjuti	3 Tahun	Musnah
	03	Evaluasi					
		01	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kesehatan		1 Tahun	4 Tahun	Musnah
		02	Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional		1 Tahun	4 Tahun	Musnah
		03	Evaluasi Reformasi dan Birokrasi		1 Tahun	4 Tahun	Musnah
		04	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			
			2)	Manajemen Risiko Indeks			
			3)	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi			
			4)	Surat Penugasan sampai dengan Pelaporan			
		05	Evaluasi Efektivitas Kepatuhan Satuan Kepatuhan Intern/ Satuan Pengawas Intern		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		06	Evaluasi Program Lainnya		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	04	Pengaduan Masyarakat					
		01	Penanganan Pengaduan Masyarakat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		02	Daftar Hitam		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03	Klarifikasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	05	Laporan Hasil Pengawasan					

			01	Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah				
			2)	Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Semesteran dan Tahunan yang Disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Menteri Kesehatan				
	06			Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi				
		01		Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	2 Tahun Setelah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Dinyatakan Tuntas	3 Tahun	Musnah	
			1)	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Laporan Kehilangan				
			2)	Berita Acara Kehilangan Barang/Uang				
			3)	Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (Surat Kesanggupan untuk Mengganti Ke Kas Negara)				
			4)	Surat Keputusan Penghapusan Uang dan Barang Sampai Laporan Penyelesaian				
	07			Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan				
		01		Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan	1 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tuntas dan Mempunyai Kekuatan Hukum	4 Tahun	Musnah	
			1)	Surat Tugas				
			2)	Laporan Hasil Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan/Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan yang Ditindaklanjuti				
	08			Program Pencegahan Korupsi				
		01		Pengendalian Gratifikasi/Sponsorship	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	

			1)	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi/Sponsorship sampai dengan Pelaporan			
		02		Pembangunan Zona Integritas (ZI)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani) meliputi Surat Penugasan, Surat Pemberitahuan sampai dengan Pelaporan			
		03		Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan LHKPN meliputi Surat Penugasan, Surat Pemberitahuan sampai dengan Pelaporan			
		04		Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara meliputi Surat Penugasan, Surat Pemberitahuan sampai dengan Pelaporan			
		05		Program Pencegahan Korupsi Lainnya	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Program Pencegahan Korupsi Lainnya meliputi Surat Penugasan, Surat Pemberitahuan sampai dengan Pelaporan			
		09		Kegiatan Pengawasan Lainnya			
		01		Konsultasi Pengawasan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Bimbingan dan Konsultasi Pengawasan			
		02		Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan yang Meliputi Surat Penugasan, Surat Undangan, Narasumber, sampai dengan Pelaporan			
		03		Kebijakan Pengawasan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	2 Tahun	Permanen
		04		Perencanaan Pengawasan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah

			1)	Perencanaan Pengawasan			
			2)	Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)			
			3)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)			
				Roadmap pengawasan			
	05	Verifikasi Pengawasan			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
UM	<b>KETATAUSAHAAN</b>						
	01	<b>Kesekretariatan Pimpinan</b>					
		01	Penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Menteri dan Wakil Menteri) Terkait Bidang Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1) Rapat Koordinasi Pimpinan				
			2) Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas				
			3) Rapat Dengar Pendapat				
			4) Sambutan Menteri dan Wakil Menteri				
		02	Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03	Rapat Koordinasi Direktorat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		04	Rapat Koordinasi Staf		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		05	Rapat Koordinasi Pusat/Biro		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		06	Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Permintaan Fotokopi				
			2) Permintaan Penjilidan				
			3) Permintaan Pencetakan				
	02	<b>Keprotokolan</b>					
		01	Lambang, Bendera, dan Lagu Kebangsaan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Penggunaan Lambang Negara Garuda Pancasila				
			2) Penggunaan Bendera Kebangsaan Bendera Merah Putih				
			3) Penggunaan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya				
	02	Pelaksanaan Upacara			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Upacara Bendera				
		2)	Upacara Hari Raya/Hari Besar Nasional				

			3)	Upacara Pemakaman dan Apel Pagi			
			4)	Berkas Kegiatan Penandatanganan MoU dan Peresmian			
			5)	Pelantikan, Pengukuhan, Pemberian Penghargaan			
		03	Administrasi Audiensi dan Jamuan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		04	Agenda Pimpinan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		05	Ucapan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Ucapan Terima Kasih			
			2)	Ucapan Selamat			
			3)	Ucapan Bela Sungkawa			
UI	PENGELOLAAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA						
	01	Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara					
		01	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara dan Gaji Aparatur Sipil Negara		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Administrasi/Data Dukung Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara dan Gaji Aparatur Sipil Negara			
		02	Dokumen tunjangan Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara				
			1)	Dokumen Usulan Uang Makan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2)	Dokumen Usulan Uang Lembur			
			3)	Dokumen Usulan Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara			
		03	Pemotongan Pajak Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara		1 Tahun Setelah Pemeriksaan Selesai	4 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Verifikasi Mekanisme Pemotongan Pajak Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara			

		04	Rekening Gaji Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara	2	3 Tahun	Musnah
			1) Verifikasi Pembuatan Rekening Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara			
		05	Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		06	Penggunaan Aplikasi <i>e-Monev</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	02	Pengelolaan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian				
		01	Administrasi Pengelolaan Pembayaran Insentif Tenaga Kontrak dengan Perjanjian	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Insentif Staf Khusus Menteri			
			2) Insentif Tenaga Pegawai Tidak Tetap			
			3) Insentif Tenaga Honorer			
			4) Insentif Nusantara Sehat Individu			
			5) Insentif Nusantara Sehat Tim			
			6) Insentif Pendayagunaan Dokter Spesialis, Residen, dan Dokter Pasca <i>Internship</i>			
		02	Dokumen Tunjangan Uang Lembur Tenaga Kontrak dengan Perjanjian	2 Tahun Setelah Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
			1) Verifikasi Usulan Uang Lembur Tenaga Honorer			
			2) Database Dasar Pembayaran Uang Lembur Tenaga Honorer			
		03	Pemotongan Pajak Tenaga Kontrak dengan Perjanjian	2 Tahun Setelah Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
			1) Verifikasi Mekanisme Pemotongan Pajak Tenaga Kontrak dengan Perjanjian			
		04	Rekening Gaji Tenaga Kontrak dengan Perjanjian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Verifikasi Pembuatan Buku Rekening Tenaga Kontrak dengan Perjanjian			
		05	Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
II	SUBSTANTIF					
	AD	ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN				

		01	Analisis Lingkungan Strategis			
		01	Analisis Politik Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Forum Dialog Kebijakan			
		2)	Asesmen Lapangan			
		3)	Pembahasan Analisis Kebijakan			
		02	Analisis Sosial Ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Forum Dialog kebijakan			
		2)	Asesmen Lapangan			
		3)	Pembahasan Analisis Kebijakan			
		03	Analisis Perilaku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Forum Dialog Kebijakan			
		2)	Asesmen Lapangan			
		3)	Pembahasan Analisis Kebijakan			
		04	Analisis Kesehatan Intelegensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Forum Dialog kebijakan			
		2)	Asesmen Lapangan			
		3)	Pembahasan Analisis Kebijakan			
	02	Pelaksanaan Program Analisis Lingkungan Strategis				
	01	Pelaksanaan Program Analisis Politik Kesehatan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Pelaksanaan Kegiatan di Daerah			
		2)	Lokakarya			
	02	Pelaksanaan Program Analisis Sosial Ekonomi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Pelaksanaan Kegiatan di Daerah			
		2)	Lokakarya			
	03	Pelaksanaan Program Analisis Perilaku		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Pelaksanaan Kegiatan di Daerah			
		2)	Lokakarya			
	04	Pelaksanaan Program Analisis Kesehatan Intelegensi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Pelaksanaan Kegiatan di Daerah			
		2)	Lokakarya			

		03	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Analisis Lingkungan Strategis			
		01	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Analisis Politik Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Pemantauan			
			2) Evaluasi			
		02	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Analisis Sosial Ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Pemantauan			
			2) Evaluasi			
		03	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Analisis Perilaku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Pemantauan			
			2) Evaluasi			
		04	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Analisis Kesehatan Intelelegensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Pemantauan			
			2) Evaluasi			
BP	<b>KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN</b>					
	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Kebijakan Pembangunan Kesehatan				
		01	Kebijakan Upaya Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Pengusulan Kebijakan (Surat Usulan, Surat Permintaan, Telaahan Staf, Bahan Pidato, Ceramah, Materi Presentasi, Memo Kebijakan)			
			2) Penetapan Agenda Kebijakan ( <i>Agenda Setting</i> )			
			3) Survei/Studi/Penelitian			
			a) Rencana kerja Survei/Studi/Penelitian ( <i>Master Plan</i> )			
			b) Administrasi Survei/Studi/Penelitian (Surat Tugas/Surat Perintah, Pembentukan Tim)			

					Kerja, Dokumen Kerja Sama (Dinas, Laboratorium, Perguruan Tinggi, Layanan Kesehatan, dan lain-lain)			
				c)	Pelaksanaan Survei/Studi/Penelitian (Proposal Protokol, Rekomendasi Etik, Perizinan, Kuesioner, Kontak Responden, Data Hasil Pemeriksaan Spesimen			
				d)	Laporan Hasil Survei/Studi/Penelitian (Laporan Akhir)			
	02	Usulan Penyusunan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan					2 Tahun	3 Tahun
		1)	Pengusulan Kebijakan (Surat Usulan, Surat Permintaan, Telaahan Staf, Bahan Pidato, Ceramah, Materi Presentasi, Memo Kebijakan)					Musnah
		2)	Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)					
		3)	Survei/Studi/Penelitian					
			a)	Rencana kerja Survei/Studi/Penelitian ( <i>Master Plan</i> )				
			b)	Administrasi Survei/Studi/Penelitian (Surat Tugas/Surat Perintah, Pembentukan Tim Kerja, Dokumen Kerja Sama (Dinas, Laboratorium, Perguruan Tinggi, Layanan Kesehatan, dan lain-lain)				
			c)	Pelaksanaan Survei/Studi/Penelitian (Proposal Protokol, Rekomendasi Etik, Perizinan, Kuesioner, Kontak Responden, Data Hasil Pemeriksaan Spesimen				
			d)	Laporan Hasil Survei/Studi/Penelitian (Laporan Akhir)				
	03	Usulan Penyusunan Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan					2 Tahun	3 Tahun
								Musnah

				1)	Pengusulan Kebijakan (Surat Usulan, Surat Permintaan, Telaahan Staf, Bahan Pidato, Ceramah, Materi Presentasi, Memo Kebijakan)				
				2)	Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)				
				3)	Survei/Studi/Penelitian				
				a)	Rencana kerja Survei/Studi/Penelitian ( <i>Master Plan</i> )				
				b)	Administrasi Survei/Studi/Penelitian (Surat Tugas/Surat Perintah, Pembentukan Tim Kerja, Dokumen Kerja Sama (Dinas, Laboratorium, Perguruan Tinggi, Layanan Kesehatan, dan lain-lain)				
				c)	Pelaksanaan Survei/Studi/Penelitian (Proposal Protokol, Rekomendasi Etik, Perizinan, Kuesioner, Kontak Responden, Data Hasil Pemeriksaan Spesimen				
				d)	Laporan Hasil Survei/Studi/Penelitian (Laporan Akhir)				
	04				Usulan Penyusunan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				1)	Pengusulan Kebijakan (Surat Usulan, Surat Permintaan, Telaahan Staf, Bahan Pidato, Ceramah, Materi Presentasi, Memo Kebijakan)				
				2)	Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)				
				3)	Survei/Studi/Penelitian				
				a)	Rencana kerja Survei/Studi/Penelitian ( <i>Master Plan</i> )				
				b)	Administrasi Survei/Studi/Penelitian (Surat Tugas/Surat Perintah, Pembentukan Tim Kerja, Dokumen Kerja Sama (Dinas,				

					Laboratorium, Perguruan Tinggi, Layanan Kesehatan, dan lain-lain)			
				c)	Pelaksanaan Survei/Studi/Penelitian (Proposal Protokol, Rekomendasi Etik, Perizinan, Kuesioner, Kontak Responden, Data Hasil Pemeriksaan Spesimen			
				d)	Laporan Hasil Survei/Studi/Penelitian (Laporan Akhir)			
	02	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Kesehatan						
	01	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Upaya Kesehatan					2 Tahun	3 Tahun
		1)	Perumusan dan Penyusunan Bahan (Hasil Konsultasi Publik Hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), Hasil Uji Petik, <i>Hearing</i> dan Bahan Dukungan Lainnya Dalam Penyusunan Kebijakan					Permanen
		2)	Rekomendasi Kebijakan (Naskah Urgensi, Naskah Akademik, Naskah Kajian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Saran Kebijakan seperti <i>Policy Brief</i> , <i>Policy Paper</i> , <i>Policy Memo</i> , Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan, Monografi Kebijakan)					
		3)	Perbaikan/Penyempurnaan Kebijakan ( <i>Policy Refinement</i> )					
		4)	Laporan Advokasi Kebijakan					
		5)	Laporan hasil Evaluasi Kebijakan					
		6)	<i>Material Transfer Agreement</i> (Permohonan Rekomendasi <i>Material Transfer Agreement</i> dan Rekomendasi <i>Material Transfer Agreement</i> )					

			02	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1)	Perumusan dan Penyusunan Bahan (Hasil Konsultasi Publik Hasil FGD, Hasil Uji Petik, <i>Hearing</i> , dan Bahan Dukungan Lainnya dalam Penyusunan Kebijakan				
			2)	Rekomendasi Kebijakan (Naskah Urgensi, Naskah Akademik, Naskah Kajian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Saran Kebijakan seperti <i>Policy Brief</i> , <i>Policy Paper</i> , <i>Policy Memo</i> , Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan, Monografi Kebijakan)				
			3)	Perbaikan/Penyempurnaan Kebijakan ( <i>Policy Refinement</i> )				
			4)	Laporan Advokasi Kebijakan				
			5)	Laporan hasil Evaluasi Kebijakan				
			6)	<i>Material Transfer Agreement</i> (Permohonan Rekomendasi <i>Material Transfer Agreement</i> dan Rekomendasi <i>Material Transfer Agreement</i> )				
			03	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1)	Perumusan dan Penyusunan Bahan (Hasil Konsultasi Publik Hasil FGD, Hasil Uji Petik, <i>Hearing</i> , dan Bahan Dukungan Lainnya dalam Penyusunan Kebijakan				
			2)	Rekomendasi Kebijakan (Naskah Urgensi, Naskah Akademik, Naskah Kajian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Saran Kebijakan seperti <i>Policy Brief</i> , <i>Policy Paper</i> , <i>Policy</i>				

				<i>Memo, Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan, Monografi Kebijakan)</i>			
			3)	Perbaikan/Penyempurnaan Kebijakan ( <i>Policy Refinement</i> )			
			4)	Laporan Advokasi Kebijakan			
			5)	Laporan hasil Evaluasi Kebijakan			
			6)	<i>Material Transfer Agreement</i> (Permohonan Rekomendasi <i>Material Transfer Agreement</i> dan Rekomendasi <i>Material Transfer Agreement</i> )			
	04	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1)	Perumusan dan Penyusunan Bahan (Hasil Konsultasi Publik Hasil FGD, Hasil Uji Petik, <i>Hearing</i> , dan Bahan Dukungan Lainnya dalam Penyusunan Kebijakan				
		2)	Rekomendasi Kebijakan (Naskah Urgensi, Naskah Akademik, Naskah Kajian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Saran Kebijakan seperti <i>Policy Brief</i> , <i>Policy Paper</i> , <i>Policy Memo</i> , Artikel Kebijakan/Makalah Kebijakan, Monografi Kebijakan)				
		3)	Perbaikan/Penyempurnaan Kebijakan (( <i>Policy Refinement</i> )				
		4)	Laporan Advokasi Kebijakan				
		5)	Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan				
		6)	<i>Material Transfer Agreement/MTA</i> (Permohonan Rekomendasi MTA dan Rekomendasi MTA)				
	03	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Kesehatan					
	01	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Upaya Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	

			1)	Sosialisasi/Penyebarluasan Kebijakan (Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi Publik)			
			2)	Laporan Diseminasi Kebijakan			
			3)	Uji Coba Kebijakan			
		02	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi/Penyebarluasan Kebijakan (Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi Publik)			
			2)	Laporan Diseminasi Kebijakan			
			3)	Uji Coba Kebijakan			
		03	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi/Penyebarluasan Kebijakan (Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi Publik)			
			2)	Laporan Diseminasi Kebijakan			
			3)	Uji Coba Kebijakan			
		04	Diseminasi dan Advokasi Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi/Penyebarluasan Kebijakan (Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi Publik)			
			2)	Laporan Diseminasi Kebijakan			
			3)	Uji Coba Kebijakan			
	04	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Kesehatan					
		01	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Upaya Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Adopsi Kebijakan			
		02	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Adopsi Kebijakan			
		03	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Adopsi Kebijakan			
		04	Integrasi dan Sinergi Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Adopsi Kebijakan			
	05	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan					
		01	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Upaya Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan				
			2) Perencanaan Evaluasi Kebijakan				
			3) Surat Keputusan Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan				
			4) Dokumen Rencana Kerja Evaluasi Kebijakan				
			5) Survei Evaluasi Kebijakan				
			6) Administrasi				
		02	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan				
			2) Perencanaan Evaluasi Kebijakan				
			3) Surat Keputusan Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan				
			4) Dokumen Rencana Kerja Evaluasi Kebijakan				
			5) Survei Evaluasi Kebijakan				
			6) Administrasi				
		03	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan				
			2) Perencanaan Evaluasi Kebijakan				
			3) Surat Keputusan Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan				

			4)	Dokumen Rencana Kerja Evaluasi Kebijakan							
			5)	Survei Evaluasi Kebijakan							
			6)	Administrasi							
	04	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan					Musnah				
		1) Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan									
		2) Perencanaan Evaluasi Kebijakan									
		3) Surat Keputusan Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan									
		4) Dokumen Rencana Kerja Evaluasi Kebijakan									
		5) Survei Evaluasi Kebijakan									
		6) Administrasi									
DP	<b>PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN</b>										
	01	Fasilitasi produksi dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan									
	01	Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Spesialis		2 Tahun Setelah Pengawasan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun		Musnah				
		1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan									
		2) Pengembalian Peserta Didik									
		3) Penyiapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (Pedoman dan Petunjuk Teknis)									
		4) Rekrutmen Peserta									
		5) Penjajakan Kerja Sama									
		6) Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi									
		7) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan									
	02	Program Bantuan Biaya Pendidikan SDM Kesehatan		2 Tahun Setelah Pengawasan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun		Musnah				
		1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan									
		2) Pengembalian Peserta Didik									
		3) Penyiapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (Pedoman dan Petunjuk Teknis)									
		4) Rekrutmen Peserta									

			5)	Penjajakan Kerja Sama		2 Tahun Setelah Pengawasan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Musnah
			6)	Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			7)	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan				
	03	Program Afiriasi Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi						
		1)	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan					
		2)	Pengembalian Peserta Didik					
		3)	Penyiapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (Pedoman dan Petunjuk Teknis)					
	04	Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan				2 Tahun Setelah Pengawasan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Musnah
		1)	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan					
		2)	Pengembalian Peserta Didik					
		3)	Penyiapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (Pedoman dan Petunjuk Teknis)					
		4)	Rekrutmen Peserta					
		5)	Penjajakan Kerja Sama					
		6)	Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi					
	05	Penyiapan Program Studi Pendidikan Tinggi Kesehatan				2 Tahun Setelah Program Studi Ditutup	3 Tahun	Musnah
		1)	Kajian Pembukaan atau Penutupan Program Studi					
		2)	Rekomendasi Pembukaan dan Penetapan Program Studi					
		3)	Penetapan Kuota Mahasiswa			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	06	Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Tinggi Kesehatan						
		1)	Bimbingan Teknis					

			2)	Supervisi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan						
		07	Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1) Surat Keputusan Panitia Nasional							
			2) Petunjuk Teknis							
			3) Master Soal							
		08	Program Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Dokter Melalui Pendidikan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1) Program <i>Academic Health System</i> (AHS) dan Dokter Layanan Primer							
			2) Usulan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Program Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Dokter Melalui Pendidikan							
			3) Sosialisasi							
			4) Pembuatan <i>Roadmap</i> Implementasi							
			5) Pendampingan dan Bimbingan Teknis							
			6) Pelaksanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi							
			7) Kerja Sama dengan <i>Stakeholders</i>							
		02	Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan Industri serta Dunia Kerja							
		01	Penyelenggaraan Penyalarasan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1) Integrasi Fungsional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dengan Pengguna ( <i>Stakeholder</i> )							
			2) Kerja Sama dengan Pendidikan Tinggi							
			3) Bimbingan Teknis							
			4) Supervisi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan							

			02	Penyiapan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan atau Industri serta Dunia Kerja		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pemagangan Dosen atau Tenaga Kependidikan di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan atau Lokasi Lain				
			2)	Bimbingan Teknis				
			3)	Supervisi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan				
	03	Penyiapan Cadangan Tenaga Kesehatan dalam Situasi Khusus						
	01	Penyiapan Tenaga Kesehatan Cadangan			1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		1)	Identifikasi					
		2)	Pendaftaran Atau Registrasi					
	02	Mobilisasi Tenaga Kesehatan Cadangan			2 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah	
		1)	Penempatan					
		2)	Kerja Sama dengan Instansi lainnya					
	03	Pembinaan Tenaga Kesehatan Cadangan			1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		1)	Bimbingan Teknis					
		2)	Supervisi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan					
	04	Fasilitasi Pembinaan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Milik Kementerian Kesehatan Terkait Bidang Penyediaan Tenaga Kesehatan						
	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Penyusunan Kurikulum, Bahan Ajar					
		2)	Pengembangan Metode Pembelajaran					
		3)	Pelaksanaan Program Kerja Sama <i>Detasering</i>					
		4)	Bimbingan Teknis					
		5)	Supervisi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan					
	02	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Pengembangan Program Studi					
		2)	Rintisan Kelas Internasional					

			3)	Pusat Unggulan IPTEK Poltekkes Kemenkes			
			4)	<i>Center of Excellence</i>			
			5)	<i>Inter-Professional Education</i>			
			6)	<i>Inter-Professional Collaboration</i>			
			7)	<i>Recognize Prior Learning</i>			
	03	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah		
		1) Usulan Norma Standar Prosedur Kriteria Penelitian dan Pengabdian Masyarakat					
		2) Proposal					
		3) Laporan Penelitian					
		4) Laporan Pengabdian Masyarakat					
		5) Penetapan Penerima Bantuan Biaya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat					
	04	Peningkatan Kapasitas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Lingkungan Kementerian Kesehatan	2 Tahun	2 Tahun	Musnah		
		1) Pemilihan Dosen/Mahasiswa Berprestasi					
		2) Peningkatan Kapasitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan					
	05	Fasilitasi Penjaminan Mutu Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan					
		01 Fasilitasi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
		02 Fasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
		1) Sinkronisasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi					
		2) <i>Tracer Study</i>					
		3) Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu					
		4) Akreditasi	1 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah		
		03 Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan					
		1) Bimbingan Teknis					

			2)	Supervisi dan Pemantauan			
			3)	Evaluasi dan Pelaporan			
	06		06	Fasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan			
		01	01	Fasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penilaian dan Penetapan Pengelolaan Angka Kredit			
			2)	Bimbingan Teknis			
			3)	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan</i>			
FH				KETAHANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN			
	01		01	Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produk Biologi Dalam Negeri			
		01	01	Bahan Baku Fitofarmaka Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Pemetaan Kebutuhan			
			3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi dengan Petani Fitofarmaka			
			4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi			
			5)	Peningkatan Penggunaan Bahan Baku Fitofarmaka Dalam Negeri			
			6)	Pelaksanaan			
			7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	02		02	Sediaan Fitofarmaka Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Pemetaan Kebutuhan			
			3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi dengan Petani Fitofarmaka			
			4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi			
			5)	Peningkatan Penggunaan Sediaan Fitofarmaka Dalam Negeri			

			6)	Pelaksanaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
	03	Bahan Baku Produk Biologi Dalam Negeri	1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Pemetaan Kebutuhan				
			3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi dengan Petani Fitofarmaka				
			4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi				
			5)	Peningkatan Penggunaan Bahan Baku Produk Biologi Dalam Negeri				
			6)	Pelaksanaan				
			7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
	04	Sediaan Baku Produk Biologi Dalam Negeri	1)	Penyusunan Kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2)	Pemetaan Kebutuhan				
			3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi dengan Petani Fitofarmaka				
			4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi				
			5)	Peningkatan Penggunaan Sediaan Produk Biologi Dalam Negeri				
			6)	Pelaksanaan				
			7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
	05	Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku dan Sediaan Fitofarmaka dan Produk Biologi Dalam Negeri	1)	Pemantauan dan Evaluasi				
	02	Bahan Baku dan Sediaan Vaksin Dalam Negeri	01	Bahan Baku Dalam Negeri		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Permanen
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Pemetaan Kebutuhan				
			3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi				
			4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi				

			5)	Peningkatan Penggunaan Bahan Baku Vaksin Dalam Negeri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			6)	Pelaksanaan				
			7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
	02	Sediaan Vaksin Dalam Negeri						
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Pemetaan Kebutuhan					
		3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi					
		4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi					
		5)	Peningkatan Penggunaan Sediaan Vaksin Dalam Negeri					
		6)	Pelaksanaan					
		7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
	03	Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku dan Sediaan Vaksin Dalam Negeri				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Pemantauan dan Evaluasi					
	03	Alat Kesehatan Diagnostik In-Vitro Dalam Negeri						
	01	Alat Kesehatan				2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Pemetaan Kebutuhan					
		3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi					
		4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi					
		5)	Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri					
		6)	Pelaksanaan					
		7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
	02	Alat Kesehatan Diagnostik In-Vitro Dalam Negeri				2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Pemetaan Kebutuhan					
		3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi					
		4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi					

			5)	Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Diagnostik In-Vitro Dalam Negeri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah				
			6)	Pelaksanaan								
			7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi								
	03	Uji Klinik Alat Kesehatan Dalam Negeri					3 Tahun	Musnah				
		1)	Penyusunan Kebijakan									
		2)	Pelaksanaan									
		3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				3 Tahun	Musnah				
	04	Pemantauan dan Evaluasi Alat Kesehatan										
		1)	Pemantauan dan Evaluasi									
	04	Bahan Baku Obat Kimia dan Obat Kimia Dalam Negeri										
	01	Sediaan Farmasi					3 Tahun	Musnah				
		1)	Penyusunan Kebijakan									
		2)	Pemetaan Kebutuhan									
		3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi									
		4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi									
		5)	Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi Dalam Negeri									
		6)	Pelaksanaan									
		7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				3 Tahun	Permanen				
	02	Bahan Baku Obat Kimia Dalam Negeri										
		1)	Penyusunan Kebijakan									
		2)	Pemetaan Kebutuhan									
		3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi									
		4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi									
		5)	Peningkatan Penggunaan Bahan Baku Obat Kimia Dalam Negeri									
		6)	Pelaksanaan									
		7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				3 Tahun	Musnah				
	03	Obat Kimia Dalam Negeri										
		1)	Penyusunan Kebijakan									

			2)	Pemetaan Kebutuhan			
			3)	Fasilitasi Kerja Sama antara Industri Farmasi			
			4)	Fasilitasi Pengembangan Produksi			
			5)	Peningkatan Penggunaan Obat Kimia Dalam Negeri			
			6)	Pelaksanaan			
			7)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	04	Pemantauan dan Evaluasi Bahan Baku Obat Kimia dan Obat Kimia Dalam Negeri	1)	Pemantauan dan Evaluasi			
	05	Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri	01	Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan Dalam Negeri			
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Pelaksanaan			
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	02	Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri	1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	03	Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan serta Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri	1)	Pemantauan dan Evaluasi			
	FK	PENGAWASAN ALAT KESEHATAN	01	Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Produksi			
			01	Audit Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik			
			1)	Pelaksanaan Audit Sarana Produksi Alat Kesehatan			

			2)	Pelaksanaan Audit Alat Kesehatan Diagnostik <i>In-Vitro</i>			
		02	Audit Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan Audit Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			
		03	Verifikasi Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		04	Verifikasi Sertifikasi Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		05	Pengawasan Post-Market Sarana Produksi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pengawasan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik Sarana Produksi Alat Kesehatan			
			2)	Pengawasan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik Alat Kesehatan Diagnostik <i>In-Vitro</i>			
	02	Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Distribusi					
		01	Audit Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan Audit Sarana Produksi Alat Kesehatan			
			2)	Pelaksanaan Audit Alat Kesehatan Diagnostik <i>In-Vitro</i>			
		02	Verifikasi sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03	Pengawasan Post-Market Sarana Produksi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pengawasan Cara Distribusi Sarana Produksi Alat Kesehatan			
			2)	Pengawasan Cara Distribusi Alat Kesehatan Alat Kesehatan Diagnostik <i>In-Vitro</i>			
	03	Pengawasan Produk					
		01	Alat Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			

			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	02	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga					
		1)	Penyusunan Kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
	03	Pengawasan Iklan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	04	Kejadian Tidak Diinginkan			2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Musnah
		1)	Penanganan Laporan				
	05	Pengawasan <i>Vigilans</i>			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Pengawasan <i>Vigilans</i> Alat Kesehatan		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		2)	Pengawasan Alat Kesehatan Diagnostik <i>In-Vitro</i>				
	04	Pembakuan dan Pengujian					
	01	Standar Pengawasan Produk					
		1)	Penyusunan Kebijakan		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
	02	Standar Nasional Indonesia			2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
	03	Standar Pengawasan Sarana Produksi					
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				

			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		04		Standar Pengawasan Sarana Distribusi	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		05		Standar Sistem Manajemen Mutu	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	05			Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan (Wasmatlitrik), dan Penanganan Pengaduan Masyarakat			
		01		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penyidikan	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Musnah
			1)	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Alat Kesehatan			
			2)	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Alat Kesehatan Diagnostik <i>In-Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			
			3)	Penyidikan Dugaan Pelanggaran Bidang Alat Kesehatan			
		02		Penanganan Pengaduan Masyarakat	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Musnah
			1)	Penanganan Keluhan Masyarakat Terkait Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Beredar			
			2)	Penanganan Keluhan Masyarakat Terkait Sertifikasi, Sarana Produksi, dan Sarana Distribusi			
		03		Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pembuatan Media			
			2)	Sosialisasi			

		04	Sistem Informasi Penyidikan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
	06	Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan				
	01	Pengawasan Bidang Kesehatan		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Musnah
		1) Pelaksanaan				
		2) Laporan				
	02	Penyidikan Bidang Kesehatan		1 Tahun Setelah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap	2 Tahun	Permanen
		1) Pelaksanaan Penyidikan				
		2) Laporan Hasil Penyidikan				
FP	PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN					
	01	Sertifikasi dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi				
	01	Produksi dan Distribusi Kefarmasian di Bidang Obat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Penyusunan Kebijakan				
		2) Sosialisasi				
		3) Pelaksanaan				
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
	02	Izin Pedagang Besar Farmasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Penyusunan Kebijakan				
		2) Sosialisasi				
		3) Pelaksanaan				
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5) Rekomendasi				
	03	Izin Industri Farmasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Penyusunan Kebijakan				
		2) Sosialisasi				
		3) Pelaksanaan				
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5) Rekomendasi				

		02	Pengendalian Harga dan Pemantauan Pasar obat			
		01	Penentuan Harga Obat Katalog	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan			
		2)	Sosialisasi			
		3)	Pelaksanaan			
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		02	Penentuan Harga Obat Generik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan			
		2)	Sosialisasi			
		3)	Pelaksanaan			
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		03	Penentuan Harga Obat Program Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan			
		2)	Sosialisasi			
		3)	Pelaksanaan			
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		04	Pasar Obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Perencanaan, Prosedur dan Penyusunan Kebijakan			
		2)	Sosialisasi			
		3)	Pelaksanaan			
		4)	Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pemantauan			
		05	Pasar Perbekalan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Perencanaan, Prosedur dan Penyusunan Kebijakan			
		2)	Sosialisasi			
		3)	Pelaksanaan			
		4)	Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pemantauan			
		06	E-Logistik Obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Perencanaan, Prosedur dan Penyusunan Aplikasi			

			2)	Sosialisasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pemantauan				
	07	E-Monev Obat						
			1)	Perencanaan, Prosedur dan Penyusunan Aplikasi				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pemantauan				
	03	Penilaian Farmakoeconomii						
	01	Kebijakan di Bidang Farmakoeconomii			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1)	Penyusunan Aplikasi				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
	02	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Farmakoeconomii			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1)	Seminar				
			2)	Pendidikan dan Pelatihan, dan lain-lain				
	03	Implementasi Analisis Farmakoeconomii di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1)	Pelaksanaan				
			2)	Laporan				
	04	Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan <i>Special Access Scheme</i>						
	01	Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Narkotika			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
	02	Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Psikotropika			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1)	Penyusunan Kebijakan				

			2)	Sosialisasi						
			3)	Pelaksanaan						
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
	03	Produksi dan Distribusi di Bidang Obat Prekursor Farmasi								
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							
	04	Perizinan di bidang Obat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi								
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							
	05	Seleksi Fitofarmaka dan Pembinaan Industri serta Usaha Obat Tradisional								
		01	Produksi dan Distribusi Industri di Bidang Obat Tradisional							
			1)	Penyusunan Kebijakan						
			2)	Sosialisasi						
			3)	Pelaksanaan						
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
		02	Produksi dan Distribusi Industri di Bidang Kosmetika							
			1)	Penyusunan Kebijakan						
			2)	Sosialisasi						
			3)	Pelaksanaan						
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
FR	PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN									
	01	Penyusunan Standardisasi								
		01	Standardisasi Alat Kesehatan			3 Tahun	Musnah			

			1)	Penyusunan Kebijakan	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah			
			2)	Sosialisasi						
			3)	Pelaksanaan						
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
	02	Standardisasi Produk Diagnostik		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah				
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah				
	03	Standardisasi Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga								
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah				
	04	Standardisasi Pengembangan Produk Mandiri								
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah				
	05	Harmonisasi Regulasi Alat Kesehatan								
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah				
	06	Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus ( <i>Special Access Scheme</i> )								
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							

		02	Klarifikasi			
		01	Klarifikasi Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Rapat Klarifikasi			
			2) Rekomendasi			
		02	Double Keagenan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Data Agen			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		03	Perizinan			
		01	Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5) Rekomendasi			
		02	Surat keterangan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Sosialisasi			
			2) Pelaksanaan			
			3) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			4) Rekomendasi			
		03	Rekomendasi Persetujuan Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5) Rekomendasi			

			04	Persetujuan Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1)	Sosialisasi						
			2)	Pelaksanaan						
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
			4)	Rekomendasi						
			05	Persetujuan Pemasukan Alat Kesehatan melalui Jalur Khusus ( <i>Special Access Scheme</i> )	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1)	Sosialisasi						
			2)	Pelaksanaan						
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
			4)	Rekomendasi						
			06	Izin Distribusi Alat Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1)	Penyusunan Kebijakan						
			2)	Sosialisasi						
			3)	Pelaksanaan						
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
			5)	Rekomendasi						
FY	PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN									
	01	Seleksi Obat								
	01	Formularium Nasional			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							
		5)	Laporan dan Evaluasi							
	02	Formularium Haji			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							

			5)	Laporan dan Evaluasi			
		03	Daftar Obat Esensial Nasional		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
	02		Perencanaan Kebutuhan Obat dan <i>Digital Inventory</i>				
		01	Perencanaan Kebutuhan Obat Perbekalan Kesehatan dan Vaksin untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Haji		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Perencanaan Kebutuhan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
		02	Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dan <i>Digital Inventory</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
		03	Sistem Informasi Perencanaan Kebutuhan Obat dan <i>Digital Inventory</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Perencanaan, Penyusunan Aplikasi dan Prosedur				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan, Evaluasi dan Pemantauan				

		03	Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah			
		01	Tata Kelola Obat <i>Buffer Stock</i> Provinsi dan Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan			
		2)	Sosialisasi			
		3)	Pelaksanaan			
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		5)	Laporan dan Evaluasi			
		02	Tata Kelola Obat Program dan Pelayanan Kesehatan Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan			
		2)	Sosialisasi			
		3)	Pelaksanaan			
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		5)	Laporan dan Evaluasi			
		03	Kebijakan Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan			
		2)	Sosialisasi			
		3)	Pelaksanaan			
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		5)	Laporan dan Evaluasi			
		04	Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat <i>Buffer Stock</i> dan Obat Program	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat <i>Buffer Stock</i> dan Obat Program di Dinas Kesehatan Provinsi			
		2)	Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat <i>Buffer Stock</i> di dan Obat Program Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Serta Puskesmas			
		04	Pengendalian Ketersediaan Vaksin			
		01	Vaksin	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Penyediaan Vaksin Baru						
			2)	Penyediaan Vaksin Reguler						
			3)	Penyediaan Vaksin Hepatitis						
			4)	Penyediaan Vaksin Influenza dan Vaksin Haji/Umroh						
	02		<i>Auto Disable Syringe dan Safety Box</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyediaan <i>Auto Disable Syringe dan Safety Box</i>							
	03		Reagen		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyediaan Reagen <i>Screening</i> Darah							
		2)	Penyediaan Reagen Campak		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
	04		Kebijakan Pengendalian Ketersediaan Vaksin							
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		5)	Laporan dan Evaluasi							
	05		Data dan Evaluasi Ketersediaan Vaksin		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Data dan Evaluasi Ketersediaan Vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi							
		2)	Data dan Evaluasi Ketersediaan Vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Serta Puskesmas							
	05		Pengendalian Ketersediaan Obat							
	01		Obat Program Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	<i>Obat Buffer Stock</i> Pusat							
		2)	Obat Bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB)							
		3)	Obat Penyakit Menular							
		4)	Obat Filariasis							
		5)	<i>Obat Acquired Immunodeficiency Syndrome</i> (AIDS) dan Penyakit Menular Seksual							
		6)	Obat Malaria							
		7)	Obat Tuberkulosis Paru							

			8)	Obat dan Perbekalan Kesehatan Haji				
			9)	Obat Kesehatan Ibu				
			10)	Obat Kesehatan Anak				
			11)	Obat Gizi				
			12)	Obat Kesehatan Jiwa				
			13)	Obat Poliklinik Kementerian Kesehatan				
			14)	Obat Operasi Surya Baskara Jaya				
			15)	Obat Hepatitis				
	02	Kebijakan Pengendalian Ketersediaan Obat				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5)	Laporan dan Evaluasi					
	03	Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat Program di Dinas Kesehatan Provinsi					
		2)	Data dan Evaluasi Ketersediaan Obat Program di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas					
	06	Farmasi Manajemen dan Farmasi Klinis						
	01	Kebijakan Farmasi Manajemen dan Farmasi Klinis			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5)	Laporan dan Evaluasi					
	02	Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Pengelolaan Aplikasi Perizinan					
	03	Sistem Informasi Pelayanan Kefarmasian			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Manajemen Data					

			2)	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Kefarmasian Melalui Aplikasi Sistem Informasi <i>Monitoring</i> dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (SIMONA)			
		04	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pengembangan <i>Center of Excellence</i> Pelayanan Kefarmasian			
	7	Evaluasi Penggunaan Obat Rasional					
		01	Kebijakan Pengendalian dan Penggunaan Obat Rasional		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02	Promosi dan Edukasi penggunaan Obat Rasional		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Promosi			
			2)	Edukasi			
		03	Pemantauan dan Evaluasi penggunaan Obat Rasional		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pemantauan			
			2)	Evaluasi			
GM	GIZI MASYARAKAT						
	01	Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi					
		01	Pedoman Gizi Seimbang		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02	Pemberian Makanan Bayi dan Anak		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			

			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	03	Peringatan Hari Gizi Nasional					
			1)	Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			2)	Pelaksanaan			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
	04	Pelayanan Gizi Masyarakat			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi			
			2)	Pelaksanaan			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Kewaspadaan Gizi					
	01	Standar Antropometri			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Pemantauan Konsumsi Gizi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	03	Pemberian Gizi dalam Kegiatan Bencana			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			

			04	Pemantauan Status Gizi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			05	Jaringan Informasi Pangan dan Gizi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			03	Penanggulangan Masalah Gizi				
			01	Penanggulangan Masalah Gizi Stunting/Pendek Skala Nasional		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			02	Manajemen Taburia (Bubuk Tabur Gizi)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			03	Suplementasi Gizi Tablet Tambah Darah dan Vitamin A		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				

			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		04	<i>Buffer Stock Makanan Pendamping</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	<i>Buffer Stock MPASI</i>			
			2)	Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Sekolah dalam Penanggulangan Masalah Gizi			
	04	Pengelolaan Konsumsi Gizi					
	01	Pelayanan Gizi di Puskesmas			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Pelayanan Gizi di Rumah Sakit			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	03	Peringatan Pekan Air Susu Ibu (ASI) Sedunia			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1)	Pelaksanaan				
		2)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Gizi Buruk			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi			
HJ	KESEHATAN HAJI						
	01	Pelayanan Kesehatan Haji					

			01	Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Penyiapan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan			
			2)	Penyusunan Rencana Operasional, Kontingensi, dan Mitigasi Kesehatan			
		03		Pelatihan Petugas Kesehatan Haji	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan Haji			
			2)	Pelatihan bagi Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji			
			3)	Pelatihan bagi Tenaga Pendukung Kesehatan			
	02			Surveilans Kesehatan Haji			
		01		Surveilans Kesehatan Haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
		02		Analisis Data Kesehatan Haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pengelolaan dan Analisis Data Kesehatan Jemaah Haji			
			2)	Penyusunan Profil Kesehatan Haji			
		03		Strategi Pengembangan Kesehatan Haji			
		01		Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Analisis			
			3)	Sosialisasi			
			4)	Pelaksanaan			
			5)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			6)	Laporan dan Evaluasi			

			7)	Rekomendasi						
		02	Petunjuk Teknis/Standar Kesehatan Haji		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1) Penyusunan Kebijakan							
			2) Sosialisasi							
			3) Pelaksanaan							
		03	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Petugas Kesehatan Haji					2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan							
			2) Sosialisasi							
			3) Pelaksanaan							
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi							
			5) Laporan dan Evaluasi							
	04	Pengendalian Risiko dan Promosi Kesehatan Haji								
	01	Program Manasik Kesehatan Haji			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1) Pelaksanaan								
		2) Bimbingan Teknis dan Supervisi								
		3) Laporan dan Evaluasi								
	02	Penyuluhan dan Bimbingan Kesehatan Haji			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1) Pembuatan Media Promosi Kesehatan								
		2) Bimbingan Kesehatan Haji dalam Peningkatan Kebugaran Kesehatan Haji								
	03	Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1) Pemeriksaan Jasa Boga Katering Jemaah Haji								
		2) Vaksinasi Jamaah Haji								
		3) Sanitasi Asrama Haji								
	05	Sistem Informasi dan Publikasi								
	01	Informasi dan Publikasi Kesehatan haji			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1) Penyusunan Aplikasi								
		2) Sosialisasi								

			3)	Pelaksanaan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji						
		1)	Berkas rekrutmen Petugas Kesehatan Haji					
IM	IMUNISASI							
	1	Imunisasi Dasar dan Bayi di Bawah Dua Tahun						
	01	Imunisasi Hepatitis B0 (HB0), <i>Bacillus Calmette-Guérin</i> (BCG), Polio ( <i>Oral Polio Vaccine</i> (OPV), <i>Inactivated Polio Vaccine</i> (IPV)), <i>Dipteri Pertusis Tetanus</i> (DPT)-Hepatitis B (HB), <i>Haemophilus Influenzae type B</i> (HiB), MR, JE Bayi di Bawah Dua Tahun, <i>Human Papiloma Virus</i> (HPV), dan Rotavirus				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5)	Laporan dan Evaluasi					
	02	Pekan Imunisasi				2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1)	Pekan Imunisasi Nasional					
		2)	Pekan Imunisasi Internasional					
	03	Data Imunisasi				2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
	02	Imunisasi Tambahan dan Khusus						
	01	Imunisasi Tambahan				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5)	Laporan dan Evaluasi					
	02	Imunisasi Antigen Baru				2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	03	Imunisasi Respons Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Imunisasi Khusus untuk Jemaah Haji/Umroh			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	05	Imunisasi <i>Coronavirus Disease-19 (COVID-19)</i>			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Imunisasi Wanita Usia Subur, Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi dan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi					
	01	Imunisasi Wanita Usia Subur			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				

			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
		02		Surveilans Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan				
			2)	Laporan dan Evaluasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03		Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi				
			1)	Pelaksanaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2)	Laporan dan Evaluasi				
		04		Imunisasi Usia Sekolah dan Sumber Daya Imunisasi				
		01		Imunisasi Anak Sekolah		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
		02		Sumber Daya Manusia Imunisasi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pendidikan dan Pelatihan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Workshop				
			4)	Webinar dan lain-lain				
		03		Logistik Imunisasi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Data Penyimpanan dan Distribusi				
			2)	Laporan dan Evaluasi				
		04		Sistem Informasi Imunisasi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Aplikasi				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
		05		Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program		1 Tahun	2 Tahun	Musnah

			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
JP	PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN						
	01	Pembiayaan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		01	<i>National Health Account (NHA) / Provincial Health Account (PHA) / District Health Account (DHA)</i>				
			1)	Persiapan, Pelaksanaan, Pendampingan bagi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota			
			2)	Laporan			
			3)	Diseminasi Pada Unit Terkait			
			4)	Rekomendasi			
	02	Analisis Biaya Kesehatan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Perhitungan Biaya Pelayanan Kesehatan ( <i>Costing</i> )			
			2)	Perhitungan Kebutuhan Satuan Biaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat			
			3)	Persiapan			
			4)	Pelaksanaan			
			5)	Laporan			
			6)	Advokasi			
			7)	Rekomendasi			
	02	Jaminan Kesehatan					
		01	Kepesertaan		2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1)	Perhitungan Data Kepesertaan			
			2)	Penataan Kepesertaan			
			3)	Rekonsiliasi dengan Kementerian terkait Data Kepesertaan			
			4)	Laporan			
			5)	Rekomendasi			
	02	Iuran			2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Perhitungan			

			2)	Kesinambungan dan Kecukupan Iuran								
			3)	Laporan serta Rekomendasi								
	03	Tarif				2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah				
		1) Perhitungan Tarif yaitu Kapitasi Bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)										
		2) <i>Indonesian Case Based Groups (INA CBG)</i> bagi Rumah Sakit										
		3) Pengembangan dan <i>Monitoring</i> Tarif										
		4) Evaluasi Klaim Rumah Sakit										
		5) Penyusunan Kebijakan tentang Iuran Biaya										
		6) Laporan Hasil dan Rekomendasi (Kebijakan)										
		7) Penetapan Tarif (Kapitasi dan INA CBG)										
	04	<i>Clinical Advisory</i>				2 Tahun	3 Tahun	Musnah				
		1) Pertimbangan Medis Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional										
		2) Pelaksanaan										
		3) Usulan Pedoman										
		4) Komite Pelayanan Medik										
		5) Laporan										
		6) Diseminasi dan Rekomendasi										
	05	Manfaat Pelayanan				2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah				
		1) Koordinasi Paket Manfaat										
		2) Koordinasi Kendali Mutu dan Biaya dengan <i>Stakeholder</i>										
		3) Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan <i>Coordination Of Benefit (COB)</i> dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan										
		4) Laporan										
		5) Rekomendasi										
	06	Laporan Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Jaminan Kesehatan		2 Tahun		2 Tahun	3 Tahun	Musnah				

			1)	Penyusunan Laporan			
	03			Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan			
		01		Penilaian Teknologi Kesehatan/ <i>Health Technology Assessment</i> (PTK/HTA)			
			1)	Persiapan Pemilihan Topik			
			2)	Pelaksanaan HTA			
			3)	Workshop Hasil dengan Tim <i>ad-hoc</i> dan Para Ahli			
			4)	Laporan			
			5)	Diseminasi			
			6)	Rekomendasi			
	02			Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan			
			1)	Tata Laksana Skrining (Deteksi Awal) Penyakit Tidak Menular pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			
			2)	Laporan			
			3)	Rekomendasi			
KG				KESEHATAN KELUARGA			
	01			Kesehatan Maternal dan Neonatal			
		01		Pelayanan Antenatal Terpadu			
			1)	Kegiatan Konseling Kesehatan			
			2)	Kegiatan Stimulasi dan Gizi			
			3)	Kegiatan Deteksi Dini Masalah, Penyakit dan Penyulit/Komplikasi Kehamilan			
			4)	Kegiatan Penyiapan Persalinan yang Bersih dan Aman			
			5)	Kegiatan Antisipasi dan Persiapan Dini untuk Melakukan Rujukan			
			6)	Kegiatan Penatalaksanaan Kasus Serta Rujukan			
			7)	Kegiatan Menyiapkan Persalinan dan Kesiagaan bila terjadi Penyulit/Komplikasi			

			02	Pelayanan Kelas Ibu Hamil	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pelayanan Kelas Ibu Hamil dalam Bentuk Tatap Muka			
			2)	Kegiatan Aktivitas Fisik/Senam Ibu Hamil			
			03	Pencegahan Penularan <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i> AIDS Dari Ibu ke Anak (PPIA)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Pencegahan Primer Pada Perempuan Usia Reproduksi Agar Tidak Tertular HIV			
			2)	Kegiatan Pencegahan Kehamilan yang Tidak Direncanakan pada Perempuan Pengidap HIV			
			3)	Kegiatan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu Hamil Dengan HIV ke Bayi yang Dikandungnya			
			4)	Kegiatan Pemberian dukungan Psikologis, Sosial dan Perawatan kepada Ibu dengan HIV beserta Anak dan Keluarganya			
			04	Kemitraan Bidan dan Dukun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			05	Rumah Tunggu Kelahiran			
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			06	Supervisi Fasilitatif			
			1)	Kegiatan Pembinaan Klinis dan Manajemen untuk Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			2)	Kegiatan Pembinaan Klinis dan Manajemen untuk Pengelola Program Keluarga Berencana			
			3)	Kegiatan Pembinaan Klinis dan Manajemen untuk Pengelola Program Bidan Koordinator dan Bidan Desa			
		07	Audit Maternal Perinatal		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penelusuran dan Pengkajian Penyebab Kematian atau Kesakitan Ibu, Perinatal, dan Neonatal			
		08	Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/ Pemberdayaan Masyarakat		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Suami, Keluarga dan Masyarakat dalam Merencanakan Persalinan yang Aman dan Persiapan Menghadapi Komplikasi bagi Ibu Hamil			
			2)	Kegiatan Perencanaan Penggunaan Keluarga Berencana Pasca Persalinan, Cakupan serta Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir			
		09	Tanda Bahaya pada Kehamilan				
			1)	Penyusunan Kebijakan			Musnah
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		10	Surveilans Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Identifikasi Masalah Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak			
			2)	Mengkaji Faktor-Faktor Penyebab Masalah, Menganalisis dan Menginterpretasi Informasi yang Terkumpul, dan Bertindak Sesuai Hasil			

				yang Ada Untuk Mengurangi Masalah Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak di Masa Mendatang			
			3)	Menetapkan Tingkatan dan Kecenderungan, Mengidentifikasi Faktor Risiko dan Faktor Penentu <i>(Determinant Factors)</i>			
			4)	Mendeteksi Kelompok Berisiko ( <i>Red Flags</i> )			
			5)	Memonitor Perilaku dan Pelayanan Kesehatan			
			6)	Memudahkan dalam Perencanaan, Mengidentifikasi Pelatihan dan Kebutuhan Riset, serta Memonitor dan Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program			
	11	Pelayanan Kesehatan Neonatal			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	12	Manajemen Asfiksia			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	13	Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				

			14	Pencegahan Infeksi pada Proses Melahirkan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			15	Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			16	<i>Screening Hypothyroid Congenital</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			17	Kelainan Bawaan Pada Janin dan Bayi Baru Lahir		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	02			Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah				
			01	Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				

			02	Rujukan Tumbuh Kembang		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			03	Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			04	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			05	Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			06	Buku Kesehatan Ibu dan Anak		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				

			07	Kohort Bayi, Kohort Anak Balita dan Anak Pra-Sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		08	Anak dengan Disabilitas		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		09	<i>Knowledge Sharing Program (KSP)</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		10	Kelas Ibu Balita		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi			
			2)	Pelaksanaan			
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			4)	Laporan dan Evaluasi			
	03	Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja					
		01	Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			

			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Akselerasi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Sekolah		1) Sosialisasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		2) Pelaksanaan		2) Pelaksanaan			
		3) Bimbingan Teknis dan Supervisi		3) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		4) Laporan dan Evaluasi		4) Laporan dan Evaluasi			
	03	Kader Kesehatan Remaja/Konselor Sebaya		1) Penyusunan Kebijakan			
		2) Sosialisasi		2) Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3) Pelaksanaan		3) Pelaksanaan			
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		5) Laporan dan Evaluasi		5) Laporan dan Evaluasi			
	04	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja		1) Penyusunan Kebijakan			
		2) Sosialisasi		2) Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3) Pelaksanaan		3) Pelaksanaan			
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		5) Laporan dan Evaluasi		5) Laporan dan Evaluasi			
	05	Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di dalam Sekolah		1) Penyusunan Kebijakan			
		2) Sosialisasi		2) Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3) Pelaksanaan		3) Pelaksanaan			
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		5) Laporan dan Evaluasi		5) Laporan dan Evaluasi			
	06	Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di luar Sekolah		1) Penyusunan Kebijakan			
		2) Sosialisasi		2) Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3) Pelaksanaan		3) Pelaksanaan			
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
		5) Laporan dan Evaluasi		5) Laporan dan Evaluasi			

			07	Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Remaja	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi			
			2)	Pelaksanaan			
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			4)	Laporan dan Evaluasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			08	Jejaring Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja			
			1)	Sosialisasi			
			2)	Pelaksanaan			
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			4)	Laporan dan Evaluasi			
	04	Kesehatan Reproduksi					
		01	Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin				
			1)	Penyusunan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02	Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Pasangan Usia Subur/Skrining Layak Hamil		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03	Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Mahasiswa				
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			

			04	Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			05	Pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			06	Pelayanan Infertilitas dan Kesehatan Reproduksi Lainnya		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			07	Kemitraan dan Jejaring Kesehatan Reproduksi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan				
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			3)	Laporan dan Evaluasi				
			08	Pendampingan/Penyeliaan/Fasilitasi/ <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Program Kesehatan Reproduksi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan				
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			3)	Laporan dan Evaluasi				
			05	Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)				
			01	Penyelenggaraan Puskesmas Santun Lanjut Usia dan Pelayanan Geriatri Terpadu di Rumah Sakit		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02		Posyandu Lanjut Usia/Pelayanan <i>Home Care/Long Term Care</i> (PJP)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	03		Kemitraan LP/LS dalam penyelenggaraan kesehatan lansia		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
	04		<i>Training of Trainer</i> / Pelatihan/Orientasi Kesehatan Lanjut Usia		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	<i>Training of Trainer</i>			
			2)	Pelatihan			
			3)	Orientasi			
	05		Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan Lanjut Usia		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Media			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	06		Pendampingan/Penyeliaan/Fasilitasi/ <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Program Kesehatan Lansia		1 Tahun	2 Tahun	Musnah

			1)	Pendampingan			
			2)	Penyeliaan			
			3)	Fasilitasi			
			4)	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>			
	07	Data dan Informasi Kesehatan Lanjut Usia			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)					
		2)					
		3)					
	08	Isu Global Kesehatan Lansia					
		1)					
		2)					
		3)					
	06	Kesehatan Kelompok Rentan					
		01			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		02			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03			2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			3)	Pelaksanaan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
			5)	Laporan dan Evaluasi					
	04	Pengarusutamaan Gender							
		1)	Sosialisasi						
		2)	Pelaksanaan			1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
		4)	Laporan dan Evaluasi						
	05	Isu-Isu Global Kelompok Rentan							
		1)	Pelaksanaan			1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
		3)	Laporan dan Evaluasi						
KH	<b>KEMAHASISWAAN</b>								
	01	Penerimaan Mahasiswa Baru							
		01	Penerimaan Mahasiswa Baru			2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1)	Promosi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)					
			2)	Pendaftaran Mahasiswa					
			3)	Naskah Soal Tes					
			4)	Tes Masuk, Pengumuman Hasil Tes Masuk					
			5)	Uji Kesehatan, Wawancara dan Psikotes					
			6)	Daftar Mahasiswa yang Tidak Lulus dan Tidak Diterima					
			7)	Registrasi Mahasiswa Baru					
	02	Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru				2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah	
		1)	Daftar Mahasiswa yang Lulus dan Diterima						
		2)	Penetapan Peserta Didik Baru						
	03	Orientasi Mahasiswa Baru				2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Administrasi Penyelenggaraan Orientasi						

			2)	Laporan Mahasiswa dan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru			
	04	Berkas Mahasiswa	2) Kartu Mahasiswa 2) Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan Orientasi Mahasiswa Baru 3) Surat Keterangan Izin/Tugas 4) Berkas Pendaftaran Mahasiswa 5) Nilai Tugas Akhir 6) Piagam/ Sertifikasi Kuliah Kerja Nyata/ Kriteria Ketuntasan Minimal 7) Biodata Mahasiswa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)					
		2)					
		3)					
		4)					
		5)					
		6)					
	05	Mahasiswa Asing	1) Registrasi Mahasiswa Asing 2) Rekomendasi Kegiatan Pertukaran Mahasiswa 3) Personal File Mahasiswa Asing 4) Izin Belajar, Keimigrasian, Izin Tinggal, dan Laporan Keberadaan Mahasiswa Asing	2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah	
		1)					
		2)					
		3)					
	02	Registrasi Mahasiswa	01 Registrasi Administrasi 1) Bukti Pembayaran Pendidikan	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Musnah	
		01					
		1)					
	02	Registrasi Akademik	2) Kartu Rencana Studi 2) Kartu Hasil Studi baik Mahasiswa Baru maupun Mahasiswa Lama (Reguler dan Nonreguler) 3) Registrasi Mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	2 Tahun Setelah Mahasiswa Lulus	3 Tahun	Musnah	
		2)					
		3)					
	03	Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa	01 Fasilitas Mahasiswa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	

			1)	Fasilitas Kesehatan Mahasiswa			
			2)	Peminjaman Transportasi			
			3)	Kegiatan Olahraga dan Kesenian			
			4)	Sekretariat Organisasi Mahasiswa			
			5)	Bimbingan Konseling, Pengembangan Minat Bakat, dan Fasilitas Lainnya			
			6)	Asrama			
	02		Beasiswa dengan Dana Dalam Negeri		2 Tahun Setelah Beasiswa Selesai	3 Tahun	Musnah
			1)	Kegiatan Penetapan Penerimaan Beasiswa			
			2)	Seleksi Calon Penerima Beasiswa			
			3)	Tawaran Beasiswa			
			4)	Keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah			
	03		Beasiswa dengan Dana Luar Negeri		2 Tahun Setelah Beasiswa Selesai	3 Tahun	Permanen
			1)	Kegiatan Penetapan Penerimaan Beasiswa			
			2)	Seleksi Calon Penerima Beasiswa			
			3)	Tawaran Beasiswa			
			4)	Keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah			
	04		Organisasi Mahasiswa				
	01		Kegiatan Organisasi		2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah
			1)	Pembentukan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)			
			2)	Pembentukan Himpunan Mahasiswa (HIMA)/Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)			
			3)	Pembentukan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)			
			4)	Pembentukan, Daftar Anggota, dan Pengangkatan Pengurus Organisasi			
	02		Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Mahasiswa		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Mahasiswa			
	05	Kegiatan Mahasiswa					
		01	Kegiatan Akademik dan Non-Akademik Tingkat Nasional		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Kegiatan Ilmiah dan Prestasi Lomba Mahasiswa Tingkat Lokal/Nasional				
			2) Kegiatan Lomba Kegiatan Mahasiswa Tingkat Lokal/Nasional				
		02	Kegiatan Akademik dan Non-Akademik Tingkat Internasional		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			1) Kegiatan Ilmiah dan Prestasi Lomba Mahasiswa Tingkat Internasional				
			2) Kegiatan Lomba Kegiatan Mahasiswa Tingkat Internasional				
			3) Sertifikat Pemberian Prestasi Mahasiswa				
	06	Status Mahasiswa					
		01	Status Mahasiswa		2 Tahun Setelah Mahasiswa Lulus	3 Tahun	Musnah
			1) Berkas Status Mahasiswa Pindah Program Studi				
			2) Berkas Pengunduran Diri Mahasiswa				
			3) Berkas Cuti Akademik Mahasiswa				
			4) Berkas Surat Pernyataan Kembali Kuliah				
			5) Berkas Dispensasi Tidak Mengikuti Kuliah, Sanksi, dan Surat Keterangan Mahasiswa				
		02	Penetapan Pengunduran Diri Mahasiswa		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Drop Out Mahasiswa				
			2) Skorsing				
KI	KESEKRETARIATAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA						
	01	Registrasi Dokter					
		01	Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter		1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			1) Pengajuan Permohonan Registrasi				

			2)	Data Dukung Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter			
		02	Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter	1) Proses Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Spesialis	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			1)				
			2)				
		03	Penerbitan Registrasi Dokter Sementara	1) Registrasi Sementara kepada Dokter/Dokter Spesialis Warga Negara Asing yang Melakukan Kegiatan dalam rangka Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pelayanan Kesehatan di Bidang Kedokteran yang Bersifat Sementara di Indonesia	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
		04	Penerbitan Registrasi Dokter Bersyarat	1) Registrasi Dokter/Dokter Spesialis Bersyarat kepada Peserta Program Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis Warga Negara Asing yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Di Indonesia	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			2)				
		05	Heregistrasi Dokter	1) Registrasi Ulang Surat Tanda Registrasi Dokter/ Dokter Spesialis Meliputi Surat Permohonan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia beserta Lampiran Persyaratananya, Pertimbangan Ketua Divisi Registrasi Kedokteran dan Ketua Divisi Pembinaan Kedokteran	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			2)				
	02	Standar Pendidikan Profesi Dokter					

			01	Standar Pendidikan Profesi Dokter	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Proses Penerbitan Standar Pendidikan Profesi Dokter			
			02	Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Proses Penerbitan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis			
			03	Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Proses Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran			
			04	Standar Pendidikan Berkelanjutan Dokter	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Proses Penerbitan Standar Pendidikan Berkelanjutan Dokter			
			05	Standar Pengesahan Standar Kompetensi Dokter	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Proses Pengesahan Standar Kompetensi Dokter			
		03	Registrasi Kedokteran Gigi				
			01	Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			1)	Pengajuan Permohonan Registrasi			
			2)	Data Dukung Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi			
			02	Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			1)	Proses Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis			
			2)	Data Dukung Pencabutan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi			
			03	Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Sementara	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			1)	Registrasi Sementara Kepada Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Asing yang Melakukan Kegiatan dalam rangka Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pelayanan Kesehatan di Bidang Kedokteran yang Bersifat Sementara di Indonesia			
			2)	Data Dukung Registrasi Dokter Gigi Sementara			

			04	Penerbitan Registrasi Dokter Gigi Bersyarat	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			1)	Registrasi Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis Bersyarat kepada Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Asing yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Indonesia			
			05	2) Data Dukung Registrasi Dokter Gigi Bersyarat	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			1)	Registrasi Ulang Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis Meliputi Surat Permohonan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia beserta Lampiran Persyaratananya, Pertimbangan Ketua Divisi Registrasi Kedokteran Gigi dan Ketua Divisi Pembinaan Kedokteran Gigi			
			2)	Data Dukung Heregistrasi Dokter Gigi			
	04			Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi			
		01		Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Proses Penerbitan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi			
		02		Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Proses Penerbitan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis			
		03		Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Proses Pengesahan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi			
		04		Standar Pendidikan Berkelanjutan Dokter Gigi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Proses Penerbitan Standar Pendidikan Berkelanjutan Dokter Gigi			
		05		Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Proses Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi			
	05	Pembinaan Praktik					
	01	Pembinaan Praktik Dokter		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	02	Pembinaan Praktik Dokter Gigi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	06	Pelayanan Hukum					
	01	Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran		2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah	
		1) Pemeriksaan Awal untuk Menentukan Jenis Kasus atau Pelanggaran Disiplin Kedokteran					
	02	Persidangan Pemeriksaan Awal Kedokteran Gigi		2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah	
		1) Pemeriksaan Awal untuk Menentukan Jenis Kasus atau Pelanggaran Disiplin Kedokteran Gigi					
	03	Persidangan Pemeriksaan Kedokteran		2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah	
		1) Investigasi terhadap Dokter atau Dugaan Adanya Pelanggaran Kode Etik Kedokteran atau Pelanggaran Disiplin Kedokteran sampai dengan Surat Keputusan Persidangan					
	04	Persidangan Pemeriksaan Kedokteran Gigi		2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah	
		1) Investigasi terhadap Dokter Gigi atau Dugaan Adanya Pelanggaran Kode Etik Kedokteran Gigi atau Pelanggaran Disiplin Kedokteran Gigi sampai dengan Surat Keputusan Persidangan					
	05	Tindak Lanjut/Eksekusi Keputusan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1) Tindakan Penentuan Eksekusi yang Berupa Teguran, Pencabutan Surat Tanda Registrasi atas Kasus yang Telah Ditetapkan					
KJ	KESEHATAN JIWA						
	01	Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan					
	01	Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan di Institusi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	

			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan di Organisasi Lainnya			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa					
	01	Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus dan atau Disabilitas			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Usia Sekolah			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja dalam Penanganan Masalah Kasus Lainnya			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				

			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Penjangkauan Pelayanan dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa melalui Kesehatan Jiwa Bergerak		1)	Penyusunan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2)		Sosialisasi				
		3)		Pelaksanaan				
		4)		Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)		Laporan dan Evaluasi				
	05	Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa		1)	Penyusunan Kebijakan			
		2)		Sosialisasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3)		Pelaksanaan				
		4)		Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)		Laporan dan Evaluasi				
	03	Tata Kelola Gangguan Jiwa						
	01	Kasus Gangguan Jiwa Berat		1)	Penyusunan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2)		Sosialisasi				
		3)		Pelaksanaan				
		4)		Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)		Laporan dan Evaluasi				
	02	Kasus Gangguan Jiwa Ringan		1)	Penyusunan Kebijakan			
		2)		Sosialisasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3)		Pelaksanaan				
		4)		Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)		Laporan dan Evaluasi				
	03	Kegawatdaruratan Kesehatan Jiwa pada Situasi Krisis		1)	Penyusunan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
04	04	Masalah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)					
	01	Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi					Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat					Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Upaya Promotif NAPZA					Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Upaya Preventif NAPZA					Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	05	Upaya Kuratif NAPZA			2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	06	Upaya Rehabilitatif NAPZA			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	05	Surveilans Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
	01	Surveilans Kesehatan Jiwa dan NAPZA			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Pelaksanaan				
		2)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Sistem Informasi Kesehatan Jiwa			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Aplikasi				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Pembinaan dan Advokasi Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Pelaksanaan				
		2)	Laporan dan Evaluasi				
	06	Hari Besar Kesehatan Jiwa					
	01	Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1)	Pelaksanaan				
		2)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Peringatan Hari Besar Kesehatan Jiwa Lainnya			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Pelaksanaan				
		2)	Laporan dan Evaluasi				

		07	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Kader terkait Kesehatan Jiwa				
		01	Anak dan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1) Pelatihan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja				
			2) Usulan Akreditasi Pelatihan				
		02	Dewasa dan Lansia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1) Pelatihan Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lansia				
			2) Usulan Akreditasi Pelatihan				
		03	Penanganan Gangguan NAPZA	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1) Pelatihan Penanganan Gangguan NAPZA				
			2) Usulan Akreditasi Pelatihan				
KK	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN						
	01	Norma Standar Prosedur Kriteria Penanggulangan Krisis Kesehatan					
	01	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
	02	Ketahanan Kesehatan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
	03	Tanggap Darurat dan Tim Kegawatdaruratan Medis			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				

			5)	Laporan dan Evaluasi			
		04	Evaluasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
		05	Kerja Sama <i>United Nations</i> dan Kemitraan Lainnya		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
		06	Pengelolaan Data dan Informasi Pemantauan Krisis Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Aplikasi				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
		07	Revitalisasi Gudang Regional		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
		08	Logistik Kesehatan dan Barang Milik Negara		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				

			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02			Bimbingan, Informasi, Evaluasi, dan Koordinasi			
		01		Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan			
			1)	Prakrisis Kesehatan dan Koordinasi <i>Pentahelix</i>			
			2)	Asistensi Pengelolaan Krisis Kesehatan			
			3)	<i>Workshop</i>			
			4)	Rencana Kontingensi dan Peta Risiko Untuk Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan			
			5)	Penyusunan Kajian Pengelolaan Krisis Kesehatan Akibat Bencana			
			6)	Penyusunan Laporan Pengelolaan Krisis Kesehatan untuk Pimpinan			
			7)	Pemantauan			
			8)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas			
			9)	Laporan Rutin Kesiapsiagaan			
	02			Ketahanan Kesehatan			
			1)	<i>Workshop</i> Ketahanan Kesehatan			
			2)	Simulasi Pengelolaan Krisis Kesehatan			
			3)	Laporan Rutin Ketahanan Kesehatan			
	03			Tanggap Darurat dan Tim kegawatdaruratan Medis			
			1)	Pelayanan Tanggap Darurat			
			2)	Kaji Cepat Kesehatan			
			3)	Kegawatdaruratan Medis			
			4)	Pelatihan Tim			
			5)	Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Kaji Cepat Bidang Kesehatan			
			6)	Laporan Rutin Tanggap Darurat dan Kegawatdaruratan Medis			
			7)	Koordinasi yang Berkaitan Mobilisasi Tim Kegawatdaruratan Medis			
			8)	Relawan			

			9)	Logistik Kesehatan			
		04	Evaluasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1) Evaluasi Tanggap Darurat Krisis Kesehatan				
			2) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas				
			3) Laporan Rutin Evaluasi				
			4) Rehabilitasi				
			5) Rekonstruksi, Upaya Rehabilitasi, dan Rekonstruksi				
			6) Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Penilaian Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan				
			7) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi				
		05	Kerja Sama <i>United Nations</i> dan Kemitraan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1) Pemantauan dan Evaluasi, dan Laporan Rutin Kerja Sama <i>United Nations</i> dan Kemitraan Lainnya				
			2) Lembaga Di Bawah <i>United Nations</i> (WHO dan UNICEF dan Kemitraan Lainnya)				
			3) Memfasilitasi Pelaksanaan Program-program Kerja yang Telah Disepakati oleh Masing-masing Pihak				
		06	Pengelolaan Data dan Informasi, Pemantauan Krisis Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1) <i>Monitoring</i> Data dan Informasi				
			2) Membuat dan Mengelola <i>Website</i> dan Media Sosial				
			3) Pemantauan Informasi,				
			4) Sistem Informasi Pengelolaan Krisis Kesehatan Pemantauan dan Evaluasi				

			5)	Workshop Sistem Informasi Penanggulangan Krisis							
		07	Revitalisasi Gudang Regional	1) Pembukuan Logistik Kesehatan di 10 PPK Regional di Luar DKI Jakarta 2) Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan Tugas, dan Laporan Rutin Revitalisasi Gudang Regional	1 Tahun	2 Tahun	Musnah				
			1)								
			2)								
		08	Logistik Kesehatan dan Barang Milik Negara	1) Pembukuan, Pemantauan Logistik Kesehatan, Perbaikan Prasarana dan Sarana Kesehatan 2) Penerimaan Donasi Logistik Kesehatan 3) Pendistribusian Donasi Logistik Kesehatan 4) Pencatatan Penerimaan dan Distribusi Logistik Kesehatan 5) Penyusunan Berita Acara/Berita Acara Sementara Penerimaan dan Distribusi Logistik Kesehatan/Non-Medik 6) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas 7) Laporan Rutin Logistik dan Barang Milik Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah				
	KL	KESEHATAN LINGKUNGAN									
		01	Penyehatan Air, Udara, Tanah, Sanitasi Dasar dan Kawasan Lingkungan								
		01	Penyehatan Air		2 Tahun	3 Tahun	Musnah				
			1)								
			2)								
			3)								
			4)								
			5)								
		02	Penyehatan Udara	1) Penyusunan Kebijakan 2) Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah				
			1)								
			2)								

			3)	Pelaksanaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			4)	Pengamanan dan Pengawasan				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Penyehatan Tanah						
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Pengamanan dan Pengawasan					
		5)	Laporan dan Evaluasi					
	04	Penyehatan Sanitasi Dasar (Sanitasi Berbasis Masyarakat, Percepatan Pengembangan Sanitasi Pemukiman, dan Sanitasi Sekolah)				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Pengamanan dan Pengawasan					
		5)	Laporan dan Evaluasi					
	05	Penyehatan Kawasan (Higiene Sanitasi dan Bangunan Umum, Pengendalian Faktor Risiko di Rumah dan Tempat Umum, Penanggulangan Kedaruratan Bidang Kesehatan Lingkungan, Fasilitasi Kesehatan Masyarakat di Daerah Terpencil, Pelabuhan Sehat, Bandara Sehat, Terminal Sehat, Pasar Sehat, dan Kabupaten Kota Sehat				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Pengamanan dan Pengawasan					
		5)	Laporan dan Evaluasi					
	02	Penyehatan Pangan						

			01	Peningkatan Higiene Sanitasi Pangan (Rumah Tangga, Makanan Jajanan, Restoran/Rumah Makan, Jasa Boga, Depot Air Minum, dan Kantin) <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Kebijakan</li> <li>2) Sosialisasi</li> <li>3) Pelaksanaan</li> <li>4) Bimbingan Teknis dan Supervisi</li> <li>5) Laporan dan Evaluasi</li> </ul>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			02	Pengawasan dan Pelindungan <i>Higiene Sanitasi Pangan</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Kebijakan</li> <li>2) Sosialisasi</li> <li>3) Pelaksanaan</li> <li>4) Bimbingan Teknis dan Supervisi</li> <li>5) Laporan dan Evaluasi</li> </ul>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03	Pengamanan Limbah dan Radiasi				
			01	Pengamanan Limbah (Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Merkuri Logam Berat, dan Pengaman Pestisida) <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Kebijakan</li> <li>2) Sosialisasi</li> <li>3) Pelaksanaan</li> <li>4) Bimbingan Teknis dan Supervisi</li> <li>5) Laporan dan Evaluasi</li> </ul>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			02	Pengamanan Radiasi (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, Radiasi Pengion, Radiasi Non-Pengion, dan Perubahan Iklim) <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Kebijakan</li> <li>2) Sosialisasi</li> <li>3) Pelaksanaan</li> <li>4) Bimbingan Teknis dan Supervisi</li> </ul>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			5)	Laporan dan Evaluasi			
	04		Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan				
		01	Adaptasi Perubahan Iklim		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
		02	Kebencanaan Bidang Kesehatan Lingkungan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan				
			2) Sosialisasi				
			3) Pelaksanaan				
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5) Laporan dan Evaluasi				
KO			KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA				
	01		Okupasi dan Surveilans Kesehatan Kerja				
		01	Kesehatan Okupasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyakit Akibat Kerja				
			2) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja				
			3) Program Kembali Kerja				
			4) Pelayanan Kesehatan Kerja				
			5) Standar Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Okupasi				
			6) Usulan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Kerja di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan				
			7) Penyusunan Modul TOT Diagnostik Penyakit Akibat Kerja di Bidang Kesehatan Okupasi				
		02	Surveilans Kesehatan Kerja		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia				
			2) Pemeriksaan Kelayakan Kerja				

			3)	Pemeriksaan Kesehatan Pelaut			
			4)	Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia			
02	Kesehatan Kerja						
	01	Kesehatan Kerja Formal					
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
02	Kesehatan Kerja Informal						
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
03	Kesehatan Olahraga						
	01	Kesehatan Olahraga Masyarakat (Kebugaran Jasmani Ibu Hamil, Anak Sekolah, Pekerja, Karyawan, Usia Produktif, Usia Lanjut, dan Jemaah Haji					
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Kesehatan Olahraga Prestasi (Even Olahraga Nasional dan Even Olahraga Internasional					
		1)	Pelaksanaan				
		2)	Laporan dan Evaluasi				
KT	TENAGA KESEHATAN INDONESIA						
	01	Fasilitas Registrasi					
	01	Registrasi Tenaga Kesehatan				2 Tahun	Musnah

			1)	Penetapan Registrasi Tenaga Kesehatan	1 Tahun Setelah Diperbarui		
			2)	Data Dukung Registrasi Tenaga Kesehatan			
	02 Registrasi Psikologi Klinis		1)	Penetapan Registrasi Psikologi Klinis	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Data Dukung Registrasi Psikologi Klinis			
	03 Registrasi Perawat		1)	Penetapan Registrasi Perawat	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Data Dukung Registrasi Perawat			
	04 Registrasi Bidan		1)	Penetapan Registrasi Bidan	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Data Dukung Registrasi Bidan			
	05 Registrasi Kefarmasian		1)	Penetapan Registrasi Kefarmasian	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Data Dukung Registrasi Kefarmasian			
	06 Registrasi Tenaga Kesehatan Masyarakat		1)	Penetapan Registrasi Kesehatan Masyarakat	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Data Dukung Registrasi Kesehatan Masyarakat			
	07 Registrasi Tenaga Kesehatan Lingkungan		1)	Penetapan Registrasi Kesehatan Lingkungan	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Data Dukung Registrasi Kesehatan Lingkungan			
	08 Registrasi Tenaga Gizi		1)	Penetapan Registrasi Tenaga Gizi	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Data Dukung Registrasi Tenaga Gizi			
	09 Registrasi Tenaga Keterapian Fisik		1)	Penetapan Registrasi Tenaga Keterapian Fisik	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Data Dukung Registrasi Tenaga Keterapian Fisik			
	10 Registrasi Tenaga Keteknisian Medis		1)	Penetapan Registrasi Tenaga Keteknisian Medis	1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
				2) Data Dukung Registrasi Tenaga Keteknisian Medis			
	11	Registrasi Tenaga Teknik Biomedika				2 Tahun	Musnah

			1)	Penetapan Registrasi Tenaga Teknik Biomedika	1 Tahun Setelah Diperbarui		
			2)	Data Dukung Registrasi Tenaga Teknik Biomedika			
		12	Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional		1 Tahun Setelah Diperbarui	2 Tahun	Musnah
			1)	Penetapan Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional			
			2)	Data Dukung Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional			
	02	Fasilitas Standardisasi					
	01	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Standar Kompetensi Kerja Tenaga Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Standar Praktik Tenaga Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				

			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
03			03	Fasilitas Pembinaan Keprofesian			
	01		01	Pembinaan Keprofesian			
			1)	e-learning Tenaga Kesehatan dan			
			2)	Evaluasi Kemampuan <i>online</i> tenaga kesehatan			
	02		02	Pengembangan Keprofesian			
			1)	Seminar			
			2)	Webinar			
			3)	Penyusunan Keprofesian			
			4)	Bimbingan dan Pengawasan			
04			04	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan			
	01		01	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan			
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Tenaga Kesehatan			
	02		02	Disiplin Praktik Psikologi Klinis			
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Psikologi Klinis			
	03		03	Disiplin Praktik Perawat			
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Perawat			
	04		04	Disiplin Praktik Bidan			
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Bidan			
	05		05	Disiplin Praktik Kefarmasian			
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Kefarmasian			
	06		06	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat			
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat			
	07		07	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan			
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan			

			08	Disiplin Praktik Tenaga Gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Tenaga Gizi			
			09	Disiplin Praktik Tenaga Keterapi Fisik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Tenaga Keterapi Fisik			
			10	Disiplin Praktik Keteknisian Medis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Keteknisian Medis			
			11	Disiplin Praktik Teknik Biomedika	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Teknik Biomedika			
			12	Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Permasalahan dan Pelanggaran Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional			
		05	Fasilitasi Penyiapan Bahan Pertimbangan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan				
			01	Bahan Pertimbangan Pendirian Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Bahan Pertimbangan Pendirian Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan			
			02	Bahan Pertimbangan Penutupan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Bahan Pertimbangan Penutupan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan			
PG	PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN						
		01	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Subspesialis, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		01	Pendayagunaan Dokter Spesialis		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

				1)	Usulan Kebijakan Distribusi dan Redistribusi Tenaga Kesehatan Termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/ Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis, dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan			
				2)	Sosialisasi, Koordinasi dan Konsultasi, Penyiapan Wahana, Survei Lapangan			
				3)	Data Dukung Rekrutmen, Seleksi, Pembekalan, Penempatan, Pemberangkatan, Pendampingan, dan Pemulangan			
				4)	Penetapan Penempatan Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis			
	02	Program <i>Internship</i> Dokter dan Dokter Gigi Indonesia				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				1)	Usulan Kebijakan Distribusi dan Redistribusi Tenaga Kesehatan Termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/ Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis, dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan			
				2)	Sosialisasi, Koordinasi dan Konsultasi, Penyiapan Wahana, Survei Lapangan			
				3)	Data Dukung Rekrutmen, Seleksi, Pembekalan, Penempatan, Pemberangkatan, Pendampingan, dan Pemulangan			
				4)	Penetapan Penempatan Peserta Pendayagunaan <i>Internship</i> Dokter Indonesia			
	03	Komite <i>Internship</i> Dokter Indonesia				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				1)	Distribusi dan Redistribusi Tenaga Kesehatan Termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis, dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan			

			2)	Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pembekalan, Pemberangkatan, Pendampingan, Pemulangan, dan Survei Lapangan			
		04	Penugasan Khusus <i>Team Based</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Kebijakan Distribusi dan Redistribusi Tenaga Kesehatan Termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/ Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan			
			2)	Sosialisasi, Koordinasi dan Konsultasi, Penyiapan Wahana, Survei Lapangan			
			3)	Data Dukung Rekrutmen, Seleksi, Pembekalan, Penempatan, Pemberangkatan, Pendampingan, dan Pemulangan			
			4)	Penetapan Penempatan Peserta Pendayagunaan Khusus <i>Team Based</i>			
		05	Penugasan Khusus Individual		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Kebijakan Distribusi dan Redistribusi Tenaga Kesehatan Termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/ Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan			
			2)	Sosialisasi, Koordinasi dan Konsultasi, Penyiapan Wahana, Survei Lapangan			
			3)	Data Dukung Rekrutmen, Seleksi, Pembekalan, Penempatan, Pemberangkatan, Pendampingan, dan Pemulangan			
			4)	Penetapan Penempatan Peserta Pendayagunaan Khusus Individual			
		06	Penugasan Khusus Residen		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Distribusi dan Redistribusi Tenaga Kesehatan Termasuk Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis, dan Tenaga			
			2)	Pendukung/Penunjang Kesehatan Data Dukung Rekrutmen, Seleksi, Pembekalan, Penempatan, Pemberangkatan, Pendampingan, dan Pemulangan			
		07	Pembinaan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	02	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (WNI LLN) dan Purna Penempatan Luar Negeri					
		01	Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri			
			2)	Koordinasi dan Konsultasi			
			3)	Sosialisasi			
			4)	Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen			
			5)	Penilaian Kompetensi			
			6)	Pembekalan dan Penempatan			
		02	Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Purna Penempatan Luar Negeri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Kebijakan Purna Penempatan Luar Negeri			

			2)	Koordinasi dan Konsultasi, Sosialisasi Pelaksanaan <i>Job-Fair</i>			
			3)	Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen			
			4)	Penilaian Kompetensi			
			5)	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan			
	03	Pembinaan teknis kepada UPT Kementerian Kesehatan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Purna Penempatan Luar Negeri		1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	03	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia					
		01	Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Koordinasi dan Konsultasi			
			2)	Sosialisasi, Rekrutmen, Uji Seleksi, Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Indonesia Ke Luar Negeri Termasuk Pendampingan serta Fasilitasi Kunjungan Delegasi ke Negara Tujuan			
		02	Fasilitasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelayanan			
			2)	Pendidikan			
			3)	Pelatihan			
			4)	Bakti Sosial			
			5)	Penelitian			

			6)	Kondisi Darurat Bencana			
		03	Pembinaan Teknis terkait Bidang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan Warga Negara Asing di Indonesia	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		04	Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Subspesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Warga Negara Asing yang Melaksanakan Adaptasi				
		01	Fasilitasi Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/ Dokter Gigi Spesialis/Subspesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		02	Fasilitasi Pendayagunaan Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis Warga Negara Asing yang melaksanakan Adaptasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		03	Pembinaan Teknis terkait Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Warga Negara Asing yang melaksanakan Adaptasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
PL	PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN DAN PENUNJANG KESEHATAN						
	01	Kebutuhan Pelatihan Bidang Kesehatan					
		01	Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			1) Usulan Norma Standar Prosedur Kriteria Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan				
			2) Penyusunan Draf				
			3) Penyusunan Instrumen				
			4) Uji Coba Instrumen				
			5) Pengolahan Data Instrumen				

			02	Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Penunjang Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Norma Standar Prosedur Kriteria Analisis Kompetensi Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan			
			2)	Penyusunan Draf			
			3)	Penyusunan Instrumen			
			4)	Uji Coba Instrumen			
			03	Penilaian Potensi, Kompetensi, serta Sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penilaian Potensi			
			2)	Kompetensi			
			3)	Sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan			
			4)	Penyusunan Instrumen			
			5)	Uji Coba Instrumen			
			6)	Skema Sertifikasi			
			7)	Penyelenggaraan Penilaian			
			8)	Pengelolaan Hasil dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Potensi			
			9)	Uji Kompetensi dan Sertifikasi			
			04	Lembaga Sertifikasi Profesi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pemberian Rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kesehatan			
			2)	Pemberian Sertifikasi Kompetensi Kerja			
			3)	Kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi Lainnya			
			05	Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pemetaan Kebutuhan Pelatihan			
			2)	Pengolahan Data			
			3)	Analisis Data			

			4)	Penyusunan Hasil			
	02	Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan					
	01	Program Pelatihan Tenaga Kesehatan					
		1) Penyusunan Surat Keputusan					
		2) Penyusunan Modul dan Kurikulum					
		3) Surat Keterangan Pengesahan Kurikulum					
	02	Program Pelatihan Tenaga Penunjang Kesehatan					
		1) Penyusunan Surat Keputusan					
		2) Penyusunan Modul dan Kurikulum					
		3) Surat Keterangan Pengesahan Kurikulum					
	03	Penyelenggaraan Pelatihan					
	03	Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan					
	01	Penjaminan Mutu Institusi Pelatihan					
		1) Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria					
		2) Penyusunan Instrumen Akreditasi Institusi					
		3) Sertifikat Institusi Pelatihan					
		4) Proses Akreditasi Institusi, Penyusunan Surat Keputusan Penetapan					
		5) Kegiatan Penjaminan Mutu Institusi Pelatihan					
	02	Penjaminan Mutu Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan					
		1) Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria					
		2) Penyusunan Instrumen Akreditasi Pelatihan					
		3) Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan					
		4) Sertifikat Pelatihan					
		5) Proses Akreditasi Pelatihan dan Penyusunan Surat Keputusan Penetapan					
		6) Kegiatan Penjaminan Mutu Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan					
	04	Peningkatan Kompetensi					

		01	Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Pengelolaan Jabatan Fungsional di Bidang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan			
		02	Pembinaan Teknis Peningkatan Kompetensi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Pembinaan Teknis Penilaian Kompetensi			
			2) Pemetaan			
			3) Pengembangan Pelatihan			
			4) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kepada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Bidang Tenaga Kesehatan			
PK	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
	01	Strategi Komunikasi Risiko, Informasi, dan Edukasi Kesehatan				
		01	Strategi Komunikasi Risiko, Informasi, dan Edukasi Kesehatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Strategi Komunikasi Risiko			
			2) Informasi dan Edukasi Kesehatan			
			3) Pendekatan Komunikasi Kepada Sasaran (Tenaga Kesehatan, Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat)			
		02	Pengembangan Pesan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Pengembangan Pesan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit			
			2) Pengembangan Pesan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Malaria, HIV, TBC, Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Lainnya			
		03	Desain Kreatif Pesan Kesehatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Model Edukasi Kesehatan Masyarakat (Ibu Hamil, Usia Produktif dan Lanjut Usia)			
			2) Media Cetak, Audiovisual dan Jenis Desain			

		02	Penyebarluasan Informasi Kesehatan			
		01	Penyebarluasan Informasi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Pedoman Umum			
			2) Usulan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan			
			3) Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Berbagai Media Di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota			
		02	Kampanye Kesehatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Kampanye Kesehatan Berupa Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Sosial Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Malaria, HIV, TBC, Penyakit Tidak Menular			
			2) Pengendalian Tembakau/Rokok Pada Ibu Hamil (Bumil), Usia Produktif, dan Lansia			
		03	Advokasi Kesehatan			
		01	Advokasi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis, dan Petunjuk Pelaksanaan terkait Advokasi Kesehatan			
		02	Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan yang Disusun oleh Sektoral, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03	Penyusunan Komitmen Sektoral di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		04	Kemitraan Kesehatan			
		01	Kemitraan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan terkait Kemitraan Kesehatan			

			02	MoU Dalam Mendukung Program Kesehatan Masyarakat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan MoU dengan Dunia Usaha				
			2)	Administrasi Lembaga Kemasyarakatan yang Mempunyai Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Bidang Kesehatan				
			03	Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dalam Mendukung Program Kesehatan Masyarakat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			04	Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			05	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Bersama Mitra				
			2)	Sosialisasi				
			05	Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan				
			01	Pemberdayaan dan Penggerakan Promosi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Masyarakat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			03	Penggerakan Promosi Kesehatan di Berbagai Tatapan (Promosi Kesehatan di Institusi Pendidikan seperti,		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			Sekolah/Madrasah, Pesantren, Tempat Ibadah, Tempat Kerja, dan Tempat Umum			
			1) Penyusunan Kebijakan			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5) Laporan dan Evaluasi			
	04	Penggerakan 7 Materi Prioritas Promosi Kesehatan Imunisasi, Olahraga, Gizi Seimbang, Personal Higienis dan Sanitasi Lingkungan, Skrining, Anti Merokok, dan Kepatuhan Minum Obat)		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1) Penyusunan Materi				
		2) Sosialisasi				
		3) Pelaksanaan				
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5) Laporan dan Evaluasi				
	05	Saka Bakti Husada		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1) Kegiatan Saka Bakti Husada				
		2) Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada Nasional				
	06	Promosi Kesehatan di Rumah Sakit		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Penyusunan Kebijakan				
		2) Sosialisasi				
		3) Pelaksanaan				
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5) Laporan dan Evaluasi				
	07	Promosi Kesehatan Bencana/Tim Gerak Cepat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Penyusunan Kebijakan				
		2) Sosialisasi				
		3) Pelaksanaan				
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5) Laporan dan Evaluasi				

		06	Pengorganisasian Masyarakat						
		01	Pengorganisasian Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan						
		2)	Sosialisasi						
		3)	Pelaksanaan						
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
		5)	Laporan dan Evaluasi						
		02	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Kegiatan Posyandu, Kegiatan Pos Kesehatan Desa, dan Dana Desa)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan						
		2)	Sosialisasi						
		3)	Pelaksanaan						
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
		5)	Laporan dan Evaluasi						
		03	Pembentukan Kelompok Kerja Operasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Desa						
		2)	Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif						
		3)	Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu/Forum Peduli Kesehatan						
		04	<i>International Non-Government Organization (INGO)</i>				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Administrasi terkait Lembaga Swadaya Masyarakat Asing yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat Khususnya Bidang Kesehatan						
		07	Peningkatan Peran Serta Masyarakat						
		01	Peran Serta Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan						
		2)	Sosialisasi						
		3)	Pelaksanaan						
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						

			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat	1) Pelaksanaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
				2) Laporan dan Evaluasi			
		03		Institusi Keagamaan yang Menyelenggarakan Peran serta Masyarakat Bidang Kesehatan			
		04	Kelompok Potensial yang Melaksanakan Gerakan Masyarakat Bidang Kesehatan	1) Pelaksanaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
				2) Laporan dan Evaluasi			
	08			Data dan Analisis Perilaku			
		01	Data dan Analisis Perilaku	1) Penyusunan Data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				2) Analisis Data			
				3) Laporan dan Evaluasi			
		02	Data Perilaku dan Analisis Semua Siklus Kehidupan	1) Penyusunan Data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				2) Analisis Data			
				3) Laporan dan Evaluasi			
		03	Komunikasi Risiko dan Strategi 7 Materi Prioritas Promosi Kesehatan	1) Penyusunan Data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				2) Analisis Data			
				3) Laporan dan Evaluasi			
		04	Standar Prasarana dan Sarana Promosi Kesehatan	1) Penyusunan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				2) Sosialisasi			

			3)	Pelaksanaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	05	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)						
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5)	Laporan dan Evaluasi					
	09	Perilaku Ibu Hamil (Bumil), Anak, dan Remaja						
	01	Perilaku Bumil, Anak dan Remaja				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5)	Laporan dan Evaluasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	02	<i>Demand Creation</i> dan Edukasi sesuai dengan Siklus Bumil, Anak, dan Remaja						
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		5)	Laporan dan Evaluasi					
	03	Upaya Kesehatan Sekolah				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan					
		2)	Sosialisasi					
		3)	Pelaksanaan					
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5)	Laporan dan Evaluasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	10	Perilaku Usia Produktif dan Lanjut Usia						
	01	Perilaku Usia Produktif dan Lanjut Usia				2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02		<i>Demand Creation</i> dan Edukasi sesuai dengan Siklus Usia Produktif dan Lanjut Usia		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
PM	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR						
	01		Tuberkulosis (TBC)				
		01	Pengendalian Penyakit Tuberkulosis		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02		Pengobatan Tuberkulosis ( <i>Directly Observed Treatment Short-Course</i> , Wakil Supervisor Tuberkulosis, Tuberkulosis Anak, Tuberkulosis <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV), Keperawatan Tuberkulosis, Tuberkulosis di Lembaga Pemasyarakatan, dan Tuberkulosis Diabetes Melitus)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			

			03	Laboratorium Tuberkulosis		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
			04	Obat Anti Tuberkulosis		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi				
			2)	Pelaksanaan				
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			4)	Laporan dan Evaluasi				
			05	<i>Tuberculosis Operational Research (TORG)</i>		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi				
			2)	Pelaksanaan				
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			4)	Laporan dan Evaluasi				
			06	Logistik Tuberkulosis		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Data Penyimpanan dan Distribusi				
			2)	Laporan dan Evaluasi				
	02		Pengendalian <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)</i> dan Penyakit Infeksi Menular Seksual					
		01	Survei Terpadu Biologis dan Perilaku			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan				
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			3)	Laporan dan Evaluasi				
		02	<i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i>			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				

			03	Infeksi Menular Seksual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			04	Obat Anti Retro Viral (ARV) dan Reagen Tes <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi			
			2)	Pelaksanaan			
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			4)	Laporan dan Evaluasi			
			05	Kelompok Kerja Pengendalian <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i> dan Penyakit Infeksi Menular Seksual	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
			03	Pengendalian Penyakit Menular			
			01	Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut ( <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> , Pneumonia, dan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut lainnya)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			02	Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (Diare, Disentri, Kolera, Hepatitis, Tifoid, dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan Lainnya)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			

			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		03	Penyakit Tropis Menular (Kusta, Frambusia, Ulkus, Penyakit <i>Neglected Tropical Diseases</i> , dan Penyakit Tropis Menular Langsung Lainnya)				
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		04	Kelompok Kerja Pengendalian Penyakit Menular				
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
PN	PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN						
	01	Proyeksi dan Pemetaan Produksi Tenaga Kesehatan					
		01	Proyeksi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan				
			1)	Proyeksi Tenaga Kesehatan Berdasarkan <i>Supply</i> dan <i>Demands/Needs</i> Tenaga Kesehatan			
			2)	Dokumen Penyusunan Identifikasi Data			
			3)	Penyusunan Petunjuk Teknis			
			4)	Diseminasi Petunjuk Teknis			
			5)	Finalisasi Petunjuk Teknis dan Dokumen Sosialisasi <i>Supply Demands/Needs</i> Tenaga Kesehatan			
			6)	Pelaporan Proyeksi Tenaga Kesehatan			

			7)	Penyusunan Analisis Kesenjangan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Nasional			
		02	Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pemetaan Produksi Tenaga Kesehatan			
			2)	Penyusunan Pemetaan Produksi Dokter, Bidan, dan Perawat			
			3)	Pelaporan Pemetaan Produksi Tenaga Kesehatan			
			4)	Penyusunan Rencana Adaptasi Dokter/Dokter Gigi, Dokter/Gigi Spesialis/Subspesialis, WNI LLN dan WNA			
		03	Penetapan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Baru		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung					
		01	Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan			
			2)	Penyusunan dan Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Kebijakan Pelaporan			
		02	Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan			
			2)	Berdasarkan Program Prioritas			
			3)	Identifikasi			
			4)	Penyusunan			
			5)	Diseminasi			
			6)	Finalisasi Penyusunan Juknis			

			7)	Sosialisasi dan <i>Monitoring</i>				
			8)	Pelaporan				
		03	Pemanfaatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan	1)	Pemanfaatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				2)	Penyusunan Formasi ASN dan Pemanfaatan Lainnya			
		03		Strategi Nasional Pemenuhan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan				
		01	Strategi Nasional Pemenuhan Tenaga Kesehatan	1)	Rekomendasi dan Pelaporan Kebijakan Strategi Nasional Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				2)	Penyusunan Rencana Pemenuhan, Produksi, Distribusi, dan Redistribution Tenaga Kesehatan serta Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Jangka Menengah dan Jangka Panjang			
		02		Strategi Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan				
			1)	Penyusunan Dokumen Strategi Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			2)	Pengembangan Tenaga Kesehatan Diseminasi Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan				
			3)	Pelaporan				
		04	Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan					
		01	Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan	1)	Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan Presiden tentang Tunjangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			2)	Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan Presiden tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan			
		02	Perencanaan Evaluasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Permohonan Rekomendasi Formasi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan			
		03	Pembinaan Teknis Perencanaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
PP	PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN						
	01	Perkuliahannya					
		01	Administrasi Perkuliahannya		2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			1) Administrasi Jadwal Perkuliahannya (Surat Undangan Rapat)				
			2) Administrasi Kalender Akademik				
			3) Administrasi Jadwal Akademik				
			4) Administrasi Rancangan Pengumuman				
			5) Administrasi Rancangan Surat Edaran (Semester Genap, Semester Ganjil, Beban Mengajar, Ruang Kuliah, Dosen Pembina Mata Kuliah, Pembimbing Akademik, dan Peserta Didik)				
		02	Silabus Mata Kuliah		2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			1) Silabus Mata Kuliah				
			2) Bobot Satuan Kredit Semester (SKS)				
			3) Kode Mata Kuliah (Perubahan dan Penetapan)				
			4) Persyaratan Mata Kuliah				
			5) Bahan Bacaan (Wajib, Pendukung, atau Referensi)				
		03	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran			3 Tahun	Musnah

			1)	Pembelajaran Teori dan Pembelajaran Praktik (Jadwal, Materi Mata Kuliah)	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku		
			2)	Kontrak Perkuliahan			
			3)	Garis-garis Besar Materi Perkuliahan dan Modul Bahan Ajar			
	04		Proses Belajar Mengajar		2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			1)	Permohonan Dosen Mengajar			
			2)	Tutorial			
			3)	Matrikulasi			
			4)	Penguji <i>Objective Structured Clinical Assessment</i> (OSCA)			
			5)	Pembimbing dan Penguji Karya Tulis Ilmiah			
	05		Daftar Kehadiran Dosen		2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			1)	Daftar Kehadiran Dosen			
			2)	Daftar Kehadiran Mahasiswa			
			3)	Evaluasi Kehadiran			
	02		Kurikulum				
	01		Administrasi Kurikulum		2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan Kurikulum			
			2)	Penyusunan Kurikulum Program Studi (Penambahan, Perubahan, dan Penyempurnaan Kurikulum)			
	02		Pedoman Kurikulum		2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah
			1)	Kurikulum Perguruan Tinggi			
			2)	Evaluasi Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi			
	03		Mata Kuliah		2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah
			1)	Mata Kuliah Dasar Umum			
			2)	Praktik Laboratorium			
			3)	Praktik Klinik			
			4)	Mata Kuliah Keahlian			

		03	Program Studi							
		01	Administrasi Program Studi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyelenggaraan Program Studi (Surat Usulan Program Studi, Proses Penyelenggaraan Program Studi)							
		02	Penolakan Program Studi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		03	Evaluasi Program Studi		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah			
		1)	Proses Akreditasi Program Studi							
		04	Dosen							
		01	Pengajaran		2 Tahun Setelah Penetapan Angka Kredit	3 Tahun	Musnah			
		1)	Proses Belajar Mengajar							
		2)	Permohonan Dosen Mengajar							
		3)	Tutorial							
		4)	Matrikulasi							
		5)	Penguji <i>Objective Structured Structured Clinical Assessment (OSCA)</i>							
		6)	Pembimbing dan Penguji Karya Tulis Ilmiah dan Skripsi							
		7)	Laporan Realisasi Pengajar							
		05	Penunjang Akademik							
		01	Administrasi Kegiatan Penunjang Akademik		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Perpustakaan							
		2)	Kegiatan Bengkel							
		3)	Kegiatan Olahraga							
		4)	Kegiatan Praktik Lapangan							
		5)	Kegiatan Workshop							
		6)	Kegiatan Pendidikan Lainnya							
		02	Peraturan Penggunaan Sarana dan Prasarana		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah			
		1)	Pemakaian Laboratorium							
		2)	Pemakaian Perpustakaan							

			3)	Pemakaian Bengkel			
			4)	Pemakaian Prasarana dan Sarana Olahraga			
			5)	Pemakaian Prasarana dan Sarana Lainnya			
06	06	Evaluasi Mahasiswa					
	01	Pelaksanaan Ujian Semester			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester				
		2)	Usulan Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester				
		3)	Soal Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester				
		4)	Nilai Hasil Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester				
	02	Tugas Akhir			2 Tahun Setelah Mahasiswa Lulus	3 Tahun	Musnah
		1)	Usulan, Pelaksanaan Karya Tulis Ilmiah				
		2)	Usulan, Pelaksanaan Skripsi dan Karya Tulis Akhir Profesi				
		3)	Usulan, Pelaksanaan Nilai Tugas Akhir (Praktik Kerja Lapangan dan Pembelajaran Berbagai Masalah)				
	03	Pelaksanaan Uji Kompetensi			2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
		1)	Usulan, Daftar Panitia, Penguji dan Peserta, Soal, Pelaksanaan, dan Nilai Hasil Try-Out				
		2)	Usulan, Daftar Panitia, Penguji dan Peserta, Soal, Pelaksanaan, dan Nilai Hasil Uji Kompetensi				
07	07	Yudisium					
	01	Kelulusan			2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah
		1)	Penetapan Yudisium				
		2)	Penetapan Kelulusan				
		3)	Surat Keterangan Lulus				

			4)	Ijazah dan Transkrip Nilai Termasuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)			
			5)	Surat Pengganti Ijazah			
			6)	Legalisasi Ijazah			
			7)	Sertifikat Uji Kompetensi			
			8)	Sertifikat/ Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi			
			9)	Salinan Ijazah			
			10)	Salinan Transkrip Nilai			
	02	Administrasi Kelulusan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Surat Tugas, Undangan, dan Prosesi Wisuda				
		2)	Berkas Pengusulan Pengadaan Blangko Ijazah dan Berkas Pengadaan Transkrip				
	03	Buku Induk			2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah
		1)	Buku Induk Nomor Registrasi Kelulusan Mahasiswa				
	08	Alumni					
	01	Himpunan Organisasi			2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah
		1)	Registrasi Alumni				
		2)	Program Kegiatan Alumni				
	02	Perkembangan Alumni			2 Tahun Setelah Institusi Dinyatakan Tidak Ada	3 Tahun	Musnah
		1)	Buku Wisuda				
		2)	Verifikasi Ijazah				
PT	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN						
	01	Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara					
		01	Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan Presiden tentang Tunjangan			
			2)	Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan Presiden tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan			
	02	Permohonan Rekomendasi					
		1)	Penyusunan Permohonan Rekomendasi Formasi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		2)	Pemberitahuan Uji Kompetensi, Pemberian Nomor Sertifikat, Pengumuman Hasil Uji Kompetensi				
	03	Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kesehatan				
	04	Sistem Informasi Jabatan Fungsional Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		1)	Rekapitulasi Data Pejabat Fungsional Kesehatan				
		2)	Pemanfaatan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Kesehatan				
	02	Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan Non-Aparatur Sipil Negara					
		01	Pengelolaan Karier Tenaga Kesehatan Non-Aparatur Sipil Negara		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pedoman Skema Karier Tenaga Kesehatan Non-Aparatur Sipil Negara			
			2)	Usulan Standar Kompetensi Kerja Tenaga Kesehatan Non-Aparatur Sipil Negara			
			3)	Skema Sertifikasi			

			02	Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Karier Tenaga Kesehatan Non-Aparatur Sipil Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pemantauan dan Evaluasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kesehatan dan Pengelolaan Karier Tenaga Kesehatan Non-Aparatur Sipil Negara			
			03	Sistem Informasi Karier Tenaga Kesehatan Non-Aparatur Sipil Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pemanfaatan Sistem Informasi Karier Tenaga Kesehatan Non-Aparatur Sipil Negara			
		03	Pengawasan Tenaga Kesehatan				
			01	Pengelolaan Pengaduan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Musnah
			1)	Laporan atau Pengaduan dari Instansi Pusat dan Daerah Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan			
			02	Pelaksanaan Penyidikan Tenaga Kesehatan	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
			1)	Tim Penyidik Tenaga Kesehatan, Laporan Hasil Penyidikan, dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penyidikan			
			03	Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Tenaga Kesehatan			
		04	Kesejahteraan dan Pelindungan Tenaga Kesehatan				
			01	Kesejahteraan dan Pelindungan Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Usulan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Regulasi Pelindungan Tenaga Kesehatan			
			2)	Standar Pengupahan Tenaga Kesehatan			
			3)	Penghargaan Tenaga Kesehatan			

			02	Pemantauan dan Evaluasi Kesejahteraan dan Pelindungan Tenaga Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1)	Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Tenaga Kesehatan						
PV	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOTIK									
	01	Pengendalian Malaria								
		01	Kelambu Berinsektisida ( <i>Long-Lasting Insecticidal Nets (LLINs)</i> )		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1)	Penyusunan Kebijakan						
			2)	Sosialisasi						
			3)	Pelaksanaan						
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
			5)	Laporan dan Evaluasi						
	02	Eliminasi Malaria			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							
		5)	Laporan dan Evaluasi							
	03	<i>Crosschecker</i> Mikroskopis Malaria			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							
		3)	Pelaksanaan							
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi							
		5)	Laporan dan Evaluasi							
	02	Pengendalian Arbovirosis								
	01	Demam Berdarah Dengue (DBD)			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Sosialisasi							

			3)	Pelaksanaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Chikungunya						
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	<i>Japanese Encephalitis</i>						
			1)	Penyusunan Kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Virus Zika				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Pengendalian Zoonosis						
	01	Penyakit Flu Burung				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Penyakit Rabies				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				

			3)	Pelaksanaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Penyakit Pes						
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Penyakit Flu Baru						
			1)	Penyusunan Kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	05	Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tumbuhan Beracun				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	06	Penyakit Bersumber Binatang Lainnya				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Pengendalian Filariasis dan Kecacingan						
	01	Filariasis				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				

			2)	Sosialisasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Kecacingan						
			1)	Penyusunan Kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	<i>Schistosomiasis</i>				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	05	Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit						
	01	Pengendalian Vektor				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Pengendalian Binatang Pembawa Penyakit				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				
			2)	Sosialisasi				
			3)	Pelaksanaan				
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Uji Resistensi				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan				

			2)	Sosialisasi						
			3)	Pelaksanaan						
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
			5)	Laporan dan Evaluasi						
RS	PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA									
	01	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit			1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
	01	Pelayanan Medis								
		1)	Administrasi Pelayanan Rawat Inap							
		2)	Administrasi Pelayanan Rawat Jalan							
		3)	Administrasi Pelayanan Rawat Inap Intensif							
		4)	Administrasi Pelayanan Tindakan Operatif							
		5)	Administrasi Layanan Tindakan Non Operatif							
		6)	Administrasi Instalasi Gawat Darurat (IGD)							
		7)	Administrasi Pelayanan Paliatif							
		8)	Administrasi Pelayanan HIV dan Penyakit Infeksi Lainnya							
	02	Pelayanan Penunjang			1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
		1)	Formulir Laboratorium (Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Darah)							
		2)	Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensi (Formulir Permintaan Layanan dan Hasil)							
		3)	Radioterapi (Formulir Permintaan Layanan)							
		4)	Kedokteran Nuklir (Formulir Permintaan Layanan)							
		5)	Farmasi (Resep Obat)							
		6)	Administrasi Instalasi Gizi							
		7)	Administrasi Central Sterile Supply Departement (CSSD)							
		8)	Administrasi Instalasi Binatu							
		9)	Administrasi Instalasi Rehabilitasi Medis							

				10)	Administrasi Instalasi Optik			
				11)	Administrasi Instalasi Hiperbarik			
				12)	Administrasi Instalasi Pemulasaraan Jenazah			
				13)	Administrasi Instalasi Gas Medik, dan lain-lain			
	03	Pelayanan Non-Medis				1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Promosi Kesehatan					
		2)	Kesehatan dan Keselamatan Kerja					
		3)	Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit					
		4)	Kesehatan Lingkungan dan lain-lain					
		5)	Pelayanan Penginapan Keluarga Pasien					
	04	Rekam Medis				1 Tahun Setelah Tanggal Kunjungan Terakhir	4 Tahun	Musnah
		1)	Berkas Rekam Medis Pasien yang berisi Catatan dan Dokumen tentang Identitas, Pemeriksaan, Pengobatan, dan Tindakan Medis Lainnya					
	05	Resume Konvensional Pasien Pulang dan Tindakan Medis				1 Tahun Setelah Tanggal Kunjungan Terakhir	9 Tahun	Musnah
	06	Rekam Medis Pejabat Negara, Tokoh Nasional, Tokoh Daerah				1 Tahun Setelah Pasien Meninggal	2 Tahun	Permanen
	07	Resume Kasus Besar, Kasus Pertama Pandemi, dan Kejadian Luar Biasa				1 Tahun Setelah Kasus Dinyatakan Berakhir	2 Tahun	Permanen
	08	Forensik				1 Tahun Setelah Kasus Dinyatakan Selesai	4 Tahun	Musnah
		1)	Administrasi Kegiatan Forensik					
	09	Visum Et Repertum				1 Tahun Setelah Kasus	4 Tahun	Musnah

				Dinyatakan Selesai		
		10	Transplantasi Organ			
			1) Kegiatan Transplantasi Organ yang Pertama Kali dan Kasus Baru	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Selesai	4 Tahun	Permanen
		02	Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Lainnya			
		01	Pelayanan Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya			Musnah
			1) Kegiatan Pelayanan Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya Seperti Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Inap Intensif, Pelayanan Tindakan Operatif, Layanan Tindakan Non-Operatif, dan Unit Gawat Darurat	1 Tahun	2 Tahun	
		02	Pelayanan Penunjang di Fasilitas Kesehatan Lainnya			Musnah
			1) Pelaksanaan Pelayanan Penunjang di Fasilitas Kesehatan Lainnya Seperti Laboratorium, Radiologi dan Diagnostik, Farmasi, Gizi, CSSD, Binatu, Rehabilitasi Medik, Optik, Hiperbarik, dan lain-lain	1 Tahun	2 Tahun	
		03	Pelayanan Non-Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya			Musnah
			1) Kegiatan Pelayanan Non-Medis di Fasilitas Kesehatan Lainnya seperti Promosi Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana, Central Sterile Supply Departement (CSSD), Binatu, Kesehatan Lingkungan dan lain-lain	1 Tahun	2 Tahun	
		04	Rekam Medis Konvensional di Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Tahun Setelah Tanggal Kunjungan Terakhir	4 Tahun	Musnah
SR	SURVEILANS DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN					
	01	Surveilans				

			01	Surveilans Penyakit (Difteri, Polio, dan lain sebagainya)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			02	Surveilans Kejadian Luar Biasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			03	Surveilans Kesehatan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			04	Surveilans Epidemiologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			05	Kewaspadaan Dini	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			

			06	Respons Kejadian Luar Biasa dan Wabah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02			Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan			
		01		Hapus Serangga dan Hapus Tikus	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
		02		Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan (Pelabuhan, Bandara, Pos Lintas Batas Darat Negara, Pemukiman, Even Khusus, Tempat Kerja, Industri Farmasi, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
		03		Vaksinasi Internasional ( <i>Yellow Fever</i> , Meningitis, dan Vaksin Baru Lainnya)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
		04		Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
		05		Pengangkutan Orang Sakit (Penjemputan, Pelayanan Kesehatan, dan Perizinan)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Evaluasi			

			06	Pengiriman Jenazah (Penjemputan dan Perizinan)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
			07	Dokumen Perjalanan Kejadian Luar Biasa dan Wabah <i>(Health Alert Card)</i>	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		03		Penyakit Infeksi <i>Emerging</i>			
			01	Penyakit Infeksi Emerging (Penyakit <i>Poliomyelitis</i> , Virus Ebola, Virus MERS, Influenza A (H5N1) Flu Burung, Virus Hanta, Virus Nipah, <i>Yellow Fever</i> , Demam Lassa, Demam Congo Meningitis, Covid-19, dan Penyakit Infeksi <i>Emerging</i> Lainnya)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			02	Deteksi Penyakit Infeksi <i>Emerging</i>	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
			03	Intervensi Penyakit Infeksi <i>Emerging</i>	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
		04		Sertifikat dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT			
			01	Sertifikat Kesehatan Manusia	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	0	Musnah
			1)	Sertifikat <i>International Certificate Of Vaccination (ICV)</i>			
			02	Sertifikat Kesehatan Moda Transportasi	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	0	Musnah
			1)	<i>Port Health Quarantine Clearance (PHQC)</i>			
			2)	<i>Certificate of Pratique (CoP)</i>			
			3)	<i>Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)</i>			

			4)	<i>Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)</i>			
			5)	Sertifikat obat dan Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan			
			6)	Sertifikat Air Bersih			
	03	Sertifikat Kesehatan Barang			1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	0	Musnah
		1)	Surat keterangan Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Barang Adiktif (OMKABA)				
	04	Sertifikat Kesehatan Lingkungan			1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	0	Musnah
		1)	Sertifikat Air Bersih				
		2)	Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal				
		3)	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga				
		4)	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan				
		5)	Sertifikat Obat dan Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan				
	05	Surat Keterangan			1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	0	Musnah
		1)	Hasil Uji Laboratorium Rujukan				
		2)	Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Jenazah, Orang Sakit yang Laik Terbang				
		3)	Surat Keterangan Pengujian Kesehatan Nakhoda/ Pilot dan Anak Buah Kapal				
	06	Buku Kesehatan			1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	0	Musnah
		1)	Pemberian Buku Kesehatan pada Kapal yang berisi Keterangan dari Pelabuhan Terakhir, Diantaranya Informasi Apakah Kapal Tersebut Sehat atau Tidak, dan dari Pelabuhan Terjangkit atau Tidak				
	05	Laboratorium Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
	01	Standardisasi Laboratorium Surveilans		2 Tahun	3 Tahun		Musnah

			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Pengembangan Laboratorium Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Penyelenggaraan Laboratorium Surveilans dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	06	Surveilans Terintegrasi					
	01	Diseminasi Informasi Surveilans Terintegrasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Diseminasi Informasi Di Bidang Surveilans Terintegrasi Laboratorium				
		2)	Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
		3)	Kewaspadaan Dini dan Respons Kejadian Luar Biasa				
		4)	Deteksi dan Intervensi Penyakit Infeksi <i>Emerging</i>				
		5)	Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit				
		6)	Kekarantinaan Di Pintu Masuk dan Wilayah				

			02	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Surveilans Terintegrasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
			1)	Pendidikan dan Pelatihan						
			2)	Sosialisasi						
			3)	Workshop						
			4)	Webinar, dan sebagainya						
			03	Fasilitasi Kemitraan Surveilans Terintegrasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
			1)	Pelaksanaan						
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
			3)	Laporan dan Evaluasi						
SS	<b>SISTEM DAN STRATEGI KESEHATAN</b>									
	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan								
	01	Upaya Kesehatan Masyarakat			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Analisis							
		3)	Harmonisasi							
		4)	Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan							
	02	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Analisis							
		3)	Harmonisasi							
		4)	Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan							
	03	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Ketahanan dan Teknologi Kesehatan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Penyusunan Kebijakan							
		2)	Analisis							
		3)	Harmonisasi							

			4)	Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan			
		04	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan Sumber Daya Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Analisis			
			3)	Harmonisasi			
			4)	Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan			
	02		Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi dan Sistem Kesehatan				
		01	Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi serta Sistem Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
		02	Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi serta Sistem Kesehatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
		03	Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi serta Sistem Kesehatan Ketahanan dan Teknologi Kesehatan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
		04	Pelaksanaan Analisis, Harmonisasi, dan Sinergi Strategi serta Sistem Kesehatan Sumber Daya Kesehatan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah

			1)	Pelaksanaan			
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
	03		03	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan			
		01	01	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		02	02	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelayanan serta Penunjang Kesehatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		03	03	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelayanan serta Penunjang Kesehatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		04	04	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sumber Daya Kesehatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
TK		TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN					
	01	Tata Kelola Sistem Rujukan					
		01	01	Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02	02	Pengembangan Pelayanan <i>Telemedicine</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02		Pengelolaan Wahana Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan			
			01	Jejaring Rumah Sakit Pendidikan (Jejaring Rumah Sakit dan <i>Academic Health System</i> )	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02	Program di Rumah Sakit Pendidikan (Program Pelayanan Jantung, Pelayanan Ginjal, Pelayanan Hati, Pelayanan Kanker, Pelayanan Mata, Sel Punca, Teknologi dan Reproduksi Berbantu, serta Transplantasi Organ di Rumah Sakit Pendidikan)		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Sosialisasi			
			2)	Pelaksanaan			
			3)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			4)	Laporan dan Evaluasi			
		03	Teknologi Kesehatan <i>Biomedical Genome-Based Science Initiative (BGSi)</i>				Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		04	Program di Rumah Sakit Pendidikan Lainnya (Program Dokter Spesialis, Program <i>Fellowship, Stase</i> , dan lain-lain)				Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	03	Pengelolaan Kerja Sama Pelayanan Kesehatan					
		01	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Kerja Sama Bidang Pelayanan Kesehatan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Pengelolaan Badan Layanan Umum					
	01	Penilaian Kinerja Pelayanan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Rencana Strategis Bisnis			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
TL	<b>PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LABORATORIUM</b>						
	01	Teknologi Pengendalian Penyakit					
	01	Pengembangan Model dan Teknologi Tepat Guna			2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				

			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02	Pengembangan dan Penapisan Teknologi	1) 2) 3) 4) 5)	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			Penyusunan Kebijakan				
			Sosialisasi				
			Pelaksanaan				
			Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			Laporan dan Evaluasi				
		03	Kemitraan dan Jejaring Kerja di Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	1) 2) 3) 4) 5)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			Penyusunan Kebijakan				
			Sosialisasi				
			Pelaksanaan				
			Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			Laporan dan Evaluasi				
	02	Teknologi Laboratorium					
		01	Pengembangan Teknologi Laboratorium	1) 2) 3) 4) 5)	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			Penyusunan Kebijakan				
			Sosialisasi				
			Pelaksanaan				
			Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			Laporan dan Evaluasi				
		02	Laboratorium Rujukan	1) 2) 3) 4) 5)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			Penyusunan Kebijakan				
			Sosialisasi				
			Pelaksanaan				
			Bimbingan Teknis dan Supervisi				
			Laporan dan Evaluasi				
		03	Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi	1) 2) 3)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			Penyusunan Kebijakan				
			Sosialisasi				
			Pelaksanaan				

			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		04	Rekomendasi Hasil Uji Laboratorium		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Laporan dan Rekomendasi			
TM	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR						
	01	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah					
		01	Penyakit Jantung		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Penyakit Pembuluh Darah			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	03	Penyakit Hipertensi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	04	Penyakit Stroke			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			

			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Pengendalian Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik					
	01	Penyakit Diabetes Melitus					
		1) Penyusunan Kebijakan					
		2) Sosialisasi					
		3) Pelaksanaan					
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5) Laporan dan Evaluasi					
	02	Penyakit Gangguan Metabolik					
		1) Penyusunan Kebijakan					
		2) Sosialisasi					
		3) Pelaksanaan					
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5) Laporan dan Evaluasi					
	03	Penyakit Gangguan Tiroid					
		1) Penyusunan Kebijakan					
		2) Sosialisasi					
		3) Pelaksanaan					
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5) Laporan dan Evaluasi					
	04	Gangguan Obesitas					
		1) Penyusunan Kebijakan					
		2) Sosialisasi					
		3) Pelaksanaan					
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5) Laporan dan Evaluasi					
	03	Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah					
	01	Penyakit Kanker					
		1) Penyusunan Kebijakan					
		2) Sosialisasi					
		3) Pelaksanaan					

			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Penyakit Kelainan Darah					
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Pengendalian Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi					
	01	Penyakit Akibat Produk Tembakau					
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Gangguan Imunologi					
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	05	Gangguan Indera dan Fungsional					
	01	Pengendalian Gangguan Panca Indera					
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Pengendalian Gangguan Fungsional					
		1)	Penyusunan Kebijakan				

			2)	Sosialisasi						
			3)	Pelaksanaan						
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi						
			5)	Laporan dan Evaluasi						
YK	<b>FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN</b>									
	01	Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer								
	01	Pemetaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Primer			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Perencanaan							
		2)	Pelaksanaan Pemetaan							
		3)	Analisis							
		4)	Fasilitasi							
	02	Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Primer			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Perencanaan							
		2)	Pelaksanaan Penilaian							
		3)	Analisis							
		4)	Fasilitasi							
	03	Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Primer			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Pelaksanaan Penilaian							
		2)	Koordinasi							
		3)	Fasilitasi							
	04	Analisis Data dan Informasi Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Primer			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
		1)	Pelaksanaan							
		2)	Analisis Data dan Informasi							
	05	Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Primer			1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
		1)	Pembinaan Teknis							

			2)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan					
	01	Pemetaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Perencanaan					
		2) Pelaksanaan Pemetaan					
		3) Analisis					
		4) Fasilitasi					
	02	Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Perencanaan					
		2) Pelaksanaan Penilaian					
		3) Analisis					
		4) Fasilitasi					
	03	Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Pelaksanaan Penilaian					
		2) Koordinasi					
		3) Fasilitasi					
	04	Analisis Data dan Informasi Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Pelaksanaan					
		2) Analisis Data dan Informasi					
	05	Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1) Pembinaan Teknis					
		2) Laporan dan Evaluasi					
	03	Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					

		01	Pemetaan Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Perencanaan			
		2)	Pelaksanaan Pemetaan			
		3)	Analisis			
		4)	Fasilitasi			
		02	Penilaian Teknologi Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Perencanaan			
		2)	Pelaksanaan Penilaian			
		3)	Analisis			
		4)	Fasilitasi			
		03	Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Prasarana dan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Pelaksanaan Penilaian			
		2)	Koordinasi			
		3)	Fasilitasi			
		04	Pembinaan Teknis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		1)	Pembinaan Teknis			
		2)	Laporan dan Evaluasi			
	04	Standar Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
		01	Pemetaan Standar Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		1)	Perencanaan			
		2)	Pelaksanaan Pemetaan			
		3)	Analisis			
		4)	Fasilitasi			
		02	Penilaian Teknologi Standar Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1)	Perencanaan			

			2)	Pelaksanaan Penilaian			
			3)	Analisis			
			4)	Fasilitasi			
		03	Pengelolaan dan Penilaian Fungsi Standar Alat Kesehatan				
			1)	Pelaksanaan Penilaian			
			2)	Koordinasi			
			3)	Fasilitasi			
		04	Fasilitasi Pemenuhan Standar Alat Kesehatan				
			1)	Fasilitasi			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
		05	Analisis Data dan Informasi Standar Alat Kesehatan				
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Analisis Data dan Informasi			
		06	Pembinaan Teknis Standar Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan				
			1)	Pembinaan Teknis			
			2)	Laporan dan Evaluasi			
	05	Pengujian dan Kalibrasi					
		01	Penilaian dan <i>Monitoring</i> Pengamanan Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan				
			1)	Pelaksanaan Penilaian			
			2)	<i>Monitoring</i>			
		02	Pengujian dan Kalibrasi Prasarana, Sarana, dan Alat Kesehatan				
			1)	Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi			
			2)	Koordinasi			
		03	Analisis Data dan Informasi Pengujian serta Kalibrasi				
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Analisis Data dan Informasi			

		04	Pembinaan Teknis Pengujian dan Kalibrasi Prasarana dan Sarana serta Alat Kesehatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1) Pembinaan Teknis			
			2) Laporan dan Evaluasi			
YM			MUTU PELAYANAN KESEHATAN			
	01		Mutu Pelayanan Kesehatan			
		01	Mutu Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas, Klinik Pratama, dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5) Laporan dan Evaluasi			
		02	Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit dan Klinik Utama)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5) Laporan dan Evaluasi			
		03	Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya (Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Lainnya)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5) Laporan dan Evaluasi			
	02		Akreditasi Pelayanan Kesehatan			

		01	Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas, Klinik Pratama, dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya)	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5) Laporan dan Evaluasi			
		02	Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit dan Klinik Utama)	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5) Laporan dan Evaluasi			
		03	Akreditasi Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya (Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Lainnya)	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan			
			2) Sosialisasi			
			3) Pelaksanaan			
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5) Laporan dan Evaluasi			
YP	PELAYANAN KESEHATAN PRIMER					
	01	Pelayanan Kesehatan Masyarakat				
		01	Puskesmas (Manajemen Puskesmas, Puskesmas Sebagai Wahana Pendidikan, Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial, dan Perawatan Kesehatan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Penyusunan Kebijakan			

			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	02	Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan dan Pelayanan Kesehatan Bergerak					
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	03	Keluarga Sehat					
		1)	Penyusunan Kebijakan				
		2)	Sosialisasi				
		3)	Pelaksanaan				
		4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		5)	Laporan dan Evaluasi				
	04	Integrasi Layanan Kesehatan Primer					
		1)	Pelaksanaan				
		2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi				
		3)	Laporan dan Evaluasi				
	02	Pelayanan Klinik					
		01	Pelayanan Kesehatan Klinik dan Penunjang Kesehatan Klinik				
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		02	Pelayanan Darah ( <i>Quickwins</i> )		1 Tahun	2 Tahun	Musnah

			1)	Kegiatan Pelayanan Darah yang Bekerja Sama dengan Dinas Kesehatan melalui Unit Transfusi Darah dan Rumah sakit						
		03	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Berprestasi		1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
			1)	Usulan Instrumen Penilaian						
			2)	Proposal <i>Corporate Social Responsibility</i>						
			3)	Penganugerahan						
	03	Perizinan dan Registrasi Klinik								
	01	Perizinan dan Registrasi Pelayanan Klinik			2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah			
		1)	Fasilitasi Perizinan Pelayanan Modal Asing dan Non-Pelayanan Modal Asing							
		2)	Pelayanan Kesehatan Klinik							
	02	Perizinan dan Registrasi Praktik Perorangan			2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah			
		1)	Fasilitasi Perizinan Praktik Perorangan (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, dan Tenaga Kesehatan Lainnya)							
	03	Panduan Praktik Klinis dan Panduan Keterampilan Klinis								
		1)	Pelaksanaan							
		2)	Laporan dan Evaluasi							
YR	<b>PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN</b>									
01	Standardisasi Klinis Pelayanan Kesehatan Rujukan									
01	Standar Pelayanan Kedokteran			2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah				
	1)	Penyusunan Kebijakan								
	2)	Sosialisasi								
	3)	Pelaksanaan								
	4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi								
	5)	Laporan dan Evaluasi								
	02	Pelayanan Kesehatan Rujukan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			

			1)	Fasilitasi Penyediaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			
			2)	Fasilitasi Tata Kelola Klinis Pelayanan Kesehatan Rujukan			
		03	Panduan Praktik Klinis		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1)	Fasilitasi Penerapan Panduan Praktik Klinis dan <i>Clinical Pathway</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan			
		04	Audit Klinis Rumah Sakit dan Lainnya		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Pengelolaan Audit Medis			
			2)	Pengelolaan Audit Klinis Rumah Sakit			
	02	Perizinan dan Pengembangan Serta Pengawasan Pelayanan Kesehatan Rujukan					
		01	Perizinan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah
			1)	Fasilitasi Perizinan			
			2)	Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Praktik Perseorangan, Klinis, Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya			
			3)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Khusus Lainnya			
		02	Pengawasan Rumah Sakit		2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
			1)	Pengawas Internal Rumah Sakit dan Badan Pengawas Rumah Sakit			
		03	Transformasi Pelayanan Kesehatan Rujukan				
		01	Rujuk Balik		1 Tahun	2 Tahun	Musnah

			1)	Fasilitasi Pengelolaan Rujuk Balik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
			2)	Penguatan Integrasi Pelayanan Klinik dan Praktik Perseorangan dan Rumah Sakit			
		02	Pelayanan Unggulan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Fasilitasi Pengembangan Layanan Unggulan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan			
		03	Jejaring Pelayanan Kesehatan		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Fasilitasi Stratifikasi dan Pengampuan Jejaring Pelayanan Kesehatan Rujukan Untuk Penyakit Prioritas			
YT	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL						
	01	Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris					
		01	Pelayanan Kesehatan Penyehat Tradisional (Hattrra)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
		02	Pembinaan Penyehat Tradisional		1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			1)	Pelaksanaan			
			2)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			3)	Laporan dan Evaluasi			
		03	Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
		04	Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			

			5)	Laporan dan Evaluasi						
		05	Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1) Penyusunan Kebijakan							
			2) Sosialisasi							
			3) Pelaksanaan							
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi							
			5) Laporan dan Evaluasi							
		06	Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur		2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1) Penyusunan Kebijakan							
			2) Sosialisasi							
			3) Pelaksanaan							
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi							
			5) Laporan dan Evaluasi							
	02	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer			1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
	01	Penilaian/Penapisan Kesehatan Tradisional								
			1) Pelaksanaan Penilaian/Penapisan							
			2) Bimbingan Teknis dan Supervisi							
			3) Laporan dan Evaluasi							
	02	Pelayanan Kesehatan Komplementer Non Tradisional			2 Tahun	3 Tahun	Musnah			
			1) Penyusunan Kebijakan							
			2) Sosialisasi							
			3) Pelaksanaan							
			4) Bimbingan Teknis dan Supervisi							
			5) Laporan dan Evaluasi							
	03	Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer			1 Tahun	2 Tahun	Musnah			
			1) Pelaksanaan							
			2) Publikasi							
			3) Laporan dan Evaluasi							

			04	Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia (FROTI)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			05	Tenaga Pengawas Kesehatan Tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			06	Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			07	Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
			08	Kelompok Kerja Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			

			5)	Laporan dan Evaluasi			
	03	Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi					
	01	Formularium Obat Herbal Asli Indonesia					
		1) Penyusunan Kebijakan					
		2) Sosialisasi					
		3) Pelaksanaan					
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5) Laporan dan Evaluasi					
	02	Pelayanan Medik Obat Herbal Asli Indonesia					
		1) Penyusunan Kebijakan					
		2) Sosialisasi					
		3) Pelaksanaan					
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5) Laporan dan Evaluasi					
	03	Pelayanan Medik Akupunktur					
		1) Penyusunan Kebijakan					
		2) Sosialisasi					
		3) Pelaksanaan					
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5) Laporan dan Evaluasi					
	04	Pelayanan Akupresur di Puskesmas					
		1) Penyusunan Kebijakan					
		2) Sosialisasi					
		3) Pelaksanaan					
		4) Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		5) Laporan dan Evaluasi					
	05	Brainstorming Pelaksanaan Kegiatan terkait Pelayanan Kesehatan Integrasi					
		1) Pelaksanaan					
		2) Laporan dan Evaluasi					
	06	Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			
	07	Pelayanan Akupresur di Puskesmas			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1)	Penyusunan Kebijakan			
			2)	Sosialisasi			
			3)	Pelaksanaan			
			4)	Bimbingan Teknis dan Supervisi			
			5)	Laporan dan Evaluasi			

## BAB V PENUTUP

Dengan ditetapkannya Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan, diharapkan semua Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam melakukan penomoran naskah dinas keluar, pemberkasan arsip, pelindungan informasi dari akses pihak yang tidak berhak, serta penyusutan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan mengacu kepada instrumen pengelolaan arsip dinamis.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003